

# RKPD 2021



Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M. Pd

BUPATI ENREKANG

A S M A N, SE

WAKIL BUPATI ENREKANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. ENREKANG TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
2020



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 243);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 283);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 45);
  25. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  
2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda-Litbang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya, disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang di susun dengan berpedoman pada Rencana Strategis PD dan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan :
  - a. Renja - PD;
  - b. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
  - c. rancangan APBD; dan
  - d. sebagai evaluasi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan RKPD :
  - a. untuk memudahkan dalam penyusunan Renja PD;
  - b. tercapainya sasaran dari program dan kegiatan Renja PD; dan
  - c. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD.

## BAB III

### SISTIMATIKA PENYUSUNAN

#### Pasal 3

- (1) Sistimatika Dokumen RKPD Tahun 2021 terdiri dari :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP



- (2) Dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KEDUDUKAN DAN FUNGSI

##### Pasal 4

- (1) RKPD dipergunakan sebagai bahan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan DPRD untuk memperoleh kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah.

#### BAB V

#### EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

##### Pasal 5

- (1) Hasil program pembangunan secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Keluaran dan hasil dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan.

##### Pasal 6

- (1) Kepala PD sebagai pengguna anggaran bertanggungjawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan/atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Kepala PD membuat laporan evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala (triwulan, tahunan) atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian mengenai capaian keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda-Litbang, paling lambat 10 (sepuluh)

hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan.

- (4) Laporan Evaluasi kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian analisis dan evaluasi usulan program kegiatan dan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 20 Juli 2020  
BUPATI ENREKANG,

  
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 NOMOR

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN	6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>10</b>
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	10
2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	24
2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH	52
2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	57
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	100
2.2.1. EVALUASI KINERJA RKPD TAHUN LALU	100
2.2.2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD	312
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	314
2.3.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	314
2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	315
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>342</b>
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	342
3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN TAHUN 2019	342
3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2019 DAN 2020	351
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	353
3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	353
3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	355



3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	356
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>358</b>
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	358
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020	363
4.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020	368
4.2.2. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN ENREKANG	374
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	<b>377</b>
5.1. RENCANA KERJA DAERAH	377
5.2. RENCANA KERJA DAERAH/PROGRAM DAN KEGIATAN	378
5.3. RENCANA PENDANAAN DAERAH	570
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>571</b>
6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2020	571
6.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA	571
6.1.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI	572
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>583</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama Dan Luas Area Kecamatan	10
Tabel 2.2	Tabel Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Di Kabupaten Enrekang, 2017	11
Tabel 2.3	DAS Kabupaten Enrekang	16
Tabel 2.4	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang 2018	18
Tabel 2.5	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang, 2018	18
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang, 2015-2019	19
Tabel 2.7	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang, 2019	19
Tabel 2.8	Distribusi Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang, 2019	20
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang, 2019	21
Tabel 2.10	Penduduk Menurut Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Enrekang 2019	21
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Enrekang, 2018	22
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Kabupaten Enrekang 2018	23
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Enrekang 2018	24
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha ( Miliar Rupiah ) 2015-2019	25
Tabel 2.15	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah ) 2015-2019	26
Tabel 2.16	Distribusi presentase PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2015-2019	26
Tabel 2.17	PDRB Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah) 2015-2019	27
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 ,Menurut Pengeluaran Kabupaten Enrekang 2015-2019	28
Tabel 2.19	Indeks Inflasi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Enrekang 2015-2019	28
Tabel 2.20	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Enrekang 2015-2019	29
Tabel 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang 2015-2019	30
Tabel 2.22	Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang 2015-2019	31
Tabel 2.23	PDRB Per Kapita Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah) 2015-2019	31
Tabel 2.24	Indeks Gini Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan	

	Dan Nasional 2017 Maret 2019	32
Tabel 2.25	Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2019	32
Tabel 2.26	Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	33
Tabel 2.27	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Umur 15-24 Tahun Dan 15-55 Tahun Kabupaten Enrekang 2019	34
Tabel 2.28	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Enrekang 2015-2019	35
Tabel 2.29	Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Enrekang, 2015-2019	35
Tabel 2.30	Jumlah Balita Gizi Buruk, 2019	36
Tabel 2.31	Opini BPK Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	44
Tabel 2.32	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	46
Tabel 2.33	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	47
Tabel 2.34	Tingkat Capaian Kinerja Nilai Produksi Komoditas Pertanian Di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018	47
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB (Jutaan Rupiah) Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	48
Tabel 2.36	Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB (%) Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	48
Tabel 2.37	Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019	49
Tabel 2.38	Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	49
Tabel 2.39	Jumlah Produksi Padi Hasil Kelompok Tani (Ton) Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	50
Tabel 2.40	Cagar Budaya Kabupaten Enrekang 2019	51
Tabel 2.41	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang 2015-2019	57
Tabel 3.42	Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang 2018	58
Tabel 2.43	Rasio Dokter Persatuan Penduduk Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	72
Tabel 2.44	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	76
Tabel 2.45	Angka Kejadian Dan Kematian Akibat Malaria Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	82
Tabel 2.46	Sebaran Data Balita Stunting Berdasarkan Hasil Survey Nasional Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019	92
Tabel 2.47	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Enrekang 2019	98
Tabel 2.48	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Enrekang 2019	99
Tabel 2.49	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang 2019	99



Tabel 2.50	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang 2019	100
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019	101
Tabel 2.52	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang Semester II Triwulan III & IV T.A 2019	103
Tabel 2.53	Evaluasi Capaian Terhadap Pelaksanaan RPJMD Periode (2018-2023) Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Pelaksanaan 2019	322
Tabel 3.1	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Tahun 2015—2019 (Miliar Rupiah)	342
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)	344
Tabel 3.3	Tabel Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Pada PDRB Tahun 2015 -2019 Kabupaten Enrekang	345
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Usaha Harga Konstan 2010 Kabupaten Enrekang 2015-2019	346
Tabel 3.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Enrekang Dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021	347
Tabel 3.6	Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2016—2019	348
Tabel 3.7	Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang Dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian Tahun 2019 Perkiraan 2020 Dan Target 2021	349
Tabel 3.8	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Enrekang Tahun 2019	349
Tabel 3.9	Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Enrekang Tahun 2019	350
Tabel 3.10	Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 (Dalam Miliar Rupiah)	354
Tabel 3.11	Proyeksi Dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022	355
Tabel 3.12	Reliasisai Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022	357
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi Dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang 2019-2023	359
Tabel 4.2	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	363
Tabel 4.3	Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2021	365

Tabel 4.4	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2021	366
Tabel 4.5	Fokus Pembangunan RPJMN 2020—2024	369
Tabel 4.6	Dukungan Kabupaten Enrekang Terhadap Prioritas Nasional	373
Tabel 4.7	Dukungan Kabupaten Enrekang Terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	373
Tabel 5.1	Rencana Kerja 2021 Kabupaten Enrekang	378
Tabel 5.2	Lampiran Hasil Desk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Pimpinan Dan Anggota DPR Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021	527
Tabel 5.3	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021	570
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Enrekang Tahun 2021	571
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Enrekang Tahun 2020	573

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan	7
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Enrekang	11
Gambar 2.2	Peta Curah Hujan Kabupaten Enrekang	12
Gambar 2.3	Peta Topografi	13
Gambar 2.4	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Enrekang	14
Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Enrekang	16
Gambar 2.6	DAS Kabupaten Enrekang	17
Gambar 2.7	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	37
Gambar 2.8	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	37
Gambar 2.9	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	38
Gambar 2.10	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	39
Gambar 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2019	39
Gambar 2.12	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	40
Gambar 2.13	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	41
Gambar 2.14	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017	41
Gambar 2.15	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	43
Gambar 2.16	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	44
Gambar 2.17	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	45
Gambar 2.18	Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	46
Gambar 2.19	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	50
Gambar 2.20	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	51



Gambar 2.21 Jumlah Atlet yang Berprestasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2018	52
Gambar 2.22 Rasio Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	53
Gambar 2.23 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	53
Gambar 2.24 Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	54
Gambar 2.25 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	55
Gambar 2.26 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	55
Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	56
Gambar 2.28 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018	57
Gambar 2.29 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	59
Gambar 2.30 APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	59
Gambar 2.31 APM SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	60
Gambar 2.32 APS di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	61
Gambar 2.33 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang 2013-2017	62
Gambar 2.34 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	62
Gambar 2.35 Angka Melanjutkan di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	63
Gambar 2.36 Kondisi Bangunan SD/MI Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	63
Gambar 2.37 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	64
Gambar 2.38 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2017	64
Gambar 2.39 Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15-24 Tahun di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	65
Gambar 2.40 Guru Berkulifikasi S1/DIV di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	66
Gambar 2.41 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Enrekang	

Tahun 2013-2017	67
Gambar 2.42 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	67
Gambar 2.43 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	68
Gambar 2.44 Angka Kematian Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	68
Gambar 2.45 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	70
Gambar 2.46 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	70
Gambar 2.47 Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	71
Gambar 2.48 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	72
Gambar 2.49 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	73
Gambar 2.50 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	74
Gambar 2.51 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	75
Gambar 2.52 Cakupan UCI di Kabupaten Enrekang Tahun 204-2018	76
Gambar 2.53 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	77
Gambar 2.54 NON POLIO AFP Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	78
Gambar 2.55 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	78
Gambar 2.56 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA	79
Gambar 2.57 Tingkat prevalensi Tuberkulosis Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	79
Gambar 2.58 Tingkat kematian karena Tuberkulosis Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	80
Gambar 2.59 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	81
Gambar 2.60 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	81
Gambar 2.61 Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Enrekang Tahun	

2013-2017	82
Gambar 2.62 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017	83
Gambar 2.63 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	84
Gambar 2.64 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	85
Gambar 2.65 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	85
Gambar 2.66 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	86
Gambar 2.67 Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	87
Gambar 2.68 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	87
Gambar 2.69 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	88
Gambar 2.70 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	89
Gambar 2.71 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	89
Gambar 2.72 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017	90
Gambar 2.73 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	90
Gambar 2.74 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017	91
Gambar 2.75 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dan rasio panjang Jalan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018	92
Gambar 2.76 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018	93
Gambar 2.77 Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) Di Kabupaten Enrekang 2014 s/d 2018	93



Gambar 2.78	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran Air tidak tersumbat Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019	94
Gambar 2.79	Persentase Irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018	95
Gambar 2.80	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Enrekang 2014 s/d 2018	95
Gambar 2.81	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	96
Gambar 2.82	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum layak, perkotaan dan pedesaan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	96
Gambar 2.83	Luas Area Kawasan Kumuh (Ha) Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	97
Gambar 2.84	Rasio bangunan Ber IMB Per Satuan bangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	98
Gambar 2.85	Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018	98
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang 2014—2018	347
Gambar 3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Enrekang Capaian Tahun 2019, Perkiraan 2020 dan Target 2021	351

## DAFTAR TABEL PROGRAM KEGIATAN SKPD/KECAMATAN TAHUN 2021

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	379
2. Dinas Kesehatan	384
3. Rumah Sakit Umum Daerah Masserempulu	402
4. Dinas Pekerjaan Umum	404
5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	408
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	412
7. Dinas Sosial	416
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	420
9. Dinas Ketahanan Pangan	423
10. Dinas Lingkungan Hidup	427
11. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	431
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	434
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	438
14. Dinas Perhubungan	442
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	444
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	447
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	450
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	453
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	456
20. Dinas Pertanian	459
21. Dinas Peternakan dan Perikanan	462
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	469
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	472
24. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	476
25. Badan Pendapatan Keuangan daerah	480
26. Badan Kegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	482
27. Sekretariat DPRD	484
28. Sekretariat Daerah	485
29. Inspektorat Daerah	494
30. Kecamatan Enrekang	494
31. Kecamatan Alla	500
32. Kecamatan Anggeraja	502
33. Kecamatan Baraka	504

34. Kecamatan Maiwa	506
35. Kecamatan Bungin	508
36. Kecamatan Cendana	510
37. Kecamatan Curio	512
38. Kecamatan Buntu Batu	514
39. Kecamatan Malua	516
40. Kecamatan Masalle	519
41. Kecamatan Baroko	521
42. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	523
43. Dinas Kesatuan Bangsa dan politik	525



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR : 33 TAHUN 2020  
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
TAHUN 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menyusun RKPD tahun berikutnya. Secara teknis operasional penyusunan dokumen RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun keempat belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang tahun 2008—2028 dan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman yang digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2021.

**Visi** yang dijadikan dasar dalam merencanakan dan menggerakkan pembangunan secara cepat dan tepat pada setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan di Kabupaten Enrekang yaitu: **Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius”**.

Untuk memastikan seluruh bidang pembangunan bergerak secara simultan, harmonis dan seimbang maka pemerintah Kabupaten Enrekang menetapkan **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral serta beriman dan bertaqwa.
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Sebagaimana penyusunan dokumen RKPD tahun sebelumnya, penyusunan dokumen RKPD tahun 2021 juga menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu politis, teknokratik, *bottom up/top down*, dan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin terjadinya integrasi dan sinkronisasi seluruh urusan pembangunan dalam dokumen RKPD yang diwadahi dalam setiap urusan pemerintahan. Pendekatan ini pula dilakukan untuk memastikan terjadinya sinergi seluruh *stakeholder* pembangunan yaitu Pemerintah Kabupaten, DPRD, Pemerintah Desa, organisasi formal/informal, dan masyarakat umum di Kabupaten Enrekang.

RKPD Kabupaten Enrekang tahun 2021 memiliki kedudukan sangat strategis dalam perencanaan pembangunan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2021;
2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan DPRD;
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam RKPD; dan
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2021 berdasarkan peraturan yang terkait:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi

- Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
  29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2023; dan
  34. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018.

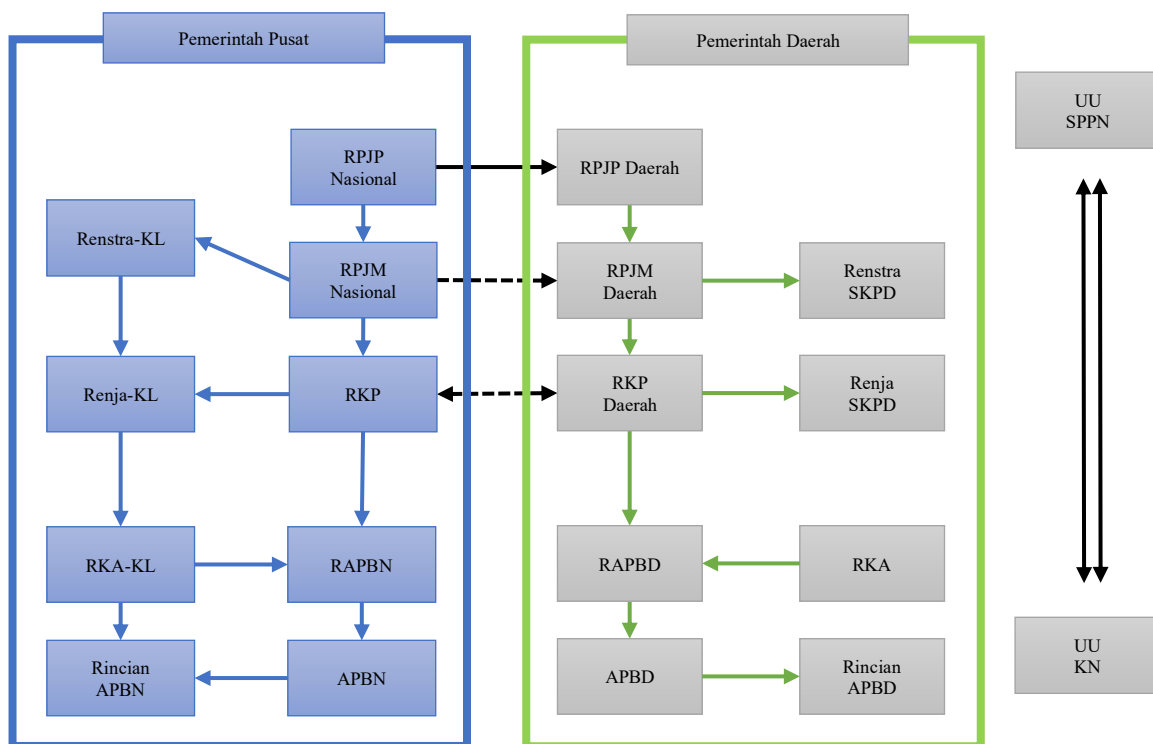
### **1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN**

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan

c. RKPD.

Gambar 1.1  
Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan



RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang 2021 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang 2021 adalah:

- a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Enrekang;
- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD, yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

#### **Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**

Bab III ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.



### **Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### **Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

### **Bab VII Penutup**

### 2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD

- A. Sasaran prioritas I (Misi I), yaitu Meningkatkan kualitas ketersediaan infrastruktur pelayanan publik

Implementasi program daerah dalam meningkatkan kualitas ketersediaan infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Enrekang mempunyai nilai rata-rata capaian kinerja untuk prioritas I adalah 98,35% dengan Predikat Kinerja Tinggi Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 75,40 %, dengan predikat baik. Program daerah yang dilakukan adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong, Program rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah, Program pengembangan perumahan, Program perencanaan tata ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang.

- B. Sasaran prioritas II (Misi II), yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi

Pelaksanaan program daerah meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi mempunyai nilai rata-rata capaian kinerja untuk prioritas II adalah 93,42% dengan Predikat Kinerja Tinggi. Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 81,29%, dengan Predikat Kurang Baik. Program daerah yang dilakukan adalah Program obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan masyarakat, Program pengawasan obat dan makanan, Program pengembangan lingkungan sehat, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit, Program pendidikan anak usia dini, Program wajib belajar pendidikan sembilan tahun, Program pendidikan menengah, Program pendidikan nonformal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan Program pengembangan nilai budaya.

- C. Sasaran prioritas III (Misi III), yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminatif Laki-Laki Perempuan

Dalam mewujudkan sasaran prioritas III ini, setidaknya ada 10 kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut: Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; program pembinaan prapurna tugas; program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; program peningkatan pengelolaan administrasi dan kelembagaan pemerintah daerah; program penataan administrasi kependudukan; program perencanaan pembangunan daerah; program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah; program pencegahan dan kesiapan terhadap bencana; program tanggap darurat dan bencana; dan program keluarga berencana dan program penguatan kelembagaan pangarusutaman gender dan anak. Ke-10 program mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminatif Laki-Laki Perempuan.

Rata-rata capaian kinerja untuk prioritas III adalah 91,06% dengan Predikat Kinerja Tinggi. Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 76,83%, dengan predikat Baik.

D. Sasaran prioritas IV (Misi IV), yaitu Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri

Implementasi program daerah dengan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri menggunakan sebelas program, yaitu:

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. program peningkatan pelayanan terpadu
3. program kegiatan investasi dan promosi investasi
4. Program Peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah
5. program peningkatan penerapan teknologi pertanian
6. program kesejahteraan petani
7. program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan
8. program peningkatan produksi hasil peternakan
9. program pengembangan industri kecil dan menengah
10. program pengembangan kelembagaan masyarakat
11. program ketersediaan dan pengembangan pangan dan penanganan rawan pangan

Rata-rata capaian kinerja untuk prioritas IV adalah 95,91% dengan Predikat Kinerja Sedang, Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 78,80%, dengan predikat Baik.

E. Sasaran prioritas V (Misi V), yaitu Meningkatkan Sumber Daya Alam secara optimal yang berwawasan lingkungan

Pelaksanaan program daerah pada sasaran prioritas V dengan meningkatkan Sumber Daya Alam secara optimal yang berwawasan lingkungan mempunyai sepuluh program, yaitu:

1. Program pemantapan kawasan hutan
2. Program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

3. program pengembangan kawasan konservasi hutan
4. Program pemamfaatn potensi sumber daya hutan
5. program rehabilitasi hutan dan lahan
6. program pengembangan pemasaran pariwisata
7. program pengembangan destinasi pariwisata
8. program pengembangan kemitraan pariwisata
9. program sistem pertanian organik
10. program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan

Rata-rata capaian kinerja untuk prioritas V adalah 99,68% dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 48,67%, dengan predikat Baik.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Tema pembangunan Kabupaten Enrekang adalah membangun utilitas perkotaan dan pemerataan pembangunan. Dari tema tersebut dikaitkan dengan capaian indikator sasaran yang berdasarkan evaluasi RKPD dan RPJMD, sehingga dapat kita melihat berbagai permasalahan pembangunan untuk terlaksananya tema pembangunan Kabupaten Enrekang.

#### **2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

##### **A. Angka Kemiskinan**

Persentase kemiskinan di Kabupaten Enrekang masih tergolong tinggi dan masih berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi disebabkan oleh:

- 1) Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level yang lebih rendah tampaknya juga belum berhasil.
- 2) Rendahnya tingkat produktivitas penduduk, sehingga upah yang mereka terima masih rendah. Ini diindikasikan oleh tingginya angka kemiskinan di satu sisi, tetapi rendahnya tingkat pengangguran di sisi lain.
- 3) Tingkat pendidikan masih rendah dan penduduk miskin belum memiliki keterampilan yang dapat mengangkat perekonomian mreka, sehingga menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.

##### **B. Pendapatan Per Kapita Penduduk**

Pendapatan per kapita Kabupaten Enrekang masih jauh berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita Sulawesi Selatan. Rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang relatif lambat (berada di bawah rata-rata Sulsel) dan perubahan struktur ekonomi yang berjalan lamban.



2) Kurang berkembangnya aktifitas ekonomi, terutama industri pengolahan.

C. Akses Penduduk Terhadap Layanan Pendidikan

Akses penduduk terhadap layanan pendidikan belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh, yaitu:

- 1) Rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah atas
- 2) Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.
- 3) Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang tahun 2017 berada pada angka 63,25%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 68,40%. Angka ini menunjukkan bahwa APS SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang tahun 2017 berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 71,80% pada tahun 2017.
- 4) Sarana dan prasarana pendidikan tidak mampu menjangkau seluruh anak usia sekolah, tidak tersedianya secara memadai sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 5) Ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

D. Akses Penduduk Terhadap Layanan Kesehatan

Akses penduduk terhadap layanan kesehatan belum maksimal. Fakta mengenai hal ini paling tidak ditunjukkan oleh:

- 1) Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, balita gizi buruk.
- 2) Masih adanya persalinan yang dibantu oleh dukun. Situasi ini terjadi karena layanan kesehatan tidak mampu menjangkau seluruh penduduk, terutama di wilayah pelosok dan terpencil.
- 3) Faktor aksesibilitas wilayah dan konektivitas wilayah yang terbatas menjadi faktor penghambat bagi rendahnya akses terhadap layanan kesehatan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Pendidikan
  - a. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD dan SMP yang masih tergolong rendah.
  - b. Masih di dapatkan Angka Putus Sekolah di tingkat SD dan SMP.
  - c. Masih banyak ruang kelas SD dan SMP yang masih dalam kondisi rusak.
  - d. Sarana dan prasarana pendidikan dasar yang tidak merata.

- 2) Urusan Kesehatan
    - a. Angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi.
    - b. Kejadian gizi buruk yang masih terjadi.
    - c. Sarana dan prasarana kesehatan yang masih terbatas.
    - d. Tingginya rasio tenaga dokter/perawat terhadap rerata pasien dalam kurun waktu tertentu (bulanan/mingguan).
    - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk identifikasi dan penanganan pasien Covid-19
  - 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - a. Ketersediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi yang masih belum merata.
    - b. Aksesibilitas antara wilayah (desa/kelurahan dan kecamatan) yang masih rendah.
    - c. Masih tingginya proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak (ringan dan berat).
  - 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    - a. Masih adanya kawasan pemukiman kumuh.
    - b. Masih terdapat perumahan yang tidak layak huni.
    - c. Sarana dan prasarana pemukiman yang masih terbatas.
  - 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    - a. Belum tertanganinya semua kasus kriminalitas.
    - b. Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang masih rendah.
    - c. Penegakan Peraturan Daerah yang belum maksimal.
  - 6) Urusan Sosial
    - a. Belum tertanganinya semua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
    - b. Angka PMKS yang masih tinggi.
    - c. Sarana dan prasarana di panti sosial yang masih belum memadai.
- B. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar
- 1) Urusan Ketenagakerjaan
    - a. Kualitas tenaga kerja yang masih rendah.
    - b. Rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
    - c. Masih adanya pencari kerja yang terdaftar yang belum ditempatkan.
  - 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - a. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih terjadi.

- b. Eksploitasi anak dan perempuan yang masih terjadi.
  - c. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah yang belum optimal
- 3) Urusan Pangan
- a. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang masih belum maksimal.
  - b. Ketersediaan energi dan protein per kapita yang masih rendah.
- 4) Urusan Pertanahan
- a. Persentase luas lahan bersertifikat yang masih tergolong rendah.
  - b. Penyelesaian kasus tanah Negara yang masih belum maksimal.
  - c. Konversi lahan produktif menjadi lahan pemukiman/ perumahan yang masih terus terjadi.
- 5) Urusan Lingkungan Hidup
- a. Persentase volume sampah yang tertangani yang masih rendah.
  - b. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang masih terbatas.
  - c. Indeks kualitas tutupan lahan yang masih terus menurun.
- 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Pelayanan administrasi kependudukan (KTOP, akte lahir, akte nikah, dll.) yang belum optimal.
  - b. Sistem basis data kependudukan dengan sistem online yang belum tersedia.
- 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Peran Pos Yandu yang belum optimal.
  - b. Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang masih terbatas.
  - c. Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang masih belum memadai.
  - d. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang belum optimal.
- 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Pemakaian alat kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun yang belum maksimal.
  - b. Rasio akseptor KB yang masih rendah.
  - c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang belum tersedia.
- 9) Urusan Perhubungan
- a. Ketersediaan rambu-rambu yang belum maksimal.
  - b. Kepemilikan KIR angkutan umum yang belum maksimal.

- 10) Urusan Komunikasi dan Informatika
- a. Masih adanya beberapa wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi.
  - b. Pemanfaatan telekomunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang masih belum optimal.
- 11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
- a. Masih adanya koperasi yang tidak aktif.
  - b. Pertumbuhan UMKM yang lambat.
  - c. BPR/LKM yang belum berkembang.
- 12) Urusan Penanaman Modal
- Melambatnya pertumbuhan PMA/PMDN.
- 13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- a. Sarana dan prasarana olah raga yang melambat.
  - b. Persentase wirausaha muda yang masih tergolong rendah.
  - c. Jumlah atlet berprestasi di level Regional dan Nasional yang masih rendah.
- 14) Urusan Statistik
- a. Penggunaan data statistik dalam perumusan kebijakan yang masih terbatas.
  - b. Sistem data statistik yang terintegrasi belum tersedia.
- 15) Urusan Persandian
- a. Pemanfaatan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih belum optimal.
  - b. Jumlah tenaga persandian yang belum memadai.
- 16) Urusan Kebudayaan
- a. Perlindungan asset budaya yang belum optimal.
  - b. Pemeliharaan cagar budaya yang belum maksimal.
  - c. Belum diinventarisirnya semua karya budaya.
- 17) Urusan Perpustakaan
- a. Kapasitas perpustakaan yang masih terbatas.
  - b. Belum tersedianya perpustakaan di semua wilayah.
  - c. Belum memadainya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.
- 18) Urusan Kearsipan
- a. SDM kearsipan yang belum memadai.
  - b. Belum semuanya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.

### C. Urusan Pilihan

#### 1) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Komoditas unggulan perikanan yang belum berkembang.
- b. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB yang masih tergolong rendah.
- c. Pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang masih belum optimal.

#### 2) Urusan Pariwisata

- a. Pengelolaan destinasi pariwisata yang masih belum maksimal.
- b. Jumlah kunjungan wisata yang masih tergolong rendah.
- c. Master Plan Pariwisata (RIPDA Pariwisata) yang belum tersedia.

#### 3) Urusan Pertanian

- a. Tingkat produktivitas tanaman pangan yang masih rendah.
- b. Pembinaan kelompok tani yang belum optimal.

#### 4) Urusan Kehutanan

- a. Konservasi kawasan hutan yang asmi belum maksimal.
- b. Perhutanan sosial yang masih belum berkembang.

#### 5) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Masih terjadinya kegiatan pertambangan tanpa ijin.
- b. Masih adanya rumah tangga yang memperoleh layanan listrik.

#### 6) Urusan Perdagangan

- a. Pusat-pusat perdagangan di berbagai wilayah yang masih belum berkembang.
- b. Sarana dan prasarana perdagangan yang masih kurang memadai.

#### 7) Urusan Perindustrian

- a. Industri mikro dan kecil di berbagai wilayah yang masih belum berkembang.
- b. Pembinaan pelaku industri yang belum optimal.
- c. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri yang masih belum maksimal.

#### 8) Urusan Transmigrasi

Belum berkembangnya transmigrasi swakarsa.

### D. Urusan Penunjuang

#### 1) Perencanaan Pembangunan

- a. Kebutuhan data dan ketersediaan data yang tidak sesuai.
- b. Kualitas dokumen perencanaan yang belum memadai.



- c. Belum dijadikannya hasil pengendalian dan evaluasi sebagai input dalam penyusunan rencana.
- 2) Keuangan
    - a. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum optimal.
    - b. Tenaga Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah yang masih terbatas.
    - c. Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang rendah.
    - d. Belum optimalnya penegakan hukum atau pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan.
  - 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
    - a. Pengembangan ASN secara komprehensif dan terintegrasi yang belum tercapai.
    - b. Masih adanya ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya.
    - c. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier yang belum optimal.
    - d. Penegakan peraturan disiplin ASN secara konsisten dan konsekuen yang belum terlaksana.
  - 4) Penelitian dan Pengembangan
    - a. Produk-produk kelitbangan daerah yang masih rendah.
    - b. Inovasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik yang masih rendah.
    - c. Penggunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang masih terbatas.
    - d. Sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung kegiatan kelitbangan yang belum memadai.
  - 5) Pengawasan
    - a. Komitmen Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti temuan BPK yang belum kuat.
    - b. Pelaksanaan pemantauan/monev atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Tim Tindak Lanjut Kabupaten yang belum optimal.
    - c. Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai.
    - d. Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten dan profesional dibandingkan dengan beban kerja APIP dalam pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum memadai.

6) Sekretariat Dewan

- a. Sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD yang masih terbatas.
- b. Kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang belum maksimal.
- c. Jumlah Ranperda inisiatif DPRD yang masih terbatas.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

##### 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

###### A. Kondisi Geografis

Dalam kondisi geografis Kabupaten Enrekang akan dijelaskan tentang letak wilayah, klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, dan wilayah rawan bencana.

###### 1. Letak dan Luas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Enrekang terletak di antara 3<sup>o</sup>14'36" Lintang Utara - 3<sup>o</sup>50'0" Lintang Selatan dan antara 119<sup>o</sup>40'53" Bujur Barat - 120<sup>o</sup>6'33" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah 1.786,01 km<sup>2</sup> atau sebesar 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan dengan 112 jumlah desa dan 17 jumlah kelurahan yang tersebar di semua kecamatan tersebut. Berikut tabel nama kecamatan beserta luasannya, yaitu:

Tabel 2.1  
Nama dan Luas Area Kecamatan

No	Bulan	Ibu Kota	Luas Total Are (Km <sup>2</sup> )
1	Maiwa	Bangkala	392,87
2	Bungin	Bungin	236,84
3	Enrekang	Juppandang	291,19
4	Cendana	Cendana	91,01
5	Baraka	Baraka	159,15
6	Buntu Batu	Pasui	126,65
7	Anggeraja	Lakawan	125,34
8	Malua	Malua	40,36
9	Alla	Kambiolangi	24,66
10	Curio	Curio	178,51
11	Masalle	Masalle	68,35
12	Baroko	Baroko	41,08

*Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019*

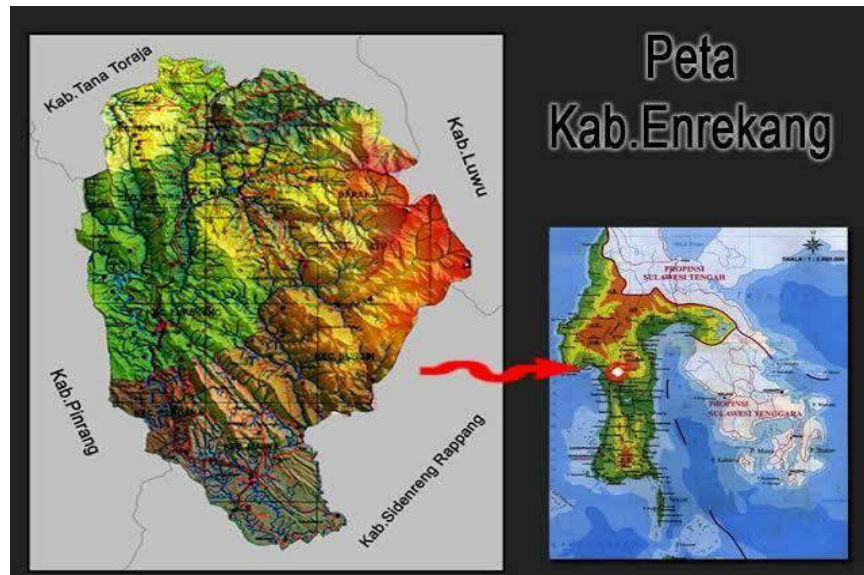
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Maiwa adalah kecamatan terluas dengan luasannya 392,87 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Alla yang paling kecil dengan luasan sebesar 34,66 Km<sup>2</sup>.

2. Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah selatan : Kabupaten Sidrap
- Sebelah barat : Kabupaten Pinrang

Gambar 2.1  
Peta Kabupaten Enrekang



3. Klimatologi

Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan Kabupaten Enrekang sangat bervariasi setiap bulannya dalam satu tahun. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2  
Tabel Jumlah Curah Hujan dan Hari hujan Menurut Bulan di Kabupaten Enrekang, 2017

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan
Januari	1.813,5	180
Februari	1.688	155
Maret	1.806	168
April	1.553,5	181
Mei	3.765,1	239
Juni	3.271	258
Juli	1.849	166
Agustus	1.476,4	133
September	1.357	111

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan
<b>Oktober</b>	1.491	159
<b>November</b>	2.520,5	170
<b>Desember</b>	1.706,9	154

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Mei terjadi jumlah curah hujan tinggi sebanyak 3.765,1 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari sebanyak 239 hari, bulan Maret tergolong jumlah curah hujan sedang sebanyak 1.806 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari sebanyak 168 hari, dan pada bulan September terjadi jumlah curah hujan rendah sebanyak 1.357 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan sebanyak 111 hari.

Gambar 2.2  
Peta Curah Hujan Kabupaten Enrekang



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang

#### 4. Topografi

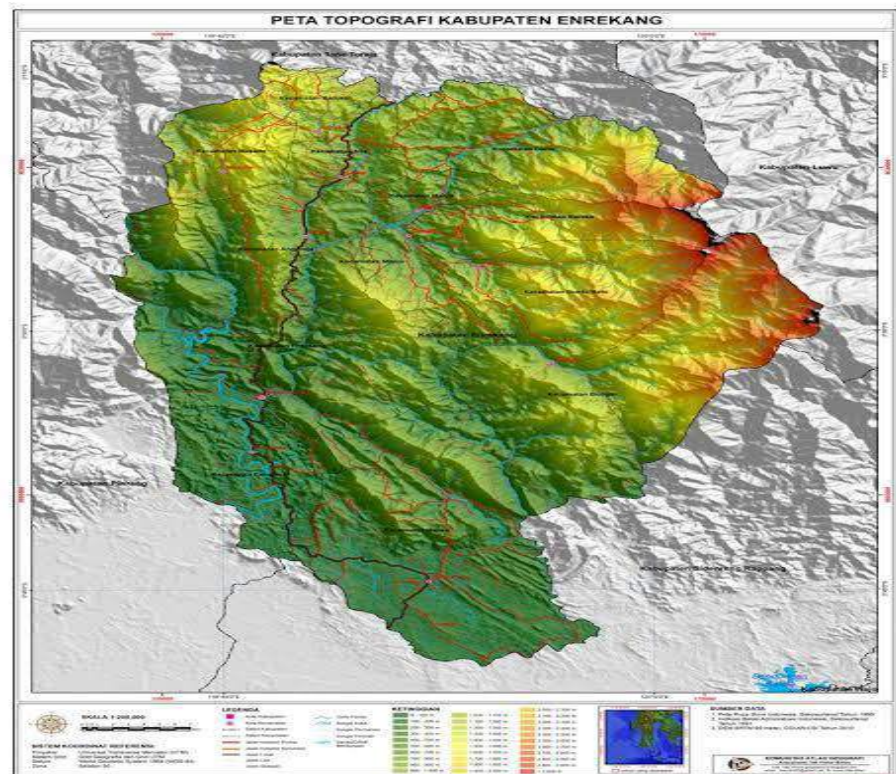
Kabupaten Enrekang mempunyai topografi yang bervariasi berupa pegunungan, perbukitan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 m – 3.329 m di atas permukaan laut, akan tetapi kabupaten ini tidak mempunyai pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten ini juga memiliki wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji dan lain-lain.

Kabupaten Enrekang didominasi oleh kawasan hutan dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/kebun, lading/huma, padang rumput, rawa-



rawa, kolam, perkebunan dan areal peruntukan lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan teksturnya berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Indonesia Timur.

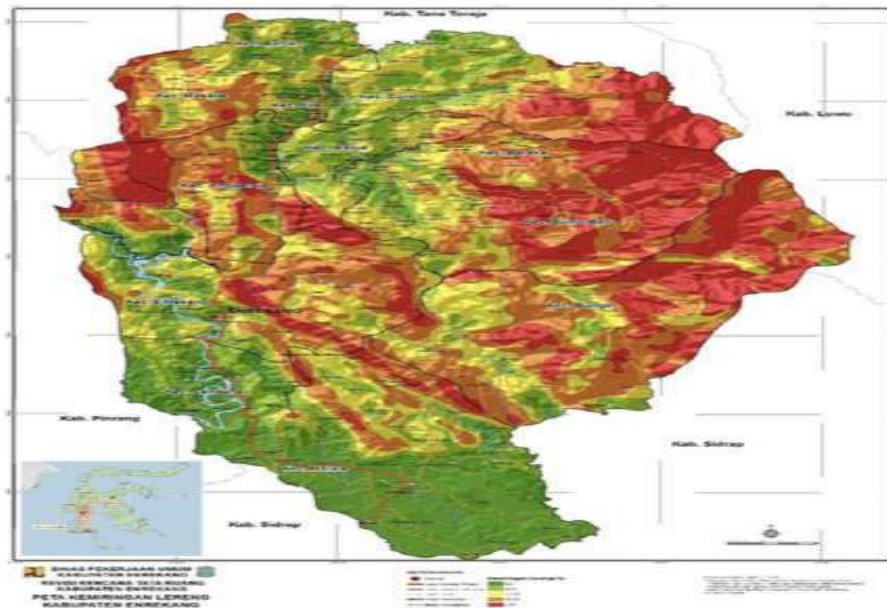
Gambar 2.3  
Peta Topografi



Sumber: Profil Kabupaten Enrekang

Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Enrekang bervariasi mulai dari datar 0 -2 % hingga sangat curam sebesar > 40 %. Kemiringan lereng yang paling dominan adalah 15-40% meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Enrekang. Sedangkan untuk kemiringan >40% merupakan wilayah terkecil. Perebatan kondisi ini hampir merata pada seluruh bagian kecamatan di Wilayah kabupaten Enrekang. Masih banyak potensi tanaman yang sifatnya kering, seperti tanaman perkebunan, buah-buahan dan tanaman keras lainnya yang dapat ditanaman dan dikembangkan.

Gambar 2.4  
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Enrekang



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang

## 5. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik yang kompleks dicirikan oleh morfologi wilayah yang bervariasi. Berdasarkan morfologinya maka wilayah Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi 9, yaitu :

- a. Brown Farest Soil yang banyak terdapat di Kecamatan Kabere yang merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
- b. Mediterian coklat kekelabu-labuan yang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
- c. Mediteran Coklat banyak terdapat di Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla.
- d. Podsolik Coklat dengan bahan induk tufa volkan macam terdapat di Wilayah Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Maiwa.
- e. Podsolik Coklat dengan bahan induk batuan pasir serfik dan tufa banyak terdapat di Wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
- f. Podsolik kekuningan dengan bahan induk seksis terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.
- g. Podsolik merah kekuningan dengan bahan induk batu pasir terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa.

- h. Podsolit violet dengan bahan induk serpih dan batu pasir terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa atas, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.
- i. Kompleks podsolik coklat kelabuan dan regosol terdapat di wilayah Maiwa.

Morfologi pegunungan vulkanik mempunyai relief topografi tinggi. Batuan pegunungan adalah batuan gunung api dari formasi Latimojong, menyebar di bagian Timur Wilayah Kabupaten Enrekang dengan arah penyebaran ke Utara Selatan. Formasi Latimojong tersusun dari batuan sedimen liat berselingan dengan batuan gunung api (vulkanik), batu pasir tufaan berselingan dengan tufa, batu pasir, batu lanau dan batu lempung umumnya mengeras kuat dan sebagian kurang padat. Tebal pelapisannya  $\pm$  4-100 cm, tufanya berbutir halus hingga mapilli, mengandung fosil foraminifera kecil yang menunjukkan umur miosen tengah sampai miosen akhir dan diendapkan dalam lingkungan neritik.

Kemudian ditinjau dari struktur batuan sebagai pembentuk geologi, maka dapat dibedakan atas 14 jenis batuan, yaitu :

- a. Batuan lempung yang menyebar hampir merata pada semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Enrekang
- b. Batuan Koalin yang terdapat di Kecamatan Baraka
- c. Batu gamping banyak terdapat di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja Kecamatan Curio, Kecamatan Alla dan Kecamatan Enrekang.
- d. Batu Marmer, terdapat di Kecamatan Baraka dan Anggeraja
- e. Pasir Kuarsa, banyak terdapat di Kecamatan Alla dan Anggeraja
- f. Serpih, yaitu terdapat di kecamatan Baraka
- g. Batu Pasir, yaitu terdapat hampir di semua kecamatan di Wilayah Kabupaten Enrekang, kecuali Kecamatan Bungin dan Kecamatan Curio.
- h. Tufa, yaitu hanya terdapat di Kecamatan Cendana
- i. Basal, terdapat di Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana
- j. Andesit, banyak terdapat di Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Baraka.

Gambar 2.5  
Peta Geologi Kabupaten Enrekang



Sumber: RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020

## 6. Hidrologi

Kondisi Hidrologi Kabupaten Enrekang adalah dengan air permukaan, meskipun ada beberapa daerah mempunyai potensi dengan memakai mata air bawah tanah dengan memanfaatkan aliran sungai. Khusus untuk daerah Kecamatan Curio dan Kecamatan Maiwa sebagian besar masih menggunakan sistem pemboran dengan memakai mesin bor jenis rotari.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Enrekang adalah DAS Saddang dan DAS Bila di tambah dengan sungai sungai yang mengalir dari daerah perbukitan/pegunungan yang tersusun dari berbagai formasi geologi antara lain batuan sedimen, batuan beku, batuan volkan dan batuan malihan. Sungai-sungai di Kabupaten Enrekang mengalir dengan perbedaan gradient. Berikut ini sungai-sungai yang ada di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Tabel 2.3  
DAS Kabupaten Enrekang

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Aliran Sungai		
			Lokasi	Ketinggian (m)	Kerendahan (m)
1	Saddang	39,107	a. Enrekang b. Cendana	100 – 500M	Kurang dari 25M
2	Bulu Cenrana	68,609	a. Bungin b. Malua	100 – 500M	Kurang dari 25M
3	Mata Allo	35,211	a. Alla b. Anggeraja c. Enrekang	500 – 1000M	100 – 500M
4	Malua	39,366	a. Curio b. Malua c. Baraka	500 – 1000M	100 500M

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

Gambar 2.6  
DAS Kabupaten Enrekang



Sumber: RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020

Kondisi sempadan sungai yang berada di Kabupaten Enrekang bermacam-macam, ada yang kondisinya masih baik adalah 22,72 Ha, yang sedang seluas 1,096,56 Ha, dan yang rusak seluas 1,669,02 Ha. Kemudian luas kawasan sekitar mata air yang kondisinya masih baik seluas 1,64 Ha, kemudian kondisinya sedang seluas 57,32 Ha, dan dalam kondisi rusak adalah 41,04 Ha.

#### 7. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri. Wilayah eawan bencana di Kabupaten Enrekang tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada. Jenis bencana yang terjadi adalah banjir, kebakaran angin topan, dan tanah longsor. Berikut ini dapat kita lihat data jumlah kejadian bencana alam tahun 2018, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.4  
Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang 2018

Kecamatan	Banjir	Kebakaran	Angin Topan	Tanah Longsor	Jumlah
Maiwa	-	-	-	1	1
Bungin	-	1	-	-	1
Enrekang	-	2	2	-	4
Cendana	2	-	-	-	2
Baraka	-	1	-	-	1
Buntu Batu	-	-	1	-	1
Anggeraja	-	-	-	-	-
Malua	-	-	1	-	1
Alla	-	2	-	-	2
Curio	-	2	-	-	2
Masalle	-	1	-	-	1
Baroko	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, Kecamatan Enrekang yang paling rawan bencana di antara kecamatan lainnya se Kabupaten Enrekang pada tahun 2018, jenis bencananya adalah kebakaran yang telah terjadi 2 kali dan angin topan telah terjadi sebanyak 2 kali. Kemudian ada 2 (dua) kecamatan yang tidak rawan atau tidak mengalami bencana di tahun 2018 adalah Kecamatan Anggeraja dan Baroko.

Data jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2018 adalah Kecamatan Anggeraja terdapat 8 desa/kelurahan yang mengalami banjir dan sebanyak 6 desa/kelurahan yang mengalami tanah longsor sehingga kecamatan ini dapat di kategorikan rawan bencana dan Kecamatan Buntu Batu juga dapat di kategorikan sebagai wilayah rawan bencana longsor karena sebanyak 7 desa/kelurahan yang terkena tanah longsor. Kemudian Kecamatan Malua tidak mengalami bencana alam berupa banjir dan tanah longsor sehingga kecamatan ini dapat di kategorikan wilayah yang tidak rawan bencana. Berikut ini datanya:

Tabel 2.5  
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2018

Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor
Maiwa	2	1
Bungin	0	2
Enrekang	2	5
Cendana	4	4
Baraka	0	2

Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor
Buntu Batu	0	7
Anggeraja	8	6
Malua	0	0
Alla	0	2
Curio	0	5
Masalle	0	3
Baroko	0	1

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020

B. Kondisi Demografis

Kondisi demografis menjelaskan tentang kondisi kependudukan Kabupaten Enrekang yang terdiri dari, yaitu:

1. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk menurut kecamatan, dan rasio jenis kelamin

a. Jumlah Penduduk

Kabupaten Enrekang termasuk salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai jumlah penduduk yang tidak tinggi. Dari tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Enrekang sebanyak 199.998 orang dan tahun 2019 jumlah penduduknya sebesar 226.776 orang. Sehingga peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Enrekang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 hanya sebanyak 26.778 orang. Berikut ini dapat kita lihat tabel jumlah penduduk Kabupaten Enrekang dari tahun 2015 – 2019, yaitu:

Tabel 2.6  
Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang, 2015-2019

Tahun	Penduduk
2015	199.998
2016	201.614
2017	203.320
2018	204.827
2019	226.776

Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II 2019 dan SIPD 2019

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 2.7

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2019

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019
Maiwa	28.082	-1,90
Bungin	5.552	-6,79

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019
Enrekang	37.188	-4,20
Cendana	10.126	-1,26
Baraka	23.659	-10,54
Buntu Batu	15.359	-3,32
Anggeraja	28.512	-3,96
Malua	9.238	-1,03
Alla	24.413	-0,16
Curio	17.842	-2,88
Masalle	14.834	-2,64
Baroko	11.935	-3,21
<b>Hasil Registrasi</b>	<b>226 776</b>	<b>-3,42</b>
<b>Hasil Proyeksi</b>	<b>206 387</b>	<b>0,76</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang paling banyak jumlahnya penduduknya pada tahun 2019 adalah Kecamatan Enrekang dengan jumlah 37.188 ribu orang dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bungin dengan jumlah 5.552 ribu orang.

c. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Tabel 2.8  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2019

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Maiwa	12.38	71.48
Bungin	2.45	23.44
Enrekang	16.40	127.71
Cendana	4.47	111.26
Baraka	10.43	186.81
Buntu Batu	6.79	96,73
Anggeraja	12.57	227.48
Malua	4.07	228.89
Alla	10.77	704.36
Curio	7.87	99.95
Masalle	6.54	217.03
Baroko	5.26	290.53
<b>Hasil Registrasi</b>	<b>100</b>	<b>126.97</b>
<b>Hasil Proyeksi</b>	<b>100</b>	<b>115.56</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang paling tinggi di tahun 2019 adalah Kecamatan Enrekang dengan 16,40% dan yang paling sedikit persentase penduduknya adalah Kecamatan Bungin dengan jumlah 2,45%. Kemudian kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Alla dengan 704.36 per km<sup>2</sup> dan paling sedikit kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bungin dengan 23.44 per km<sup>2</sup>.

d. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Tabel 2.9  
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2019

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Maiwa	101.67
Bungin	108.96
Enrekang	101.97
Cendana	98.67
Baraka	103.92
Buntu Batu	106.01
Anggeraja	102.24
Malua	100.00
Alla	106.47
Curio	107.03
Masalle	105.51
Baroko	107.89
<b>Hasil Registrasi</b>	<b>103.78</b>
<b>Hasil Proyeksi</b>	<b>100.84</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa Kecamatan Bungin yang mempunyai rasio jenis kelamin yang paling tinggi dengan besaran 108.96. Kemudian Kecamatan Cendana yang mempunyai rasio jenis kelamin yang paling sedikit, yaitu 98.97.

2. Jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin

Tabel 2.10  
Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2019

Kecamatan	Anak-anak (0—14 tahun)			Dewasa (15—64 tahun)			Lansia (≥ 65 Tahun)		
	L	P	(L+P)	L	P	(L+P)	L	P	(L+P)
<b>Maiwa</b>	4.064	3.792	7.856	7.681	7.710	15.391	995	1.295	2.290
<b>Bungin</b>	765	722	1.487	1.368	1.345	2.713	145	134	279
<b>Enrekang</b>	5.229	5.009	10.252	10.238	9.622	19.961	1.196	1.483	2.679
<b>Cendana</b>	1.423	1.347	2.770	2.439	2.736	5.175	402	502	904
<b>Baraka</b>	3.865	3.618	7.483	6.971	6.786	13.757	774	960	1.734
<b>Buntu Batu</b>	2.484	2.392	4.876	4.238	3.951	8.189	421	476	897
<b>Anggeraja</b>	4.103	3.969	8.072	7.917	7.863	15.780	965	1.185	2.150
<b>Malua</b>	1.377	1.338	2.715	2.392	2.566	4.958	341	399	740
<b>Alla</b>	3.754	3.400	7.154	7.333	6.953	14.286	638	790	1.428
<b>Curio</b>	3.046	2.879	5.925	4.901	4.621	9.522	584	633	1.217
<b>Masalle</b>	2.312	2.263	4.575	3.892	3.602	7.494	500	526	1.026
<b>Baroko</b>	1.843	1.678	3.521	3.210	3.082	6.292	437	416	853
<b>Total</b>	<b>34.265</b>	<b>32.407</b>	<b>66.672</b>	<b>61.964</b>	<b>61.554</b>	<b>123.518</b>	<b>7.398</b>	<b>8.799</b>	<b>16.197</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang, 2020

Pada tabel 2.10 adalah tabel yang mengelompokkan jumlah penduduk per kecamatan yang telah di kategorikan sebagai anak-anak dengan rentang usia 0-14 tahun, dewasa dengan rentang usia 15-64 tahun, dan yang mempunyai usia  $\geq 65$  di kategorikan sebagai lansia. Selain berdasarkan kategori usia tersebut, juga di bagi berdasarkan jenis kelamin. Sehingga tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Enrekang adalah kecamatan yang paling banyak penduduknya yang di kategorikan sebagai anak-anak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.229 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 5.009 orang, tergolong dewasa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9.6222 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 10.339, dan tergolong lansia laki-laki sebanyak 1.196 orang dan lansia perempuan sebanyak 1.483 orang. Kemudian Kecamatan Bungin yang paling sedikit penduduknya yang telah di kategorikan sebagai anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 765 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 722 orang, tergolong dewasa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.368 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.345 orang, dan yang tergolong lansia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 145 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 134 orang.

### 3. Jumlah penduduk usia sekolah

Tabel 2.11  
Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang, 2018

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
7 - 12	13.759	13.001	26.760
13 - 15	6.545	5.976	12.521
16 - 18	6.048	5.211	11.259
19 - 24	8.609	7.700	16.309
<b>Total</b>	<b>34.961</b>	<b>31.888</b>	<b>66.849</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok umum 7 - 12 tahun adalah kelompok umur usia sekolah yang terbanyak dengan jumlah 26.760 orang anak, dengan jenis kelamin laki-laaki sebanyak 13.759 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 13.001 orang. Kelompok umur usia sekolah yang paling sedikit jumlahnya adalah 16 - 18 tahun dengan jumlah



sebanyak 11.259 orang anak yang terbagi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.048 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 5.211 orang.

4. Jumlah penduduk menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan

Tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk Kabupaten Enrekang bervariasi, ada yang tidak/belum sekolah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas kejuruan, diploma I/II/III/akademi, dan universitas. Berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan, jumlah penduduk yang mempunyai umur telah memasuki angkatan kerja dan telah bekerja paling banyak adalah tidak/belum pernah sekolah sebanyak 34.122 orang dan yang paling sedikit telah bekerja adalah lulusan diploma I/II/III/akademi sebanyak 2.561 orang. Kemudian lulusan sekolah menengah atas yang paling banyak menjadi pengangguran terbuka dengan jumlah 694 orang dan lulusan sekolah menengah atas kejuruan dan lulusan diploma I/II/III/akademi yang tidak ada pengangguran terbukanya. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.12  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Enrekang, 2018

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	
Tidak/belum pernah sekolah	34.122	418	34.540
Tidak/belum tamat SD	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama	20.738	197	20.935
Sekolah Menengah Atas	14.879	694	15.573
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	7.684	0	7.684
Diploma I/II/III/Akademi	2.561	0	2.561
Universitas	11.542	236	11.778
<b>Jumlah</b>	<b>91.526</b>	<b>1.545</b>	<b>93.071</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

5. Jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan

Pada tabel di bawah ditunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Enrekang adalah masyarakat yang agraris, hal ini ditunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Enrekang yang paling banyak memiliki lapangan pekerjaan utama di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan adalah yang paling banyak di antara lapangan pekerjaan lainnya, yaitu sebanyak 59.181 orang dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin laki-laki

sebanyak 38.652 dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 20.529. kemudian penduduk yang mempunyai lapangan pekerjaan utama sebagai industri pengolahan yang paling sedikit dengan jumlah 3.341 orang dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.374 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.967 orang.

Tabel 2.13  
Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang, 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	38.652	20.529	59.181
Industri Pengolahan	1.374	1.967	3.341
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan hotel	2.620	6.187	8.807
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	7.616	7.334	14.950
Lainnya	5.181	66	5.247
<b>Total</b>	<b>55.443</b>	<b>36.083</b>	<b>91.526</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

#### 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

##### 1. Pertumbuhan dan Peran Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto atau disingkat PDRB adalah jumlah dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian pada wilayah dan periode tertentu dalam waktu satu tahun. Suatu wilayah yang menyusun PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB berdasarkan lapangan usaha adalah total dari keseluruhan komponen nilai tambah bruto yang dapat dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi berdasarkan berbagai aktivitas produksinya. Kemudian PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah sesuatu yang menjelaskan penggunaan dari nilai tambah tersebut.

##### a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kabupaten Enrekang berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018 sebesar 6.719,8 dan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 7.289,2. Kemudian, PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2018 sebesar 4.302,1 dan naik di tahun 2019 sebesar 4.535,6. Berikut dapat kita lihat data lengkanya, yaitu:

Tabel 2.14  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan  
 Usaha (miliar rupiah), 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.224,6	2.544,9	2.685,6	2.636,1	2.810,7
Pertambangan dan Penggalian	195,3	217,8	238,1	262,9	267,3
Industri Pengolahan	646,6	716,9	799,2	857,9	1.023,1
Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	5,4	6,1	6,6	7,0
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	3,7	4,1	4,5	5,1	5,3
Konstruksi	589,2	666,6	746,8	856,3	946,0
Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil	415,6	474,3	501,1	557,8	590,5
Transportasi dan Pergudangan	63,3	71,0	78,7	90,2	94,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,0	41,3	45,8	51,0	58,3
Informasi dan Komunikasi	149,8	170,8	188,5	209,6	221,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	140,7	165,7	177,1	196,3	208,6
Real Estate	150,4	163,1	176,3	191,4	205,9
Jasa Perusahaan	1,7	1,8	2,0	2,3	2,6
Administrasi Pemerintah, Pertahanan	410,2	421,3	460,8	513,5	546,1
Jasa Pendidikan	88,2	96,9	105,0	115,7	128,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93,7	103,1	115,6	131,6	142,9
Jasa Lainnya	25,0	25,9	29,3	35,6	39,9
<b>PDRB</b>	<b>5.240,7</b>	<b>5.890,9</b>	<b>6.360,5</b>	<b>6.719,8</b>	<b>7.289,2</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Enrekang masih mengandalkan lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusinya terhadap pembentukan total dari PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 1.487,4, tahun 2016 sebesar 1.605,3 , tahun 2017 sebesar 1,698,2, tahun 2018 sebesar 1,642,8 dan tahun 2019 naik sebesar 1,726,3. Jasa perusahaan yang paling sedikit memberikan sumbangsih pada peningkatan PDRB Kabupaten Enrekang. PDRB pada tahun 2015 sebesar 1,7, 2016 sebesar 1,8, tahun 2017 sebesar 2,0, tahun 2018 sebesar 2,3, dan 2019 naik sebesar 2,6.

## b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Tabel 2.15  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Enrekang (miliar rupiah), 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.487,4	1.605,3	1.698,2	1.642,8	1.726,3
Pertambangan dan Penggalian	115,6	127,9	138,3	151,5	152,1
Industri Pengolahan	260,1	279,4	300,0	3320,5	374,0
Pengadaan Listrik dan Gas	5,3	5,8	6,2	6,6	6,8
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	3,8	4,1	4,4	4,9	5,1
Konstruksi	508,9	546,5	590,7	637,4	665,2
Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil	370,0	409,4	442,7	471,5	487,2
Transportasi dan Pergudangan	34,9	38,2	41,7	47,1	48,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,3	30,4	33,3	36,6	39,7
Informasi dan Komunikasi	156,0	172,6	188,3	207,0	215,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	95,9	108,8	112,6	119,2	122,8
Real Estate	102,0	108,9	116,9	123,0	129,7
Jasa Perusahaan	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
Administrasi Pemerintah, Pertahanan	287,7	285,7	302,8	325,2	337,4
Jasa Pendidikan	74,1	79,1	84,6	91,9	98,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,0	77,2	83,5	91,9	99,1
Jasa Lainnya	19,1	19,2	21,1	23,9	26,2
<b>PDRB</b>	<b>3.623,2</b>	<b>3.899,6</b>	<b>4.166,4</b>	<b>4.302,1</b>	<b>4.535,6</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha yang paling sedikit sumbangsinya adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah. Tahun 2015 sebesar 3,8 M, tahun 2016 sebesar 4,1 M, tahun 2017 sebesar 4,4 M, tahun 2018 sebesar 4,9 M, dan tahun 2019 sebesar 5,1 M.

## c. PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Tabel 2.16  
Distribusi Presentasi PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,45	43,20	42,22	39,23	38,51
Pertambangan dan Penggalian	3,73	3,70	3,74	3,91	3,66
Industri Pengolahan	12,34	12,17	12,56	12,77	14,02
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Limbah dan daur ulang					
Konstruksi	11,24	11,32	11,74	12,74	12,96
Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil	7,93	8,05	7,88	8,30	8,09
Transportasi dan Pergudangan	1,21	1,20	1,24	1,34	1,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,72	0,70	0,72	0,76	0,80
Informasi dan Komunikasi	2,86	2,90	2,96	3,12	3,03
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,68	2,81	2,78	2,92	2,86
Real Estate	2,87	2,77	2,77	2,85	2,82
Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Administrasi Pemerintah, Pertahanan	7,83	7,15	7,24	7,64	7,48
Jasa Pendidikan	1,68	1,64	1,65	1,72	1,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,75	1,82	1,96	1,96
Jasa Lainnya	0,48	0,44	0,46	0,53	0,55

Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi pada PDRB Kabupaten Enrekang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2019 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 38,51%. Lapangan usaha yang paling sedikit berkontribusi pada PDRB Kabupaten Enrekang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2019 adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebanyak 0,07%.

d. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran

Tabel 2.17  
PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah) 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	3.188,98	3.530,80	3.894,32	4.220,94	4.583,59
Konsumsi LNPRT	50,99	56,07	61,76	76,96	111,549
Konsumsi Pemerintah	934,13	990,80	1.037,27	1.192,23	1.286,68
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.959,49	2.171,32	2.344,18	2.564,41	2.813,40
Perubahan Inventor	189,98	174,41	15,89	35,01	31,75
Net Ekspor	(1.082,90)	(1.032,51)	(992,92)	(1.369,76)	(1.528,72)
<b>PDRB</b>	<b>5.240,68</b>	<b>5.890,89</b>	<b>6.360,51</b>	<b>6.719,80</b>	<b>7.298,24</b>

Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Pengeluaran 2015-2019

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2015 sebesar 5.240,68 M, tahun 2016 sebesar 5.890,89 M, tahun 2017 sebesar 6.360,51 M, tahun 2018 sebesar 6.719,80 M, dan tahun 2019 sebesar 7.298,24 M.

e. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran

Tabel 2.18  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Enrekang 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	Rumah	5,54	6,27	6,73	5,46	5,75
Konsumsi LNPRT		1,76	2,35	8,98	20,04	39,90
Konsumsi Pemerintah		7,02	1,49	0,87	7,38	4,97
Pembentukan Tetap Bruto	Modal	9,63	5,57	6,84	5,82	4,12
Perubahan Inventor		-	-	-	-	-
Net Ekspor		26,65	(4,67)	(11,50)	22,24	5,42
<b>PDRB</b>		<b>6,91</b>	<b>7,63</b>	<b>6,84</b>	<b>3,26</b>	<b>5,43</b>

Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Pengeluaran 2015-2019

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa komponen pengeluaran yang paling banyak memberikan sumbangsih terhadap laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran tahun 2019 adalah konsumsi LNPRT sebesar 39,90% dan paling sedikit adalah perubahan inventar karena datanya tidak tersedia, kemudian pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,12%.

f. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran

Tabel 2.19  
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Enrekang 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	Rumah	140,58	146,47	151,36	155,57	159,75
Konsumsi LNPRT		141,34	151,84	153,45	159,31	165,05
Konsumsi Pemerintah		143,57	150,05	155,73	166,70	171,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto		137,36	144,18	145,70	150,62	158,70
Perubahan Inventor		172,60	153,41	143,40	190,34	163,41
Net Ekspor		124,68	124,71	135,51	152,93	161,90
<b>PDRB</b>		<b>144,64</b>	<b>151,06</b>	<b>152,66</b>	<b>156,20</b>	<b>160,91</b>

Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Pengeluaran 2015-2019



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komponen pengeluaran yang paling banyak memberi sumbangsih kepada indeks implisit PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 adalah konsumsi pemerintah sebesar 171,38 dan yang paling sedikit adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 158,70.

g. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Tabel 2.20  
Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Enrekang 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	4,38	4,75	4,23	2,01	3,42
Konsumsi LNPRT	0,07	0,08	0,06	0,03	0,06
Konsumsi Pemerintah	1,24	1,37	1,16	0,52	0,90
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,65	3,00	2,64	1,26	2,15
Perubahan Inventor	(0,04)	0,23	0,20	0,01	0,02
Net Ekspor	(1,40)	(1,83)	(1,45)	(0,57)	(1,13)
<b>PDRB</b>	<b>6,91</b>	<b>7,63</b>	<b>6,84</b>	<b>3,26</b>	<b>5,43</b>

Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Pengeluaran 2015-2019

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa komponen pengeluaran yang paling banyak memberikan sumbangsih kepada pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 adalah konsumsi rumah tangga sebesar 3,42% dan yang paling sedikit adalah perubahan inventur sebesar 0,02%.

2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Penghitungan pendapatan per kapita ialah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dalam sebuah negara. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Enrekang tahun 2019 sebesar 35,36 Juta Rupiah (Sumber: Indikator Pembangunan Manusia).

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar

daripada tahun sebelumnya. Berikut data laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:

Tabel 2.21  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Enrekang	6,91	7,64	6,84	3,12	5,43

Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Pro. Sul-sel Triwulan 4 tahun 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebanyak 6,91%, tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 7,64%, tahun 2017 mengalami penurunan hingga 6,84%, tahun 2018 terus mengalami penurunan yang signifikan hingga angka 3,12%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 5,43%.

#### 4. Laju Inflasi Kabupaten Enrekang

Pengertian inflasi menurut Bank Indonesia (BI) adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Pengertian lain dari inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Faktor penyebab inflasi ada 6 (enam), yaitu:

- a. Inflasi karena permintaan, yaitu inflasi yang terjadi diakibatkan oleh permintaan masyarakat terhadap suatu barang yang banyak.
- b. Inflasi yang diakibatkan oleh bertambahnya uang yang beredar, yaitu inflasi yang terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibanding dengan barang yang ada, sehingga harga akan naik.
- c. Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi, yaitu adanya desakan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.
- d. Inflasi campuran, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran.
- e. Inflasi Ekspektasi, yaitu inflasi yang terjadi karena ekspektasi kondisi ekonomi akan datang akan semakin lebih baik.
- f. Kekacauan ekonomi dan politik, yaitu inflasi yang terjadi ketika suatu negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga-harga barang tersebut akan mahal.

Tingkat inflasi di Kabupaten Enrekang sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi Kota Pare-Pare. Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan mengacu

pada tingkat inflasi Kota Pare–Pare, maka berikut ini ditampilkan tingkat inflasi Kabupaten Enrekang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.22  
Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019 (Januari-Juni)
Tingkat Inflasi (%)	1,58	2,11	3,43	1,96	1,82

Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, Di Kabupaten Enrekang mengalami inflasi terendah datanya adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 1,58%, dan tahun 2016 tingkat inflasi naik mencapai 2,11%, tahun 2017 adalah tahun yang paling tinggi inflasinya sebanyak 3,43%, tahun 2018 berhasil di turunkan menjadi 1,96%, dan tingkat inflasi pada bulan Januari sampai dengan Juni terjadi penurunan kembali dari tahun sebelumnya dengan persentasi sebanyak 1,82%.

#### 5. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita berdasarkan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Berikut data PDRB per kapita Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:

Tabel 2.23  
PDRB Per Kapita Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah) tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Enrekang	5.241	5.891	6.361	6.703	2.869,22

Sumber: BPS PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2014-2018 dan Indikator Makro Kab. Enrekang

Pada data PDRB per kapita Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif. PDRB per kapita Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 5.241 Miliar, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan sebesar 5.891 Miliar, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 6.361 Miliar, tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan hingga 6.703 Miliar, dan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan hingga 2.869,22 Miliar.

## 6. Indeks Gini

Indeks gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan atau kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 bulan Maret berada dibawah indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan dan indeks gini nasional pada tahun dan bulan yang sama. Indeks gini Kabupaten Enrekang berada pada angka 0,359 sedangkan indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan berada pada angka 0,389 dan indeks gini nasional berada pada angka 0,382. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.24  
Indeks Gini Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2017-  
Maret 2019

Gini Ratio	2017	2018	Maret 2019
Kabupaten Enrekang	0,374	0,389	0,359
Provinsi Sulawesi Selatan	0,42	0,397	0,389
Nasional	0,391	0,389	0,382

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Enrekang Tahun 2019 dan BPS

## 7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak berharta atau serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Enrekang tidak lepas dari masalah kemiskinan. Berikut data tabel garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Tabel 2.25  
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Enrekang Tahun 2016-  
2019

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (dlm 000)	Persentase
2016	275.971	26,98	13,41
2017	283.635	26,70	13,20

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (dlm 000)	Persentase
2018	312.674	25,53	12,49
2019	331.667	25,40	12,33

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019 dan Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dengan garis kemiskinan Rp 275.971,-/kapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 26,98 ribu orang atau 13,41%. Tahun 2017 garis kemiskinan Rp 238.635,-/kapita/bulan penduduk miskin sebanyak 26,70 ribu orang atau 13,20%. Tahun 2018 garis kemiskinan Rp 312.674,-/kapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 25,53 ribu orang atau 12,49%. Kemudian tahun 2019 dengan garis kemiskinan Rp 331.667 /kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,40 ribu atau 12,33%. Sehingga dapat di katakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang dari tahun 2016-2018 terus berkurang.

#### 8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP. Sejak diperkenalkan, IPM selalu dipakai oleh PBB dan negara-negara dalam membuat laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM sendiri menjelaskan penduduk bagaimana dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM memiliki 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Kriteria UNDP (United Nation Development Program) nilai IPM rendah pada skala (<60), IPM digolongkan sedang pada skala antara (60-70) dan nilai IPM tinggi antara (70-80) dan IPM sangat tinggi pada skala (>80).

Tabel 2.26  
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Enrekang, 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Enekang	70,03	70,79	71,44	72,25	72,66
Prov. Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,9	71,66

Sumber: Kabupaten Enrekang, 2020

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa data IPM Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. IPM tahun 2015 sebesar

70,03%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan menjadi 70,79%, tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 71,44%, tahun 2018 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,25, dan tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,66%. Berdasarkan kriteria UNDP, IPM Kabupaten Enrekang tergolong tinggi.

9. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah jumlah penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis aksara. Kemampuan membaca dan menulis seseorang sangat penting, karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung, bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Tabel 2.27  
Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Umur 15-24 Tahun dan 15-55 Tahun Kabupaten Enrekang, 2019

Angka Melek Huruf	
15 – 24 tahun	15 – 55 tahun
95,83	95,01

Sumber: Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka melek penduduk miskin Kabupaten Enrekang tahun 2018 yang berumur 15-24 tahun mencapai angka 95,83%, sedangkan yang berumur 15-55 tahun sebesar 95,01%. Menunjukkan bahwa sebanyak 4,17% penduduk miskin yang berumur 15-24 tahun belum menguasai membaca dan menulis. Kemudian penduduk miskin yang mempunyai rentang usia 15-55 tahun, masih ada sekitar 4,99% yang belum menguasai membaca dan menulis.

10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu gambaran jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pendidikan formal. Dalam menghitung rata-rata lama sekolah diperlukan beberapa data mengenai partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki, ijazah terakhir yang dimiliki, dan tingkat atau kelas yang pernah atau sudah diduduki.



Tabel 2.28  
Indeks Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Enrekang, 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
RLS	8,05	8,06	8,43	8,68	8,89

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019 dan Indikator Makro Kab. Enrekang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Enrekang tahun 2015 – 2019 terus meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Enrekang mempunyai kesadaran tentang pendidikan terus meningkat. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 sebesar 8,05, tahun 2016 sebesar 8,06, tahun 2017 sebesar 8,43, tahun 2018 sebesar 8,68 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 8,89%.

#### 11. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) dapat diartikan sebagai rata-rata kesempatan hidup penduduk atau masyarakat sampai pada umur tertentu. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah pada suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.29  
Angka Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Enrekang, 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
AHH	70,31	70,34	70,38	70,55	70,83

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

Pada di atas menunjukkan bahwa angka harapan hidup Kabupaten Enrekang tahun 2014 sebesar 70,21, tahun 2015 sebesar 70,31, tahun 2016 sebesar 70,34, tahun 2017 sebesar 70,38, dan tahun 2018 sebesar 70,55. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Enrekang mempunyai potensi hidup sampai dengan umur 70,55 tahun. Berdasarkan data tersebut AHH Kabupaten Enrekang berjalan positif karena terus mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir serius dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan

pemerintah Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan angka harapan hidup berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan peningkatan pelayanan RSUD Masserenpulu dengan melakukan kerjasama dengan dokter ahli dari makassar, polah hidup sehat masyarakat dengan melakukan budaya olahraga rutin, dan peningkatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat yang diutamakan diberikan kepada ibu hamil dan balita.

12. Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk merupakan kondisi dimana balita mengalami berat dan tinggi badan anak jauh di bawah rata-rata balita yang seusianya. Cara untuk mengetahui balita yang terkena gizi buruk dengan indikator graik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan lingkaran lengan atas (LILA). Kabupaten Enrekang juga tidak luput dari kejadian balita gizi buruk, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun 2020 persentasi balita gizi buruk tahun 2015 sebesar 0,14%, tahun 2016 menurun di angka 0,13%, tahun 2017 naik di angka 0,21%, tahun 2018 menurun hingga angka 0,07%, dan tahun 2019 turun kembali hingga angka 0,05%.

Tabel 2.30  
Jumlah Balita Gizi Buruk, 2019

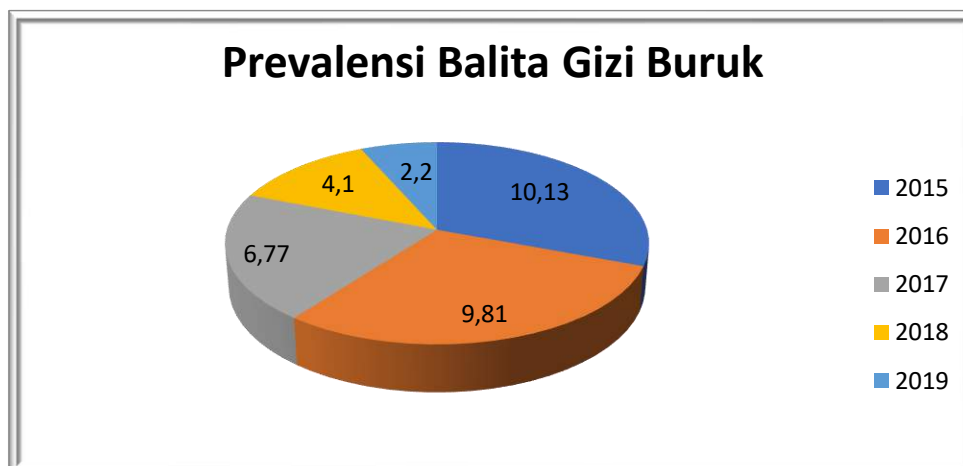
Tahun	Balita Gizi Buruk
2015	0,14
2016	0,13
2017	0,21
2018	0,07
2019	0,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

13. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Berdasarkan gambar di bawah menunjukkan bahwa angka prevalensi balita gizi buruk tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk sebesar 10,13%, menurun di tahun 2016 sebesar 9,81%, tahun 2017 sebesar 6,77%, tahun 2018 sebesar 4,10%, dan tahun 2019 sebesar 2,20%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal Dinas Kesehatan telah melakukan perbaikan gizi balita sehingga prevelensi balita gizi buruk dapat di kurangi dari tahun ke tahun.

Gambar 2.7  
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017

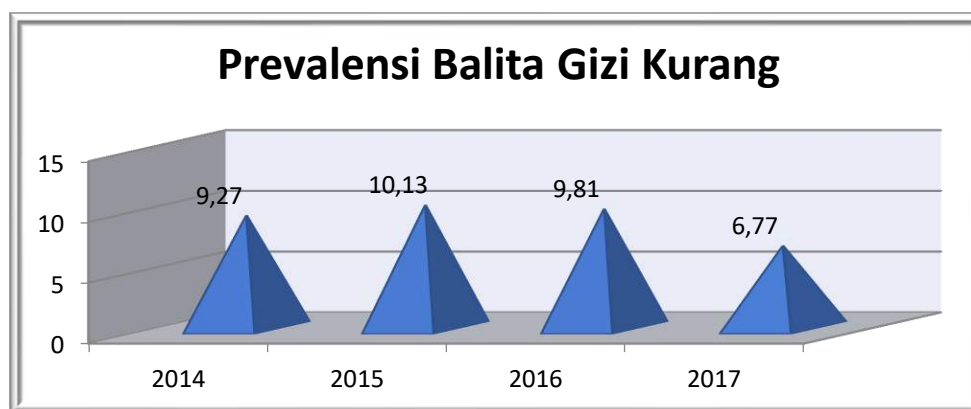


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

14. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak lepas dari kejadian balita gizi buruk, Berikut data prevalensinya, yaitu:

Gambar 2.8  
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2018

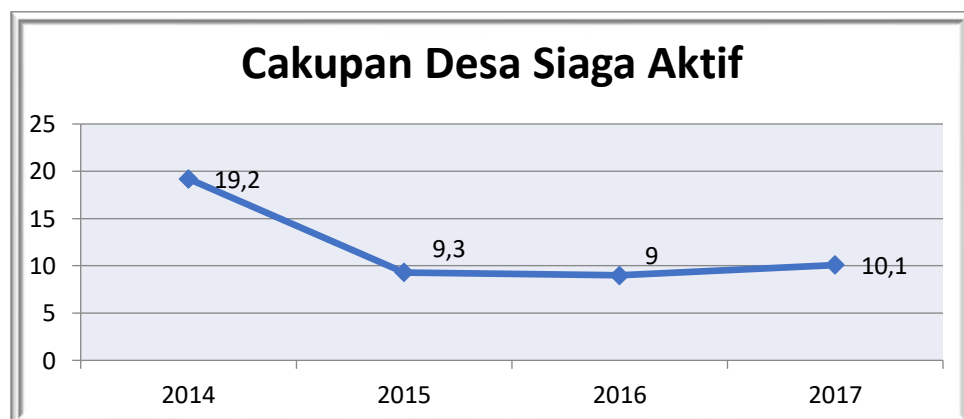
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Enrekang tahun 2014 sebesar 9,27%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,06% sehingga angkanya sebesar 10,13%, tahun 2016 mengalami penurunan mendapai angka 9,81%, dan tahun 2017 kembali mengalami penurunan signifikan sebesar 3,04% sehingga menjadi 6,77%. Hal

ini menunjukkan dari tahun ke tahun balita di Kabupaten Enrekang telah mengalami perbaikan gizi.

15. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif merupakan desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari yang mempunyai fungsi pemberian layanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, *surveillance* berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Berikut data desa cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Gambar 2.9  
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017

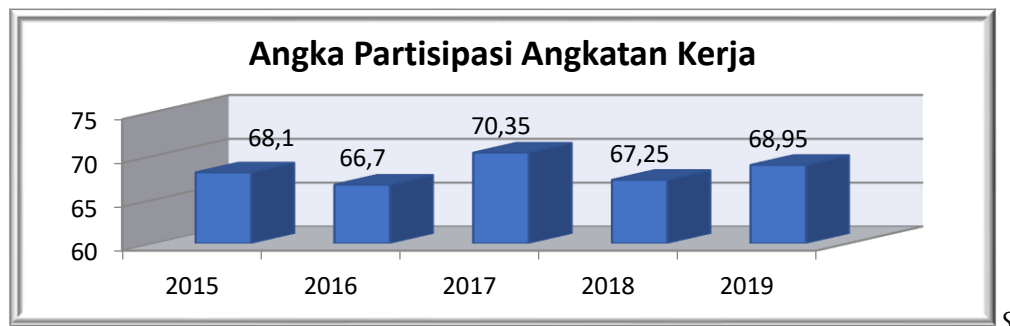


Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sekitar 9,1%. Tahun 2014 cakupan desa siaga aktif sebesar 19,2%, tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka 9,3%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan jumlah menjadi 9%, dan tahun 2017 terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 10,1%. Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya telah menerapkan PHBS.

16. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 2.10  
 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan 4 2019

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Enrekang sangat fluktuatif. Hal ini dapat kita lihat tahun 2015 sebesar 68,1%, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 66,7%, tahun 2017 terus mengalami kenaikan yang signifikan hingga 70,35%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 67,25%, dan tahun 2019 kembali mengalami kenaikan hingga angka 68,95%.

17. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2.11  
 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



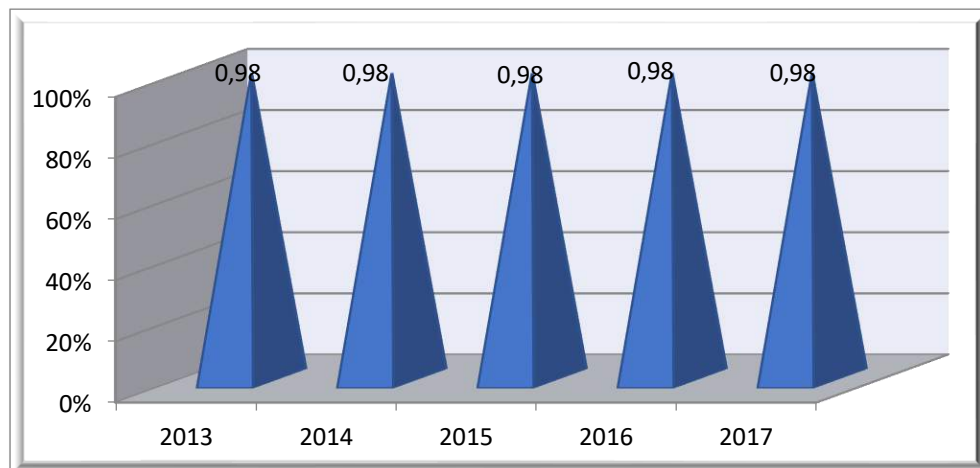
Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan 4 2019

Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2019 mengalami flutuatif, yang artinya jumlah pengangguran terbuka kadang naik dan kadang turun dan naik kembali. Pengangguran terbuka tahun 2015 sebesar 1,33%, kemudian pada tahun 2016 kembali naik hingga 1,9%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 1,87%. Kemudian terjadi lagi penurunan sdi

tahun 2018 sebesar 1,66% dan tahun 2019 terjadi kenaikan 0,74% sehingga mencapai nilai 2,40%.

18. Rasio Penduduk yang Bekerja

Gambar 2.12  
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

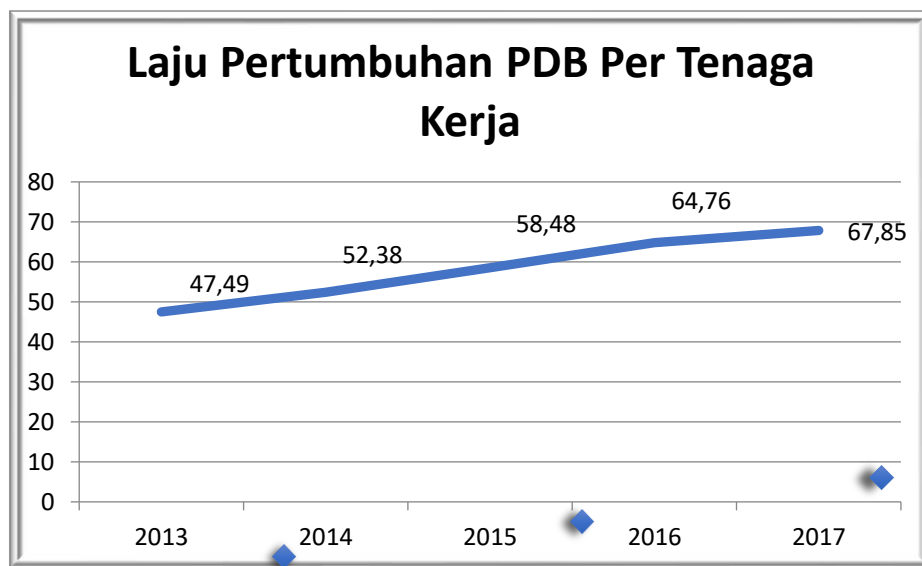
Pada gambar 2.13 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Enrekang stagnan di angka 0,98%.

19. Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja

Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja merupakan laju rata-rata pertumbuhan PDB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator dipergunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Berikut data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja di Kabupaten Enrekang, yaitu:



Gambar 2.13  
Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017

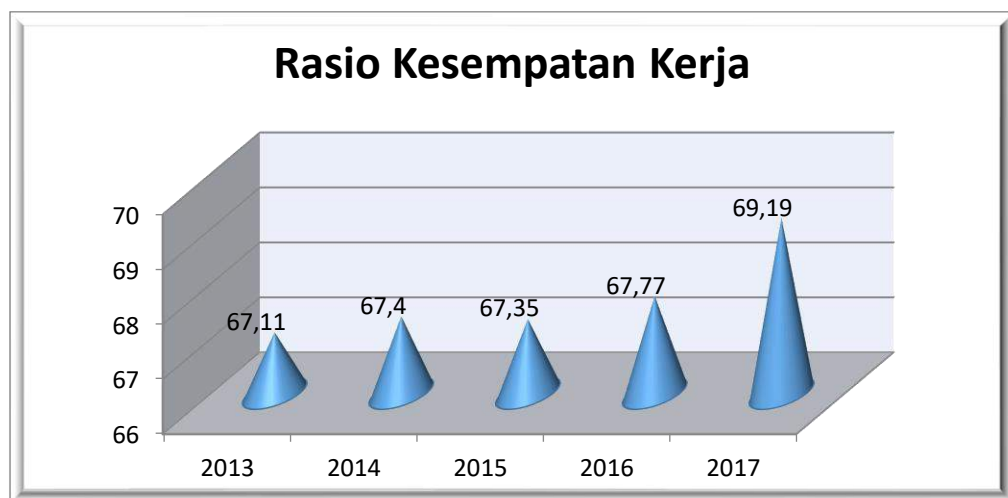


Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 peningkatannya sebanyak 20,36%.

20. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Gambar 2.14  
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) merupakan perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Rumus

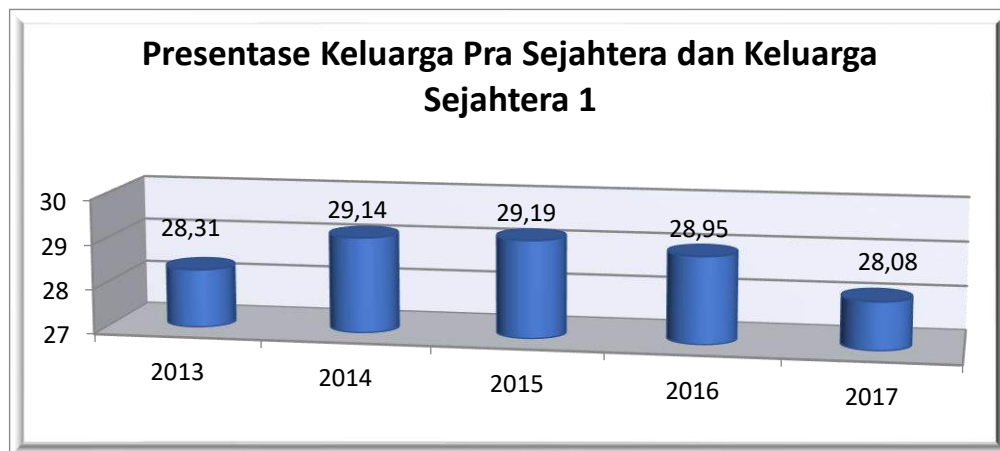
kesempatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan data rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 2.08%. Tahun 2013 angka rasio kesempatan kerja sebesar 67,11% dan tahun 2017 sebesar 69,19%.

#### 21. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

Menurut BKKBN, keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*). 6 indikator terbut adalah (a) pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (b) anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah; (c) bekerja/sekolah dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik; (d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan; (e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; dan (f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Keluarga sejahtera 1 adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga. Ke 8 indikator tersebut adalah (a) pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (b) paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur; (c) seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun; (d) luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah; (e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing; (f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; (g) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin; dan (h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Berikut data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Gambar 2.15  
 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



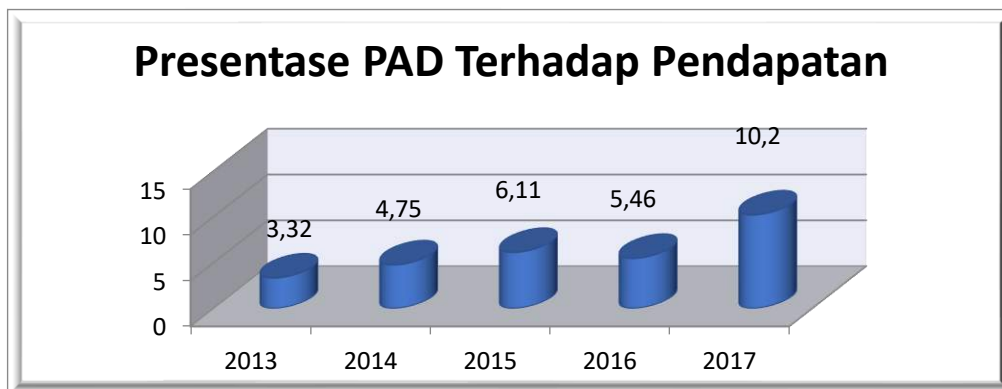
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa presentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 tahun 2013 sebesar 28,31%, tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 29,14, tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit sebesar 29,19, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 28,95%, dan tahun 2017 terus mengalami penurunan sebesar 28,08%. Hal ini menunjukkan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 di Kabupaten Enrekang telah menurun dan adanya peningkatan perekonomian masyarakat.

## 22. Presentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan di dalam daerahnya sendiri. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa presentase PAD terhadap pendapatan menunjukkan peningkatan, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2016. presentase PAD terhadap pendapatan tahun 2013 sebesar 3,32%, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,75%, tahun 2015 naik lagi menjadi 6,11%, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,46%, dan tahun 2017 mengalami kenaikan presentase PAD terhadap pendapatan yang sangat signifikan sebesar 10,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang mengoptimalkan potensi-potensi daerah sehingga PAD meningkat secara signifikan.

Gambar 2.16  
Presentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

### 23. Opini BPK

Opini BPK adalah pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ada 4 (empat) jenis opini yang biasanya dikeluarkan oleh BPK, yaitu (1) wajar tanpa pengecualian (WTP); (2) wajar dengan pengecualian (WDP); (3) tidak wajar (TW); dan (4) tidak menyatakan pendapat (TMP). Berdasarkan data opini BPK Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2015 mendapatkan opini TMP, tahun 2016 dan 2017 mendapatkan opini WDP, tahun 2018 dan 2019 mendapatkan opini WTP. Mendapatkannya predikat WTP dua kali berturut-turut Kabupaten Enrekang tahun 2018 dan 2019, merupakan bukti bahwa keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Tabel 2.31  
Opini BPK Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

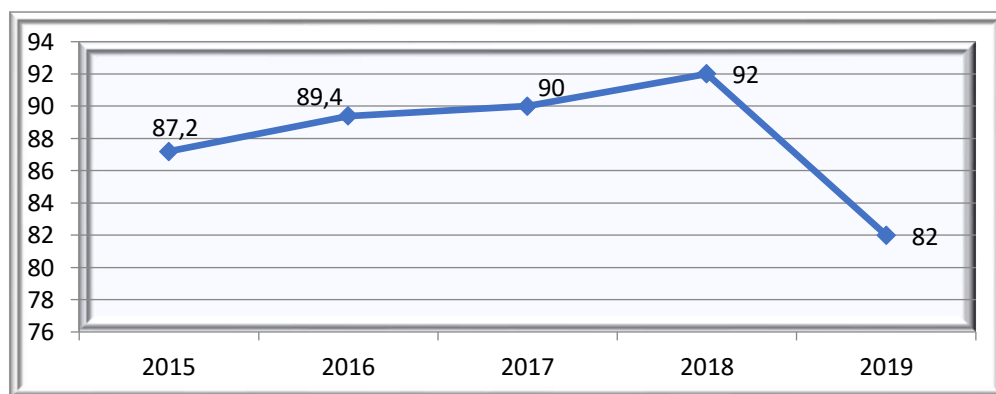
No	Opini	2015	2016	2017	2018	2019
1	WTP				√	√
2	WDP		√	√		
3	TMP	√				
4	TW					

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, 2020

24. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH juga merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Berikut ini data PPH di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:

Gambar 2.17  
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



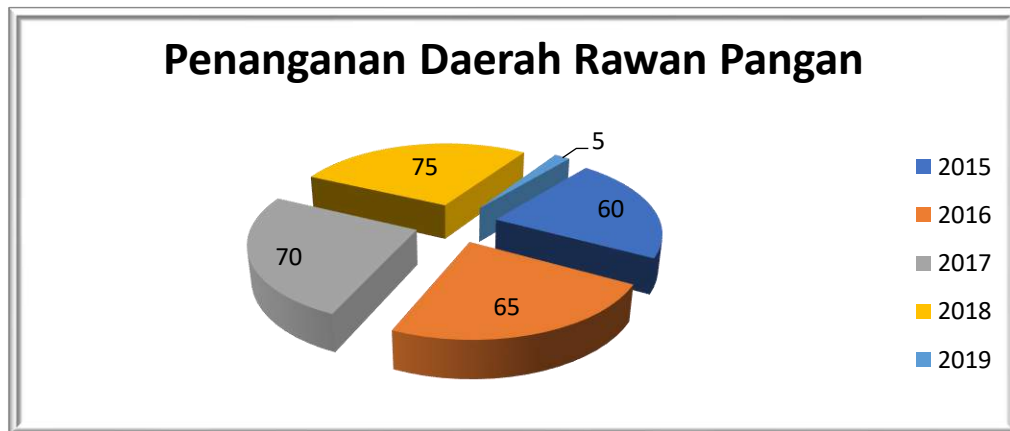
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PPH Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 87,2%, tahun 2016 mengalami peningkatan hingga angka 89,4%, tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan hingga angka 90%, tahun 2018 mengalami kenaikan hingga angka 92%, dan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka 82%. Hal menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Enrekang telah memperhatikan keberagaman makanan sesuai dengan kandungan.

25. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan adalah upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga. Berikut data penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Gambar 2.18  
 Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, 2020

Data di atas dapat dilihat bahwa penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 60%, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 65%, tahun 2017 mengalami kenaikan hingga angka 70%, tahun 2018 naik hingga angka 75%, akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga angka 5%..

26. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Dari data Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kontribusi sebesar Rp, 620.577,2 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2.32  
 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (jutaan Rupiah)	1.273.983,6	1.382.507,9	1.464.750,58	1.794.560,8	1.894.560,8

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020



## 27. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Tabel 2.33  
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kabupaten Enrekang  
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Jutaan Rupiah)	837.720,46	913.529,07	958.912,95	1.065.876,09	1.165.876,09

Sumber: Diasn Pertanian Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Kontribusi di tahun 2015 sebesar Rp. 837.720,46, tahun 2016 sebesar Rp. 913.529,07, tahun 2017 sebesar Rp. 958.912,95, tahun 2018 sebesar Rp. 1.065.876,09 dan tahun 2019 tetap sebesar Rp. 1.065.876,09. Sehingga dari tahun 2015-2019 kenaikannya sebesar Rp. 328.155,63.

## 28. Produksi sektor pertanian

Berdasarkan data Tingkatan Capaian Kinerja Nilai Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa capaian kinerja nilai produksi komoditas bawang merah tertinggi di tahun 2017 dengan jumlah sebesar 1.116.123 ton. Capaian kinerja nilai produksi tertinggi pada kentang terdapat di tahun 2018 dengan jumlah sebesar 2.376 ton. Capaian kinerja nilai produksi cabe yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 22.194 ton. Capaian kinerja nilai produksi yang tertinggi pada komoditas kopi terdapat pada tahun 2018 sebesar 8.672. Capaian kinerja nilai produksi tertinggi kakao terdapat di tahun 2014 dengan jumlah sebesar 7.034 ton.

Tabel 2.34  
Tingkatan Capaian Kinerja Nilai Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten  
Enrekang Tahun 2014-2018

No.	Nama Komoditas	2014 (Ton)	2015 (Ton)	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)
1	Bawang Merah	44.189	58.217	85.194	1.116.123	699.571
2	Kentang	333	250	384,4	3.869	2.376
3	Cabe	846	972	7.551,5	73.568	22.194
4	Kopi	7.916	7.924	6.506	8.584	8.672

No.	Nama Komoditas	2014 (Ton)	2015 (Ton)	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)
5	Kakao	7.034	7.019	5.000	3.289	2.960

Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

29. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Tabel 2.35  
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB (Jutaan Rupia) di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Jutaan Rupiah)	23.798,88	23.782,29	25.700,36	30.300,00	31.300,00

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Jutaan Rupiah) di Kabupaten Enrekang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data tahun 2015 kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sebesar Rp 23,798,88 juta rupiah, mengalami sedikit penurunan di tahun 2016 sebesar Rp 23.782,29 juta rupiah, naik lagi di tahun 2017 sebesar Rp 25.700,36 juta rupiah, tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp 30.300,00 juta rupiah, dan tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.300,00 juta rupiah.

30. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2019 semuanya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa produksi kelompok petani sangat berpengaruh terhadap kemiskinan meningkatnya PDRB di Kabupaten Enrekang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.36  
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB (%) di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020

31. Produktivitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Tabel 2.37  
Produktifitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar  
Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Produktifitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	48	47,58	48,46	48,46	49,46

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa produktifitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Produktifitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar tahun 2015 sebesar 48 Ha, tahun 2016 turun sebesar 47,58 Ha, 2017 mengalami kenaikan sebesar 48,46 Ha, tahun 2018 mengalami stagnasi di angka 48,46 Ha, dan tahun 2019 mengalami peningkatan kembali di angka 49,46 Ha.

32. Cakupan Bina Kelompok Tani

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan sebesar 20,57%. Data tahun 2015 cakupan bina kelompok tani sebesar 45,43%, tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 46,46%, tahun 2017 naik kembali di angka 53%, tahun 2018 stagnan di angka 53%, dan tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga angka 66%. Berikut datanya lengkapnya, yaitu:

Tabel 2.38  
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan bina kelompok tani	45,43	46,46	53	53	66

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020

33. Jumlah Produksi Padi Hasil Kelompok Tani

Tabel 2.39  
Jumlah Produksi Padi Hasil Kelompok Tani (Ton) Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

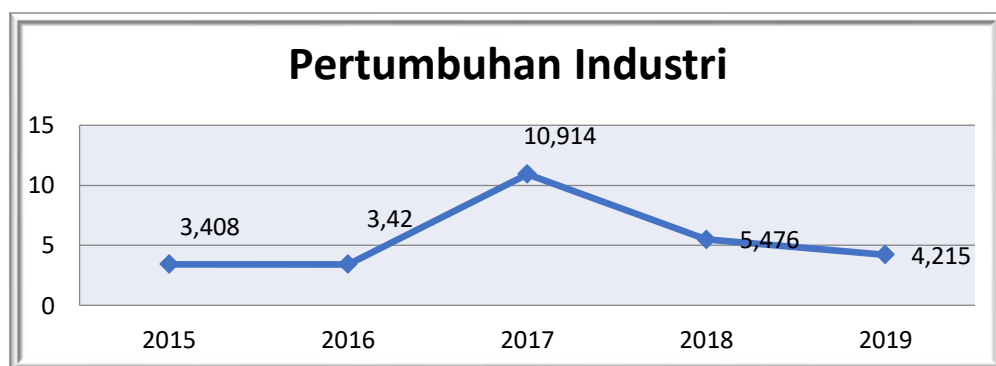
Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Produksi Hasil Kelompok Tani (Ton)	50.150,00	53.740,02	60.806,37	65.824,00	65.824,00

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah produksi padi hasil kelompok tani terus mengalami peningkatan produksi. Jumlah produksi di tahun 2015 sebesar 50.150,00 Ton, naik di tahun 2016 sebesar 53.740,02 Ton, tahun 2017 naik lagi sebesar 60.806,37 Ton, tahun 2018 naik kembali hingga 65.824,00 Ton, dan tahun 2019 mengalami stagnasi jumlah produksi di angka 65.824,00 Ton.

34. Pertumbuhan Industri

Gambar 2.19  
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang, 2020

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa data pertumbuhan industri di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2018 fluktuatif. Tahun 2015 pertumbuhan industri sebesar 3,408%, tahun 2016 mengalami kenaikan sedikit sebesar 3,42%, tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 10,914%, tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan hingga angka 5,476%, dan di tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,215%.

35. Cagar Budaya

Tabel 2.40  
Cagar Budaya Kabupaten Enrekang 2019

Jumlah benda cagar budaya milik pemda	Jumlah bangunan cagar budaya milik pemda	Jumlah struktur cagar budaya milik pemda	Penetapan cagar budaya		Pemanfaatan cagar budaya milik pemda yang sudah dipugar
			Sudah ditetapkan	Belum ditetapkan	
24	108	108	24	8	24

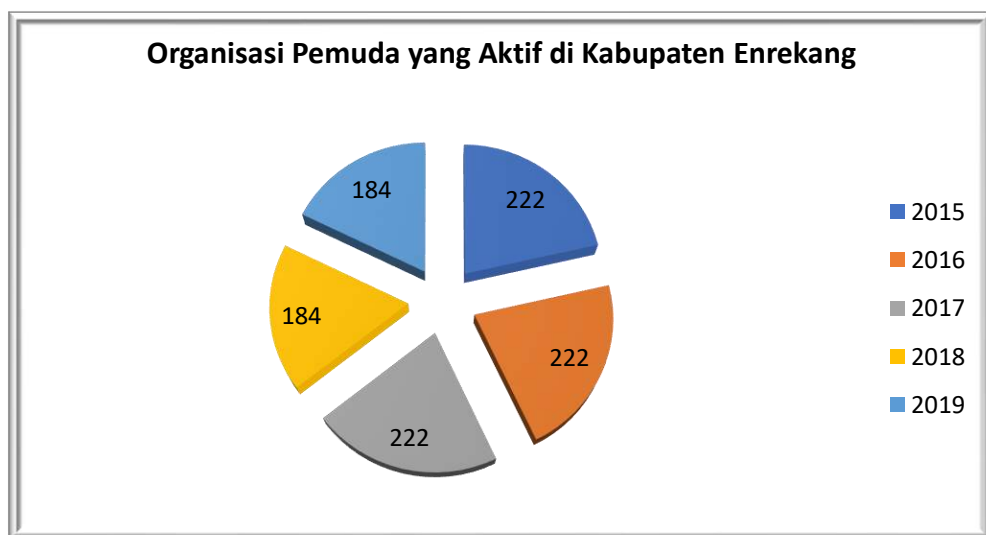
Sumber: SIPD Kabupaten Enrekang 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang memiliki cagar budaya yang harus dipelihara dan dilestarikan. Berdasarkan data tahun 2019 jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh pemda sebanyak 24 buah, jumlah bangunan dan struktur cagar budaya milik pemda masing-masing sebanyak 108 buah, cagar budaya yang sudah ditetapkan sebanyak 24 buah dan yang belum ditetapkan sebanyak 8 buah, dan pemanfaatan cagar budaya milik pemda yang sudah dipugar sebanyak 24 buah.

36. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi kepemudaan merupakan lembaga yang mengakomodir potensi yang dimiliki pemuda, baik masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa bahkan pemuda yang tidak mempunyai pendidikan atau telah melakukan pendidikan formal.

Gambar 2.20  
Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

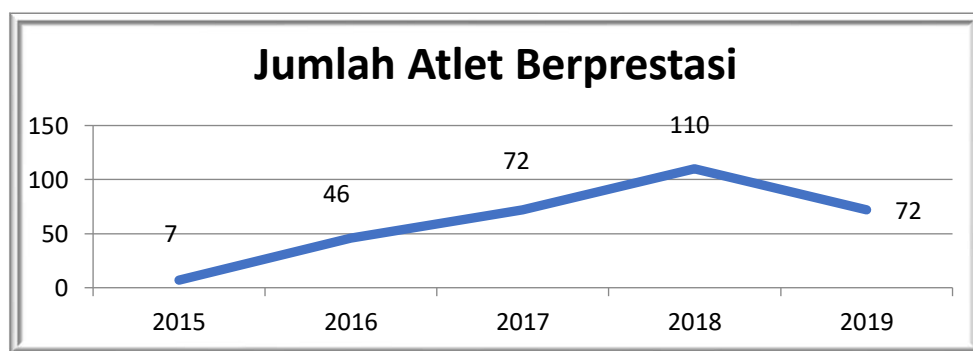


Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 222 organisasi kepemudaan dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 turun tinggal 184 organisasi kepemudaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemuda untuk berhimpun dan membuat organisasi kepemudaan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Enrekang semakin meningkat.

37. Atlet yang Berprestasi

Gambar 2.21  
Jumlah Atlet yang Berprestasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Enrekang, 2020

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa atlet yang berprestasi pada tahun 2015 di Kabupaten Enrekang sebanyak 7 orang, tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 46 orang, kemudian di tahun 2017 terjadi peningkatan drastis jumlah menjadi 72 orang, tahun 2018 terjadi lagi peningkatan jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 110 orang, dan tahun 2019 mengalami penurunan atlet yang berprestasi jumlahnya sebanyak 72 orang. Atas dasar data tersebut, pemerintah Kabupaten Enrekang di harapkan memberikan perhatian khusus kepada atletnya, sehingga dapat lagi berprestasi di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.

2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

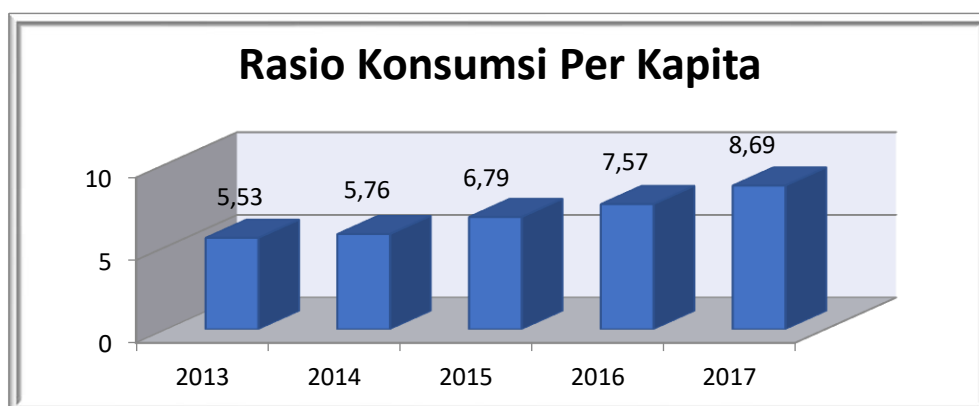
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Fungsi dari data pengeluaran yaitu dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah



tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang dapat berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rasio konsumsi rumah tangga per kapita kabupaten enrekang tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 rasio konsumsi per kapita sebesar 5,53%, tahun 2014 sebesar 5,76%, tahun 2015 sebesar 6,79, tahun 2016 sebesar 7,57, dan tahun 2017 sebesar 8,69%. Sehingga dari tahun 2013-2017 peningkatannya sebesar 3,16%.

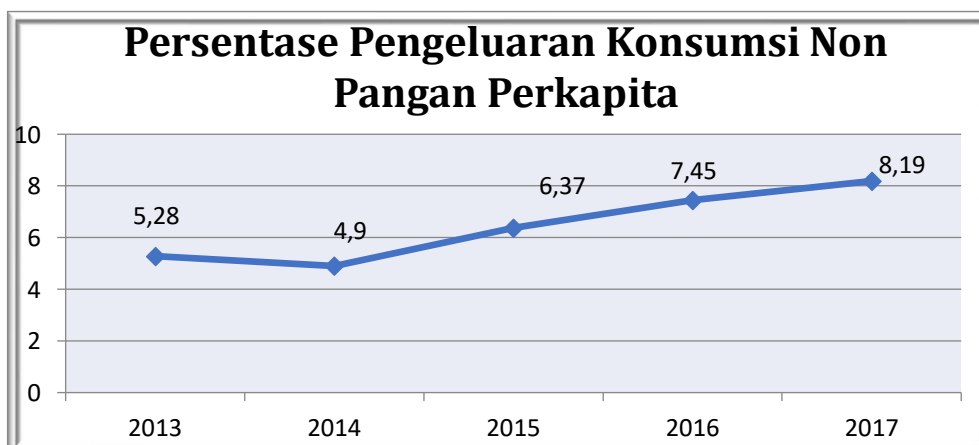
Gambar 2.22  
Rasio Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Gambar 2.23  
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



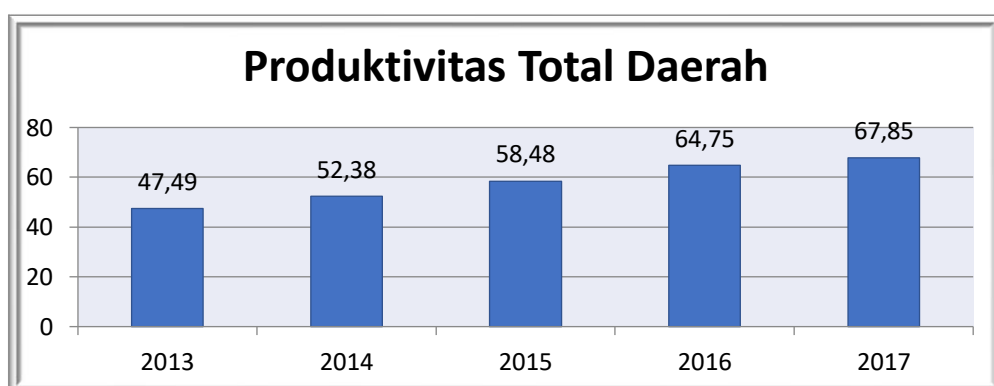
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan sebesar 2,91% dari tahun 2013-2017. Tahun 2013 persentasinya sebesar 5,28%, tahun 2014 mengalami penurunan di angka 4,9%, tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan ke angka 6,37%, tahun 2016 terus mengalami kenaikan hingga angka 7,445%, dan tahun 2017 mengalami peningkatan hingga angka 8,19%. Dengan meningkatnya persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita di Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa semakin terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat, sehingga masyarakat telah melakukan pengeluaran untuk kepentingan non pangan.

### 3. Produktivitas Total Daerah

Tujuan penghitungan produktivitas total daerah adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Berikut data produktivitas total daerah di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Gambar 2.24  
Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



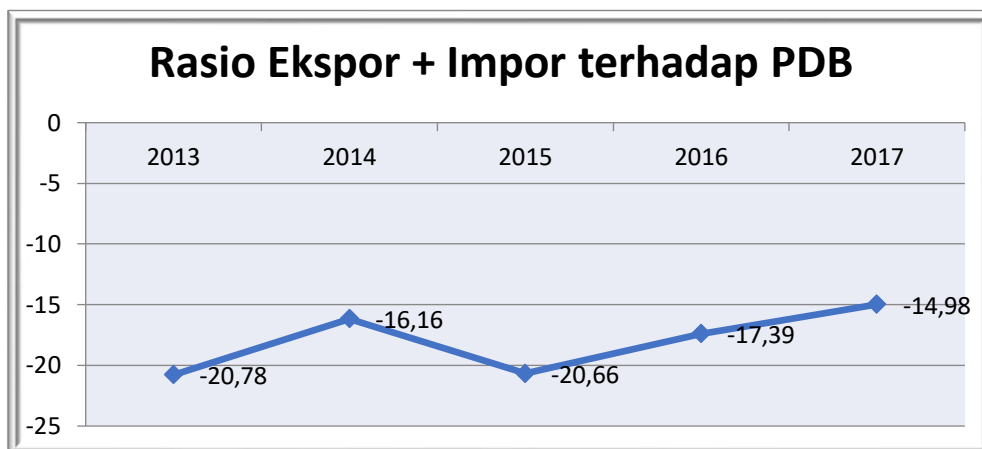
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Pada data di atas menunjukkan bahwa produktivitas total daerah di Kabupaten Enrekang tahun 2013 sebesar 47,49%, tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan sebesar 52,38%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 58,48%, tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan sebesar 64,75%, dan tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 67,85%.

4. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)

Berdasarkan data rasio ekspor + impor terhadap PDB di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang negatif, dari tahun 2013 sebesar -20,78%, tahun 2014 sebesar 16,16%, tahun 2015 sebesar 20,66%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan pada angka -17,39%, dan tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan di angka -14,98%.

Gambar 2.25  
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017

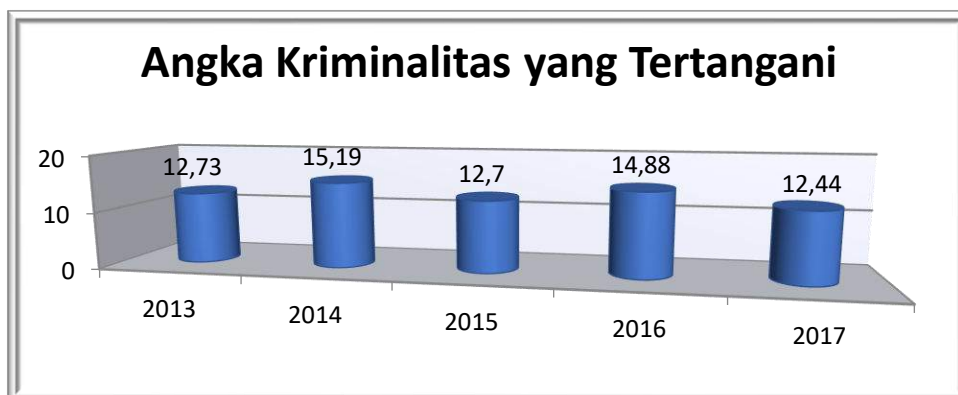


Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

5. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kriminalitas adalah tindakan individu atau seseorang, kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana, sehingga memengaruhi keseimbangan sosial dalam masyarakat. Angka kriminalitas suatu daerah harus di turunkan atau di tekan, karena dapat berdampak kepada kondisi ekonomi, psikologis, keamanan masyarakat. Berikut data angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Gambar 2.26  
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



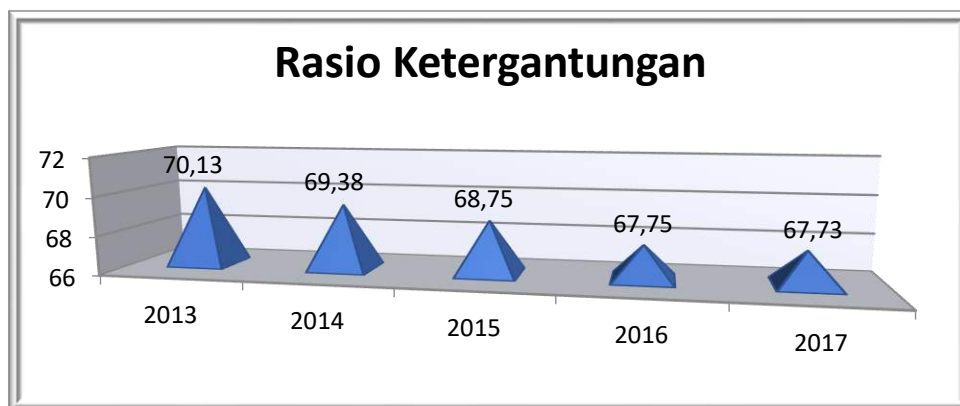
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Enrekang fluktuatif. Angka kriminalitas yang tertangani tahun 2013 sebesar 12,73%, mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 15,19%, terjadi penurunan di tahun 2105 sebesar 12,7%, mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 sebesar 14,88%, dan terjadi penurunan kembali di tahun 2017 sebesar 12,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan harus berperan aktif dalam usaha menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Enrekang.

6. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi presentasi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Presentasi rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk. Berikut ini data rasio ketergantungan di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017, yaitu:

Gambar 2.27  
Rasio Ketergantungan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Data di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Enrekang dari tahun 2013-2017 terus mengalami penurunan sebesar 2,4%. Rasio ketergantungan Kabupaten Enrekang tahun 2013 sebesar 70,13%, tahun 2014 turun sebesar 69,38%, tahun 2015 sebesar 68,75, tahun 2016 sebesar 67,75%, turun hingga tahun 2017 sebesar 67,73%.

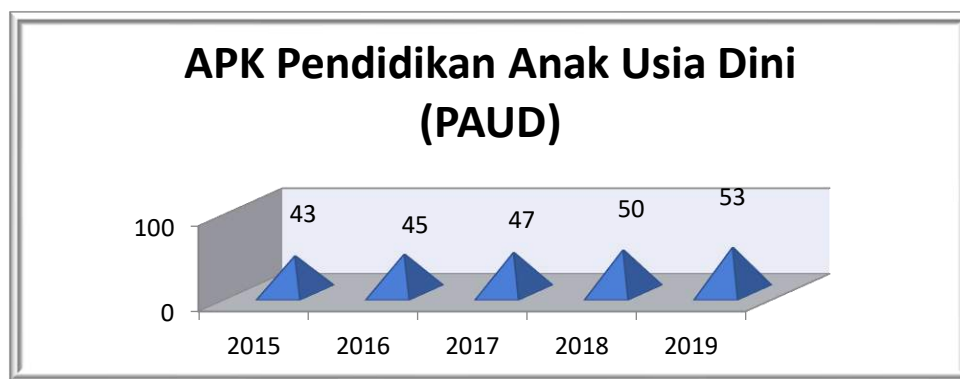
2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu indikator penilaian pelayanan umum anak usia dini dengan menghitung jumlah murid yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK)/RA/penitipan anak yang berusia 4-6 tahun. Besaran dari data tersebut mengidentifikasi jumlah anak yang berusia 4-6 tahun mendapatkan pendidikan dasar.

Gambar 2.28  
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa APK pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 sebanyak 43%, tahun 2016 mengalami kenaikan hingga angka 45%, tahun 2017 naik lagi hingga angka 47%, tahun 2018 mengalami kenaikan hingga angka 50%, dan pada tahun 2019 naik lagi hingga angka 53%.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tanpa melihat usianya terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Berikut data angka partisipasi kasar Kabupaten Enrekang berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2018, yaitu:

Tabel 2.41  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang 2015-2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	103	103	103	103	103
SMP/MTs	100	100	100,02	100,02	100,03

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menurut jenjang pendidikan, yaitu APK pada jenjang SD/MI dari tahun 2015-2019 stagnan di angka 103%, SMP/MTs tahun 2015 dan 2016 sebesar 100%, tahun 2017 dan 2018 sebesar 100,02%, dan tahun 2019 sebesar 100,3%.

### 3. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berikut data APM Kabupaten Enrekang Tahun 2018 berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu:

Tabel 2.42  
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang 2018

Jenjang Pendidikan	APM		
	L	P	L+P
SD	98,84	100	99,39
SMP	82,53	80,40	81,42
SMA	55,08	83,95	67,90

Sumber: Diknas Kabupaten Enrekang, 2018

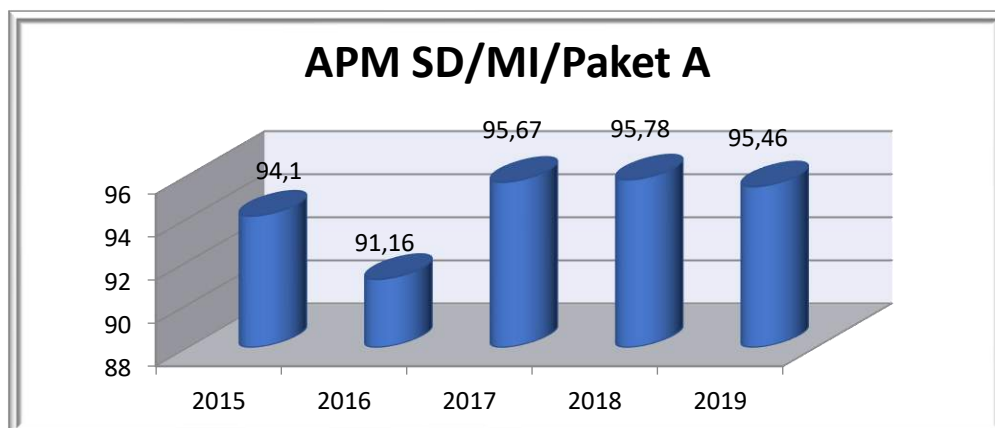
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Enrekang tahun 2018 menurut jenjang pendidikan, yaitu APM pada jenjang pendidikan SD sebesar 99,39%, APM jenjang pendidikan SMP sebesar 81,42%, dan APM jenjang pendidikan SMA sebesar 67,90%.

### 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

APM SD/MI/Paket A adalah partisipasi sekolah penduduk pada usia sekolah SD/MI/Paket A dengan usia 7-12 tahun. Berdasarkan data angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebanyak 94,1%, mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 91,16%, tahun 2017 mengalami kenaikan hingga angka 95,67%, tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan hingga angka 95,78%, dan tahun 2019 sebesar 95,46%. Berikut data APM SD/MI/Paket A Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017, yaitu:



Gambar 3.29  
 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

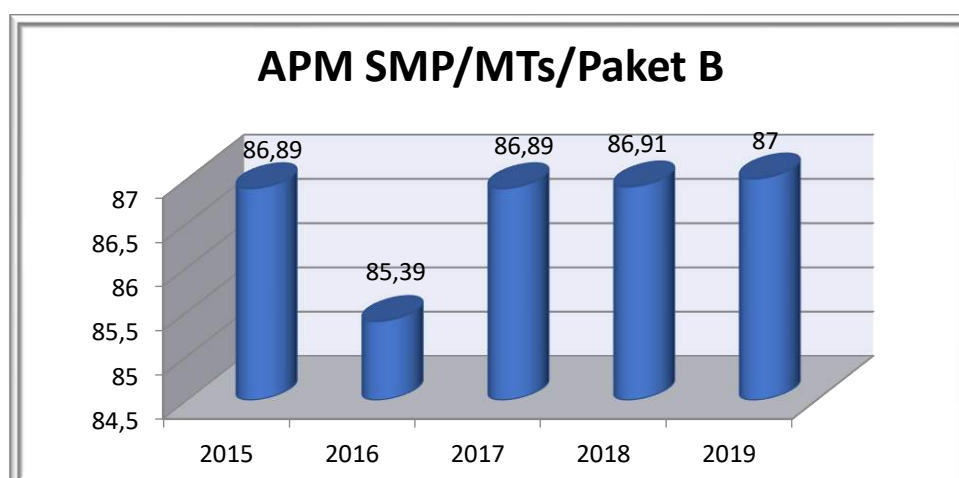


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

APM SMP/MTs/Paket B merupakan persentase angka partisipasi penduduk usia sekolah 13-15 tahun dengan jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. Berdasarkan data APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Enrekang Tahun 2015 sebesar 86,89%, tahun 2016 mengalami penurunan hingga angka 85,39%, tahun 2017 mengalami kenaikan hingga angka 86,89%, tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan 86,91%, dan tahun 2019 naik sebesar 87%. Berikut data APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019, yaitu:

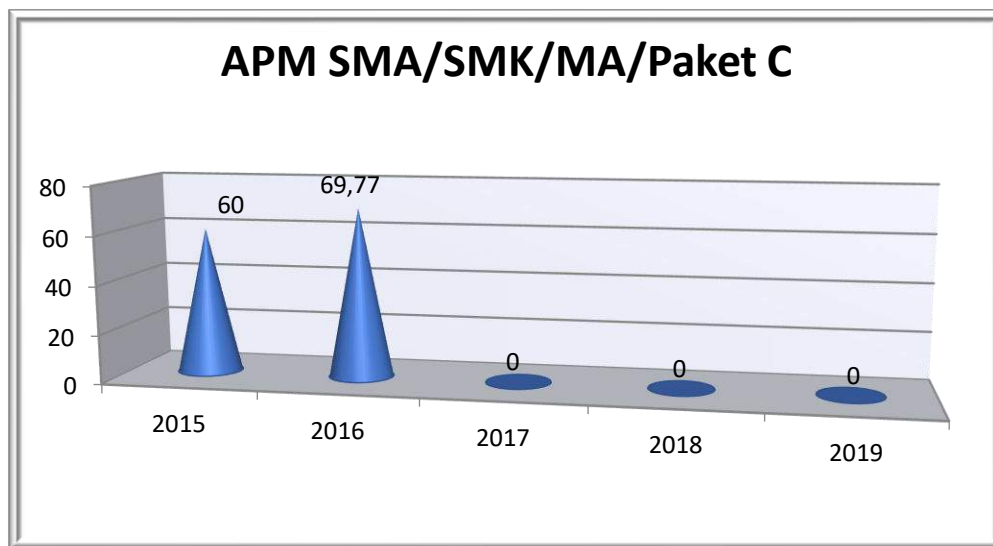
Gambar 2.30  
 APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Gambar 2.31  
APM SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

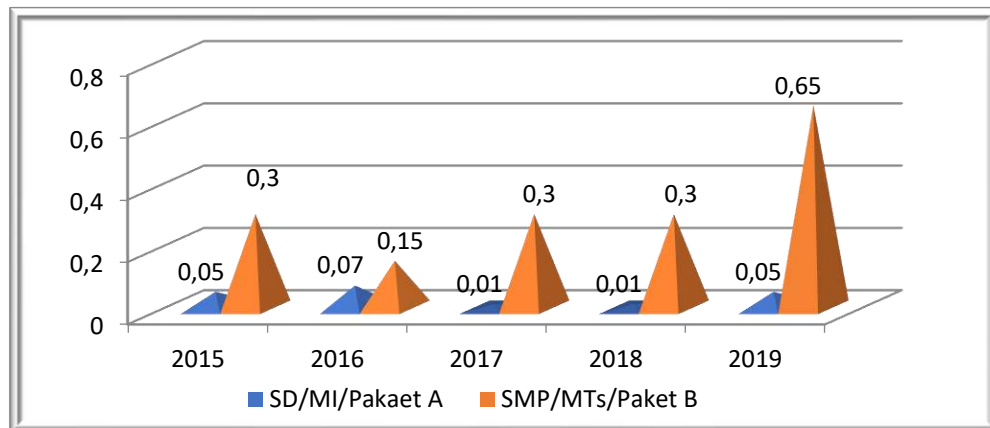
Berdasarkan data APM SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 60%, 2016 mengalami peningkatan sebesar 69,77%, dan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kewenangan urusan pendidikan tingkat SMA/SMK/MA/Paket C berada di provinsi sehingga pemerintah Kabupaten Enrekang tidak memiliki data.

7. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A dan SMP/MTs Paket B

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif, tahun 2015 sebesar 0,05%, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,07%, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,01%, tahun 2018 mengalami stagnan di angka 0,01, dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,05%

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Paket B di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 0,3%, mengalami penurunan di tahun 2016 di angka 0,15%, dan naik di tahun 2017 sebesar 0,30%, tahun 2018 mengalami stagnan di angka 0,30%, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2019 hingga mencapai 0,65%. Berikut data lengkap Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs Paket B di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019, yaitu:

Gambar 2.32  
APS di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



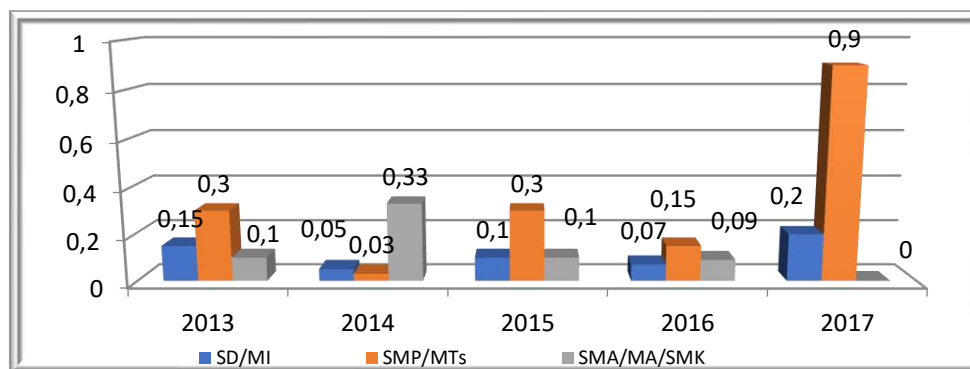
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

#### 8. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

Angka putus sekolah merupakan kelompok anak usia sekolah kemudian tidak bersekolah lagi atau tidak tamat sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Kemudian usia anak yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Hal ini digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang pendidikan, untuk melihat keterjangkauan pendidikan, dan pemerataan pendidikan.

Berdasarkan gambar di bawah dapat kita lihat bahwa angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang fluktuatif dari tahun 2013-2017. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2013 sebesar 0,15% dan tahun 2017 sebesar 0,2%. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2013 sebesar 0,3% dan tahun 2017 terjadi kenaikan yang sangat drastis sebesar 0,9%. Jenjang SMA/MA/SMK tahun 2013 sebesar 0,1% dan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,09%. Hal ini menunjukkan terjadi kondisi yang kurang baik dari setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Enrekang, walaupun angkanya masih di bawah 1%. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Enrekang berkomitmen untuk menurunkan angka putus sekolah melalui kebijakan-kebijakan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini gambar angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun 2013-2017, yaitu:

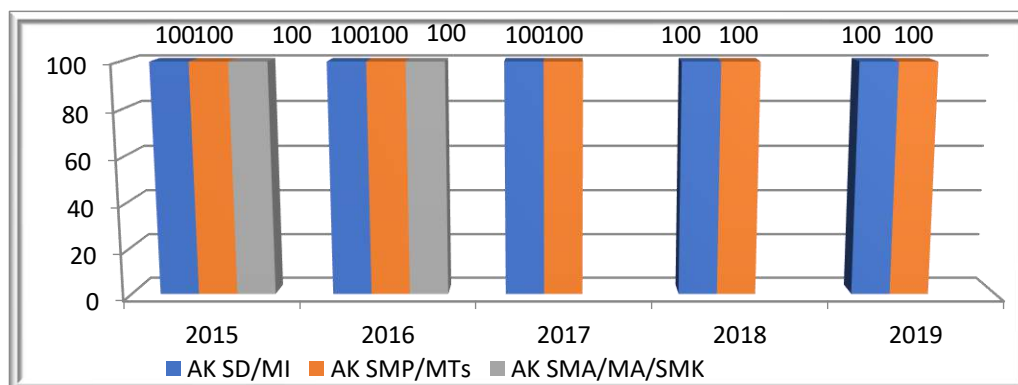
Gambar 2.33  
 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang 2013-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 dan Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, 2018

9. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

Gambar 2.34  
 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



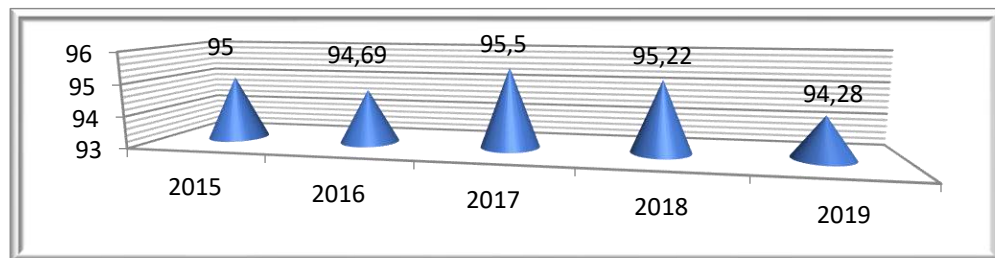
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan jenjang pendidikan SD/Mi, dan SMP/MTs, di Kabupaten Enrekang mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 semuanya 100%. Data SMA/MA/SMK tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 semuanya 100%, kemudian data 2017 sampai dengan 2019 kewenangan sudah berada di provinsi.

10. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan merupakan persentase jumlah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Berikut ini data mengenai persentase angka melanjutkan di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:

Gambar 2.35  
Angka Melanjutkan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



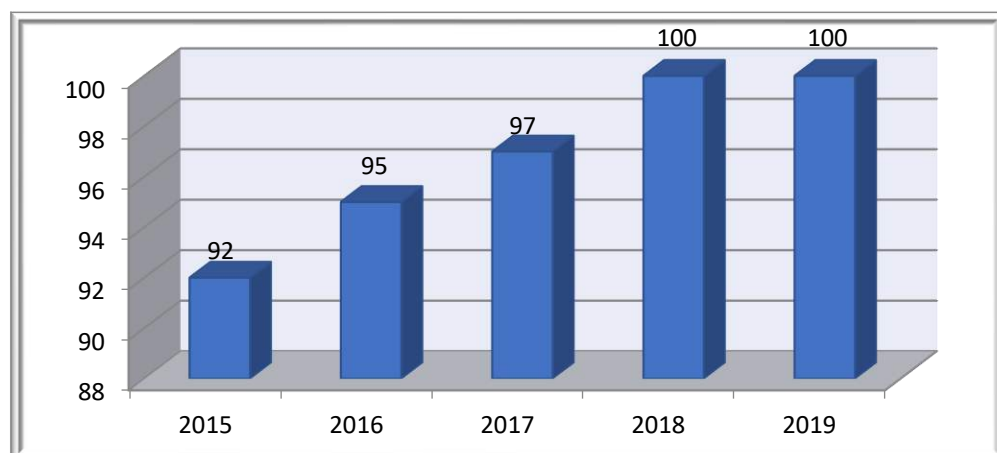
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

Pada data di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan jenjang pendidikan di tahun 2015 sebesar 95%, tahun 2016 turun di angka 94,69%, tahun 2017 naik kembali di angka 95,5%, tahun 2018 mengalami penurunan sedikit di angka 95,22%, dan tahun 2019 terus mengalami penurunan di angka 94,28%.

#### 11. Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kondisi bangunan SD/MI di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi bangunan SD/MI tahun 2015 yang dinyatakan dalam kondisi baik sebesar 92%. Tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai angka 95%, tahun 2017 meningkat kembali di angka 97%, tahun 2018 meningkat di angka 100%, dan tahun 2019 mengalami stagnan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memperbaiki bangunan SD/MI dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan di level SD/MI.

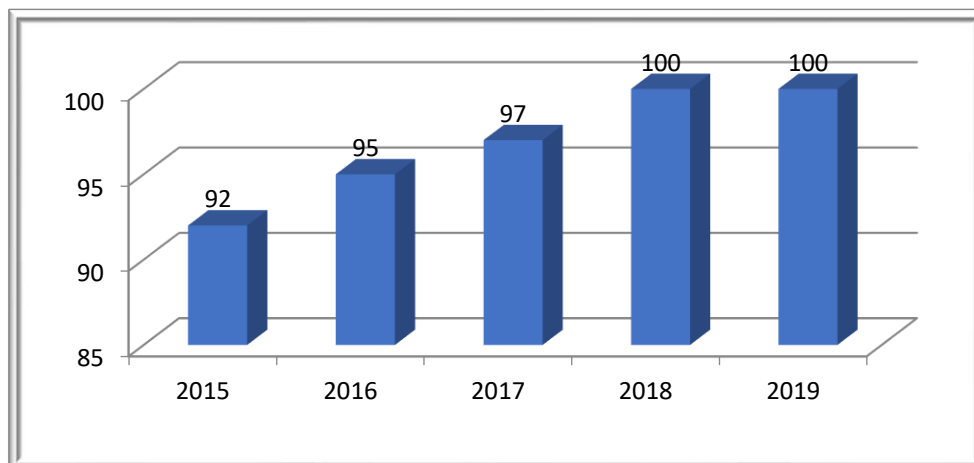
Gambar 2.36  
Kondisi Bangunan SD/MI Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Gambar 2.37  
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

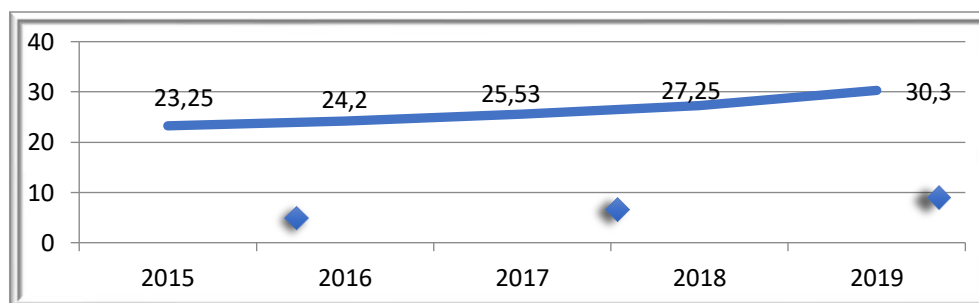


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

Pada data Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menunjukkan bahwa tahun 2015 sebesar 92%, tahun 2016 naik di angka 95%, tahun 2017 mengalami peningkatan di angka 97%, tahun 2018 naik menjadi 100%, dan 2019 tetap di angka 100%.

13. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar

Gambar 2.38  
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

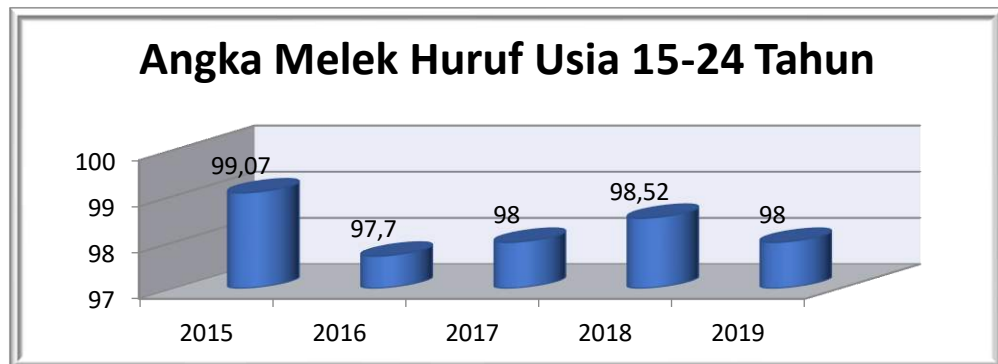
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rasio antara guru dan murid di Kabupaten Enrekang terus meningkat. Pada tahun 2015 rasio guru terhadap murid pendidikan dasar dan menengah sebesar 23,25%, tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan di angka 24,2%, tahun 2017 mengalami peningkatan di angka 25,53%, tahun 2018 meningkat di angka 27,25%, dan tahun 2019 meningkat hingga angka 30,3%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru di



Kabupaten Enrekang masih kurang, semakin tinggi perbandingannya maka guru tidak dapat mengajar dengan efektif.

14. Penduduk yang Berusia 15-24 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Gambar 2.39  
 Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15-24 Tahun di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



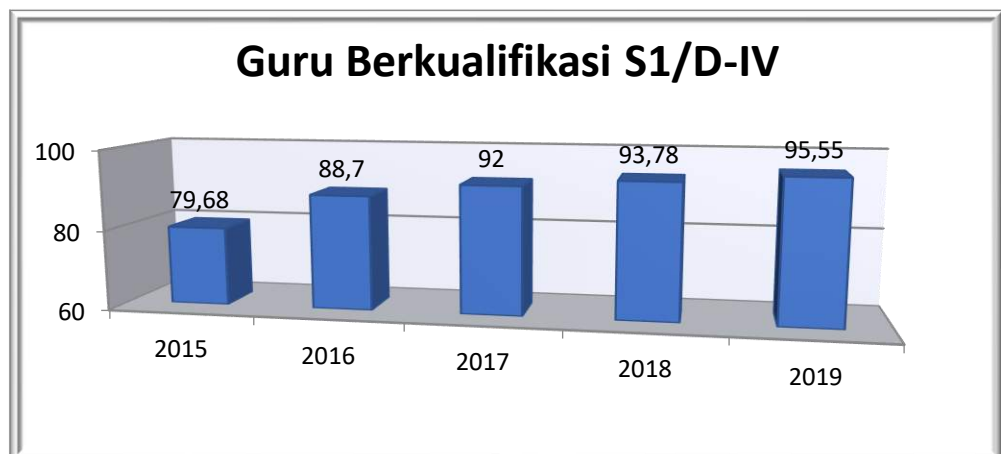
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

Pada data menunjukkan bahwa angka melek huruf usia 15-24 tahun di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 99,07%, tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 97,7%, tahun 2017 mengalami kenaikan di angka 98%, tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan menjadi 98,52%, dan tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 98%.

15. Guru Berkulifikasi S1/D-IV

Pada gambar di bawah dapat kita lihat guru yang mempunyai kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 dapat dikatakan baik karena dari tahun ke tahun terus ada peningkatan. Tahun 2015 guru berkualifikasi S1/D-IV 79,68%, tahun 2016 meningkat menjadi 88,7%, tahun 2017 sebesar 92%, tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah menjadi 93,78%, dan tahun 2019 sebesar 95,55%.

Gambar 2.40  
Guru Berkulifikasi S1/DIV di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020

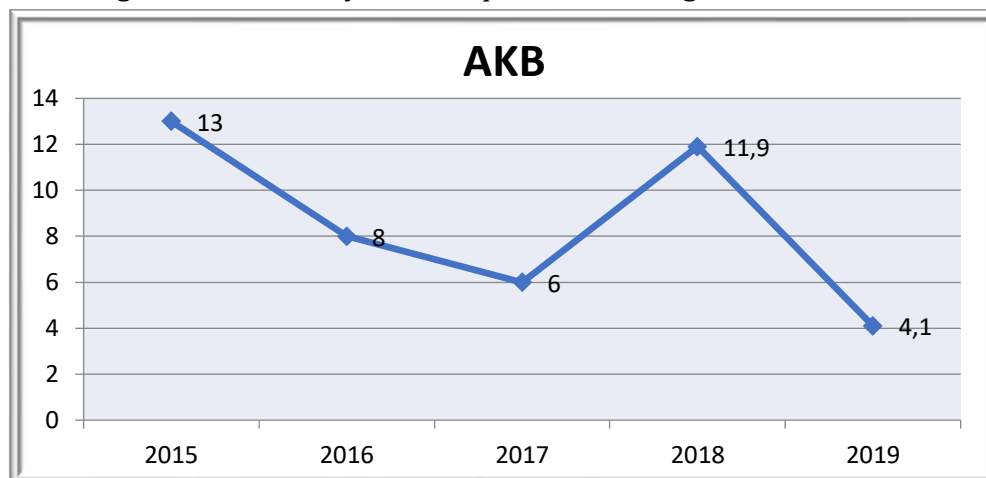
## B. Kesehatan

### 1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi yang berusia 0 tahun per 1.000 kelahiran. AKB mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tuanya dan berhubungan juga dengan pengetahuan dan kondisi ekonomi orang tuanya. Penyakit yang biasanya menjadi penyebab kematian pada bayi adalah komplikasi kelahiran infeksi neonatal, asfiksia kelahiran, malgizi, diare, pneumonia, malaria, dan campak.

Kabupaten Enrekang juga tidak luput dari kejadian kematian bayi, berdasarkan data tahun 2015 angka kematian bayi sebanyak 13% saja, tahun 2014 mengalami penurunan mencapai 8%, tahun 2017 turun lagi menjadi 6%, tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan di angka 11,9%, dan tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan di angka 4,1%. Penyebab AKB di Kabupaten Enrekang adalah masalah sosial dan ekonomi yang berdampak kepada kurangnya pengetahuan atau kepedulian orang tua terutama ibu tentang kehamilan, kesehatan, dan gizi yang dibutuhkan bayi selama berada di dalam kandungan ibunya. Berikut gambar tabelnya, yaitu:

Gambar 2.41  
 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

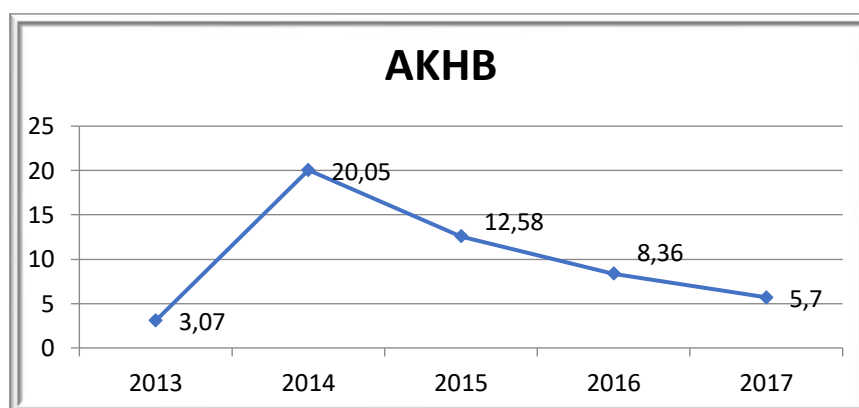


Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Pada gambar di bawah menunjukkan bahwa AKHB di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuatif. AKHB di tahun 2013 sebesar 3,07%, tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan di angka 20,05%, akan tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan di angka 12,58%, tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 8,36%, dan tahun 2017 terus turun mencapai angka 5,7%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bayi.

Gambar 2.42  
 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



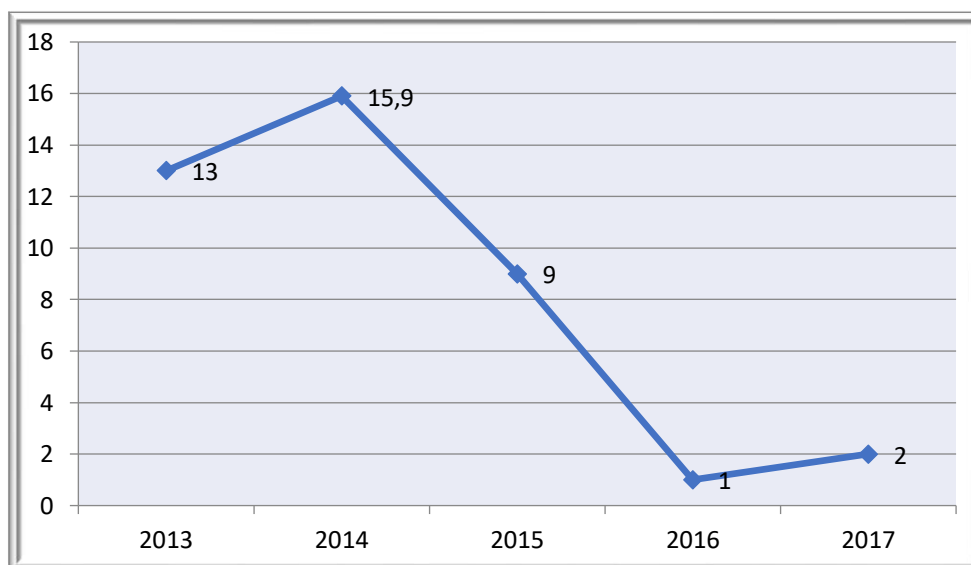
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

3. Angka Kematian Neonatal

Angka kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Neonatal = Neonatal Mortality Rate : Jumlah kematian bayi di bawah usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu

(biasanya 1 tahun). Berikut ini data angka kematian neonatal di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017, yaitu:

Gambar 2.43  
 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017

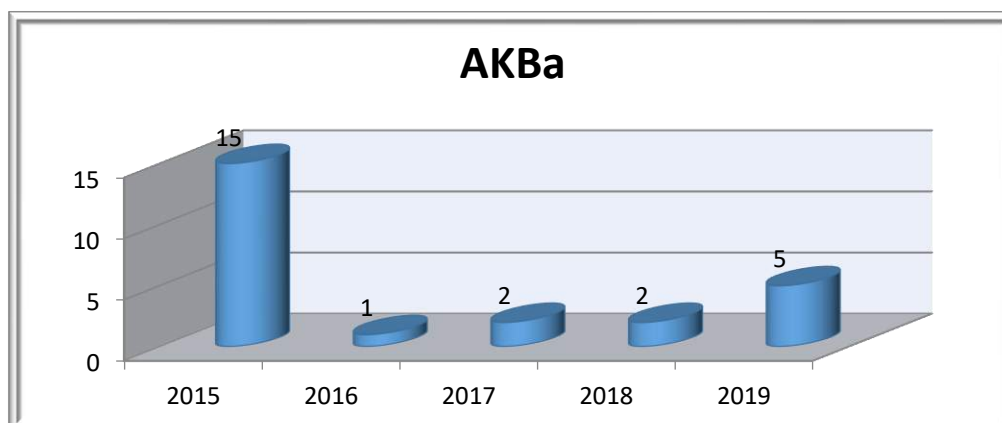


Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kematian neonatal Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017 terjadi fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 13%, tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 15,9%, tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 9%, tahun 2016 kembali turun hingga mencapai angka 1%, dan tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai angka 2%. Data ini memperlihatkan keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menekan angka kematian neonatal.

#### 4. Angka Kematian Balita (AKBa)

Gambar 2.44  
 Angka Kematian Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

Angka kematian balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun per satu tahun per 1.000 anak umur yang sama pada tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa terkait dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan konsial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan tempat tinggalnya.

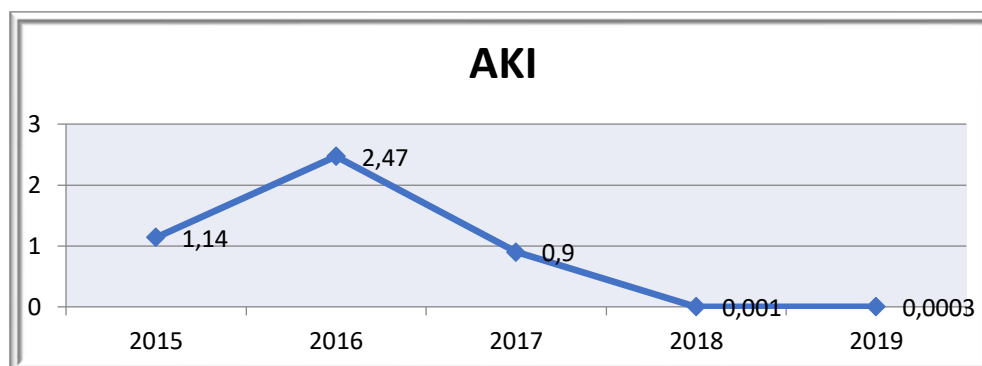
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang telah berhasil menurunkan angka kematian balita (AKBa), walaupun di tahun 2015 paling banyak 15%, tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 1%, tahun 2017 mengalami peningkatan 2%, tahun 2018 tetap di angka 2%, dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 5%. Penyebab kematian balita di Kabupaten Enrekang paling banyak terjangkau penyakit pneumonia dan diare.

#### 5. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu yang diakibatkan oleh proses kehamilan, persalinan dan setelah bersalin per 100.000 kelahiran hidup pada periode satu tahun. AKI mempunyai relevansi dengan perilaku hidup sehat, kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, kondisi lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan pada saat melahirkan, masa nifas.

Kabupaten Enrekang tidak lepas dari kejadian kematian ibu, baik pada masa kehamilan, persalinan, dan pada masa nifas. Penyebab kematian ibu rata-rata disebabkan oleh pendarahan, penyakit jantung dan gagal ginjal. Dari tahun 2015 sebesar 1,14%, tahun 2016 meningkat mencapai 2,47%, tahun 2017 turun mencapai 0,9%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali di angka 0,001%, dan tahun 2019 turun kembali di angka 0,0003%. Berdasarkan data tersebut pemerintah Kabupaten Enrekang dan pihak terkait masih perlu memberikan kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan dan menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Berikut ini data Kematian Ibu di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Gambar 2.45  
 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

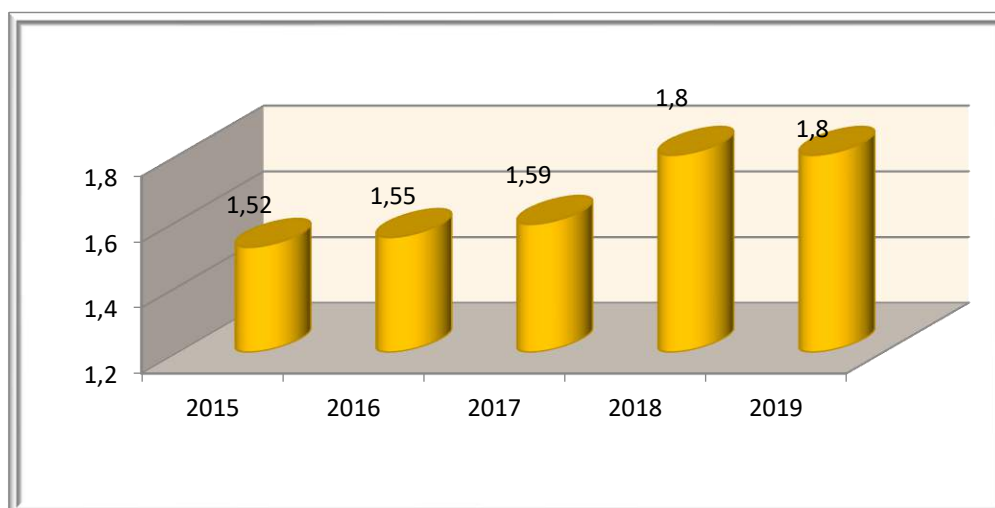


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio posyandi per satuan balita di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 1,52%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan di angka 1,55%, tahun 2017 mengalami peningkatan di angka 1,59%, tahun 2018 naik kembali di angka 1,8%, dan tahun 2019 tetap di angka 1,8%. Hal itu menunjukkan bahwa masih perlu perbaikan pelayanan balita di posyandu. Pemerintah juga diharapkan untuk menambah jumlah posyandu dan fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatannya, agar pelayanan kepada balita di posyandu lebih baik lagi dan rasio posyandu per satuan balita dapat meningkat lagi. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu:

Gambar 2.46  
 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

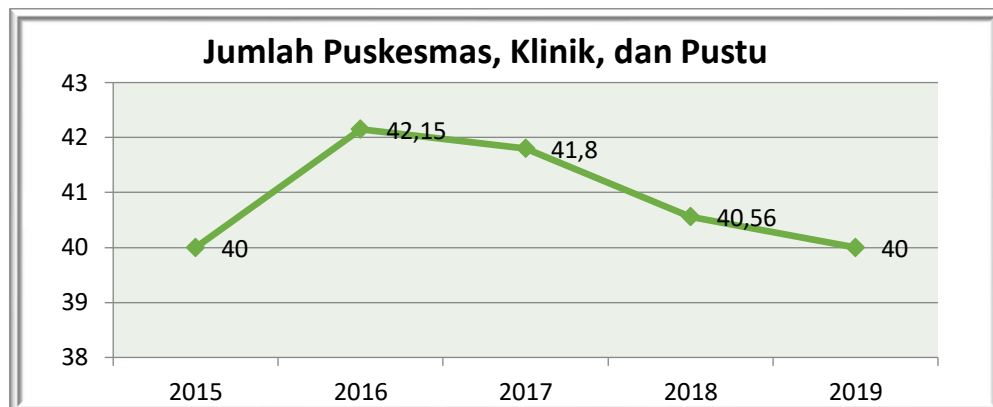


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020



7. Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu

Gambar 2.47  
Rasio Puskemas, Klinik, dan Pustu di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



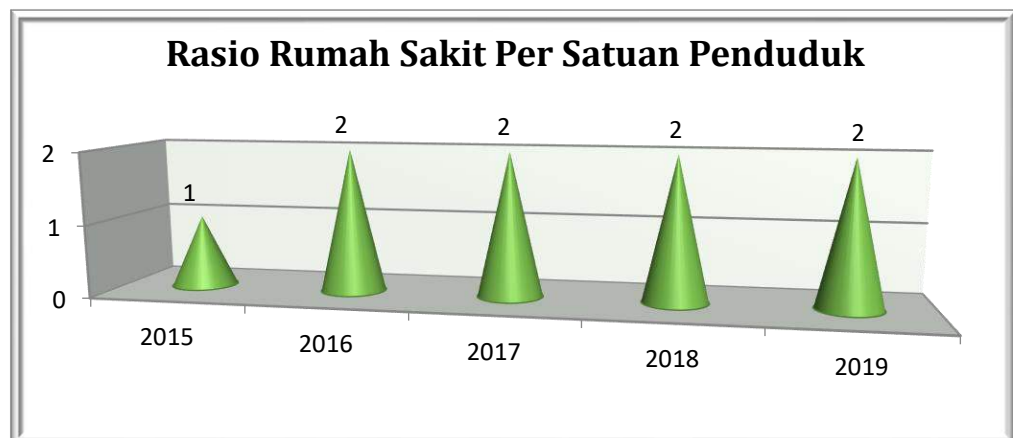
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

Puskesmas, klinik, dan pustu merupakan tempat pelayanan kesehatan yang menjadi gaerda terdepan. Semakin banyak puskesmas, klinik, dan pustu yang dibangun oleh pemerintah atau badan hukum, makan akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Data rasio puskesmas, klinik, dan pustu di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 sebesar 40%, kemudian di tahun 2016 naik mencapai 42,15% dan sekaligus rasio tertinggi, tahun 2017 mengalami penurunan sampai dengan 41,8%, tahun 2018 mengalami penurunan di angka 40,56%, dan tahun 2019 turun kembali di angka 40%.

8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Setiap daerah membutuhkan rumah sakit baik itu tipe A, B, C, dan D untuk melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memuaskan pasien. Berdasarkan data SIPD tahun 2019 Kabupaten Enrekang hanya memilik 1 rumah sakit tipe C dan 1 rumah sakit tipe D. jumlah ini dianggap kurang dengan luas wilayah Kabupaten Enrekang sebesar 1.786,01 km<sup>2</sup> dengan 12 kecamatan, jumlah penduduk sebesar 242.253 orang, dan kontur topografi yang berbukit. Berikut ini data rasio rumah sakit per satuan penduduk, yaitu:

Gambar 2.48  
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa rasio rumah sakit tahun 2015 dengan angka 1, tahun 2016 samapai dengan tahun 2019 naik dengan angka 2.

9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan data rasio dokter per satuan penduduk di Kecamatan Enrekang dari tahun 2015-2019 terjadi fluktuatif berdasarkan jumlah dokter dan jumlah penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 11%, tahun 2016 naik di angka 11,40%, tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan hingga angka 24,59%, tahun 2018 mengalami penurunan hingga angka 22,15%, dan tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan hingga angka 22,93%. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Enrekang untuk terus menambah jumlah dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi karena laju pertumbuhan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Sehingga masyarakat dapat terlayani oleh dokter.

Tabel 2.43  
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

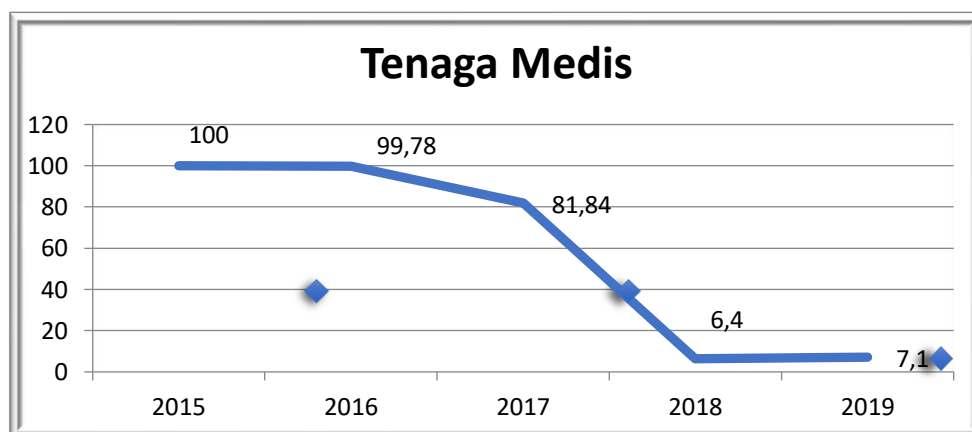
Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Jumlah Dokter</b>	Orang	22	23	50	52	52
<b>Jumlah Penduduk</b>	Orang	199.998	201.614	203.320	234.797	226.776
<b>Rasio dokter per satuan penduduk</b>		11	11,40	24,59	22,15	22,93

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Enrekang, 2020

## 10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Tenaga medis merupakan tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu terbaik dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa rasio tenaga medis tahun 2015 sebesar 100%, kemudian turun sedikit di tahun 2016 hingga angka 99,78%, tahun 2017 turun kembali di angka 81,84%, tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga angka 6,4%, dan tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan di angka 7,1%. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara penambahan jumlah penduduk dengan tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Enrekang.

Gambar 2.49  
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang  
Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

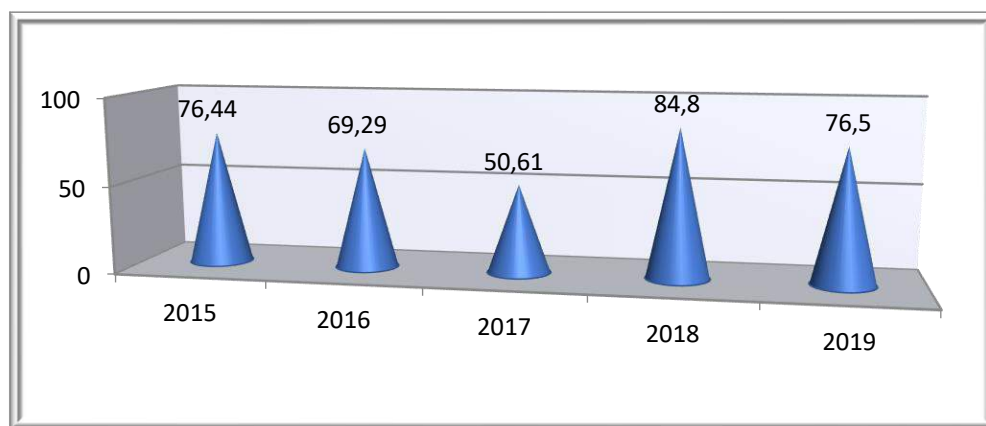
## 11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Impian dari ibu hamil adalah kesehatan bagi si bayi beserta ibunya, akan tetapi tidak semua kehamilan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Komplikasi dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah kehamilan. Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam ibu beserta bayinya. Komplikasi kehamilan yang paling umum adalah tekanan darah tinggi, keguguran, pre-eklamsia, anemia, kelahiran prematur, diabetes gestasional, dan infeksi saluran kemih. Ibu bayi di Kabupaten Enrekang juga banyak yang mengalami komplikasi kebidanan dan telah di tangani.

Berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa rasio komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 76,44%,

tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 69,29%, tahun 2017 mengalami penurunan yang drastis menjadi 50,61%, tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan di angka 84,8%, dan tahun 2019 mengalami penurunan di angka 75,5%. Data ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan bidan dalam menangani kasus komplikasi kebidanan harus di tingkatkan dan jumlah bidan juga perlu di tambah, dan tidak kalah pentingnya lagi perlu perbaikan dan penambahan fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk melayani ibu hamil.

Gambar 2.50  
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

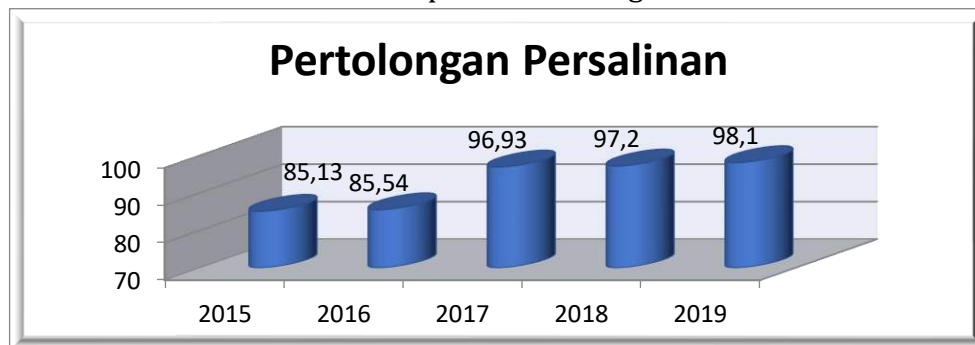


Sumber: Diasn Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

## 12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan atau bergerak positif. Pertolongan persalinan di tahun 2015 sebesar 85,13%, tahun 2016 mengalami peningkatan di angka 85,54%, tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan hingga angka 96,93%, tahun 2018 mengalami peningkatan 97,20%, dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 98,10%. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Enrekang tetap berusaha mencapai angka yang maksimal atau 100% dengan cara memperbaiki mutu pelayanan pasien.

Gambar 2.51  
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



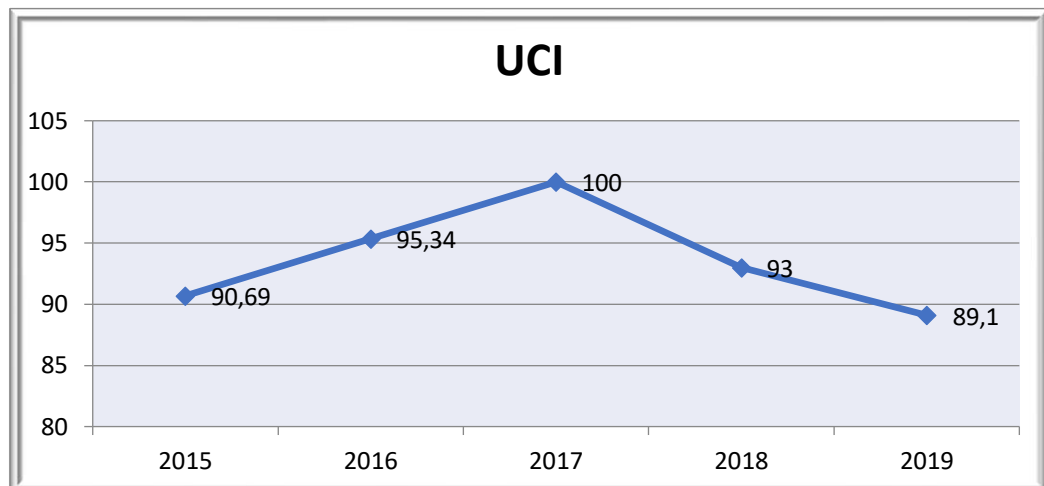
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

### 13. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

*Universal Child Immunization* (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar lengkap pada semua bayi. Indikator penilaian UCI, yaitu (a) DPT-1: jangkauan/akseibilitas pelayanan, (b) hepatitis B1 < 7 hari: jangkauan/aksesibilitas pelayanan, (c) campak: tingkat perlindungan (efektivitas program), (d) tingkat perlindungan (efektivitas program, dan (e) *drop out* DPT-1 campak: efisiensi/manajemen program.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 90,69%, tahun 2016 mengalami kenaikan 95,34%, tahun 2017 telah mencapai 100%, tahun 2018 mengalami penurunan hingga angka 93%, dan tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga angka 89,1%. Data ini menunjukkan bahwa bayi Kabupaten Enrekang telah mendapatkan pelayanan imunisasi dasar yang lengkap melalui tempat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, dan posyandu, dan klinik kesehatan. Berikut datanya dalam bentuk diagram, yaitu:

Gambar 2.52  
Cakupan UCI di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

#### 14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk merupakan keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada  $<-3SD$ . Balita yang terkena gizi buruk harus segera ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Enrekang juga tidak lepas dari kejadian balita gizi buruk, akan tetapi pemerintah Kabupaten telah melakukan perawatan.

Berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 seluruhnya telah tertangani oleh pemerintah Kabupaten Enrekang melalui perangkat yang dimiliki Dinas Kesehatan dengan persentase 100%. Berikut datanya, yaitu:

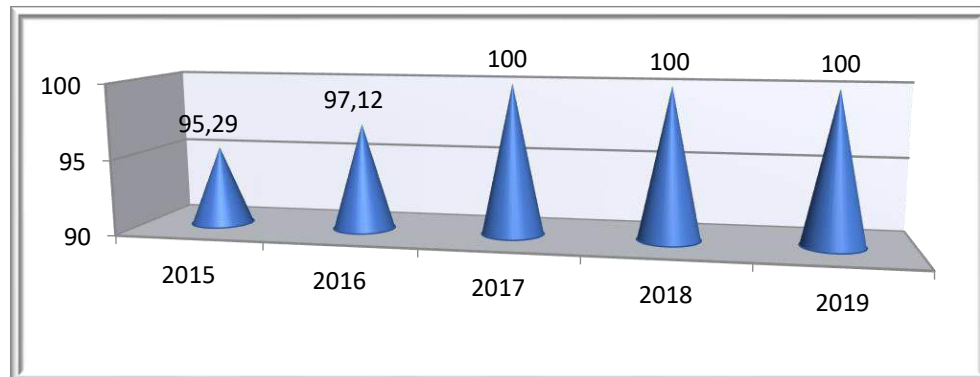
Tabel 2.44  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	10	9	5	5	7
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Anak	10	9	5	5	7
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

15. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Gambar 2.53  
 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

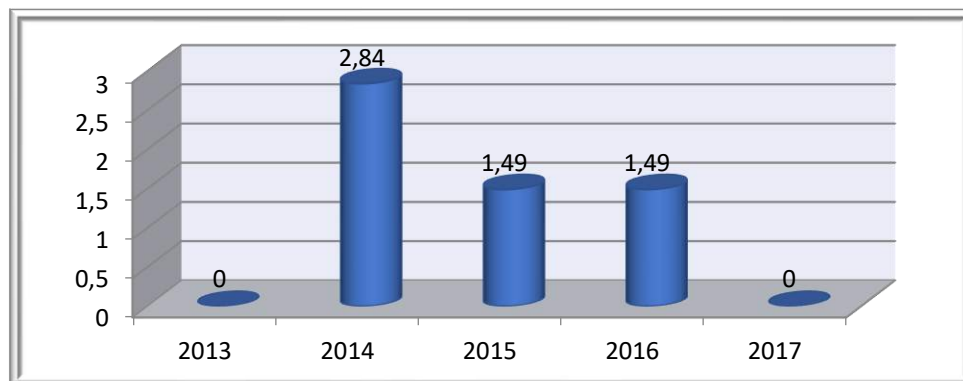
Imunisasi campak merupakan salah satu jenis imunisasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit campak. Campak adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus dan dapat menular melalaui udara. Imunisasi campak wajib di berikan kepada anak hingga berumur 5 tahun. Di kabupaten Enrekang, anak yang berusia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak tahun 2015 sebesar 95,29%, tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 97,12%, dan tahun 2017 sampai dengan 2019 mendapatkan nilai sempurna 100%.

16. Non Polio AFP

AFP adalah kelumpuhan flaccid (layuh) tanpa penyebab lain pada anak kurang dari 15 tahun. Flaccid paralysis terjadi pada kurang dari 1% dari infeksi poliovirus dan lebih dari 90% infeksi tanpa gejala atau dengan demam tidak spesifik. Meningitis aseptik muncul pada sekitar 1% dari infeksi. AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu. Data Non Polio AFP Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Tahun 2013 tidak ditemukan kasus Non Polio AFP, tahun 2014 melonjak menjadi 2,84%, tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan ke angka 1,49%, tahun 2016 mengalami stagnasi jumlah sebesar 1,49%, dan tahun 2017 kembali ke angka 0%. Berikut dapat diligat dalam bentuk gambar, yaitu:



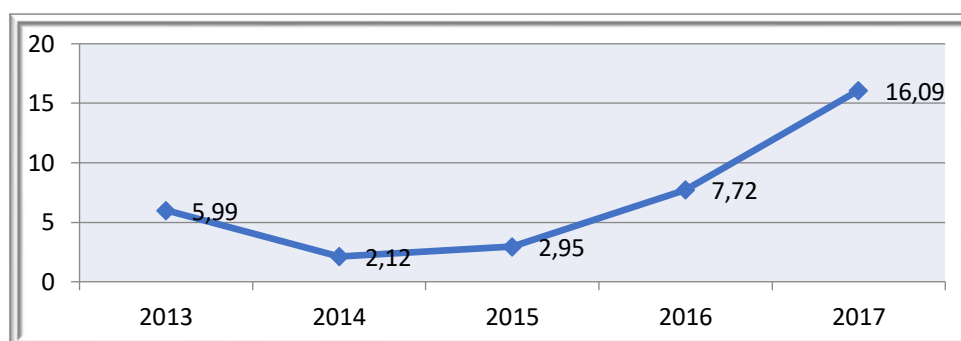
Gambar 2.54  
Non Polio AFP Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

### 17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Gambar 2.55  
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

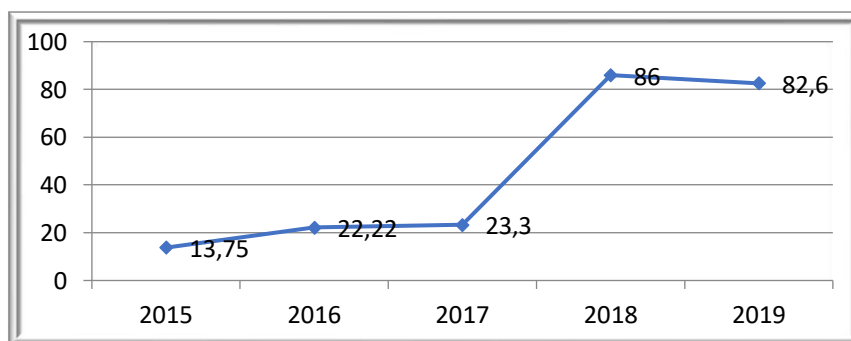
Pneumonia balita adalah sebuah penyakit infeksi yang mendadak (akut) kurang dari 2 minggu, menyerang jaringan paru-paru pada anak usia di bawah 5 (lima) tahun. Radang paru-paru atau pneumonia adalah kondisi inflamasi pada paru utamanya memengaruhi kantung-kantung udara mikroskopik yang dikenal sebagai alveolus. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dan lebih jarang mikroorganisme lainnya, obat-obatan tertentu, dan kondisi lain seperti penyakit autoimun. Data diatas menunjukkan bahwa cakupan balita pneumonia yang ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. tahun 2013 yang tertangani sebanyak 5,99%, tahun 2014 mengalami penurunan hingga mencapai angka 2,12%, tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,95%, tahun 2016 terus mengalami peningkatan ke angka 7,72%, dan tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan cakupan balita pneumonia tertangani mencapai angka 16,09%. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Kabupaten

Enrekang dalam melakukan pelayanan kesehatan terutama balita yang terkena pneumonia.

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. TBC menyebar melalui pembuluh darah dan kelenjar getah bening, tetapi secara utama menyerang paru-paru. Penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Enrekang semakin baik, hal ini berdasarkan data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2015 sebesar 13,75%, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 22,22%, tahun 2017 naik sampai dengan 23,3%, tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan hingga angka 86%, dan tahun 2019 mengalami penurunan hingga angka 82,6%.

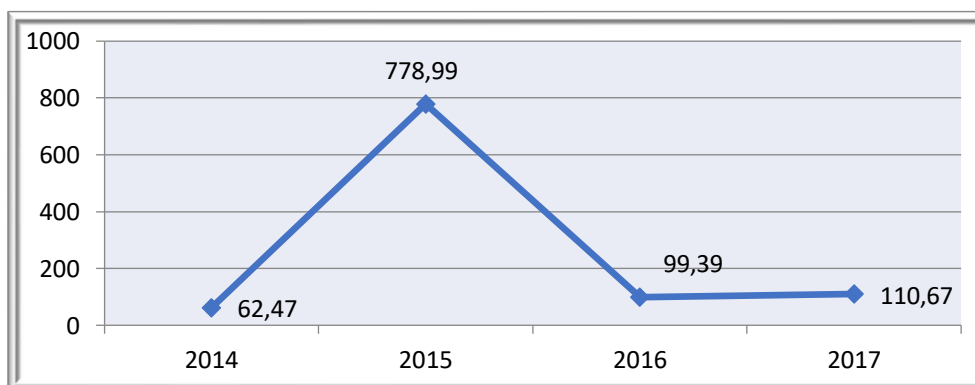
Gambar 2.56  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2015-2019



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis

Gambar 2.57  
Tingkat prevalensi Tuberkulosis Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017



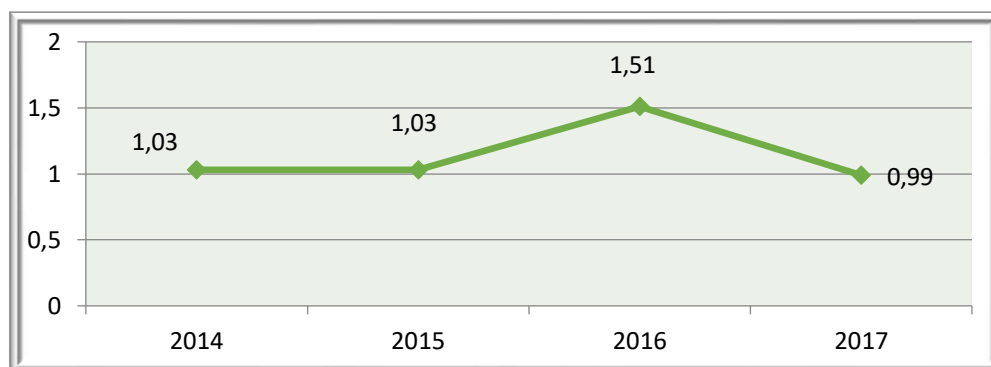
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung paru yang disebabkan oleh kuman TBC (*Mycobacterium tuberculosis*). Sebagian besar kuman ini menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Data tingkat prevalensi tuberkulosis dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 tingkat prevalensinya sebesar 62,47%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 78,99%, tahun 2016 terus naik hingga mencapai angka 99,39%, dan tahun 2017 terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 110,67%.

20. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis

Gambar 2.58

Tingkat kematian karena Tuberkulosis Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017



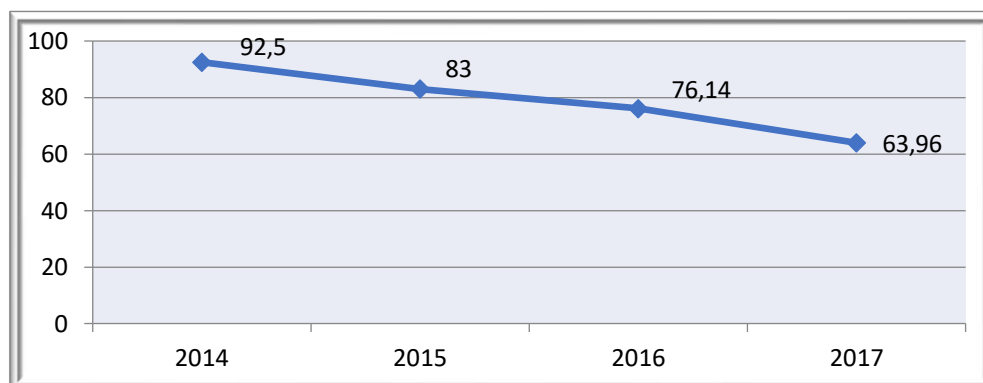
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat kematian karena tuberkulosis dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat bahwa tahun 2014-2015 mengalami stagnasi pada angka 1,03%, tahun 2015 mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan mencapai angka 1,51%, tahun 2017 mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,99%.

21. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Berdasarkan gambar di bawah menunjukkan bahwa proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS terus mengalami penurunan dari tahun 2014-2017. Tahun 2014 kasus yang sembuh sebesar 92,5%, akan tetapi tahun 2015 mengalami penurunan hingga angka 83%, tahun 2016 mengalami penurunan kembali di angka 76,14%, dan tahun 2017 masih terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 63,96%. Hal ini dibutuhkan peranan oleh semua pihak baik itu petugas kesehatan, pemerintah Kabupaten Enrekang, dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan pendampingan bagi anggota keluarga atau masyarakat dalam proses penyembuhan.

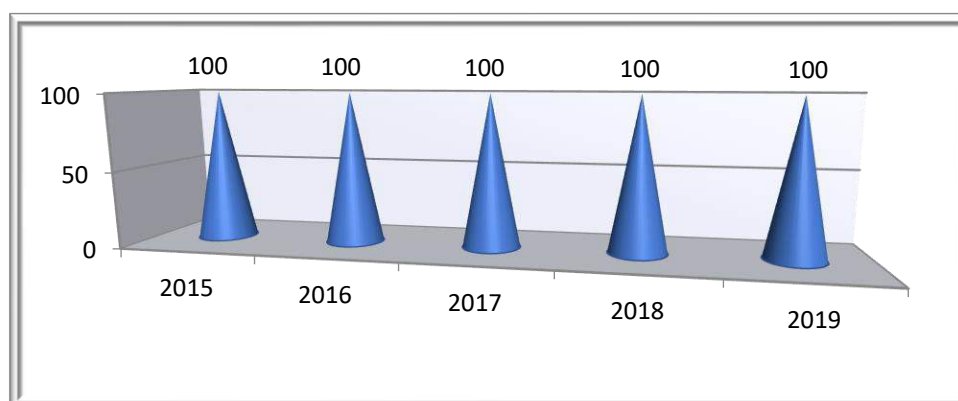
Gambar 2.59  
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

22. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Gambar 2.60  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

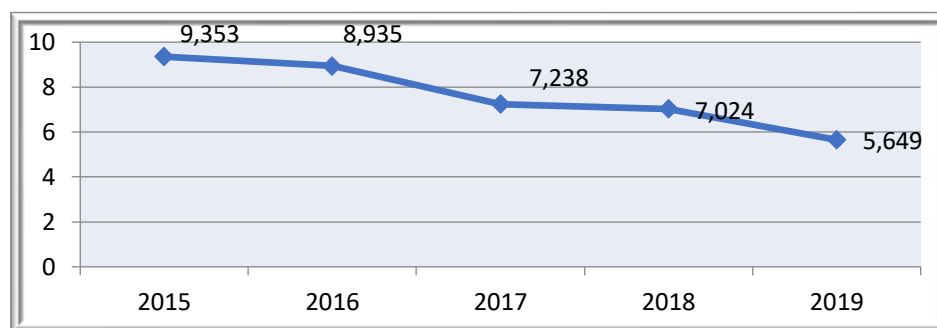
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dengan masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus, yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun dan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Penderita penyakit DBD di Kabupaten Enrekang telah mendapatkan penanganan kesehatan. Hal ini sesuai dengan data tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%.

23. Penderita Diare yang Ditangani

Diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar dalam bentuk encer atau cair dan terjadi berulang kali. Diare dapat menyebabkan hilangnya

sejumlah besar air dan zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Tingkat keparahan dan durasi bervariasi untuk setiap penderita diare. Biasanya, diare terjadi karena virus yang masuk ke dalam usus. Beberapa orang menyebutnya sebagai “flu usus” atau “flu perut”. Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuatif. Data tahun 2015 sebesar 9,353, tahun 2016 mengalami penurunan hingga angka 8,935, tahun 2017 mengalami penurunan hingga 7,2238%, tahun 2018 mengalami penurunan di angka 7,024, dan 2019 mengalami penurunan yang signifikan hingga angka 5,649%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat semakin meningkat sehingga tidak terkena virus penyebab diare. Berikut dapat kita lihat datanya dalam bentuk gambar, yaitu:

Gambar 2.61  
Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

#### 24. Angka Kejadian dan Kematian Akibat Malaria

Penyakit malaria merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe Plasmodium. Gejala penyakit malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk, gejalanya melalui tiga tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Ada 3 siklus tahapan gejala penyakit malaria, yaitu 3 hari sekali (tertiana) atau 4 hari sekali (kuartana). Berikut data angka kejadian dan kematian akibat malaria di Kabupaten Enrekang, tahun 2015-2019, yaitu:

Tabel 2.45  
Angka Kejadian dan Kematian Akibat Malaria di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kejadian akibat malaria	32,00	48,60	30,00	2,00	1,00

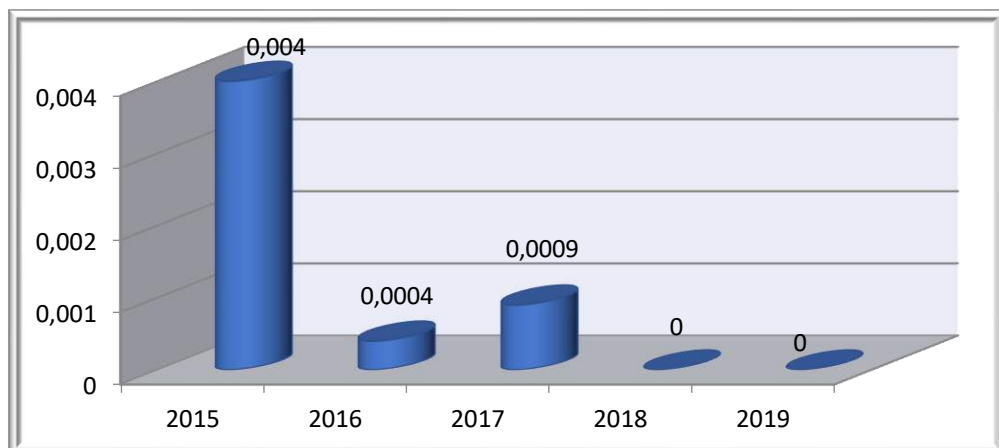
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kejadian akibat malaria di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuatif. Tahun 2015 sebesar 32,00%, tahun 2016 naik di angka 48,60%, tahun 2017 turun mencapai angka 30,00%, tahun 2018 turun secara signifikan di angka 2,00%, dan tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga angka 1,00%. Kemudian karena kesiapan dan pelayanan kesehatan bagi penderita malaria semakin baik, sehingga tidak ada kejadian kematian yang diakibatkan malaria.

25. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Berikut data prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Gambar 2.62  
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

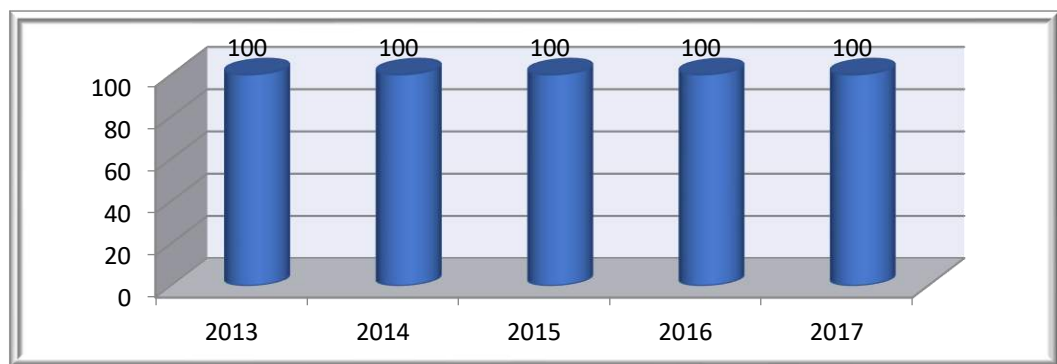
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 belum mengkhawatirkan, akan tetapi tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Enrekang. Tahun 2015 prevalensi dengan angka 0,004%, tahun 2016 mengalami penurunan drastis menjadi 0,0004% dari total jumlah

penduduk, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,0009% dari jumlah penduduk, dan tahun 2018 sampai dengan 2019 tidak ada pasien HIV/AIDS.

26. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 dibagi dengan jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten dikali dengan 100%. Data Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menunjukkan bahwa dari tahun 2013-2017 semua pasien miskin yang melakukan pelayanan kesehatan terlayani dengan persentase 100%. Hal ini dapat kita lebih jelas dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.63  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



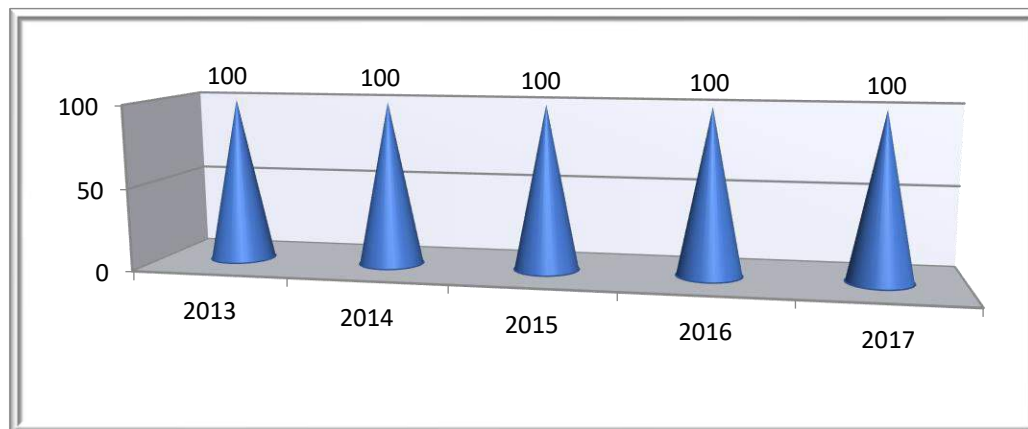
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

27. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali dengan 100%. Berikut data cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017, yaitu:



Gambar 2.64  
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



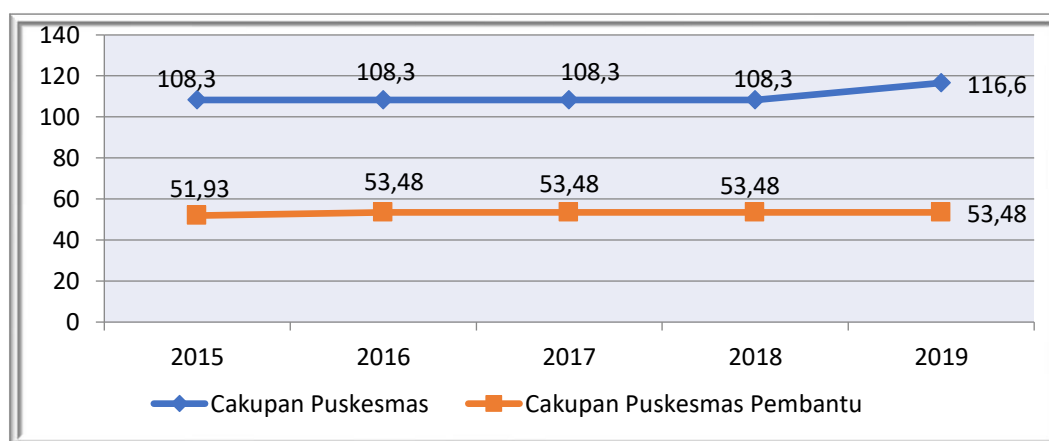
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa cakupan kunjungan bayi di tempat pelayanan kesehatan dari tahun 2013-2017 semuanya 100%.

28. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Metode perhitungan persentase rasio cakupan puskesmas atau puskesmas pembantu adalah jumlah dari keseluruhan puskesmas atau puskesmas pembantu dibagi jumlah kecamatan dikali 100. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2018 mengalami stagnansi di angka 108,3% dan tahun 2019 mengalami peningkatan hingga angka 116,6%.

Gambar 2.65  
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

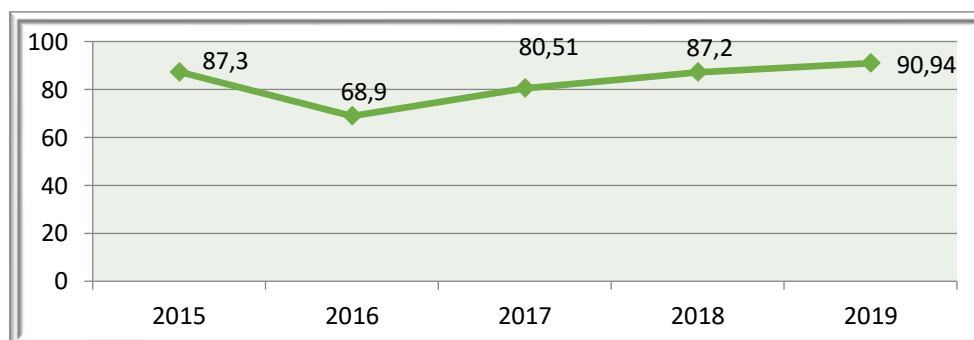
Data cakupan puskesmas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun kenaikannya tidak signifikan. Berdasarkan data tahun 2015 sebesar 108,3%, tahun 2016 sampai dengan 2019 di angka 108,3%. Hal ini masih perlu perhatian pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memperhatikan kuantitas

dan kualitas puskesmas dan pustu, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

29. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Ibu hamil K4 adalah Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukkan kualitas pelayanan antenatal yang belum memadai rendahnya K4 menunjukkan rendahnya kesempatan untuk menjarang dan menangani risiko tinggi obstetri. Berdasarkan data cakupan kunjungan ibu hamil di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 sebesar 87,3%, tahun 2016 mengalami penurunan di angka 68,9%, tahun 2017 kembali lagi mengalami peningkatan di angka 80,51%, tahun 2018 mengalami peningkatan di angka 87,2%, dan tahun 2019 mengalami peningkatan kembali di angka 90,94%.

Gambar 2.66  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

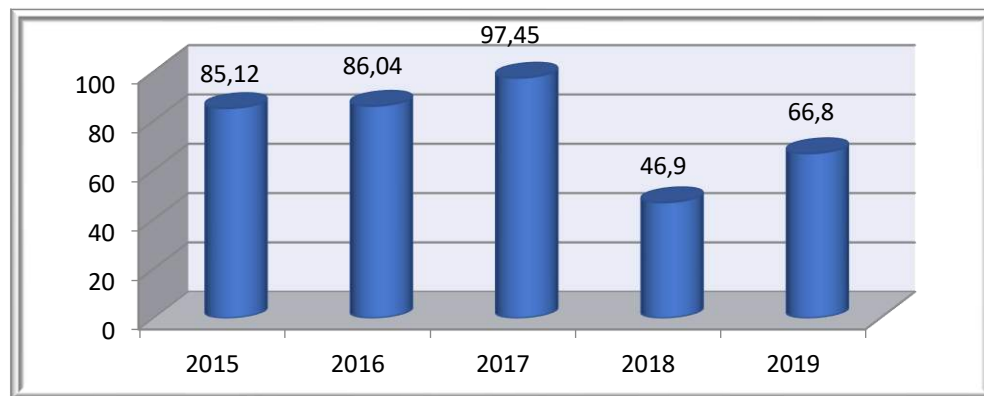


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

30. Cakupan pelayanan nifas

Nifas adalah masa setelah seorang ibu melahirkan bayi yang dipergunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali yang umumnya memerlukan waktu 6- 12 minggu. Cakupan pelayan nifas merupakan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali 100%. Berikut data cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:

Gambar 2.67  
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017

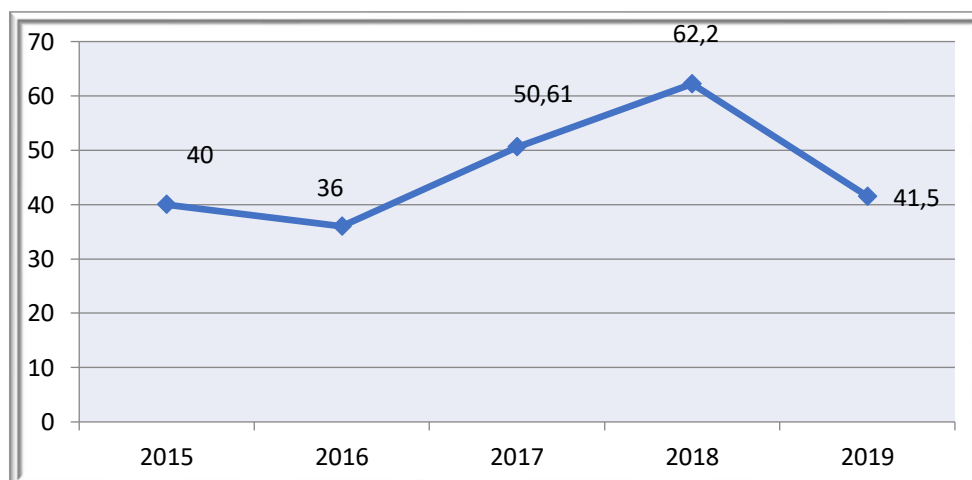


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan data cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa tahun 2015 mengalami penurunan hingga angka 85,12%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan hingga angka 86,04%, tahun 2017 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka 97,45%, tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai angka 46,9%, dan 2019 mengalami peningkatan hingga angka 66,8%.

### 31. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Gambar 2.68  
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

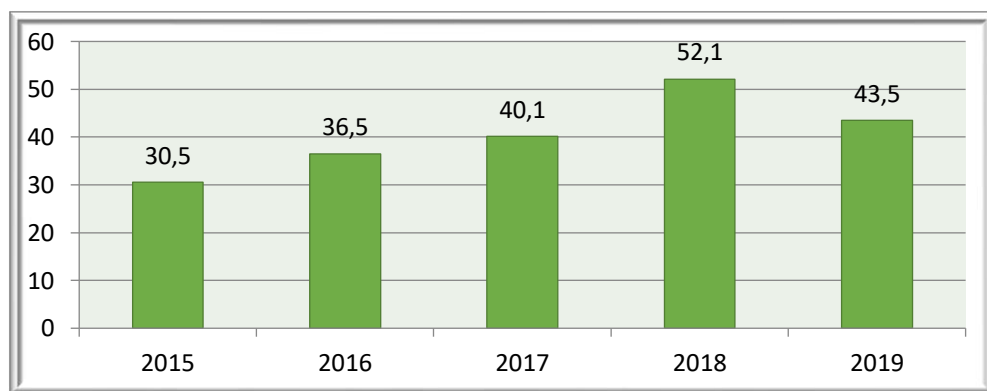
Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0 – 28 hari). Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi dengan jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada dibagi 100%. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa data Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten

Enrekang dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 sebesar 40%, tahun 2016 mengalami penurunan di angka 36%, tahun 2017 mengalami kenaikan di angka 50,61%, tahun 2018 mengalami peningkatan 62,20%, dan tahun 2019 mengalami penurunan hingga angka 41,50%.

32. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa tahun tahun 2015 sebesar 30,5%, tahun 2016 mengalami peningkatan hingga angka 36,5%, tahun 2017 mengalami peningkatan hingga angka 40,1%, tahun 2018 mengalami peningkatan hingga angka 52,1%, dan tahun 2019 mengalami penurunan hingga angka 43,5%.

Gambar 2.69  
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

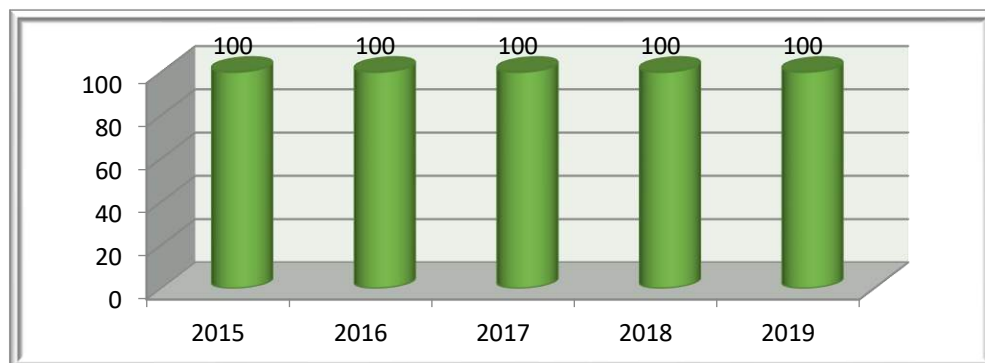


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

33. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin merupakan Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI dibagi dengan Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin dikali dengan 100%. Di kabupaten Enrekang pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin tahun 2015-2019, setiap tahunnya mencapai angka 100%. Hal ini dapat kita lihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.70  
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

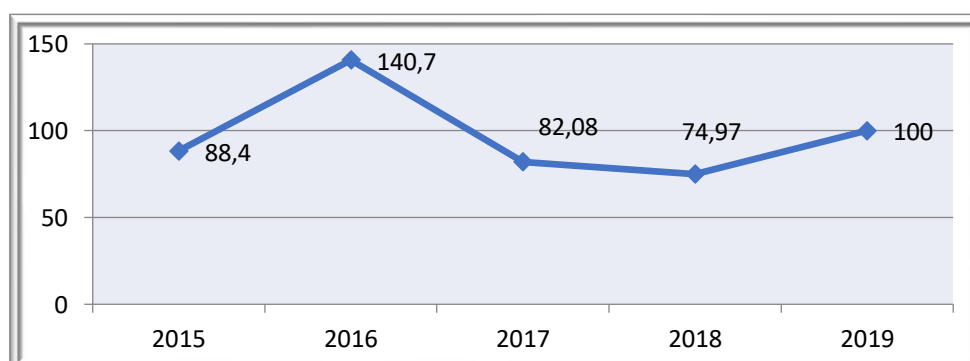


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

#### 34. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat merupakan untuk melihat derajat kesehatan siswa-siswi disetiap tahunnya yang akan menjadi dasar untuk penentuan program Usaha Kesehatan Sekolah selanjutnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan kesehatan fisik, kesehatan gigi dan mulut, status gizi, kesehatan remaja, edukasi kesehatan, hingga kesehatan lingkungan sekolah. Data cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 sebesar 88,4%, tahun 2016 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 140,7%, akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka 82,08%, tahun 2018 mengalami penurunan hingga angka 74,97%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan hingga angka 100%. Berikut data cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 yang dalam bentuk gambar, yaitu:

Gambar 2.71  
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

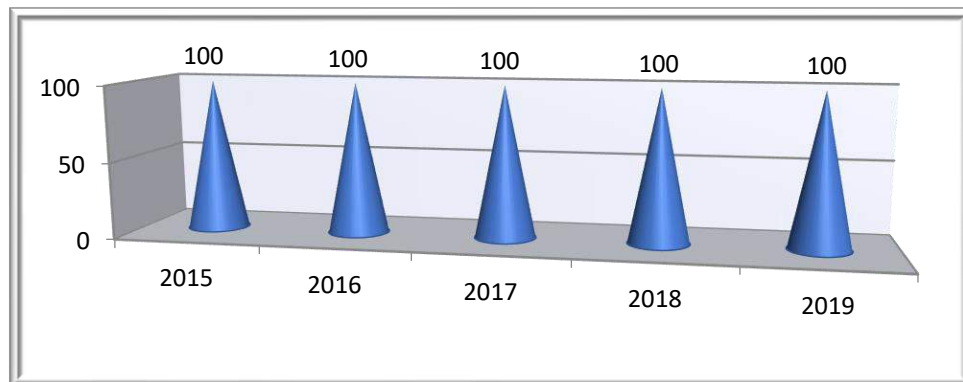


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

35. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Angka cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin diperoleh dengan membagi Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 dengan Jumlah seluruh masyarakat miskin dikali dengan 100%. Berikut data cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019, yaitu:

Gambar 2.72  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019

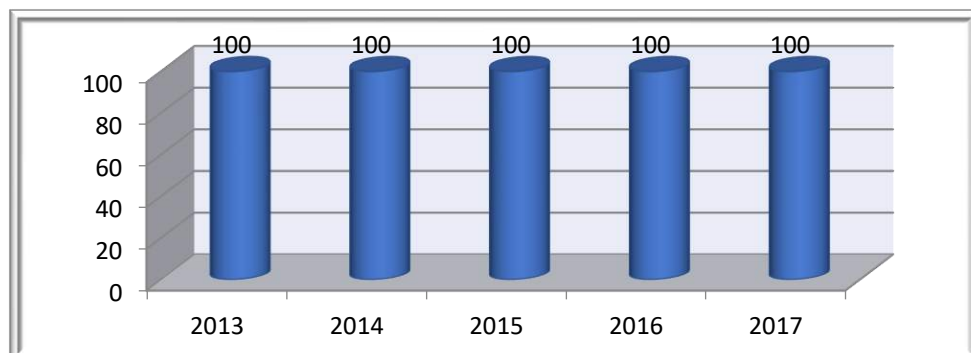


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 setiap tahunnya mencapai angka sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Enrekang sangat baik dalam melakukan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.

36. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Gambar 2.73  
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017



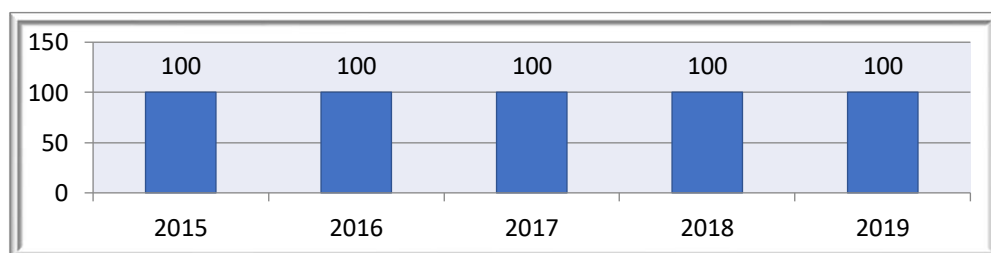
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Pada data di atas menunjukkan bahwa cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Enrekang dari tahun 2013-2017 setiap tahunnya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang telah melakukan pelayanan yang baik kepada gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS).

37. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Untuk mendapatkan nilai Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam adalah membagi Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu dengan Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama kemudian di kali dengan 100%. Data di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa setiap tahunnya mendapatkan nilai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Desa/Kelurahan. Berikut data dalam bentuk gambar, yaitu:

Gambar 2.74  
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020

38. Sebaran Balita Stunting

Stunting merupakan suatu masalah kesehatan dimana seorang bayi atau anak-anak mengalami hambatan dalam masa pertumbuhannya. Bayi atau anak-anak yang mengalami masalah stunting akan gagal memiliki tubuh yang tinggi ideal di usianya. Sebaran data balita stunting di Kabupaten Enrekang tahun 2017 berdasarkan hasil survey PSG sebesar 45,8%, dan tahun 20218 berdasarkan hasil survey RISKESDA sebesar 42,7%, dan tahun 2019 berdasarkan hasil survey SSGBI sebesar 43,7%.



Tabel 2.46  
Sebaran Data Balita Stunting Berdasarkan Hasil Survey Nasional Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019

Survey	Tahun	Balita Stunting
PSG	2017	45,8
RISKESDA	2018	42,7
SSGBI	2019	43,7

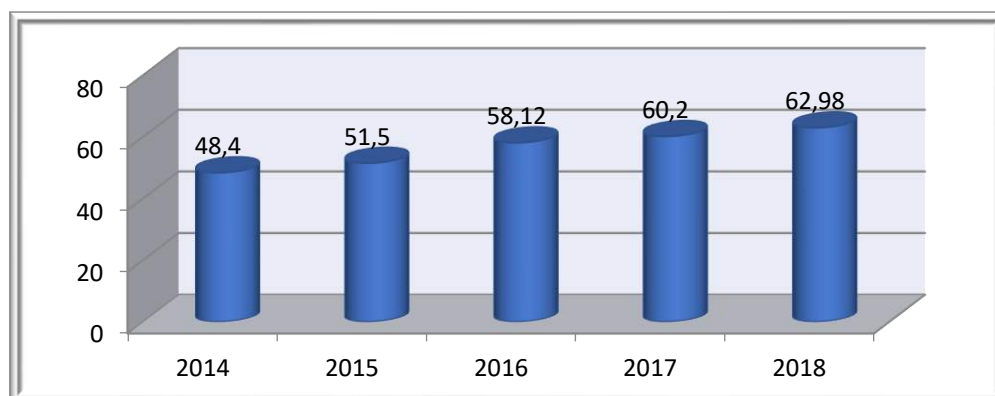
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang 2020

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan UU no.38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Sehingga Jalan merupakan sebuah fasilitas yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Di Kabupaten Enrekang, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun ke tahun terus meningkat, tahun 2014 sebesar 48,4% terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 hingga mencapai angka 62,98%. Berikut ini data panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018, yaitu:

Gambar 2.75  
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Rasio Panjang Jalan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

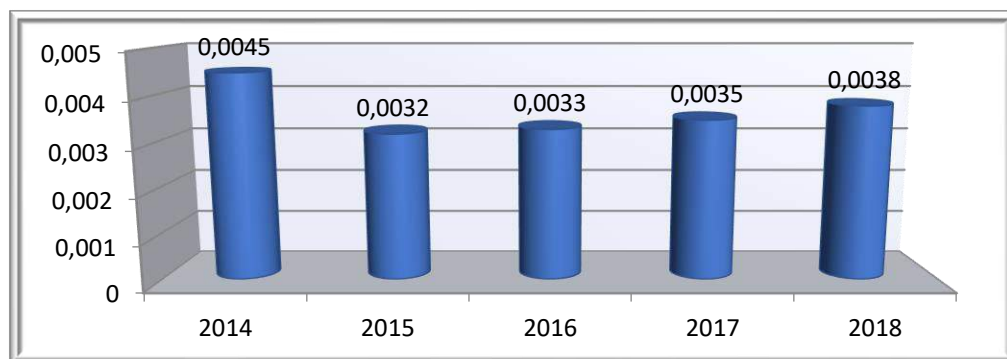


Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Gambar 2.76

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kab. Enrekang tahun 2014-2018



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

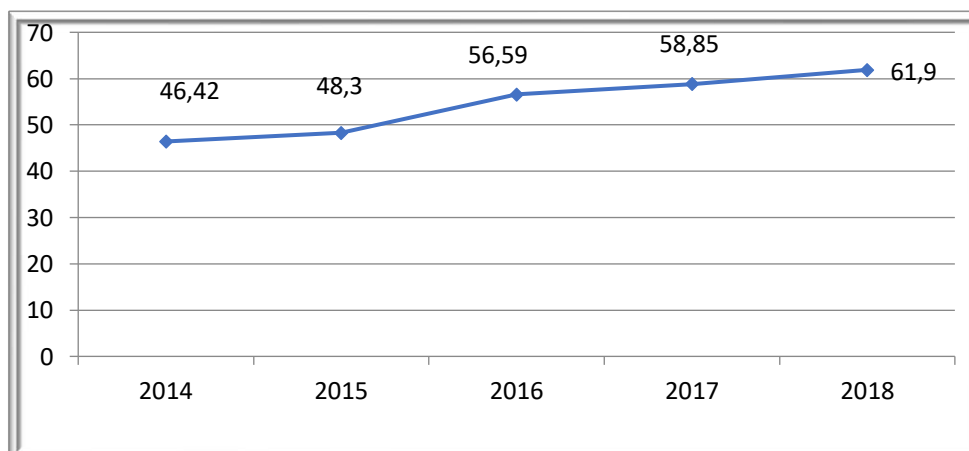
Pada gambar di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2014 sebesar 0,0045, terjadi penurunan di tahun 2015 hingga angka 0,0032, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan 0,0033, tahun 2017 meningkat kembali 0,0035, dan tahun 2018 meningkat hingga angka 0,0038.

3. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Berikut data lengkapnya:

Gambar 2.77

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Enrekang Tahun 2014 s/d 2018



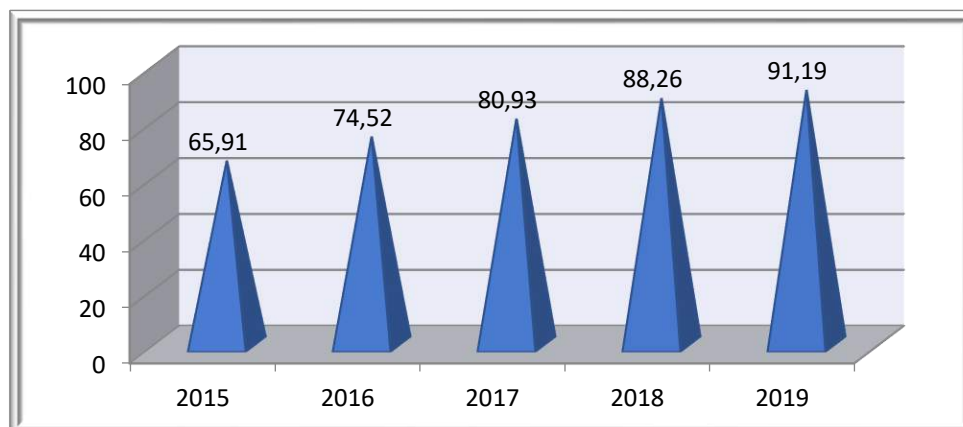
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Jalan kabupaten di Kabupaten Enrekang dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data di tahun 2014 sebesar 46,42% terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai angka 61,9%.

4. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

drainase merupakan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Presentasi drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Drainase dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 65,91%, naik di tahun 2016 hingga 74,52%, mengalami peningkatan kembali di di tahun 2017 di angka 80,93%, tahun 2018 mengalami kembali kenaikan di angka 88,26%, dan tahun 2019 terus naik hingga mencapai angka 91,19%. Berikut bagannya:

Gambar 2.78  
 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

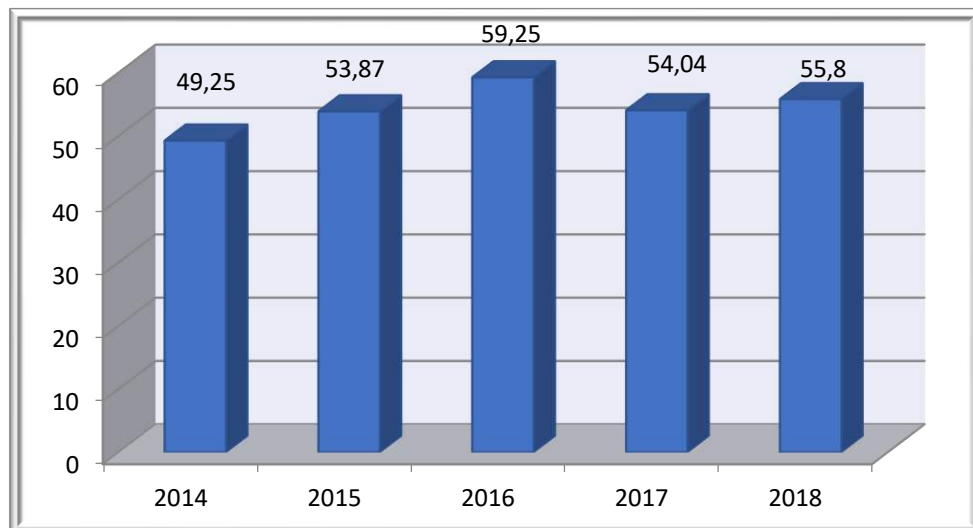


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020

5. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa persentase irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Enrekang tahun 2014 sebesar 49,25%, mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 53,87%, dan terus naik di tahun 2016 sebesar 59,25%, mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 54,04%, dan naik kembali di tahun 2018 hingga angka 55,8%.

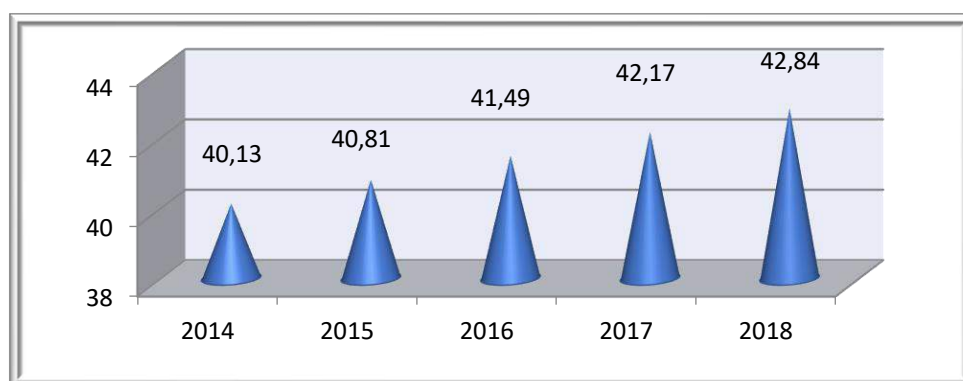
Gambar 2.79  
 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

6. Rasio Jaringan Irigasi

Gambar 2.80  
 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Enrekang Tahun 2014 s/d 2018



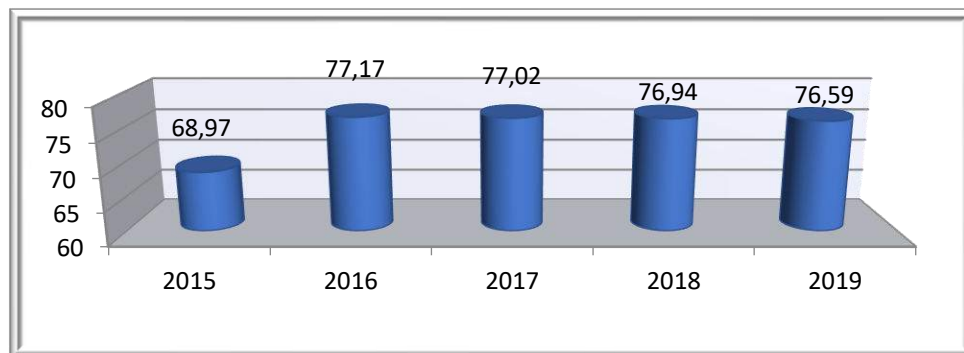
Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio jaringan irigasi Kabupaten Enrekang dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan, Rasio jaringan irigasi tahun 2014 sebesar 40,13%, naik di tahun 2015 hingga 40,81%, naik lagi di tahun 2016 hingga 41,49%, terus naik di tahun 2017 hingga 42,17%, dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2018 hingga 42,84%.

7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 68,97%, mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2016 di angka 77,17%, mengalami penurunan sedikit di tahun 2017 sebesar 77,02%, turun lagi di tahun 2018 sebesar 76,94%, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 di angka 76,59%.

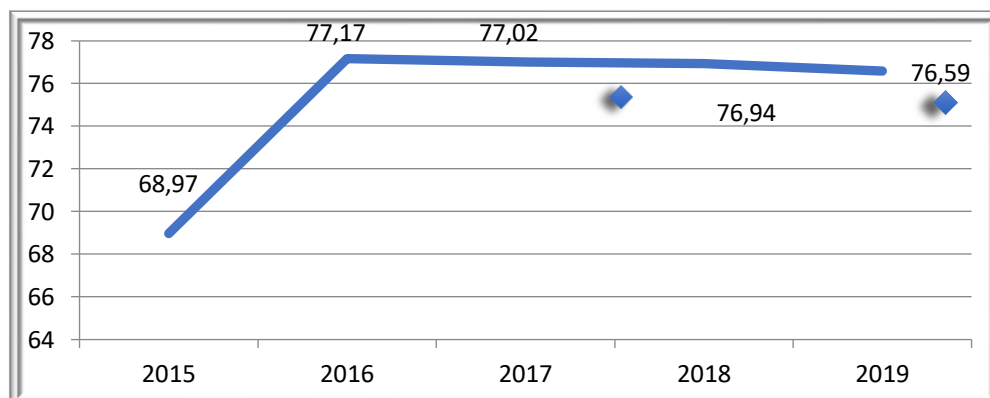
Gambar 2.81  
 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020

8. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan

Gambar 2.82  
 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020

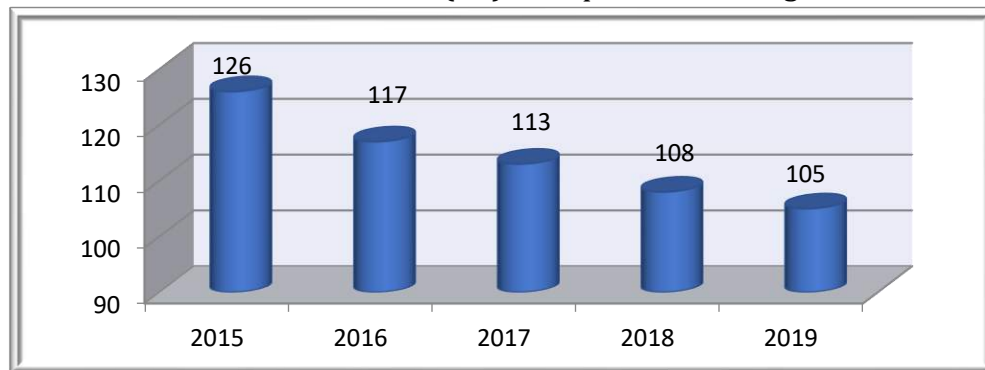
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Enrekang terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2015 ke 2016, akan tetapi setelah 2016 ke 2019 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Permasalahan yang terjadi adalah pemenuhan akses air minum layak belum optimal, dikarenakan tingginya kehilangan air di jaringan transmisi dan distribusi, kekurangan dan kekeringan air bersih di beberapa kecamatan, debit air bersih yang diproduksi untuk musim kemarau mengalami penurunan yang cukup banyak sehingga banyak pelanggan PDAM yang tidak teraliri air bersih, sarana dan prasarana (non teknis) yang lama sudah banyak yang rusak dan membutuhkan pemeliharaan, serta masih

rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana yang dibangun dan kurangnya pengetahuan untuk pengelolaan air minum yang berbasis masyarakat.

9. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang dapat dilihat bahwa luas areal kawasan kumuh dari tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan. Di tahun 2015, luas area kawasan kumuh sebesar 126 Ha, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 117 Ha, tahun 2017 sebesar 113 Ha, tahun 2018 sebesar 108 Ha, dan tahun 2019 turun hingga 105 Ha. Berikut data lengkapnya:

Gambar 2.83  
Luas Areal Kawasan Kumuh (Ha) Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

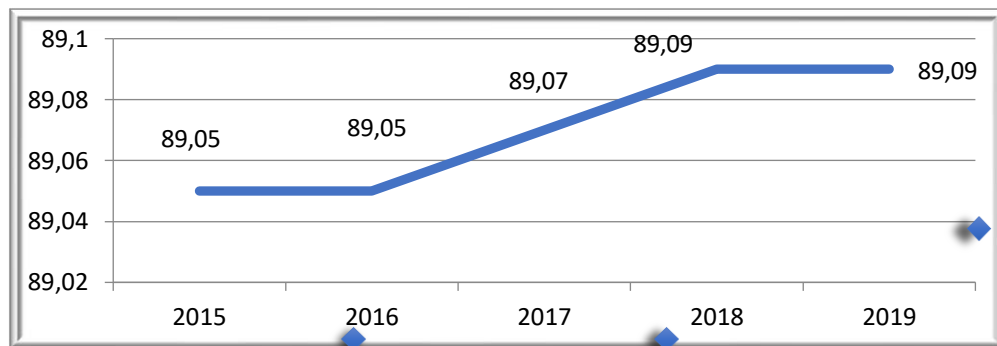


Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020

10. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan

IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 89.05%, mengalami stagnasi di tahun 2016 di angka 89,05%, dan naik di tahun 2017 di angka 89,07%, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 89,09%, dan tahun 2019 kembali mengalami stagnasi jumlah di angka 89,09%.

Gambar 2.84  
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

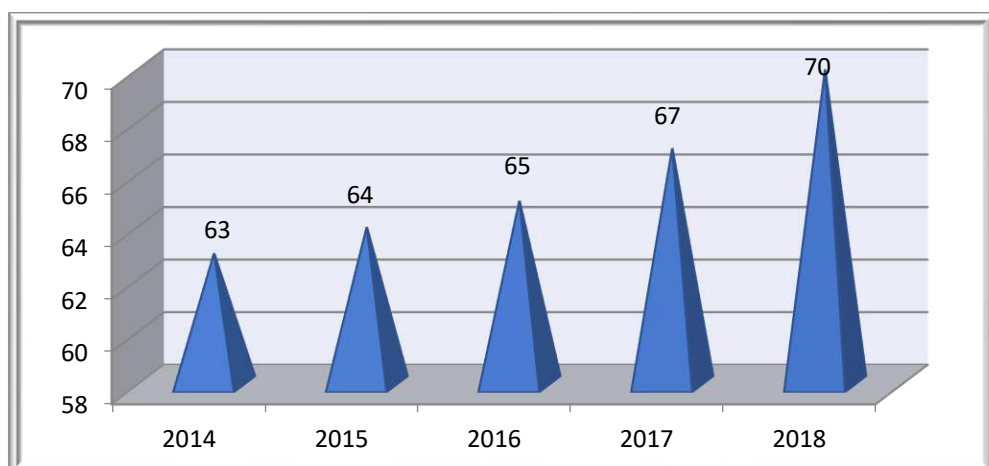


Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020

### 11. Ketaatan terhadap RTRW

RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018 sebesar 7%. Berikut data lengkapnya, yaitu:

Gambar 2.85  
Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018



Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023



D. Inovasi Daerah

1. Implementasi Rancangan Kelitbangan

Tabel 2.47  
Presentase Implementasi Rancangan Kelitbangan Kabupaten Enrekang, 2019

Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	Persentase
8	9	88,8

Sumber: Bappeda Kabupaten Enrekang, 2020

Berdasarkan tabel implementasi rancangan kelitbangan Kabupaten Enrekang Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kelitbangan dalam RKPD sebanyak 8, jumlah kelitbangan dalam RPJMD sebanyak 9, sehingga didapatkan persentasinya sebesar 88,8%.

2. Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.48  
Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Enrekang, 2019

Jumlah Kelitbangan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kelitbangan dalam Renja PD	Persentase
8	9	88,8

Sumber: Bappeda Kabupaten Enrekang, 2020

Pada tabel pemanfaatan hasil kelitbangan Kabupaten Enrekang tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti sebesar 8, jumlah kelitbangan dalam Renja PD sebanyak 9, sehingga didapatkan persentasinya sebesar 88,8%.

3. Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Tabel 2.49  
Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang, 2019

Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi	Jumlah Total Perangkat Daerah	Persentase
8	43	18,60

Sumber: Bappeda Kabupaten Enrekang, 2020

Berdasarkan data presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Enrekang tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah perangkat daerah yang difasilitasi sebanyak 8, jumlah total perangkat daerah sebanyak 43, sehingga didapatkan angka persentase sebesar 18,60%.

## 4. Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Tabel 2.50

Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang, 2019

Jumlah Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	Jumlah Inovasi yang Diusulkan	Persentase
13	43	30,23

Sumber: Bappeda Kabupaten Enrekang, 2020

Berdasarkan tabel Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan sebanyak 13, jumlah inovasi yang diusulkan sebanyak 43, sehingga didapatkan angka persentasinya sebesar 30,23%.

## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

### 2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

1. Capaian rata-rata realisasi kinerja dan anggaran (keuangan) program/kegiatan RKPD sampai dengan semester II (triwulan III dan IV) TA. 2019, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD diperoleh nilai 99.45 %, sedangkan untuk realisasi anggaran nilainya mencapai 93.46 %. Apabila menggunakan kategori interval nilai, sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, hasil Kinerja RKPD Pemerintah Daerah Kab. Enrekang Semester II TA. 2019 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, sedangkan Realisasi Anggaran termasuk pada kategori Sangat Tinggi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD khususnya Belanja Modal untuk perencanaan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.
2. Pencapaian target pertumbuhan Ekonomi sebesar 2019 sebesar 5,43%. Pencapaian target Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 2,44% dengan sasaran tingkat pengangguran terbuka untuk wilayah Sulawesi Selatan sebesar 4,97%. Pencapaian target Tingkat kemiskinan 12,33% dengan sasaran tingkat kemiskinan untuk wilayah Sulawesi Selatan sebesar 8,69%. Rasio Gini sebesar 0,35-0,36%. Laju inflasi berada pada nilai 1,82%.
3. Secara umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2019 sudah mendukung pencapaian Program Prioritas

Pembangunan Nasional mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang sampai pada pembangunan prasarana pemerintahan.

Tabel 2.51  
Capaian Kinerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Enrekang Tahun 2019

No.	UNIT KERJA (PERANGKAT DAERAH)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.62	ST	91.51	ST
2	Dinas Kesehatan	100	ST	85.26	ST
3	RSU Massenrempulu	98.84	ST	93.79	ST
4	Dinas Pekerjaan Umum	99.83	ST	65.3	R
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	95.53	ST	64.55	R
6	Dinas DAMKAR & Polisi Pamong Praja	100	ST	98.63	ST
7	Dinas Sosial	98.14	ST	94.9	ST
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	ST	91.39	ST
9	Dinas Ketahanan Pangan	100	ST	99.79	ST
10	Dinas Lingkungan Hidup	99.79	ST	99.24	ST
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.56	ST	99.52	ST
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97.78	ST	97.68	ST
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.98	ST	96.81	ST
14	Dinas Perhubungan	100	ST	98.35	ST
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	99.34	ST	86.58	T
16	Dinas Koperas, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	ST	81.26	T
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97.92	ST	89.17	T
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100	ST	81.81	T
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.63	ST	98.08	ST
20	Dinas Pertanian	100	ST	75.72	T
21	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	ST	98.51	ST
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98.74	ST	89.82	T
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	100	ST	92.39	ST
24	Badan Pengelola Keuangan Daerah	100	ST	99.57	ST
25	Badan Pendapatan Daerah	99.55	ST	94.61	ST
26	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	100	ST	95.1	ST
27	Sekretariat DPRD	100	ST	85.09	T

No.	UNIT KERJA (PERANGKAT DAERAH)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
28	Sekretariat Daerah	95.66	ST	89.34	T
29	Inspektorat Daerah	99.89	ST	99.36	ST
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98.7	ST	95.54	ST
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	ST	99.08	ST
32	Kecamatan Enrekang	100	ST	99.91	ST
33	Kecamatan Alla	100	ST	95.22	ST
34	Kecamatan Anggeraja	100	ST	97.92	ST
35	Kecamatan Baraka	100	ST	99.99	ST
36	Kecamatan Maiwa	100	ST	99.9	ST
37	Kecamatan Bungin	100	ST	100	ST
38	Kecamatan Cendana	100	ST	99.85	ST
39	Kecamatan Curio	100	ST	99.78	ST
40	Kecamatan Buntu Batu	100	ST	99.94	ST
41	Kecamatan Malua	100	ST	99.79	ST
42	Kecamatan Masalle	100	ST	99.91	ST
43	Kecamatan Baroko	100	ST	98.98	ST
	<b>Rata - Rata</b>	<b>99.45</b>	<b>ST</b>	<b>93.46</b>	<b>ST</b>

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

##### 3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN TAHUN 2020

###### 1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019

Kondisi perekonomian daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Brutonya. Ada beberapa indikator makro yang juga menjadi pengukur kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan tingkat pengangguran. Berikut adalah penjabaran indikator kondisi ekonomi Kabupaten Enrekang:

###### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Tabel 3.1  
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang  
Tahun 2015—2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.224,6	2.544,9	2.685,6	2.636,1	2.810,7
Pertambangan dan Penggalian	195,3	217,8	238,1	262,9	267,3

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Pengolahan	646,6	716,9	799,2	857,9	1.023,1
Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	5,4	6,1	6,6	7,0
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	3,7	4,1	4,5	5,1	5,3
Konstruksi	589,2	666,6	746,8	856,3	946,0
Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil	415,6	474,3	501,1	557,8	590,5
Transportasi dan Pergudangan	63,3	71,0	78,7	90,2	94,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,0	41,3	45,8	51,0	58,3
Informasi dan Komunikasi	149,8	170,8	188,5	209,6	221,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	140,7	165,7	177,1	196,3	208,6
Real Estate	150,4	163,1	176,3	191,4	205,9
Jasa Perusahaan	1,7	1,8	2,0	2,3	2,6
Administrasi Pemerintah, Pertahanan	410,2	421,3	460,8	513,5	546,1
Jasa Pendidikan	88,2	96,9	105,0	115,7	128,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93,7	103,1	115,6	131,6	142,9
Jasa Lainnya	25,0	25,9	29,3	35,6	39,9
<b>PDRB</b>	<b>5.240,7</b>	<b>5.890,9</b>	<b>6.360,5</b>	<b>6.719,8</b>	<b>7.289,2</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel di atas, perekonomian Kabupaten Enrekang tahun 2019 berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp7.289.200.000.000 (7,289 trilyun rupiah). Nilai ini meningkat sebesar Rp569.400.000.000 dibandingkan tahun 2018. Besaran PDRB ini cukup baik jika dibandingkan dengan nilai PDRB empat tahun sebelumnya. Besaran PDRB empat tahun sebelumnya memiliki kecenderungan menurun. Peningkatan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 sebesar Rp650,2 miliar, Rp469,6 miliar, dan Rp359,3 miliar.

Bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan secara konsisten merupakan penyumbang PDRB terbesar selama 2015—2019 walaupun memiliki kecenderungan menurun di 2016, 2017, dan 2018. Di posisi dua, bidang industri pengolahan dengan jumlah Rp1.023,1 miliar pada tahun 2019 serta bidang konstruksi dengan jumlah Rp946 miliar pada tahun 2019. Bidang industri pengolahan dan bidang industri secara konsisten menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua dan ketiga dalam rentang tahun 2015—2019.

Tabel 3.2  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Enrekang Tahun 2015—2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.487,4	1.605,3	1.698,2	1.642,8	1.726,3
Prtambahan dan Penggalian	115,6	127,9	138,3	151,5	152,1
Industri Pengolahan	260,1	279,4	300,0	3320,5	374,0
Pengadaan Listrik dan Gas	5,3	5,8	6,2	6,6	6,8
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	3,8	4,1	4,4	4,9	5,1
Konstruksi	508,9	546,5	590,7	637,4	665,2
Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil	370,0	409,4	442,7	471,5	487,2
Transportasi dan Pergudangan	34,9	38,2	41,7	47,1	48,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,3	30,4	33,3	36,6	39,7
Informasi dan Komunikasi	156,0	172,6	188,3	207,0	215,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	95,9	108,8	112,6	119,2	122,8
Real Estate	102,0	108,9	116,9	123,0	129,7
Jasa Perusahaan	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
Administrasi Pemerintah, Pertahanan	287,7	285,7	302,8	325,2	337,4
Jasa Pendidikan	74,1	79,1	84,6	91,9	98,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,0	77,2	83,5	91,9	99,1
Jasa Lainnya	19,1	19,2	21,1	23,9	26,2
<b>PDRB</b>	<b>3.623,2</b>	<b>3.899,6</b>	<b>4.166,4</b>	<b>4.302,1</b>	<b>4.535,6</b>

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Pada tabel di atas, perekonomian Kabupaten Enrekang tahun 2019 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp4.535,6 miliar meningkat Rp233,5



miliar dari tahun 2018. Tiga kontribusi terbesar terdapat pada bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, bidang Konstruksi, dan bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.

Untuk kontribusi sektor pada PDRB, sektor pertanian/ perkebunan memberikan kontribusi Rp1.894,56 miliar yang konsisten terus menanjak dari tahun 2015. Kontribusi sektor palawija juga konsisten terus bertumbuh dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan nilai Rp1.165,88 pada tahun 2019. Untuk sektor perkebunan (tanaman keras), peningkatan juga terjadi walaupun sangat lambat. Pada tahun 2019 tercatat kontribusi mencapai Rp31,3 miliar pada PDRB. Untuk produktivitas padi atau bahan pangan utama lain menunjukkan fluktuasi. Penurunan sempat terjadi pada tahun 2016 di angka 47,58 ton/ha lalu meningkat pada tahun 2017 dan stagnan pada tahun 2018 sebesar 48,46 ton/ha, lalu meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 49,46 ton/ha. Cakupan bina kelompok tani pada tahun 2019 sebesar 66 kelompok tani walaupun jumlah ini sempat stagnan pada tahun 2018 sebesar 53 kelompok tani.

Tabel 3.3  
Tabel Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan pada PDRB  
Tahun 2015—2019 Kabupaten Enrekang

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB (dalam miliar rupiah)	1.273,98	1.382,51	1.464,75	1.794,56	1.894,56
2.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB (dalam miliar rupiah)	851,52	937,91	984,61	1.065,88	1.165,88
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (dalam miliar rupiah)	23,2	23,79	25,7	30,3	31,3
4.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	48	47,58	48,46	48,46	49,46
5.	Cakupan Bina Kelompok Tani	45	46	53	53	66

Untuk laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan Lapangan Usaha, Industri Pengolahan memiliki laju pertumbuhan tertinggi sebesar 16,68% diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,30%, jasa lainnya lainnya sebesar 9,95%, penyediaan akomodasi dan makan minum 8,57%, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,84%. Tiga usaha yang memiliki laju pertumbuhan terendah, yaitu pertambangan dan penggalan sebesar 0,41%, jasa keuangan dan asuransi 3,06%, dan transportasi dan pergudangan sebesar 3,14%. Usaha pertambangan dan penggalan mengalami penurunan laju pertumbuhan sangat drastis dimana pada tahun 2018 laju

pertumbuhan sebesar 9,53% lalu menurun diangka 0,41% pada tahun 2019. Secara umum, terjadi penurunan laju pertumbuhan di semua sektor usaha pada tahun 2019.

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha  
atas Dasar Harga Konstan 2010  
Kabupaten Enrekang 2015—2019

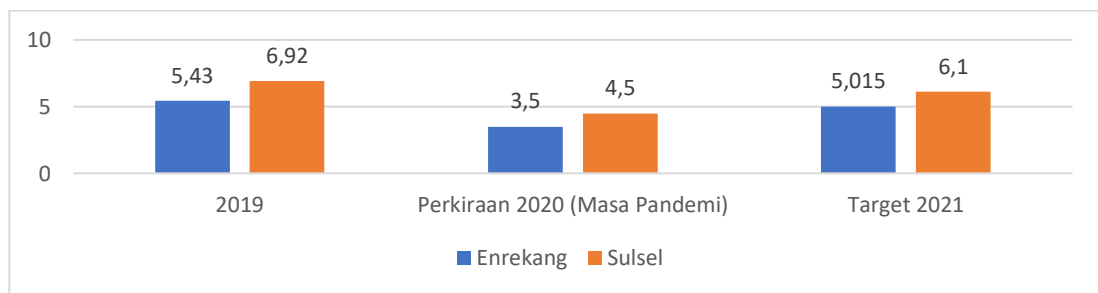
Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB					Rata-rata Pertumbuhan PDRB Per Tahun
	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	7,27	7,92	5,79	(3,62)	5,08	4,49
B. Pertambangan & Penggalian	7,02	10,61	8,16	9,53	0,41	7,15
C. Industri Pengolahan	0,88	7,42	7,39	6,84	16,68	7,84
D. Pengadaan Listrik & Gas	(1,83)	9,66	5,92	6,44	4,15	4,87
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	(1,42)	7,89	7,54	10,51	3,26	5,56
F. Konstruksi	8,43	7,39	8,08	7,91	4,36	7,23
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,08	10,65	8,14	6,51	3,33	7,14
H. Transportasi & Pergudangan	9,09	9,82	8,61	13,04	3,14	8,74
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,41	7,20	9,63	9,83	8,57	8,13
J. Informasi & Komunikasi	8,47	10,61	9,08	9,94	4,24	8,47
K. Jasa Keuangan & Asuransi	7,47	13,43	3,49	5,87	3,06	6,66
L. Real Estate	8,34	6,75	7,39	5,19	5,42	6,62
M,N. Jasa Perusahaan	5,93	3,40	8,44	10,30	10,30	7,67
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	6,77	(0,68)	6,00	7,37	3,77	4,65
P. Jasa Pendidikan	3,63	6,74	6,87	8,73	6,81	6,56
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9,08	5,78	8,18	9,99	7,84	8,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,12	0,29	9,96	13,12	9,95	8,29
Laju Pertumbuhan PDRB	6,91	7,63	6,84	3,26	5,43	6,01

#### b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 berada di angka 5,43 persen. Angka ini berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Prov. Sulawesi Selatan yang berada pada 6,92 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini mengalami perlambatan dilihat dari menurunnya pertumbuhan beberapa sektor usaha, seperti pertambangan, transportasi dan pergudangan. Hal ini merupakan lanjutan dari perlambatan laju pertumbuhan yang terjadi di tahun 2018. Untuk tahun 2020, laju perekonomian kembali diprediksi melambat. Wabah Covid-19 berdampak serius pada perekonomian global, nasional, maupun daerah. Walaupun jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 Kabupaten Enrekang masih sedikit, kondisi perekonomian nasional dan daerah lain tetap mempengaruhi. Laju pertumbuhan diprediksi hanya sebesar 3,5 persen. Angka ini jauh di bawah realisasi tahun 2019 sebesar 5,43 persen, tetapi diharapkan pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang dapat mencapai target di angka 5 persen.

Gambar 3.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang 2019  
dan Perkiraan 2020—2021



Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Pro. Sul-sel Triwulan 4 tahun 2019, Rancangan RKPD Sulsel 2021, dan

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita berdasarkan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Berikut data PDRB per kapita Kabupaten Enrekang 2019—2021, yaitu:

Tabel 3.5  
PDRB Per Kapita Kabupaten Enrekang dan Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2019—2021

Uraian	2019	2020	2021
Kabupaten Enrekang	28,69 juta	35-45jt	37-47juta
Prov. Sulsel	57,03 juta	60,77 jt	65,76juta

Sumber: BPS PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2014-2018 dan Indikator Makro Kab. Enrekang

c. Penduduk Miskin

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dengan garis kemiskinan Rp 275.971,-/kapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 26,98 ribu orang atau 13,41%. Tahun 2017 garis kemiskinan Rp 238.635,-/kapita/bulan penduduk miskin sebanyak 26,70 ribu orang atau 13,20%. Tahun 2018 garis kemiskinan Rp 312.674,-/kapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 25,53 ribu orang atau 12,49%. Kemudian tahun 2019 dengan garis kemiskinan Rp 331.667 /kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,40 ribu atau 12,33%. Sehingga dapat di katakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang dari tahun 2016-2019 terus berkurang.

Berikut data tabel garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabaputan Enrekang, yaitu:

Tabel 3.6  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Enrekang  
Tahun 2016—2019

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (dlm 000)	Persentase
2016	275.971	26,98	13,41
2017	283.635	26,70	13,20
2018	312.674	25,53	12,49
2019	331.667	25,40	12,33

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019 dan Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019

d. Tingkat Inflasi

Makro ekonomis suatu daerah dapat juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi di Kabupaten Enrekang sangat di pengaruhi oleh tingkat inflasi Kota Pare-Pare. Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan mengacu pada tingkat inflasi Kota Pare-Pare, maka berikut ini ditampilkan tingkat inflasi Kabupaten Enrekang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.7  
Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang dan Provinsi Sulawesi Selatan  
Capaian Tahun 2019, Perkiraan 2020, dan Target 2021

Uraian	2019 (Januari- Juni)	Perkiraan 2020	Target 2021
Kab. Enrekang	1,82	2,3+1	2,3+1
Prov. Sulawesi Selatan	2,35	3,1+1	3,1+1

Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang mempunyai capaian inflasi sebesar 1,82% di tahun 2019. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian inflasi Prov. Sulsel yang berada diangka 2,35%. Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi penawaran yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Inflasi pada tahun 2020 diprediksi berada pada angka 2,3+1,0 persen dengan melihat kondisi perekonomian selama pandemi ini.

e. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dan Gini Ratio

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Tabel 3.8  
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan  
Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Uraian		Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			Rata-rata	Gini Ratio
		40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas		
Rata-rata Perkapita	Pengeluaran	334.894	684.505	1.563.287	724.410	0,359
Rata-rata makanan	Pengeluaran	200.271	405.280	771.274		

Uraian	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan				Gini Ratio
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata	
Rata-rata Pengeluaran Bukan makanan	134.622	279.225	792.013		

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Enrekang Tahun 2019

Rata-rata pengeluaran perkapita Kabupaten Enrekang berada di angka Rp724.410. Pada Kelompok 40% Pengeluaran Perkapita terbawah dan tengah, konsumsi pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Hal sebaliknya terjadi pada kelompok 20% pengeluaran per kapita teratas. Pengeluaran terbanyak pada kelompok ini adalah pengeluaran bukan makanan. Untuk aspek ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan gini ratio ditunjukkan bahwa angka gini ratio Kabupaten Enrekang adalah 0,359

#### f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk Kabupaten Enrekang bervariasi, ada yang tidak/belum sekolah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas kejuruan, diploma I/II/III/akademi, dan universitas. Berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan, jumlah penduduk yang mempunyai umur telah memasuki angkatan kerja dan telah bekerja paling banyak adalah tidak/belum pernah sekolah sebanyak 34.122 orang dan yang paling sedikit telah bekerja adalah lulusan diploma I/II/III/akademi sebanyak 2.561 orang. Kemudian lulusan sekolah menengah atas yang paling banyak menjadi pengangguran terbuka dengan jumlah 694 orang dan lulusan sekolah menengah atas kejuruan dan lulusan diploma I/II/III/akademi yang tidak ada pengangguran terbukanya. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini, yaitu:

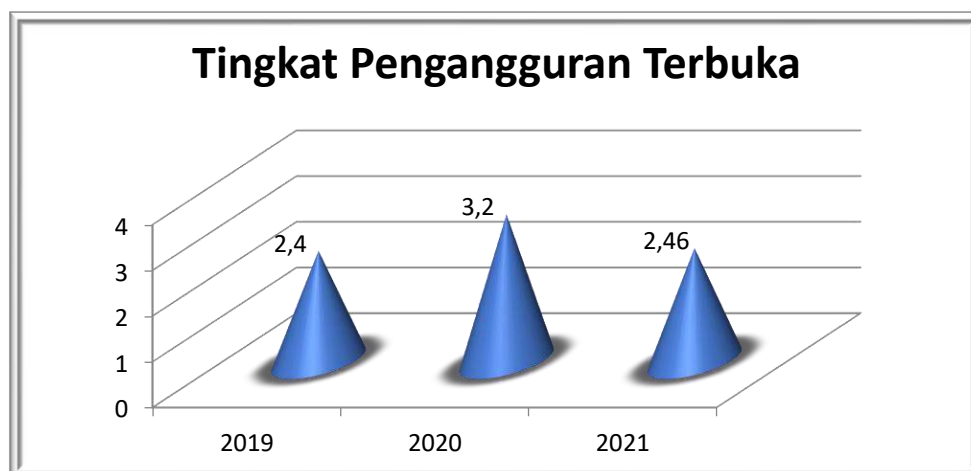
Tabel 3.9  
Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  
Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Tidak/belum pernah sekolah	34.122	418	34.540
Tidak/belum tamat SD	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama	20.738	197	20.935
Sekolah Menengah Atas	14.879	694	15.573
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	7.684	0	7.684
Diploma I/II/III/Akademi	2.561	0	52.561

Pendidikan Tertinggi yang Ditatamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Universitas	11.542	236	11.778
<b>Jumlah</b>	<b>91.526</b>	<b>1.545</b>	<b>93.071</b>

Tingkat pengangguran pada tahun 2019 mencapai 2,4 persen. Kondisi pandemi Covid-19 ini diprediksi akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Enrekang. Tingkat pengangguran terbuka diprediksi berada pada angka 3,2 persen. Nilai ini sangat jauh di atas target tahun 2020 yang berada di angka 2,4persen. Sedangkan untuk tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada angka 2,46 persen, Berikut data lengkapnya, yaitu:

Gambar 3. 2  
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Enrekang  
Capaian Tahun 2019, Perkiraan 2020, dan Target 2021



Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan 4 2019 dan Data Olahan Tim RKPD

### 3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2020 DAN 2021

#### A. Tantangan Perekonomian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Hal ini diperparah dengan adanya wabah Covid-19 yang menyerang Indonesia. Dampak yang diperkirakan akibat virus ini terhadap Indonesia adalah menurunnya kunjungan wisata, berkurangnya pasokan impor bahan baku industri, menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan, menurunnya arus perdagangan, dan meningkatnya Inflasi.



Tantangan perekonomian daerah Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu ditujukan fokus pada inklusivitas pertumbuhan sambil tetap berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan dan wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.

#### B. Tantangan Perekonomian Kabupaten Enrekang

##### (1) Masih tingginya angka kemiskinan

Angka kemiskinan mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, nilai ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan angka kemiskinan Kab. Enrekang yang berada di angka 12,33% lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin Prov. Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yang berada pada angka 8,69%.

##### (2) Angka ketimpangan yang masih besar

Indeks Gini Kabupaten Enrekang berada pada angka 0,359. Nilai ini termasuk indeks gini terbesar di wilayah Ajatappareng. Indeks Gini Kab. Enrekang berada di bawah Kabupaten Barru. Indeks Gini yang cukup tinggi ini menggambarkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat Kab Enrekang cukup besar.

##### (3) Belum maksimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik

Kondisi ini ditandai dengan belum maksimalnya akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, belum maksimalnya tata kelola pemerintahan juga mengurangi kualitas infrastruktur pelayanan publik.

##### (4) Rendahnya tingkat produktivitas pekerja

Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2018—2019. Pemerintah diharapkan terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan ekonomi. Selain itu,

pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memperhatikan implementasi teknologi produksi serta penguatan akses permodalan UMKM juga perlu diperhatikan.

### C. Prospek Perekonomian Kabupaten Enrekang

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,43%. Nilai ini meningkat sebesar 2,31% dari tahun sebelumnya. Tren penurunan terjadi dalam dua tahun terakhir, 2018 dan 2019. Pada tahun

Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi masih diprediksi bertumbuh dikisaran 3,5% pada tahun 2020 (dengan prediksi RPJMD 7,4—7,5%) dan 5,015% pada tahun 2021. Prediksi pertumbuhan ekonomi ini cenderung di bawah prediksi RPJMD mengingat adanya tren penurunan dari tahun sebelumnya dan wabah pandemik yang menyerang dunia secara luas, CoVID-19. Dalam masa ketidakpastian ini, ekonomi Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan mengalami guncangan mengingat Sulawesi Selatan menjadi wilayah terbesar keempat yang terdampak wabah CoVID-19. Akan tetapi, mengingat proyeksi beberapa variabel makro ekonomi yang didukung oleh berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi dan kebijakan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah selanjutnya diharapkan akan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan maupun pendapatan lain yang sah.

## 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

### 3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah sendiri maupun dana transfer hingga lain-lain pendapatan yang sah. Pada tabel di bawah ini, pemerintah daerah masih mengandalkan pendapatan transfer sebagai sumber utama dalam kebijakan pendapatan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang terus meningkat di angka Rp915,08 miliar pada tahun 2018 dan diprediksi meningkat pada

Rp996,46 miliar pada tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah merupakan penyumbang terbesar kedua dalam pendapatan daerah. Sama halnya dengan transfer, nilai dari lain-lain pendapatan daerah yang sah selalu mengalami kenaikan dari Rp76,38 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksi pada tahun 2022 menjadi Rp93,08 miliar. Di posisi terakhir, Lain-lain pendapatan yang Sah memiliki nilai terkecil dalam proporsi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp32,84 miliar dan diprediksi terus meningkat hingga Rp41,54 miliar pada tahun 2022.

Tabel 3.10  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>76,38</b>	<b>75,76</b>	<b>83,52</b>	<b>88,64</b>	<b>93,08</b>
Pajak Daerah	10,84	10,52	11,748	14,87	15,61
Retribusi Daerah	32,16	29,92	29,5	31,50	33,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	13,6	16,74	16,74	16,74	17,58
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	19,78	18,57	25,53	25,53	26,81
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>915,08</b>	<b>943,05</b>	<b>949,01</b>	<b>949,01</b>	<b>996,46</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	49,44	56,06	55,25	55,25	58,01
Dana Alokasi umum	534,34	559,04	506,95	506,95	532,30
Dana Alokasi Khusus	228,77	202,56	187,87	187,87	197,25
Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	4,76	9,86	53,63	53,63	56,32
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	97,77	115,53	145,31	145,31	152,58
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah</b>	<b>32,84</b>	<b>42,39</b>	<b>39,56</b>	<b>39,56</b>	<b>41,54</b>
Pendapatan Hibah	32,84	42,39	39,56	39,56	41,54
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>1.024,03</b>	<b>1.061,19</b>	<b>1072,09</b>	<b>1.077,21</b>	<b>1.131,07</b>

Kondisi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Enrekang terlihat meningkat tipis di tahun 2019. Kondisi ini cukup rendah jika disandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 7%-7,53% seperti yang diutarakan pada RPJMD Kab. Enrekang 2019—2023. Kabupaten Enrekang cukup optimis dengan memprediksi pertumbuhan pendapatan akan meningkat sekitar 7,75% pada tahun 2020, 15,43% pada tahun 2021, dan 10,48% pada tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan daerah pada 2020, 2021, dan 2022 haruslah didukung oleh pemerintah Kabupaten Enrekang dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Seperti yang diketahui dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia mumpuni, Kabupaten Enrekang diharapkan dapat melakukan inovasi untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipatif karena pendapatan daerah sangatlah bergantung pada dana perimbangan. Pendapatan daerah yang bergantung pada dana perimbangan memiliki risiko yang tinggi dalam pencapaian target karena penerimaan dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah tentang DAU dan DAK.

### 3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel di bawah ini, total belanja daerah Kabupaten Enrekang masih diprediksi terus mengalami peningkatan. Realisasi belanja daerah pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp44,11 miliar dari tahun 2018. Belanja daerah ini diproyeksi akan naik diangka Rp1,156,78 miliar pada tahun 2020 kemudian tetap diprediksi meningkat pada tahun 2021 di angka Rp1.214,62 miliar. Belanja daerah ini juga meningkat di angka Rp1.275,35 miliar pada tahun 2022.

Proporsi belanja operasi lebih besar pada tahun 2018—2022 dibandingkan semua pos belanja lainnya. Peningkatan nilai belanja operasi diharapkan mampu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selanjutnya dapat menciptakan efek multiplier yang cukup tinggi kepada masyarakat. Implikasinya adalah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki administrasi dan prosedur pencairan anggaran agar daya serap belanja modal tercapai 100 persen yang memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang.

Tabel 3.11  
Proyeksi dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Belanja Operasi	690,87	713,29	747,82	785,22	824,48

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Belanja Pegawai	398,11	405,33	427,29	448,65	471
Belanja Barang & jasa	245,11	279,74	304,70	319,94	335,94
Belanja bunga	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0			
Belanja Hibah	47,53	27,69	15,43	16,20	17,01
Belanja Bantuan sosial	0,12	0,52	0,4	0,42	0,44
<b>Belanja Modal</b>	<b>160,11</b>	<b>163,34</b>	<b>227,35</b>	<b>238,72</b>	<b>250,66</b>
Belanja Modal	160,11	163,34	227,35	238,72	250,66
<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>0,23</b>	<b>0,18</b>	<b>0,3</b>	<b>0,32</b>	<b>0,42</b>
Belanja tidak terduga	0,23	0,18	0,3	0,32	0,42
<b>Belanja Transfer</b>	<b>155,27</b>	<b>173,78</b>	<b>181,30</b>	<b>190,37</b>	<b>199,89</b>
Belanja bagi hasil	0	0	5,0	5,25	5,51
Belanja Bantuan Keuangan	155,27	173,78	176,30	185,12	194,37
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.006,49</b>	<b>1.050,60</b>	<b>1.156,78</b>	<b>1.214,62</b>	<b>1.275,35</b>

### 3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: (i). SiLPA tahun anggaran sebelumnya; (ii) pencairan dana cadangan; (iii) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (iv) penerimaan pinjaman; dan (v) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: (i) pembentukan dana cadangan; (ii) penyertaan modal pemerintah daerah; (iii) pembayaran pokok utang; dan (iv) pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah, yakni Bank Sulselbar dan PDAM Tirta Maspul. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.12  
Reliasisai dan Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022

Uraian	Realisasi		APBD 2020	Proyeksi	
	2018	2019		2021	2022
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7,16</b>	<b>6,22</b>	<b>16,55</b>		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7,15	5,217	16,45		
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-		
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,01	0,004	0,1		
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-		
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9,49</b>	<b>2,1</b>	<b>6,9</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	2,1	6,5		
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-		
Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga	0,4	0	0,4		

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan pembangunan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Rumusan tujuan diderivasi secara operasional dari masing-masing misi, dengan memperhatikan visi yang telah dirumuskan. Selanjutnya, rumusan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam rumusan sasaran. Rumusan sasaran yang dimaksudkan disini merupakan gambaran hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Setiap sasaran dirumuskan indikator kinerjanya, level indikator sasaran berada pada level impact atau dampak. Berikut ini adalah hubungan visi dan misi dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019—2023.



Tabel 4.1  
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah  
Kabupaten Enrekang Tahun 2019—2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (2018/2019)	Target Capaian 2021
<b>Visi: Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius</b>			
<b>Misi-1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik</b>			
<b>Tujuan 1.1.</b> Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	63,57	68
<b>Sasaran 1.1.1.</b> Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan sentra-sentra produksi pertanian	Persentase desa yang dapat diakses dengan baik kendaraan roda empat sepanjang tahun	82,14	92,85
<b>Sasaran 1.1.2.</b> Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas	Penghargaan Adipura level kota kecil	-	Piala
<b>Sasaran 1.1.3.</b> Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi perkotaan dan perdesaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi (%)	76,59	100
<b>Misi-2: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa</b>			
<b>Tujuan 2.1.</b> Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	72,66	72,84
<b>Sasaran 2.1.1.</b> Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Usia harapan hidup (tahun)	70,38	70,52
<b>Sasaran 2.1.2.</b> Menurunnya angka stunting	Persentase stunting	45,8	30,6
<b>Sasaran 2.1.3.</b> Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,76	14,06
<b>Tujuan 2.2.</b> Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan	Nilai Indeks SPBE	1,56	1,77

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (2018/2019)	Target Capaian 2021
Sasaran 2.2.1. Meningkatnya aplikasi teknologi terapan	Cakupan wilayah terjangkau internet dan jaringan Telekomunikasi seluler (%)	91,67	100
Tujuan 2.3. Mengembangkan kesadaran spiritual masyarakat	Jumlah Kelompok Keagamaan	330	375
Sasaran 2.3.1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat	Angka kriminalitas	253	159
<b>Misi-3: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi</b>			
Tujuan 3.1. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara professional dan menjamin rasa aman dan tenteram dalam masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	C	B
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas pelayanan publik	Mutu Pelayanan	C	B
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah	Nilai SAKIP	C	B
	Opini BPK	WTP	WTP
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya inovasi daerah dalam pelayanan publik	Penghargaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	Ada
Sasaran 3.1.4. Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Persentase penanganan gangguan kantibmas (%)	85	100
Sasaran 3.1.5. Terwujudnya penerapan SPM untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diterima setiap warga, sesuai kewenangan daerah	Cakupan penerapan SPM sesuai kewenangan daerah	100	100
Tujuan 3.2. Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	98,12	98,17
Sasaran 3.2.1. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek	Indeks Pemberdayaan Gender	58,68	58,81

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (2018/2019)	Target Capaian 2021
<b>Misi-4: Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry</b>			
<b>Tujuan 4.1.</b> Mewujudkan struktur ekonomi daerah yang kuat	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,89	7,3—7,4
<b>Sasaran 4.1.1.</b> Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan PDRB Per Kapita	7,62	8,79
<b>Sasaran 4.1.2.</b> Terwujudnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat pengangguran terbuka	1,66	1,27
<b>Tujuan 4.2.</b> Mengembangkan kawasan strategis daerah dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas lokal	Pertumbuhan Industri	9,84	10,04
<b>Sasaran 4.2.1.</b> Terwujudnya sistem pemasaran dan daya saing produk serta komoditi unggulan daerah melalui penerapan IPTEK	Kontribusi sector perdagangan dan industry terhadap PDRB	20,96	21,28
<b>Sasaran 4.2.2.</b> Menguatnya peran pelaku ekonomi masyarakat kurang mampu	Tingkat Kemiskinan	12,49	11,25
<b>Sasaran 4.2.3.</b> Terwujudnya peningkatan produktivitas kawasan pengembangan komoditas unggulan daerah	Produktivitas total daerah	66.458.292	72.620.770
<b>Tujuan 4.3.</b> Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	72,57	73,32
<b>Sasaran 4.3.1.</b> Tersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	81	81,6
<b>Misi-5: Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan</b>			
<b>Tujuan 5.1.</b> Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,06	62,76
<b>Sasaran 5.1.1.</b> Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan	Persentase Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	80	100

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal (2018/2019)	Target Capaian 2021
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan			
Sasaran 5.1.2. Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Kooditas dengan Penerapan Sistem Pertanian Raamah Lingkungan	5,92	6,8

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Prioritas pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2021 diarahkan pada pencapaian target Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2019—2023. Selain itu, prioritas dan sasaran pembangunan nasional juga turut dipertimbangkan dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahapan pembangunan yang memberikan penekanan pada tema sentral pembangunan: “Membangun utilitas perkotaan dan pemerataan pembangunan”. Dengan tema tersebut maka arah kebijakan yang diprioritaskan pada tahun 2021 mencakup:

1. Peningkatan kualitas drainase perkotaan dan perdesaan
2. Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan
3. Rasionalisasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita
4. Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga pendidik SD dan SMP
5. Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet
6. Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan
7. Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas
8. Mengembangkan indikator-indikator pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2021 difokuskan pada sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN 2021</b>	<b>INDIKATOR PEMBANGUNAN</b>	<b>CAPAIAN 2019</b>	<b>TARGET 2021</b>
1	Peningkatan kualitas drainase perkotaan dan perdesaan	Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas	Penghargaan Adipura level kota kecil	-	Piala
2	Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi perkotaan dan perdesaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi (%)	76,74	100
3	Rasionalisasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita	Menurunnya angka stunting	Persentase Stunting	45,8	30,6
4	Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	13,76	14,06

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021
	pendidik SD dan SMP	layanan pendidikan	(tahun)		
5	Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan	Cakupan wilayah terjangkau internet dan jaringan Telekomunikasi seluler (%)	91,67	100
6	Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan	Mengembangkan kesadaran spiritual	Jumlah Kelompok Keagamaan Masyarakat	330	375
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat	Angka Kriminalitas	253	159
7	Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas	Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	98,12	98,17
		Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek	Indeks Pemberdayaan Gender	58,68	58,81
8	Mengembangkan indikator-indikator pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan	Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Persentase Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	80	100
		Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Kooditas dengan Penerapan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan	5,92	6,8

Prioritas Pembangunan Tahun 2021 di atas dimaksudkan sebagai fokus pembangunan tahun 2021 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, untuk melihat sinkronisasi permasalahan terhadap prioritas pembangunan tahun 2021, sebagaimana tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah terhadap  
Prioritas Pembangunan Tahun 2021

PERMASALAHAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN
1	Kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air	1	Peningkatan kualitas drainase perkotaan dan perdesaan	Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas	Penghargaan Adipura level kota kecil
2	Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar: air bersih, listrik, telekomunikasi	2	Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi perkotaan dan perdesaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi (%)
3	Faktor aksesibilitas wilayah dan konektivitas wilayah yang terbatas	3	Rasionalisasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita	Menurunnya angka stunting	Persentase Stunting
4	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai	4	Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga pendidik SD dan SMP	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
5	Masih adanya beberapa wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi	5	Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan	Cakupan wilayah terjangkau internet dan jaringan Telekomunikasi seluler (%)
6	Belum maksimalnya penegakan Peraturan Daerah	6	Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan	Mengembangkan kesadaran spiritual	Jumlah Kelompok Keagamaan Masyarakat
				Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat	Angka Kriminalitas
7	Pengarutamaan gender dalam pembangunan daerah yang belum optimal	7	Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas	Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender
				Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek	Indeks Pemberdayaan Gender
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang masih belum maksimal		Mengembangkan indikator-indikator pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan	Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Persentase Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup



PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN
		secara berkelanjutan	
		Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Kooditas dengan Penerapan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan

Arah kebijakan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2021 telah selaras dengan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dan mendukung prioritas nasional tahun 2021 yang merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dengan arah kebijakan daerah tahun 2021 dijabarkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	Arah Kebijakan Daerah
Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik (M1)	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan pedesaan (T1)	Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan sentrasentra produksi pertanian	Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan di Kawasan perdesaan/ Kawasan transmigrasi daerah
			Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi perkotaan dan perdesaan	Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan
			Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas	Peningkatan Kualitas drainase perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral, beriman dan bertaqwa (M2)	Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat secara berkelanjutan (T2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Rasionalisasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita
			Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan	Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga pendidik SD dan SMP

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	Arah Kebijakan Daerah
			pendidikan	
		Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan (T3)	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan	Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet
		Mengembangkan kesadaran spiritual masyarakat (T4)	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat	Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan
	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi (M3)	Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tenteram dalam masyarakat (T5)	Meningkatnya inovasi daerah dalam pelayanan publik	Penguatan implementasi inovasi Pelayanan public
		Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah (T6)	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek	Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas
	Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agropolitan (M4)	Mengembangkan kawasan strategis daerah/ Kawasan Perdesaan dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas local (T8)	Terwujudnya peningkatan produktivitas komoditas lokal/ unggulan daerah	Akselerasi implementasi teknologi produksi dan pembangunan Kawasan – Kawasan berbasis komoditi lokal
		Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah (T9)	Tersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau	Pengembangan Inovasi pengolahan bahan pangan lokal
	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan (M5)	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan memperhatikan aspek	Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan	Pengembangan indikator-indikator pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	Arah Kebijakan Daerah
		lingkungan (T10)	sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	
			Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan	Pemantapan sistem Pendukung pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan

Sumber: RPJMD Kab. Enrekang Tahun 2018—2023

#### 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan pada periode IV (RPJM 2020—2024) seperti yang tertuang pada RPJP Nasional 2005—2025, pembangunan nasional diprioritaskan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Ada delapan misi yang dirumuskan untuk mencapai Dari visi RPJMN 2020—2025 “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Tema yang diusung pada RPJMN 2020—2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.**

Untuk mendukung tema ini, ada lima fokus pembangunan yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5  
Fokus Pembangunan RPJMN 2020—2024

Fokus Pembangunan				
Pembangunan Manusia	Pembangunan Ekonomi	Pembangunan Kewilayahan	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
1. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial 2. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Pangan 2. Energi 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Industry manufaktur 5. Kelautan dan kemaritiman	1. Sentra-sentra Pertumbuhan 2. Komoditas Ungulan Daerah 3. Pertumbuhan Perkotaan	1. Transportasi 2. Telekomunikasi 3. Sumber daya air 4. Perumahan dan Pemukiman	1. Hukum dan regulasi 2. Pertahanan dan Keamanan 3. Politik

Tema RPJMN 2020—2024 diturunkan dalam Tema RKP 2021 adalah “Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Industri Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2021 utamanya akan berfokus pada peningkatan investasi dan penguatan daya saing industri pariwisata, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pariwisata. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam:

- (1) Infrastruktur dalam Peningkatan Ekonomi;
- (2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
- (3) Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Inovasi; dan
- (4) SDM yang berkualitas dan religious.

Pencapaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan akan dilakukan melalui lima Program Prioritas, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa.

Pencapaian sasaran Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah akan dilakukan melalui lima Program Prioritas 5 (lima) Program Prioritas yang akan dilaksanakan: (1) Perluasan Infrastruktur Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas

Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital.

Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; (3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Program Prioritas dalam Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup antara lain: (1) Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.

Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional didukung oleh 5 (lima) Program Prioritas, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; (5) Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.

Adapun detail dukungan terhadap Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi dapat dilihat dalam lampiran V.

Isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2018-2023 adalah :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survei tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia *Competitiveness Institute*, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait

kemudahan berbisnis, tertinggal dari Provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

2. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan memiliki luas 46.000 KM persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.
3. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan. Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisis lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, di atas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.
4. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah

sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berlimpah. Sulawesi Selatan diberkahi oleh sumber daya alam yang berlimpah. Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, karena sejak dulu hasil pangan dari petani Sulawesi Selatan sudah berlimpah karena banyaknya sawah dan iklim yang mendukung. Sulawesi Selatan juga memiliki destinasi wisata alam yang sangat indah, seperti Takabonerate di Kepulauan Selayar dan Taman Nasional Bantimurung di Maros. Namun, sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan belum dimanfaatkan dengan baik. Hasil sumber daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah, padahal ada potensi pengolahan yang bisa meningkatkan nilai tambah dan menambah pendapatan petani di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah menjaga kelestarian alam, karena lebih dari 50% wilayah Sulawesi Selatan adalah kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

1. Pelembagaan Pemerintahan yang bersih dan ber-akuntabilitas
2. Pembangunan pelabuhan ekspor, penumpang dan feeder serta bandara
3. Pengembangan Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional
4. a. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan Pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi; b. Akselerasi pembangunan rumah sakit regional
5. a. Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis; b. Pemeliharaan keanekaragaman hayati secara terkoordinasikan antar pemangku kepentingan

Tabel 4.6  
Dukungan Kabupaten Enrekang terhadap Prioritas Nasional

Arah Kebijakan Kabupaten Enrekang	Prioritas Nasional
Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan di Kawasan perdesaan/ Kawasan transmigrasi daerah	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
Peningkatan Kualitas drainase perkotaan dan	



Arah Kebijakan Kabupaten Enrekang	Prioritas Nasional
pedesaan	
Rasionalisasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga pendidik SD dan SMP	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovas
Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet	Transformasi Digital
Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
Penguatan implementasi inovasi Pelayanan publik	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola
Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas	Kependudukan
Akselerasi implementasi teknologi produksi dan pembangunan Kawasan – Kawasan berbasis komoditi lokal	Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
Pengembangan Inovasi pengolahan bahan pangan lokal	
Pemantapan sistem Pendukung pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan	
Pengembangan indikator – indikator pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan

Tabel 4.7  
Dukungan Kabupaten Enrekang terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan

Arah Kebijakan Kabupaten Enrekang	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan
Penguatan implementasi inovasi Pelayanan publik	Pelembagaan Pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
Akselerasi implementasi teknologi produksi dan pembangunan Kawasan – Kawasan berbasis komoditi lokal	Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis
Pengembangan Inovasi pengolahan bahan pangan lokal	
Pemantapan sistem Pendukung pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan	
Pengembangan indikator – indikator pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan	Pengembangan Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional

#### 4.2.2. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Enrekang diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD, maka kami mencoba merumuskan beberapa Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk dicermati oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Ranperda tentang APBD Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan;

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, maka sangat diharapkan untuk melakukan pembinaan aparatur pemerintah daerah terutama pada aspek:

- Peningkatan kualitas SDM aparatur.
- Mendorong terjadinya pergeseran paradigma kultur aparatur pemerintahan daerah agar senantiasa mengembangkan inovasi dan kreatifitas dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peningkatan sinergitas hubungan program antar OPD dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kab. Enrekang sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Enrekang.
- Mendorong peran pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan serta kelembagaan penunjangnya sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, untuk lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peningkatan kesejahteraan aparatur.

Disamping hal tersebut diatas masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian kita semua adalah:

- Penataan kelembagaan dan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
- Perlunya upaya peningkatan kualitas koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang membutuhkan penganggaran yang cukup besar.

- Penanganan masalah perbatasan antar kabupaten, perbatasan kawasan hutan lindung dan lokasi tanah masyarakat perlu dilakukan secara komprehensif, optimal dan terpadu.
- Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka DPRD juga akan memberikan komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

b. Bidang Infrastruktur;

- Mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dalam artian bahwa lebih memprioritaskan tindak lanjut terhadap program infrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan lain sebagainya yang belum selesai pengerjaannya untuk diakomodir dalam APBD tahun 2021.
- Pengembangan wilayah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan yang potensial. Oleh karena itu sangat diharapkan untuk membuka akses interkoneksi antar kecamatan, antara kecamatan dan desa serta antar desa yang satu dengan desa yang lain, menuju pada kantong-kantong produksi sekaligus mengupayakan pengembangan daerah terisolir dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
- Peningkatan dukungan dan ketersediaan infrastruktur dasar yang berbasis komoditas yang siap pakai sampai ketingkat desa dan pemukiman terpencil.
- Penciptaan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- Mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar lebih mengedepankan kualitas yang dihasilkan.

c. Bidang Ekonomi;

- Peningkatan peran UKM dengan mempertahankan pemberian bantuan modal kepada para usaha kecil dan menengah, peningkatan akses kesempatan kerja, peningkatan kualitas SDM para pelaku usaha kecil menengah.
- Revitalisasi pertanian menuju pertanian yang modern dengan pengembangan dan peningkatan sistem pertanian berbasis agrobisnis dan agroindustri.
- Dalam mewujudkan Kab. Enrekang sebagai daerah agropolitan maka sangat ditentukan oleh ketersediaan akses jalan, peralatan mesin pertanian, jaringan irigasi, pembentukan lembaga penyuluh berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kios sarana produksi dan pemasarannya.

- Peningkatan produksi hendaknya disesuaikan dengan permintaan pasar, agar hasil produksi para petani tersebut dapat langsung terdistribusi dan tidak mengalami kerusakan.
- Pembangunan pasar tradisional sebagai tempat transaksi kebutuhan pokok dan pemasaran produk unggulan masyarakat.
- Pengembangan budidaya peternakan dan perikanan khususnya pada wilayah yang potensial.
- Perlunya dilakukan penyesuaian terhadap standar harga satuan.
- Dalam rangka peningkatan kualitas para rekanan lokal, maka sangat diharapkan untuk lebih memberikan ruang yang cukup bagi para pelaku usaha jasa konstruksi lokal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah ini.

d. Bidang Sosial Budaya;

- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan yang lebih menjamin partisipasi dari seluruh sektor yang terkait dalam proses pembangunan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini pula kami menegaskan bahwa hasil dari pelaksanaan reses dan penjarangan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, hendaknya menjadi salah satu skala prioritas dalam pelaksanaan musrenbang.
- Manajemen pengelolaan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pemenuhan tenaga pendidik disetiap tingkatan sekolah, peningkatan kualitas guru hendaknya dilakukan seoptimal mungkin.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk penyediaan tenaga medis pada setiap tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas/poskesdes serta ketersediaan dokter ahli yang cukup di Rumah Sakit Umum Massenrempulu.
- Penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sebagai satu bentuk upaya dalam menekan laju angka pengangguran.

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1. RENCANA KERJA DAERAH

RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana, dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi perangkat Daerah dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dalam RPJPD, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan kemajuan program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2022. Rencana program dan kegiatan tahun 2021 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 14 Ayat (3) bahwa penyusunan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Proses musrenbang yang merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD dalam pengusulan program/kegiatan diusulkan melalui e-planning. Dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Enrekang tahun 2019 penyampaian usulan program/kegiatan melalui aplikasi perencanaan e-planning (36.91.28.90/eplanning-enrekang-2018).

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2021. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2021 terdiri dari program

internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

## **5.2. RENCANA KERJA DAERAH**

Tabel 5.1  
Rencana Kerja 2021 Kabupaten Enrekang

Dokumen tersedia di lampiran

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	URUSAN WAJIB														
1.01	Pendidikan														
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Budaya														
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini										6,750,000,000	7,425,000,000			
1.01.1.01.01.15.67	Pembentukan TK Negeri / Pembina			Kab.ENREKANG			Terbentuknya TK Negeri / Pembina		Jumlah TK Negeri/Pembina yang dibentuk	1 TK	500,000,000	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	3	
1.01.1.01.01.15.71	Penyediaan Alat Permainan Edukatif			Kab.ENREKANG			Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Satuan Pendidikan PAUD (TK/KB)	Jumlah PAUD Penerima Alat Permainan Edukatif (APE)	20 Lembaga PAUD	200,000,000	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.15.72	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD			Kab.ENREKANG			Terbangunnya Sarana Prasarana PAUD	TK/KB	Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD yang dibangun	5 RKB	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.15.73	Pembangunan Pagar/Talud Lembaga PAUD			Kab.ENREKANG			Terbangunnya Pagar/Talud PAUD	TK/KB	Panjang Pagar/Talud PAUD yang terbangun	300 Meter	300,000,000	330,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	3	
1.01.1.01.01.15.74	Pembangunan/Rehab. WC/Toilet PAUD			Kab.ENREKANG			Terbangunnya/rehab. WC/Toilet PAUD	TK/KB	Jumlah WC/Toilet PAUD yang dibangun/dir rehab.	10 Unit	500,000,000	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.15.75	Monitoring dan Evaluasi BOP PAUD (Dak Non Fisik)			Kab.ENREKANG			Terlaksananya MONEV BOP PAUD	TK/KB	Frekwensi MONEV BOP PAUD	12 Bulan	100,000,000	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.15.76	Penyediaan Insentif Guru PAUD						Tersedianya Insentif Guru PAUD	Guru PAUD	Jumlah Guru PAUD (TK/KB) Penerima Insentif	655 Guru PAUD	3,900,000,000	4,290,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.15.77	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keluarga			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Keluarga	Guru PAUD dan Orang Tua Siswa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keluarga	1 Keg	250,000,000	275,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.16	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun										45,500,000,000	50,050,000,000			
1.01.1.01.01.16.80	Pendidikan Emas SD dan SMP			Kab.ENREKANG			Tersedianya Dana Pendidikan Emas	338 Sekolah (SD dan SMP)	Volume pengelolaan Dana Pendidikan Emas	12 Bulan	14,000,000,000	15,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.16.88	Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP (DAK Non Fisik)						Tersedianya Dana BOS SD dan SMP	339 Sekolah (SD dan SMP)	Volume pengelolaan Dana BOS SD dan SMP	12 Bulan	31,000,000,000	34,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.16.96	Monev Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Monev Dana BOS SD dan SMP	340 Sekolah (SD dan SMP)	Volume Monev Dana BOS SD dan SMP	12 Bulan	200,000,000	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.16.97	Monev Pengelolaan Dana Pendidikan Emas			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Monev Pendidikan Emas	338 Sekolah (SD dan SMP)	Volume Monev Pendidikan Emas	12 Bulan	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.16.98	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan			Kab.ENREKANG			Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan	Sekolah SD dan SMP	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	1 Dokumen	50,000,000	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	3	
1.01.1.01.01.16.99	Pengelolaan Pendidikan Inklusi			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Pendidikan Inklusi	Murid/Siswa	Jumlah Kegiatan pengelolaan Pendidikan Inklusi	1 Keg	100,000,000	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										4,930,000,000	5,423,000,000			
1.01.1.01.01.20.15	Peningkatan Kualitas SDM			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan peningkatan Kualitas SDM	Guru	Capaian Nilai UKG setiap Tenaga Pendidik semakin meningkat	6,5	3,000,000,000	3,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.01.1.01.01.20.16	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala LAB dan Tata Usaha berprestasi			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala LAB dan Tata Usaha berprestasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mampu berpartisipasi dan berprestasi di Tk. Propinsi maupun di Tingkat Nasional	206 Tenaga Pendidik dan Kependidikan	120,000,000	132,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.20.17	Uji Kompetensi Tenaga Pendidik						Terlaksananya Uji Kompetensi Tenaga Pendidik	Guru	Jumlah Tenaga Pendidik yang menjadi Calon Kepala Sekolah	50 Guru	300,000,000	330,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.20.21	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagi tenaga pendidik			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK	Guru	Jumlah Guru PAUD dan Dikdas yang memahami Penerapan IT untuk menunjang proses belajar mengajar	120 Guru	100,000,000	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.20.24	Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Guru	Jumlah Tenaga Pendidik per Mata Pelajaran (MAPEL) yang mengikuti Kegiatan MGMP	360 Guru	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.20.27	Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF (Tutor dan Penyelenggara)			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PNF (Tutor dan Penyelenggara)	Guru	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman pelayanan terhadap pendidikan Non Formal	200 Guru	110,000,000	121,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.20.29	Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Terlaksananya kegiatan peningkatan kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2	Guru	Jumlah Guru / Tenaga Pendidik yang Memiliki Kualifikasi S1/S2	50	550,000,000	605,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.20.30	Pembinaan (KKG) dan MKPS			Kab.ENREKANG			Terlaksananya kegiatan Pembinaan KKG dan MKPS	Guru	Jumlah Gugus yang melakukan pembinaan KKG dan MKPS	24	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.20.36	Pelatihan Pengelola Perpustakaan/Laboratorium menjadi Kepala Perpustakaan/Laboratorium			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan/ Laboratorium menjadi Kepala Perpustakaan/ Laboratorium	Guru	Jumlah kepala perpustakaan/laboratorium yang mengikuti pelatihan kepustakaan dan Laboratorium	280 Guru	50,000,000	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.20.38	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	Meningkatnya Manajemen Kepala Sekolah	75 Kepala Sekolah	400,000,000	440,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>										<b>6,585,000,000</b>	<b>7,243,500,000</b>				
1.01.1.01.01.22.05	Pembinaan dewan pendidikan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan	Dewan Pendidikan	Frekwensi Pembinaan Dewan Pendidikan	12 Bulan	220,000,000	242,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.15	Rakor Pendidikan dan Kebudayaan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Rakor Pendidikan dan Kebudayaan	Entitas Pendidikan	Frekwensi Rakor Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan	60,000,000	66,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.18	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala LAB dan Tata Usaha berprestasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mampu berpartisipasi dan berprestasi di Tk. Propinsi maupun di Tingkat Nasional	206 Tenaga Pendidik dan Kependidikan	270,000,000	297,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.19	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (PAUD, SD/MI dan SMP/MTs)			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (PAUD, SD/MI dan SMP/MTs)	Sekolah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	3 Kegiatan	100,000,000	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.20	Penyediaan Dana Insentif Guru Sekolah Terpentil			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Dana Insentif Guru Sekolah terpentil	Guru	Jumlah Guru yang mendapatkan Insentif di Sekolah Terpentil	315 Guru	4,300,000,000	4,730,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.21	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	Meningkatnya Jumlah Sekolah yang menerapkan Manajemen Kelembagaan berbasis sekolah	30 Sekolah	45,000,000	49,500,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.22	Penilaian Angka Kredit Fungsional			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Penilaian Angka Kredit Fungsional	Guru Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai dalam 1 tahun	2458 DUPAK	270,000,000	297,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.01.1.01.01.22.23	Pemberantasan Buta Aksara Alquran			Kab.ENREKANG			Terlaksananya kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Alquran	Guru Mengaji TPA	Jumlah Lembaga TPA yang melaksanakan pemberantasan Buta Aksara Al-Quran	9 TPA	270,000,000	297,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.24	Worshop Penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP)			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP)	Guru	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan penyusunan RPP	50 Guru	100,000,000	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.25	Diklat Penyusunan DUPAK			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Diklat Penyusunan DUPAK	Guru	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan penyusunan DUPAK	268 Guru	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.26	Penjaminan Mutu Pendidikan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Penjaminan Mutu Pendidikan	Sekolah	Jumlah Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan	4 Kegiatan	500,000,000	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.22.27	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang dikinerja	265 Kepala Sekolah dan 27 Pengawas Sekolah	300,000,000	330,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
<b>1.01.1.01.01.24</b>	<b>Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts</b>										<b>46,470,000,000</b>	<b>51,117,000,000</b>				
1.01.1.01.01.24.01	Pemb/Rehab. WC/Toilet SD/MI dan SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembangunan/rehab. WC/Toilet SD/MI dan SMP/M.Ts	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts	Jumlah WC/Toilet SD/MI dan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.	20 Unit	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.24.02	Pemb/Rehab. Ruang Kelas Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembangunan/rehab. Ruang Kelas SD/MI dan SMP/M.Ts	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts	Jumlah Ruang Kelas SD/MI dan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.	35 Ruang	5,500,000,000	6,050,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.24.03	Pemb. Rehab Sarana & Prasarana SD/MI/SMP/M.Ts (DAK)			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembangunan/rehab.Sarana dan Prasarana SD/MI dan SMP/M.Ts	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts			30,000,000,000	33,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.24.04	Pemb./Rehab Pagar/Talud Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembangunan/rehab. Pagar/Talud SD/MI dan SMP/M.Ts	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts	Panjang Pagar/Talud SD/MI dan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.	3500 Mtr	2,800,000,000	3,080,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.24.05	Pengadaan Mobiler R.Kls Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pengadaan Mobiler Ruang Kelas SD/MI dan SMP/M.Ts	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts	Jumlah Mobiler Ruang Kelas yang diadakan	500 Pasang	350,000,000	385,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.24.07	Pemb./Rehab. Perpustakaan SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembangunan/rehab. Perpustakaan SMP/M.Ts	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts	Jumlah perpustakaan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.	1 Ruang	380,000,000	418,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.24.08	Pemb./Rehab. Laboratorium SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembangunan/rehab. Laboratorium SMP/M.Ts	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts	Jumlah Ruang Laboratorium SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.	2 Ruang	400,000,000	440,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.24.09	Pembangunan / Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SD / SMP			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembangunan/pendirian Unit sekolah baru (USB)	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts	Jumlah Sekolah Baru yang dibangun/didirikan	1	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.24.10	Pemb./Rehab.Perpustakaan SD/MI			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembangunan/rehab. perpustakaan SD/MI dan SMP/M.Ts	Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts	Jumlah perpustakaan SD/MI dan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.	18 Ruang	5,040,000,000	5,544,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
<b>1.01.1.01.01.25</b>	<b>Program Pendidikan Kesetaraan</b>										<b>1,800,000,000</b>	<b>1,980,000,000</b>				
1.01.1.01.01.25.01	Penyelenggaraan Paket A Setara SD			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Warga	Jumlah Lambaga yang menyelenggarakan Paket A setara SD	4 Lembaga	0	0	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		
1.01.1.01.01.25.02	PenyelenggaraanPaket B Setara SMP			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Warga	Jumlah Lambaga yang menyelenggarakan Paket A setara SD	4 Lembaga	50,000,000	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.25.03	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C Serata SMA	Warga	Jumlah Lambaga yang menyelenggarakan Paket A setara SD	4 Lambaga	50,000,000	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.25.05	Pemberian Bantuan Operasional PNF			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional PNF	Lembaga	Jumlah Lambaga Pendidikan Non Formal yang mendapatkan bantuan Operasional	8 Lambaga	170,000,000	187,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.25.06	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Warga	Jumlah Warga Usia 59 Tahun keatas yang ikut pendidikan pemberantasan buta aksara	200 Warga Buta Aksara	130,000,000	143,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.25.07	Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pendidikan Kecakapan Hidup	Lembaga	Jumlah Kegiatan Kursus-Kursus yang diikuti warga masyarakat	5 Kegiatan	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.25.08	Jambore PTKPNF Tk Kab			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Terlaksananya kegiatan Jambore PTKPNF Tk. Kabupaten	Tutor / Penyelenggara	Jumlah Kegiatan Jambore yang diikuti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	4 Kegiatan	250,000,000	275,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.25.09	Pemb. Rehab Sarana dan Prasarana SKB (DAK)			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Pembangunan/Rehab. Sarana	SKB	Jumlah SKB yang dibangun/direhabilitasi	1 SKB	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.26	Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)									950,000,000	1,045,000,000		
1.01.1.01.01.26.01	Pelaksanaan UAS SD/MI dan SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya UAS/UN SD/MI dan SMP/M.Ts	Murid/Siswa	Nilai Rata-rata uian Nasional SD/MI dan SMP/M.Ts	64	750,000,000	825,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.26.02	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD dan SMP						Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pembelajaran SD dan SMP	Murid/Siswa	Frekwensi pendalaman materi UN/UAS SD/SMP	2 Kali	200,000,000	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.27	Program Peningkatan Mutu Anak Didik										950,000,000	1,045,000,000		
1.01.1.01.01.27.02	Pelaksanaan Kompetisi anak didik berprestasi SD/MI dan SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya kompetisi anak didik berprestasi SD/MI dan SMP/M.Ts	Murid/Siswa	Jumlah Kegiatan Siswa pada kompetisi Sains dan Cabang Olahraga tingkat Propinsi dan Nasional	2 Keg	300,000,000	330,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.27.03	Pelaksanaan Gala Siswa TK.SMP/M.Ts			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Gala Siswa Tk. SMP/M.Ts	Murid/Siswa	Terbentuknya Tim Sepak Bola TK.SMP/M.Ts	1 Kegiatan	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.27.04	Literasi dan Numerasi Siswa			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Literasi dan Numerasi Siswa	Murid/Siswa, Guru	Jumlah kegiatan literasi dan numerasi siswa	1 Kegiatan	200,000,000	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.01.1.01.01.27.05	Jambore Literasi			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Jambore Literasi	Murid/Siswa, Guru	Volume Pelaksanaan Jambore Literasi	1 Kegiatan	300,000,000	330,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.17	<b>Kebudayaan</b>													
1.01.01	<b>Dinas Pendidikan dan Budaya</b>													
1.17.1.01.01.19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kekayaan Budaya										2,100,000,000	2,310,000,000		
1.17.1.01.01.19.01	Pengadaan Alat Musik Tradisional						Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat Musik Tradisional	Sekolah, Kelompok/ Sanggar Kesenian	Jumlah Jenis Alat Musik Tradisional yang diadakan	2 jenis	100,000,000	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.17.1.01.01.19.02	Pelatihan Instruktur Musik Tradisional						Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Instruktur Musik Tradisional	Guru Kesenian / Warga	Jumlah Instruktur Musik Tradisional yang latih	15 Orang	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.17.1.01.01.19.03	Pembinaan Musik Tradisional			Kab.ENREKANG			Terlaksananya kegiatan pembinaan Musik Tradisional	Sekolah, Kelompok/ Sanggar Kesenian	Jumlah Kelompok Musik Tradisional yang terbina	10 Kelompok	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.17.1.01.01.19.04	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Tokoh Adat	Frekwensi Pertemuan Tokoh Adat	12 Bulan	75,000,000	82,500,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.17.1.01.01.19.05	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya Daerah	Kelompok Kesenian	Jumlah Event dan Promosi Budaya daerah yang diikuti	3 Event	400,000,000	440,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.17.1.01.01.19.06	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Bidang Kebudayaan yang ada	1 Kegiatan	150,000,000	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.17.1.01.01.19.07	Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Massenrempulu			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Massenrempulu	Warga Pemerhati budaya	Frekwensi Sosialisasi Nilai-nilai budaya	12 Bulan	75,000,000	82,500,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
1.17.1.01.01.19.08	Pembangunan Museum Budaya			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Museum Budaya	Museum	Jumlah Museum yang terbangun	1 Museum	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Budaya	1
<b>Jumlah</b>											<b>119,265,000,000</b>	<b>131,191,500,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							14
1.02	Kesehatan																
1.02.01	Dinas Kesehatan																
1.02.1.02.01.15	Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%						3,080,000,000	3,388,000,000				
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Kab.ENREKANG			Tersedianya obat-obatan	15 PKM	terpenuhinya pengadaan obat di asyankes	100%		1,500,000,000	1,650,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.15.08	Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Kab.ENREKANG			jumlah PKM yang merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	15 PKM	meningkatnya jumlah PKM yang merencanakan kebutuhan obat	100%		40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.15.09	Distribusi dan Money Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Kab.ENREKANG			Jumlah distribusi obat-obatan ke puskesmas	15 PKM	meningkatnya distribusi obat di fasyankes	100%		40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.15.15	Pembangunan / Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten / Kota			Kab.ENREKANG			terehabilitasinya gudang farmasi	100%	terbangunnya gudang farmasi yang layak digunakan sesuai standar	100%		1,500,000,000	1,650,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		persentase peningkatan kunjungan rawat jalan puskesmas dan jaringannya	90%						13,595,000,000	14,954,500,000				
1.02.1.02.01.16.15	Pengadaan Alat Kesehatan			Kab.ENREKANG			presentase kebutuhan alkes di puskesmas dan jaringannya	95%	terpenuhinya kebutuhan alkes puskesmas	100%		6,975,000,000	7,672,500,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.18	Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah terpencil			Kab.ENREKANG			presentase PKM melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil	95%	terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil	100%		70,000,000	77,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.20	Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik)			Kab.ENREKANG			Presentase Puskesmas yang di akreditasi	95%	Terakreditasinya PKM di Kabupaten Enrekang	100%		1,950,000,000	2,145,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan rujukan di PKM	95%	meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas	100%		65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.22	Peningkatan pelayanan PKM menjadi ISO			Kab.ENREKANG			jumlah PKM yang menerapkan SMM ISO 9001					0	0	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.23	Penilaian Kinerja PKM			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan penilaian kinerja PKM	95%	meningkatnya penilaian kinerja PKM	100%		70,000,000	77,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.24	Peningkatan Pelayanan Perkesmas			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan perkesmas	95%	dilaksanakannya pengembangan pelayanan perkesmas	100%		60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.26	Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi			Kab.ENREKANG			presentase penilaian tenaga kesehatan berprestasi	100%	meningkatnya penilaian tenaga kesehatan di PKM	100%		75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.29	Peningkatan Pelayanan UKGS			Kab.ENREKANG			presentase UKGS di sekolah	95%	meningkatnya pengembangan penatalaksanaan program UKGS dan kesehatan olahraga di sarana pelayanan kesehatan dan sekiolah	100%		50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3		
1.02.1.02.01.16.30	Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu, Poskesdes/ Polindes			Kab.ENREKANG			tersedianya operasional puskesmas dan jaringannya	1 paket	meningkatnya operasional puskesmas dan jaringannya	1 paket		3,300,000,000	3,630,000,000	Dinas Kesehatan	3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.16.31	Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan			Kab.ENREKANG			terselenggaranya diklat teknis tenaga kesehatan fungsional	100%	meningkatnya pengetahuan teknis tenaga kesehatan fungsional	100%	400,000,000	440,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.32	Pelayanan Kesehatan Darah			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan kegiatan kes. darah	80%	meningkatnya pelayanan kesehatan darah di kabupaten		55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.33	Pelayanan Kesehatan Tradisional			Kab.ENREKANG			jumlah pus. yang mengembangkan penatalaksanaan kesehatan tradisional	14 PKM	meningkatnya pelayanan kesehatan tradisional	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.35	PIS-PK			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan kegiatan PIS-PK	95%	terlaksananya kegiatan PISPK di puskesmas dan jaringannya	100%	230,000,000	253,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.36	Pelaksanaan PKM BLUD			Kab.ENREKANG			presentase PKM BLUD	40%	terlaksananya PKM BLUD di puskesmas	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.37	Peningkatan Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan			Kab.ENREKANG			kepemilikan STR tenaga kesehatan	100%	meningkatnya kepemilikan STR tenaga kesehatan	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.38	Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Kab.ENREKANG			jumlah puskesmas yang mensosialisasikan program JKN	14 PKM	program JKN terimplementasikan dengan baik	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
<b>1.02.1.02.01.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>persentase upaya kesehatan masyarakat</b>	<b>60%</b>					<b>13,595,000,000</b>	<b>14,954,500,000</b>		
1.02.1.02.01.16.15	Pengadaan Alat Kesehatan			Kab.ENREKANG			presentase kebutuhan alkes di puskesmas dan jaringannya	95%	terpenuhnya kebutuhan alkes puskesmas	100%	6,975,000,000	7,672,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.18	Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah terpencil			Kab.ENREKANG			presentase PKM melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil	95%	terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil	100%	70,000,000	77,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.20	Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik)			Kab.ENREKANG			Presentase Puskesmas yang di akreditasi	95%	Terakreditasinya PKM di Kabupaten Enrekang	100%	1,950,000,000	2,145,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan rujukan di PKM	95%	meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.22	Peningkatan pelayanan PKM menjadi ISO			Kab.ENREKANG			jumlah PKM yang menerapkan SMM ISO 9001				0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.23	Penilaian Kinerja PKM			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan penilaian kinerja PKM	95%	meningkatnya penilaian kinerja PKM	100%	70,000,000	77,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.24	Peningkatan Pelayanan Perkesmas			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan perkesmas	95%	dilaksanakannya pengembangan pelayanan perkesmas	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.26	Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi			Kab.ENREKANG			presentase penilaian tenaga kesehatan berprestasi	100%	meningkatnya penilaian tenaga kesehatan di PKM	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.29	Peningkatan Pelayanan UKGS			Kab.ENREKANG			presentase UKGS di sekolah	95%	meningkatnya pengembangan penatalaksanaan program UKGS dan kesehatan olahraga di sarana pelayanan kesehatan dan sekiolah	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.30	Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu, Poskesdes/ Polindes			Kab.ENREKANG			tersedianya operasional puskesmas dan jaringannya	1 paket	meningkatnya operasional puskesmas dan jaringannya	1 paket	3,300,000,000	3,630,000,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.02.1.02.01.16.31	Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan			Kab.ENREKANG			terselenggaranya diklat teknis tenaga kesehatan fungsional	100%	meningkatnya pengetahuan teknis tenaga kesehatan fungsional	100%	400,000,000	440,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.32	Pelayanan Kesehatan Darah			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan kegiatan kes. darah	80%	meningkatnya pelayanan kesehatan darah di kabupaten		55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.33	Pelayanan Kesehatan Tradisional			Kab.ENREKANG			jumlah pus. yang mengembangkan penatalaksanaan kesehatan tradisional	14 PKM	meningkatnya pelayanan kesehatan tradisional	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.35	PIS-PK			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan kegiatan PIS-PK	95%	terlaksananya kegiatan PISPK di puskesmas dan jaringannya	100%	230,000,000	253,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.36	Pelaksanaan PKM BLUD			Kab.ENREKANG			presentase PKM BLUD	40%	terlaksananya PKM BLUD di puskesmas	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.37	Peningkatan Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan			Kab.ENREKANG			kepemilikan STR tenaga kesehatan	100%	meningkatnya kepemilikan STR tenaga kesehatan	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.38	Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Kab.ENREKANG			jumlah puskesmas yang mensosialisasikan program JKN	14 PKM	program JKN terimplementasikan dengan baik	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>persentase pemanfaatan TT dipuskesmas rawat inap (BOR)</b>	<b>54%</b>					<b>13,595,000,000</b>	<b>14,954,500,000</b>		
1.02.1.02.01.16.15	Pengadaan Alat Kesehatan			Kab.ENREKANG			presentase kebutuhan alkes di puskesmas dan jaringannya	95%	terpenuhinya kebutuhan alkes puskesmas	100%	6,975,000,000	7,672,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.18	Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah terpencil			Kab.ENREKANG			presentase PKM melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil	95%	terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil	100%	70,000,000	77,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.20	Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik)			Kab.ENREKANG			Presentase Puskesmas yang di akreditasi	95%	Terakreditasinya PKM di Kabupaten Enrekang	100%	1,950,000,000	2,145,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan rujukan di PKM	95%	meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.22	Peningkatan pelayanan PKM menjadi ISO			Kab.ENREKANG			jumlah PKM yang menerapkan SMM ISO 9001				0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.23	Penilaian Kinerja PKM			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan penilaian kinerja PKM	95%	meningkatnya penilaian kinerja PKM	100%	70,000,000	77,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.24	Peningkatan Pelayanan Perkesmas			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan perkesmas	95%	dilaksanakannya pengembangan pelayanan perkesmas	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.26	Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi			Kab.ENREKANG			presentase penilaian tenaga kesehatan berprestasi	100%	meningkatnya penilaian tenaga kesehatan di PKM	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.29	Peningkatan Pelayanan UKGS			Kab.ENREKANG			presentase UKGS di sekolah	95%	meningkatnya pengembangan penatalaksanaan program UKGS dan kesehatan olahraga di sarana pelayanan kesehatan dan sekiolah	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.30	Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu, Poskesdes/ Polindes			Kab.ENREKANG			tersedianya operasional puskesmas dan jaringannya	1 paket	meningkatnya operasional puskesmas dan jaringannya	1 paket	3,300,000,000	3,630,000,000	Dinas Kesehatan	3



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.16.31	Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan			Kab.ENREKANG			terselenggaranya diklat teknis tenaga kesehatan fungsional	100%	meningkatnya pengetahuan teknis tenaga kesehatan fungsional	100%	400,000,000	440,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.32	Pelayanan Kesehatan Darah			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan kegiatan kes. darah	80%	meningkatnya pelayanan kesehatan darah di kabupaten		55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.33	Pelayanan Kesehatan Tradisional			Kab.ENREKANG			jumlah pus. yang mengembangkan penatalaksanaan kesehatan tradisional	14 PKM	meningkatnya pelayanan kesehatan tradisional	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.35	PIS-PK			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan kegiatan PIS-PK	95%	terlaksananya kegiatan PISPK di puskesmas dan jaringannya	100%	230,000,000	253,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.36	Pelaksanaan PKM BLUD			Kab.ENREKANG			presentase PKM BLUD	40%	terlaksananya PKM BLUD di puskesmas	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.37	Peningkatan Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan			Kab.ENREKANG			kepemilikan STR tenaga kesehatan	100%	meningkatnya kepemilikan STR tenaga kesehatan	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.38	Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Kab.ENREKANG			jumlah puskesmas yang mensosialisasikan program JKN	14 PKM	program JKN terimplementasikan dengan baik	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
<b>1.02.1.02.01.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>rasio tenaga paramedis persatuan penduduk</b>	<b>2,1/1000 penduduk</b>					<b>13,595,000,000</b>	<b>14,954,500,000</b>		
1.02.1.02.01.16.15	Pengadaan Alat Kesehatan			Kab.ENREKANG			presentase kebutuhan alkes di puskesmas dan jaringannya	95%	terpenuhinya kebutuhan alkes puskesmas	100%	6,975,000,000	7,672,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.18	Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah terpencil			Kab.ENREKANG			presentase PKM melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil	95%	terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil	100%	70,000,000	77,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.20	Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik)			Kab.ENREKANG			Presentase Puskesmas yang di akreditasi	95%	Terakreditasinya PKM di Kabupaten Enrekang	100%	1,950,000,000	2,145,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan rujukan di PKM	95%	meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.22	Peningkatan pelayanan PKM menjadi ISO			Kab.ENREKANG			jumlah PKM yang menerapkan SMM ISO 9001				0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.23	Penilaian Kinerja PKM			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan penilaian kinerja PKM	95%	meningkatnya penilaian kinerja PKM	100%	70,000,000	77,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.24	Peningkatan Pelayanan Perkesmas			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan perkesmas	95%	dilaksanakannya pengembangan pelayanan perkesmas	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.26	Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi			Kab.ENREKANG			presentase penilaian tenaga kesehatan berprestasi	100%	meningkatnya penilaian tenaga kesehatan di PKM	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.29	Peningkatan Pelayanan UKGS			Kab.ENREKANG			presentase UKGS di sekolah	95%	meningkatnya pengembangan penatalaksanaan program UKGS dan kesehatan olahraga di sarana pelayanan kesehatan dan sekiolah	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.30	Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu, Poskesdes/ Polindes			Kab.ENREKANG			tersedianya operasional puskesmas dan jaringannya	1 paket	meningkatnya operasional puskesmas dan jaringannya	1 paket	3,300,000,000	3,630,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.31	Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan			Kab.ENREKANG			terselenggaranya diklat teknis tenaga kesehatan fungsional	100%	meningkatnya pengetahuan teknis tenaga kesehatan fungsional	100%	400,000,000	440,000,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.16.32	Pelayanan Kesehatan Darah			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan kegiatan kes. darah	80%	meningkatnya pelayanan kesehatan darah di kabupaten		55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.33	Pelayanan Kesehatan Tradisional			Kab.ENREKANG			jumlah pus. yang mengembangkan penatalaksanaan kesehatan tradisional	14 PKM	meningkatnya pelayanan kesehatan tradisional	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.35	PIS-PK			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan kegiatan PIS-PK	95%	terlaksananya kegiatan PISPK di puskesmas dan jaringannya	100%	230,000,000	253,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.36	Pelaksanaan PKM BLUD			Kab.ENREKANG			presentase PKM BLUD	40%	terlaksananya PKM BLUD di puskesmas	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.37	Peningkatan Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan			Kab.ENREKANG			kepemilikan STR tenaga kesehatan	100%	meningkatnya kepemilikan STR tenaga kesehatan	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.16.38	Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Kab.ENREKANG			jumlah puskesmas yang mensosialisasikan program JKN	14 PKM	program JKN terimplementasikan dengan baik	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.17	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>presentase apotek dan toko obat yang diawasi</b>	<b>100%</b>					<b>80,000,000</b>	<b>88,000,000</b>		
1.02.1.02.01.17.06	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Tentang Pemakaian Obat dan Alkes yang Benar			Kab.ENREKANG			frekuensi penggunaan obat dan alkes di puskesmas	1 kali	meningkatnya penggunaan obat dan Alkes di puskesmas	100%	35,000,000	38,500,000	Dinas Kesehatan	1
1.02.1.02.01.17.07	Pengawasan dan Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Produk Makanan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pengawasan sediaan farmasi dan produk makanan	5 Kecamatan	meningkatnya pengawasan sediaan farmasi dan produk makanan	5 Kecamatan	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.18	<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>presentase pemanfaatan taman obat keluarga</b>	<b>100%</b>					<b>40,000,000</b>	<b>44,000,000</b>		
1.02.1.02.01.18.07	Pembinaan Produksi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) & Produk Industri Rumah tangga (PIRT)			Kab.ENREKANG			Jumlah IKOT/PIRT yang dibina	27 IRT	Meningkatnya jumlah IKOT/PIRT yang dibina	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>presentase desa siaga purnama mandiri</b>	<b>26%</b>					<b>14,922,246,000</b>	<b>16,414,470,600</b>		
1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang mempunyai media promosi dan informasi sadar hidup sehat	14 PKM	Meningkatnya pengadaan media promosi	14 PKM	230,000,000	253,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.06	Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga			Kab.ENREKANG			Presentase desa/kelurahan siaga Aktif	13,50%	Menigkatnya pembinaan desa siaga	100%	43,000,000	47,300,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.07	Peningkatan Pelayanan Posyandu			Kab.ENREKANG			Persentase Posyandu Aktif	68%	Meningkatnya jumlah Posyandu yang aktif	100%	1,146,320,000	1,260,952,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.08	Pembinaan dan Pengembangan UKBM			Kab.ENREKANG			Jumlah UKBM yang Terbina	3 Kelompok	Meningkatnya jumlah UKBM yang dibina	100%	47,000,000	51,700,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.09	Pembinaan dan Pengembangan UKS			Kab.ENREKANG			Jumlah UKS yang terbentuk	3 Sekolah	Meningkatnya pembinaan disekolah mengenai UKS	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.14	Advokasi Kebijakan kesehatan dan Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Bidang Kesehatan			Kab.ENREKANG			jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat dalam rangka mendukung upaya kesehatan masyarakat	2 kebijakan	adanya kebijakan kesehatan yang dibuat	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.19.17	Pembinaan dan pengembangan Rumah Tangga ber PHBS			Kab.ENREKANG			Presentase Rumah tangga Ber PHBS	63%	Meningkatnya pembinaan rumah tangga ber PHBS	90%	160,000,000	176,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.18	Implementasi Germas			Kab.ENREKANG			Frekuensi Penyebarluasan Informasi Germas	1 Kali	penyebarluasan informasi germas	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.19	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)			Kab.ENREKANG			Tersedianya biaya operasional Puskesmas	15 PKM	Meningkatnya dana operasional kesehatan	100%	13,140,926,000	14,455,018,600	Dinas Kesehatan	3
<b>1.02.1.02.01.19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>66%</b>					<b>14,922,246,000</b>	<b>16,414,470,600</b>		
1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang mempunyai media promosi dan informasi sadar hidup sehat	14 PKM	Meningkatnya pengadaan media promosi	14 PKM	230,000,000	253,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.06	Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga			Kab.ENREKANG			Presentase desa/kelurahan siaga Aktif	13,50%	Meningkatnya pembinaan desa siaga	100%	43,000,000	47,300,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.07	Peningkatan Pelayanan Posyandu			Kab.ENREKANG			Persentase Posyandu Aktif	68%	Meningkatnya jumlah Posyandu yang aktif	100%	1,146,320,000	1,260,952,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.08	Pembinaan dan Pengembangan UKBM			Kab.ENREKANG			Jumlah UKBM yang Terbina	3 Kelompok	Meningkatnya jumlah UKBM yang dibina	100%	47,000,000	51,700,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.09	Pembinaan dan Pengembangan UKS			Kab.ENREKANG			Jumlah UKS yang terbentuk	3 Sekolah	Meningkatnya pembinaan disekolah mengenai UKS	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.14	Advokasi Kebijakan kesehatan dan Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Bidang Kesehatan			Kab.ENREKANG			jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat dalam rangka mendukung upaya kesehatan masyarakat	2 kebijakan	adanya kebijakan kesehatan yang dibuat	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.17	Pembinaan dan pengembangan Rumah Tangga ber PHBS			Kab.ENREKANG			Presentase Rumah tangga Ber PHBS	63%	Meningkatnya pembinaan rumah tangga ber PHBS	90%	160,000,000	176,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.18	Implementasi Germas			Kab.ENREKANG			Frekuensi Penyebarluasan Informasi Germas	1 Kali	penyebarluasan informasi germas	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.19.19	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)			Kab.ENREKANG			Tersedianya biaya operasional Puskesmas	15 PKM	Meningkatnya dana operasional kesehatan	100%	13,140,926,000	14,455,018,600	Dinas Kesehatan	3
<b>1.02.1.02.01.20</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>presentase balita Gizi buruk</b>	<b>0,03%</b>					<b>380,000,000</b>	<b>418,000,000</b>		
1.02.1.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			Kab.ENREKANG			Presentase Tersosialisasinya Kadarzi	100%	meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat tentang kadarzi	100%	46,000,000	50,600,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.07	Peningkatan surveilans program gizi			Kab.ENREKANG			Persentase balita gizi kurang	100%	meningkatnya deteksi balita gizi kurang	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.08	Intervensi Gizi Spesifik Penanganan Stunting			Kab.ENREKANG			Presentase Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita	28%	Meningkatnya intervensi stunting sesuai standar	75%	80,000,000	88,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.09	peningkatan perawatan balita gizi buruk			Kab.ENREKANG			Presentase balita gizi buruk/cakupan balita gizi mendapat perawatan	100%	Meningkatnya perawatan gizi buruk	100%	85,000,000	93,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.10	Peningkatan pemberian ASI Eksklusif			Kab.ENREKANG			Presentase/Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif	82%	meningkatnya cakupan bayi yang mendapat asi eksklusi	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.20.13	Survey Pola Konsumsi Bumil dan Baduta			Kab.ENREKANG			Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)				0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.14	Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga sadar gizi			Kab.ENREKANG			Persentase pelaksanaan pembinaan kadargizi di desa	100%	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sadar gizi	100%	34,000,000	37,400,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%					380,000,000	418,000,000		
1.02.1.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			Kab.ENREKANG			Presentase Tersosialisasinya Kadarzi	100%	meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat tentang kadarzi	100%	46,000,000	50,600,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.07	Peningkatan surveilans program gizi			Kab.ENREKANG			Persentase balita gizi kurang	100%	meningkatnya deteksi balita gizi kurang	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.08	Intervensi Gizi Spesifik Penanganan Stunting			Kab.ENREKANG			Presentase Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita	28%	Meningkatnya intervensi stanting sesuai standar	75%	80,000,000	88,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.09	peningkatan perawatan balita gizi buruk			Kab.ENREKANG			Presentase balita gizi buruk/cakupan balita gizi mendapat perawatan	100%	Meningkatnya perawatan gizi buruk	100%	85,000,000	93,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.10	Peningkatan pemberian ASI Eksklusif			Kab.ENREKANG			Presentase/Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif	82%	meningkatnya cakupan bayi yang mendapat asi ekslusi	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.13	Survey Pola Konsumsi Bumil dan Baduta			Kab.ENREKANG			Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)				0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.14	Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga sadar gizi			Kab.ENREKANG			Persentase pelaksanaan pembinaan kadargizi di desa	100%	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sadar gizi	100%	34,000,000	37,400,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		presentase penanggulangan masalah gizi balita, Bumil dan Rematri	100%					380,000,000	418,000,000		
1.02.1.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			Kab.ENREKANG			Presentase Tersosialisasinya Kadarzi	100%	meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat tentang kadarzi	100%	46,000,000	50,600,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.07	Peningkatan surveilans program gizi			Kab.ENREKANG			Persentase balita gizi kurang	100%	meningkatnya deteksi balita gizi kurang	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.08	Intervensi Gizi Spesifik Penanganan Stunting			Kab.ENREKANG			Presentase Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita	28%	Meningkatnya intervensi stanting sesuai standar	75%	80,000,000	88,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.09	peningkatan perawatan balita gizi buruk			Kab.ENREKANG			Presentase balita gizi buruk/cakupan balita gizi mendapat perawatan	100%	Meningkatnya perawatan gizi buruk	100%	85,000,000	93,500,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.20.10	Peningkatan pemberian ASI Eksklusif			Kab.ENREKANG			Presentase/Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif	82%	meningkatnya cakupan bayi yang mendapat asi eklusi	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.13	Survey Pola Konsumsi Bumil dan Baduta			Kab.ENREKANG			Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)				0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.20.14	Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga sadar gizi			Kab.ENREKANG			Persentase pelaksanaan pembinaan kadargizi di desa	100%	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sadar gizi	100%	34,000,000	37,400,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21	<b>Program pengembangan lingkungan sehat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>presentase rumah sehat</b>	<b>80%</b>					<b>680,000,000</b>	<b>748,000,000</b>		
1.02.1.02.01.21.05	Pengawasan kualitas air bersih/air minum			Kab.ENREKANG			presentase produk yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	100%	cakupan penduduk yang memiliki akses air minum layak	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.07	Peningkatan Kesehatan Olah Raga			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan olahraga	55%	meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga	80%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.11	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			Kab.ENREKANG			presentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	100%	meningkatnya desa yang melaksanakan STBM	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.14	Pengembangan Kabupaten Sehat			Kab.ENREKANG			jumlah kec. yang memiliki kriteria kabupaten sehat	12 kec	meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki kriteria kecamatan sehat	100%	90,000,000	99,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.15	Peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja			Kab.ENREKANG			presentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	100%	meningkatnya cakupan program kesehatan kerja	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.16	Pemeriksaan TTU, TPM dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)			Kab.ENREKANG			presentase kualitas TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat kesehatan	100%	meningkatnya TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.17	Koordinasi dan Studi EHRA Program PPSP			Kab.ENREKANG			Presentase survey studi EHRA	100%			350,000,000	385,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21	<b>Program pengembangan lingkungan sehat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>presentase TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi standar</b>	<b>100%</b>					<b>680,000,000</b>	<b>748,000,000</b>		
1.02.1.02.01.21.05	Pengawasan kualitas air bersih/air minum			Kab.ENREKANG			presentase produk yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	100%	cakupan penduduk yang memiliki akses air minum layak	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.07	Peningkatan Kesehatan Olah Raga			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan olahraga	55%	meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga	80%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.11	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			Kab.ENREKANG			presentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	100%	meningkatnya desa yang melaksanakan STBM	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.21.14	Pengembangan Kabupaten Sehat			Kab.ENREKANG			jumlah kec. yang memiliki kriteria kabupaten sehat	12 kec	meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki kriteria kecamatan sehat	100%	90,000,000	99,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.15	Peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja			Kab.ENREKANG			presentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	100%	meningkatnya cakupan program kesehatan kerja	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.16	Pemeriksaan TTU, TPM dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)			Kab.ENREKANG			presentase kualitas TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat kesehatan	100%	meningkatnya TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.17	Koordinasi dan Studi EHRA Program PPSP			Kab.ENREKANG			Presentase survey studi EHRA	100%			350,000,000	385,000,000	Dinas Kesehatan	3
<b>1.02.1.02.01.21</b>	<b>Program pengembangan lingkungan sehat</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>capaian kriteria kabupaten sehat</b>	<b>12 kec</b>					<b>680,000,000</b>	<b>748,000,000</b>		
1.02.1.02.01.21.05	Pengawasan kualitas air bersih/air minum			Kab.ENREKANG			presentase produk yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	100%	cakupan penduduk yang memiliki akses air minum layak	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.07	Peningkatan Kesehatan Olah Raga			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan olahraga	55%	meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga	80%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.11	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			Kab.ENREKANG			presentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	100%	meningkatnya desa yang melaksanakan STBM	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.14	Pengembangan Kabupaten Sehat			Kab.ENREKANG			jumlah kec. yang memiliki kriteria kabupaten sehat	12 kec	meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki kriteria kecamatan sehat	100%	90,000,000	99,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.15	Peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja			Kab.ENREKANG			presentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	100%	meningkatnya cakupan program kesehatan kerja	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.16	Pemeriksaan TTU, TPM dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)			Kab.ENREKANG			presentase kualitas TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat kesehatan	100%	meningkatnya TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.21.17	Koordinasi dan Studi EHRA Program PPSP			Kab.ENREKANG			Presentase survey studi EHRA	100%			350,000,000	385,000,000	Dinas Kesehatan	3
<b>1.02.1.02.01.22</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</b>	<b>98,67%</b>					<b>1,303,000,000</b>	<b>1,433,300,000</b>		
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi			Kab.ENREKANG			Cakupan imunisasi bayi lengkap	85%	meningkatnya cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	120,000,000	132,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah			Kab.ENREKANG			Presentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam serta Terlaksananya kewaspadaan dini KLB	100%	meningkatnya penyelidikan epidemilgi KLB di desa/kelurahan	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.14	pengegahan dan penanggulangan penyakit diare dan kecacingan			Kab.ENREKANG			Presentase Penderita diare yang ditangani	100%	meningkatnya penanganan penderita diare sesuai standar	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.02.1.02.01.22.17	Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid dan pnemonia			Kab.ENREKANG			Presentase/Cakupan balita thypoid dan pneumonia yang ditangani		meningkatnya pelayanan kesehatan balita		0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.18	pencegahan dan penanggulngan penyakit malaria dan rabies			Kab.ENREKANG			Presentase Angka kejadian Malaria dan Rabies		menurunnya angka kejadian malaru		0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.19	Penemuan dan pengobatan penderita kusta			Kab.ENREKANG			Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		meningkatnya intervensi penderita penyakit trpis	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.20	Penyelenggaraan Kesehatan matra			Kab.ENREKANG			Presentase Pemeriksaan kesehatan jemaah haji	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan matra	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.21	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM di Puskesmas	15 PKM	Meningkatnya jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.22	Pengendalian Penyakit Filariasis			Kab.ENREKANG			Presentase pengendalian penyakit Filariasis	100%	meningkatnya pengendalian penyakit filariasis	38,000,000	41,800,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.23	pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD			Kab.ENREKANG			Presentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	meningkatnya deteksi dini dan penanganan penderita DBD sesuai standar	155,000,000	170,500,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.26	Pemantauan Penyakit zoonosis			Kab.ENREKANG			presentase pengendalian penyakit zoonosis		meningkatnya pengendalian penyakit zoonosis	0	0	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.27	Peningkatan pengindraan mata dan telinga			Kab.ENREKANG			Presentase Pelayanan Pengindraan Mata dan Telinga	95%	meningkatnya pelayanan kesehatan mata dan telinga	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.28	Penanggulangan Krisis Kesehatan			Kab.ENREKANG			Presentase Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh TRC	90%	meningkatnya penanggulangan bencana krisis kesehatan	150,000,000	165,000,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.29	pelatihan petugas kesehatan dalam penanganan kasus penyakit kusta			Kab.ENREKANG			Presentase Petugas Pemegang Program Kusta yang terlatih	100%	meningkatnya pengetahuan petugas pemegang program	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.30	pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria			Kab.ENREKANG			Presentase Penanganan Kejadian akibat malaria	100%	meningkatnya penanganan kejadian malaria	55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.31	pencegahan dan penanggulangan NAFZA			Kab.ENREKANG			Presentase Sekolah Yang Melakukan Penanggulangan NAFZA	60%	meningkatnya penanggulangan NAFZA di sekolah	80,000,000	88,000,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.32	pencegahan dan penanggulangan penyakit hepatitis			Kab.ENREKANG			Presentase Deteksi dini penderita hepatitis	100%	meningkatnya deteksi dini penderita hepatitis	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.33	pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies			Kab.ENREKANG			Presentase Penanganan Angka Kejadian Kasus Gigitan Rabies ( Zoonosis)	100%	meningkatnya penanganan kejadian rabies sesuai standar	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.34	Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid			Kab.ENREKANG			Presentase Penderita Thypoid yang ditangani	100%	meingkatnya penanganan penderit thypoid sesuai standar	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3	
1.02.1.02.01.22.35	pencegahan dan penanggulangan penyakit pnemonia			Kab.ENREKANG			Presentase balita pneumonia yang ditangani	100%	Meningkatnya penanganan balita pneumonia sesuai standar	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		persentase penemuan dan pengobatan penyakit menular	92%					1,303,000,000	1,433,300,000		
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi			Kab.ENREKANG			Cakupan imunisasi bayi lengkap	85%	meningkatnya cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	120,000,000	132,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah			Kab.ENREKANG			Presentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam serta Terlaksananya kewaspadaan dini KLB	100%	meningkatnya penyelidikan epidemilgi KLB di desa/kelurahan	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.14	pencegahan dan penanggulangan penyakit diare dan kecacingan			Kab.ENREKANG			Presentase Penderita diare yang ditangani	100%	meningkatnya penanganan penderita diare sesuai standar	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.17	Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid dan pnemonia			Kab.ENREKANG			Presentase/Cakupan balita thypoid dan pneumonia yang ditangani		meningkatnya pelayanan kesehatan balita		0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.18	pencegahan dan penanggulagn penyakit malaria dan rabies			Kab.ENREKANG			Presentase Angka kejadian Malaria dan Rabies		menurunnya angka kejadian malaru		0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.19	Penemuan dan pengobatan penderita kusta			Kab.ENREKANG			Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		meningkatnya intervensi penderita penyakit trpis		50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.20	Penyelenggaraan Kesehatan matra			Kab.ENREKANG			Presentase Pemeriksaan kesehatan jemaah haji	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan matra	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.21	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM di Puskesmas	15 PKM	Meningkatnya jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM	15 PKM	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.22	Pengendalian Penyakit Filariasis			Kab.ENREKANG			Presentase pengendalian penyakit Filariasis	100%	meningkatnya pengendalian penyakit filariasis	100%	38,000,000	41,800,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.23	pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD			Kab.ENREKANG			Presentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	meningkatnya deteksi dini dan penanganan penderita DBD sesuai standar	100%	155,000,000	170,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.26	Pemantauan Penyakit zoonosis			Kab.ENREKANG			presentase pengendalian penyakit zoonosis		meningkatnya pengendalian penyakit zoonosis	100%	0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.27	Peningkatan pengindraan mata dan telinga			Kab.ENREKANG			Presentase Pelayanan Penginderaan Mata dan Telinga	95%	meningkatnya pelayanan kesehatan mata dan telinga	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.28	Penanggulangan Krisis Kesehatan			Kab.ENREKANG			Presentase Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh TRC	90%	meningkatnya penanggulangan bencana krisis kesehatan	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.29	pelatihan petugas kesehatan dalam penanganan kasus penyakit kusta			Kab.ENREKANG			Presentase Petugas Pemegang Program Kusta yang terlatih	100%	meningkatnya pengetahuan petugas pemegang program	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.30	pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria			Kab.ENREKANG			Presentase Penanganan Kejadian akibat malaria	100%	meningkatnya penanganan kejadian malaria	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.22.31	pencegahan dan penanggulangan NAFZA			Kab.ENREKANG			Presentase Sekolah Yang Melakukan Penanggulangan NAFZA	60%	meningkatnya penanggulangan NAFZA di sekolah	85%	80,000,000	88,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.32	pencegahan dan penanggulangan penyakit hepatitis			Kab.ENREKANG			Presentase Deteksi dini penderita Hepatitis	100%	meningkatnya deteksi dini penderita hepatitis	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.33	pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies			Kab.ENREKANG			Presentase Penanganan Angka Kejadian Kasus Gigitan Rabies ( Zoonosis)	100%	meningkatnya penanganan kejadian rabies sesuai standar	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.34	Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid			Kab.ENREKANG			Presentase Penderita Thypoid yang ditangani	100%	meingkatnya penanganan penderita thypoid sesuai standar	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.35	penegahan dan penanggulangan penyakit pnemonia			Kab.ENREKANG			Presentase balita pneumonia yang ditangani	100%	Meningkatnya penanganan balita pneumonia sesuai standar	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular</b>	<b>31%</b>					<b>1,303,000,000</b>	<b>1,433,300,000</b>		
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi			Kab.ENREKANG			Cakupan imunisasi bayi lengkap	85%	meningkatnya cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	120,000,000	132,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah			Kab.ENREKANG			Presentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam serta Terlaksananya kewaspadaan dini KLB	100%	meningkatnya penyelidikan epidemilgi KLB di desa/kelurahan	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.14	pencegahan dan penanggulangan penyakit diare dan kecacingan			Kab.ENREKANG			Presentase Penderita diare yang ditangani	100%	meningkatnya penanganan penderita diare sesuai standar	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.17	Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid dan pnemonia			Kab.ENREKANG			Presentase/Cakupan balita thypoid dan pneumonia yang ditangani		meningkatnya pelayanan kesehatan balita		0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.18	pencegahan dan penanggulagn penyakit malaria dan rabies			Kab.ENREKANG			Presentase Angka kejadian Malaria dan Rabies		menurunnya angka kejadian malaru		0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.19	Penemuan dan pengobatan penderita kusta			Kab.ENREKANG			Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		meningkatnya intervensi penderita penyakit trpis		50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.20	Penyelenggaraan Kesehatan matra			Kab.ENREKANG			Presentase Pemeriksaan kesehatan jemaah haji	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan matra	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.21	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM di Puskesmas	15 PKM	Meningkatnya jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM	15 PKM	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.22	Pengendalian Penyakit Filariasis			Kab.ENREKANG			Presentase pengendalian penyakit Filariasis	100%	meningkatnya pengendalian penyakit filariasis	100%	38,000,000	41,800,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.23	pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD			Kab.ENREKANG			Presentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	meningkatnya deteksi dini dan penanganan penderita DBD sesuai standar	100%	155,000,000	170,500,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.22.26	Pemantauan Penyakit zoonosis			Kab.ENREKANG			presentase pengendalian penyakit zoonosis		meningkatnya pengendalian penyakit zoonosis	100%	0	0	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.27	Peningkatan penginderaan mata dan telinga			Kab.ENREKANG			Presentase Pelayanan Penginderaan Mata dan Telinga	95%	meningkatnya pelayanan kesehatan mata dan telinga	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.28	Penanggulangan Krisis Kesehatan			Kab.ENREKANG			Presentase Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh TRC	90%	meningkatnya penanggulangan bencana krisis kesehatan	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.29	pelatihan petugas kesehatan dalam penanganan kasus penyakit kusta			Kab.ENREKANG			Presentase Petugas Pemegang Program Kusta yang terlatih	100%	meningkatnya pengetahuan petugas pemegang program	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.30	pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria			Kab.ENREKANG			Presentase Penanganan Kejadian akibat malaria	100%	meningkatnya penanganan kejadian malaria	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.31	pencegahan dan penanggulangan NAFZA			Kab.ENREKANG			Presentase Sekolah Yang Melakukan Penanggulangan NAFZA	60%	meningkatnya penanggulangan NAFZA di sekolah	85%	80,000,000	88,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.32	pencegahan dan penanggulangan penyakit hepatitis			Kab.ENREKANG			Presentase Deteksi dini penderita Hepatitis	100%	meningkatnya deteksi dini penderita hepatitis	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.33	pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies			Kab.ENREKANG			Presentase Penanganan Angka Kejadian Kasus Gigitan Rabies ( Zoonosis)	100%	meningkatnya penanganan kejadian rabies sesuai standar	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.34	Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid			Kab.ENREKANG			Presentase Penderita Thypoid yang ditangani	100%	meingkatnya penanganan penderita thypoid sesuai standar	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.22.35	penegahan dan penanggulangan penyakit pnemonia			Kab.ENREKANG			Presentase balita pneumonia yang ditangani	100%	Meningkatnya penanganan balita pneumonia sesuai standar	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.25	<b>Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		<b>jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki</b>	<b>20 paket</b>					<b>15,665,332,000</b>	<b>17,231,865,200</b>		
1.02.1.02.01.25.01	Pembangunan Puskesmas			Kab.ENREKANG			Jumlah Puskesmas yang dibangun	2 Unit	adanya pembangunan Puskesmas	100%	4,000,000,000	4,400,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.25.25	Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis			Kab.ENREKANG			jumlah rumah dokter dan paramedic yang dibangun	2 unit	adanya rumah dinas yang dibangun	100%	470,000,000	517,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.25.26	Rehab Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis			Kab.ENREKANG			jumlah rumah dokter dan paramedic yang di rehabilitasi	2 unit	meningkatnya rehabilitasi rumah dinas di puskesmas	100%	500,000,000	550,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.25.28	rehabilitasi puskesmas			Kab.ENREKANG			jumlah PKM yang direhab	2 unit	meningkatnya rehabilitasi puskesmas	100%	4,065,189,000	4,471,707,900	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.25.29	Pembangunan Pustu/ Poskesdes			Kab.ENREKANG			jumlah pustu/poskesdes yang terbangun	3 unit	adanya pembangunan pustu/poskesdes	100%	800,000,000	880,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.25.31	pengadaan sarana dan prasarana kesehatan			Kab.ENREKANG			tersedianya sarana dan prasarana kesehatan	1 paket	meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan	100%	3,500,000,000	3,850,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.25.33	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pustu/Poskesdes			Kab.ENREKANG			jumlah pustu/poskesdes yang di rehabilitasi	3 unit	adanya rehabilitasi pustu/poskesdes di desa/kel	100%	770,000,000	847,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.25.35	Pembangunan/Penataan Tempat Pelayanan Kesehatan			Kab.ENREKANG			jumlah talud/pagar tempat pelayanan kesehatan	4 paket	terbangunnya tempat penataan pelayanan kesehatan	100%	810,143,000	891,157,300	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.02.1.02.01.25.36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program JKN (JKN Kapitasi)			Kab.ENREKANG			tersedianya sarana dan prasarana penunjang program JKN	1 paket	meningkatnya pengadaan sarana penunjang JKN kapitasi	100%	750,000,000	825,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN	15 PKM					34,000,000,000	37,400,000,000		
1.02.1.02.01.28.09	Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA)			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	tersedianya pembiayaan kesehatan oleh daerah	100%	20,000,000,000	22,000,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28.11	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas			Kab.ENREKANG			presentase cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan peserta JKN	100%	11,000,000,000	12,100,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28.12	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Kab.ENREKANG			cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	15 PKM	tersedianya pembiayaan kesehatan masyarakat	100%	3,000,000,000	3,300,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		termanfaatkannya dana kapitasi JKN di puskesmas	100%					34,000,000,000	37,400,000,000		
1.02.1.02.01.28.09	Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA)			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	tersedianya pembiayaan kesehatan oleh daerah	100%	20,000,000,000	22,000,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28.11	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas			Kab.ENREKANG			presentase cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan peserta JKN	100%	11,000,000,000	12,100,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28.12	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Kab.ENREKANG			cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	15 PKM	tersedianya pembiayaan kesehatan masyarakat	100%	3,000,000,000	3,300,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		terlaksananya pelayanan kesehatan gratis	100%					34,000,000,000	37,400,000,000		
1.02.1.02.01.28.09	Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA)			Kab.ENREKANG			presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	tersedianya pembiayaan kesehatan oleh daerah	100%	20,000,000,000	22,000,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28.11	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas			Kab.ENREKANG			presentase cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan peserta JKN	100%	11,000,000,000	12,100,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.28.12	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Kab.ENREKANG			cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	15 PKM	tersedianya pembiayaan kesehatan masyarakat	100%	3,000,000,000	3,300,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.33	Program Pengembangan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		persentase puskesmas yang menerapkan SIKDA	100%					483,000,000	531,300,000		
1.02.1.02.01.33.01	Penyusunan profil kesehatan, pemutakhiran data dan laporan tahunan kesehatan			Kab.ENREKANG			Presentase puskesmas yang membuat profil kesehatan	100%	adanya profil, dan laporan tahunan di puskesmas dan Dinas kesehatan	100%	80,000,000	88,000,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.33.02	pelatihan pengolahan dan analisa data kesehatan			Kab.ENREKANG			jumlah peserta pelatihan analisa data dan kesehatan	20 peserta	meningkatnya pengetahuan petugas analisa data di puskesmas dan dinas kesehatan	100%	68,000,000	74,800,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.33.03	Monitoring dan evaluasi program/kegiatan			Kab.ENREKANG			Jumlah Pelaksanaan pertemuan movev program / kegiatan	1 kali	terpantainya pelaksanaan program/kegiatan	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.33.04	pengembangan sistem informasi Kesehatan (SIK)			Kab.ENREKANG			Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA generic	4 PKM	Tersedianya Data Kesehatan yang akurat	100%	210,000,000	231,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.33.05	Koordinasi dan konsolidasi perencanaan program/kegiatan			Kab.ENREKANG			jumlah dokumen usulan rencana kegiatan tahunan	1 Dokumen	tersusunnya bahan rencana usulan program/kegiatan	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.34	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Hingga Usia Produktif	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat			100%	persentase warga negara usia pendidikan dasar dan usia produktif yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar				100,000,000	110,000,000		
1.02.1.02.01.34.01	Penjaringan kesehatan anak sekolah			Kab.ENREKANG			presentase penjaringan kelainan refraksi anak SD	94%	meningkatkan pelayanan kesehatan mata pada anak sekolah	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.34.02	Pelayanan kesehatan usia produktif			Kab.ENREKANG			presentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	meningkatkan pelayanan usia produktif	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.35	Program Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Penderita Hipertensi Diabetes Melitus Gangguan Jiwa Berat dan Terduga Tuberkulosis	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat			100%	persentase warga negara usia lanjut, penderita hipertensi, diabetes melitus dan penderita gangguan jiwa berat dan terduga tuberkulosis yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar				439,000,000	482,900,000		
1.02.1.02.01.35.01	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia			Kab.ENREKANG			presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.35.02	Sosialisasi pelayanan kesehatan bagi lansia			Kab.ENREKANG			jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi kesehatan lansia	1 kec	meningkatnya jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi tentang kesehatan lansia	1 kec	35,000,000	38,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.35.03	Pembinaan posyandu lansia			Kab.ENREKANG			Presentase posyandu lansia yang dibina	100%	Meningkatnya pembinaan posyandu lansia	100%	59,000,000	64,900,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.35.04	Pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi			Kab.ENREKANG			Presentase Warga Negara yang menderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat	100%	80,000,000	88,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.35.05	Penanggulangan Penyakit DM dan Obesitas			Kab.ENREKANG			*Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan serta Presentase obesitas pada penduduk umur >=18 tahun	60%	meningkatnya pelayanan penyakit DM sesuai standar	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.35.06	Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa komunitas			Kab.ENREKANG			Persentase penderita gangguan jiwa yang dilayani sesuai standar pelayanan	100%	meningkatnya deteksi dini gangguan jiwa	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.02.1.02.01.35.07	Penemuan dan pengobatan penderita TB			Kab.ENREKANG			Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Org	meningkatnya pengobatan penyakit TB sesuai standar	100%	125,000,000	137,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.36	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit tempat pelayanan kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertakwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		presentase ketersediaan sarana dan parasarana RS sesuai standar yang dipersyaratkan	100%					3,000,000,000	3,300,000,000		
1.02.1.02.01.36.01	Pembangunan rumah sakit			Kab.ENREKANG			jumlah rumah sakit pratama yang di bangun	1 unit	meningkatnya pelayanan di RS	100%	2,000,000,000	2,200,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.36.20	Pembangunan / Rehab Labkesda			Kab.ENREKANG			terbangunnya laboratorium kesehatan daerah	1 unit	adanya bangunan labkesda	100%	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.38	Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertakwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar	100%					120,000,000	132,000,000		
1.02.1.02.01.38.01	Zero survey IMS dan HIV/AIDS			Kab.ENREKANG			Jumlah penderita suspek HIV/AIDS/Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	100%	meningkatnya pelayanan kesehatan penderita HIV/AIDS	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.38.02	Edukasi perilaku berisiko IMS dan HIV/AIDS			Kab.ENREKANG			Frekuensi edukasi perilaku berisiko tentang IMS dan HIV/AIDS	12 Kali	meningkatnya edukasi tentang HIV/AIDS	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertakwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		persentase warga negara ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%					3,367,000,000	3,703,700,000		
1.02.1.02.01.40.01	Orientasi surveilans kematian ibu dan AMP			Kab.ENREKANG			Persentase Pengetahuan Petugas Kesehatan tentang Orientasi AMP	92%	meningkatnya pengetahuan petugas	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.03	Pelayanan antenatal care (ANC)			Kab.ENREKANG			persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	100%	meningkatnya kunjungan ibu hamil K4	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.04	Sosialisasi penanggulangan kematian ibu melahirkan			Kab.ENREKANG			Persentase Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup/Tersosialisasinya penanggulangan keselamatan ibu melahirkan	100%	menurunnya kematian ibu melahirkan	100%	95,000,000	104,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.05	Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja			Kab.ENREKANG			persentase sosialisasi kesehatan reproduksi remaja di sekolah	100%	meningkatnya pengetahuan petugas tentang reproduksi remaja	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.06	Pemantauan dan pengawasan ibu hamil dan bayi resti			Kab.ENREKANG			Persentase bumil dan bayi resti	100%	meningkatnya pelayanan bumil dan bayi resti	100%	93,000,000	102,300,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.07	Penanggulangan Komplikasi Bayi Resti			Kab.ENREKANG			Persentase bayi baru lahir yang ditangani mendapatkan layanan kesehatan	100%	meningkatnya pelayanan bayi baru lahir	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.08	Peningkatan Pelayanan persalinan melalui JAMPERSAL (DAK)			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang menyediakan operasional rumah tunggu kelahiran	15 PKM	terpenuhinya jumlah PKM yang tersedia operasionalnya	15 PKM	2,774,000,000	3,051,400,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.09	Pelayanan kesehatan ibu dan anak			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA	15 PKM	meningkatnya jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.02.1.02.01.40	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		presentase angka kematian Ibu	1%					3,367,000,000	3,703,700,000		
1.02.1.02.01.40.01	Orientasi surveilans kematian ibu dan AMP			Kab.ENREKANG			Persentase Pengetahuan Petugas Kesehatan tentang Orientasi AMP	92%	meningkatnya pengetahuan petugas	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.03	Pelayanan antenatal care (ANC)			Kab.ENREKANG			persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	100%	meningkatnya kunjungan ibu hamil K4	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.04	Sosialisasi penanggulangan kematian ibu melahirkan			Kab.ENREKANG			Persentase Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup/Tersosialisasinya penanggulangan keselamatan ibu melahirkan	100%	menurunnya kematian ibu melahirkan	100%	95,000,000	104,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.05	Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja			Kab.ENREKANG			persentase sosialisasi kesehatan reproduksi remaja di sekolah	100%	meningkatnya pengetahuan petugas tentang reproduksi remaja	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.06	Pemantauan dan pengawasan ibu hamil dan bayi resti			Kab.ENREKANG			Presentase bumil dan bayi resti	100%	meningkatnya pelayanan bumil dan bayi resti	100%	93,000,000	102,300,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.07	Penanggulangan Komplikasi Bayi Resti			Kab.ENREKANG			Persentase bayi baru lahir yang ditangani mendapatkan layanan kesehatan	100%	meningkatnya pelayanan bayi baru lahir	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.08	Peningkatan Pelayanan persalinan melalui JAMPERSAL (DAK)			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang menyediakan operasional rumah tunggu kelahiran	15 PKM	terpenuhinya jumlah PKM yang tersedia operasionalnya	15 PKM	2,774,000,000	3,051,400,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.09	Pelayanan kesehatan ibu dan anak			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA	15 PKM	meningkatnya jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		presentase angka kematian Bayi	2%					3,367,000,000	3,703,700,000	S	
1.02.1.02.01.40.01	Orientasi surveilans kematian ibu dan AMP			Kab.ENREKANG			Persentase Pengetahuan Petugas Kesehatan tentang Orientasi AMP	92%	meningkatnya pengetahuan petugas	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.03	Pelayanan antenatal care (ANC)			Kab.ENREKANG			persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	100%	meningkatnya kunjungan ibu hamil K4	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.04	Sosialisasi penanggulangan kematian ibu melahirkan			Kab.ENREKANG			Persentase Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup/Tersosialisasinya penanggulangan keselamatan ibu melahirkan	100%	menurunnya kematian ibu melahirkan	100%	95,000,000	104,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.05	Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja			Kab.ENREKANG			persentase sosialisasi kesehatan reproduksi remaja di sekolah	100%	meningkatnya pengetahuan petugas tentang reproduksi remaja	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.06	Pemantauan dan pengawasan ibu hamil dan bayi resti			Kab.ENREKANG			Presentase bumil dan bayi resti	100%	meningkatnya pelayanan bumil dan bayi resti	100%	93,000,000	102,300,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.07	Penanggulangan Komplikasi Bayi Resti			Kab.ENREKANG			Persentase bayi baru lahir yang ditangani mendapatkan layanan kesehatan	100%	meningkatnya pelayanan bayi baru lahir	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
1.02.1.02.01.40.08	Peningkatan Pelayanan persalinan melalui JAMPERSAL (DAK)			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang menyediakan operasional rumah tunggu kelahiran	15 PKM	terpenuhinya jumlah PKM yang tersedia operasionalnya	15 PKM	2,774,000,000	3,051,400,000	Dinas Kesehatan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					1	2	3	4	5	6			7	8
1.02.1.02.01.40.09	Pelayanan kesehatan ibu dan anak			Kab.ENREKANG			Jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA	15 PKM	meningkatnya jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	3
<b>Jumlah</b>											<b>106,801,250,000</b>	<b>117,481,375,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							14
1.02	Kesehatan																
1.02.02	RSUD Massenrempulu																
1.02.1.02.02.15	Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertakwa (M2)								520,000,000	572,000,000						
1.02.1.02.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Kab.ENREKANG			Jumlah obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang disediakan di Rumah Sakit	500 jenis	Terpeuhinya kebutuhan obat dan perbekalan di Rumah sakit	90%	450,000,000	495,000,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.15.07	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi RS			Kab.ENREKANG			Jumlah APD, bahan pencegahan dan pengendalian infeksi yang disediakan	6 Jenis	Terpeuhinya APD dan bahan habis pakai di Rumah Sakit	90%	70,000,000	77,000,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								34,000,000	37,400,000					
1.02.1.02.02.23.01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan			Kab.ENREKANG			Jumlah standar pelayanan kesehatan yang disusun	1 Dok	Adanya acuan standar pelayanan di Rumah sakit	1 Dok	3,000,000	3,300,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.23.03	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan			Kab.ENREKANG			Jumlah Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	2 Dok	Tersusunnya Laporan Tahunan rm dan Propil Rumah Sakit		3,000,000	3,300,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.23.05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan			Kab.ENREKANG	Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan yang disusun	1 Dok			Adanya Acuan Standar Pelayanan di Rumah Sakit	1 Dok	3,000,000	3,300,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.23.09	Peningkatan Status RSUD Menjadi BLUD			Kab.ENREKANG			Terlaksanya pembimbingan persiapan BLUD RSUD	1 Kali	RSUD Massenrempulu menjadi BLUD	1 Kali	10,000,000	11,000,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.23.10	Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit			Kab.ENREKANG			Terlaksanya pembimbingan / survei awal akreditasi RSUD	1 Kali	Terakritisinya Rumah Sakit	1 Kali	15,000,000	16,500,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertakwa (M2)									21,126,000,000	23,238,600,000					
1.02.1.02.02.28.12	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Kab.ENREKANG			Jumlah pasien BPJS yang terlayani di Rumah Sakit	1200 pasien	Terlayannya pasien BPJS yang berobat di Rumah Sakit	100%	18,176,000,000	19,993,600,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.28.13	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Umum Rumah Sakit			Kab.ENREKANG			Jumlah pasien umum yang terlayani di Rumah Sakit	750 pasien	Terlayannya pasien umum yang berobat di Rumah Sakit	100%	1,100,000,000	1,210,000,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.28.14	Pelayanan Kesehatan Kurang Mampu / SKTM			Kab.ENREKANG			Jumlah pasien kurang mampu / SKTM yang terlayani di Rumah Sakit	30 Pasien	Terlayannya pasien kurang mampu / SKTM yang berobat di Rumah Sakit	100%	1,000,000,000	1,100,000,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.28.16	kemitraan pengolahan limbah rumah sakit			Kab.ENREKANG			Jumlah limbah medis yang dikelola pihak ketiga	500 Kg	Tertanganinya limbah medis di Rumah Sakit	100%	100,000,000	110,000,000	RSUD Massenrempulu	1			
1.02.1.02.02.28.17	Pelayanan kesehatan pasien korban kekerasan pada ibu dan anak			Kab.ENREKANG			Jumlah ibu dan anak yang mengalami kekerasan	50 Pasien	Terlayannya pasien korban kekerasan ibu dan anak yang berobat di Rumah Sakit	100%	50,000,000	55,000,000	RSUD Massenrempulu	3			
1.02.1.02.02.28.18	Kemitraan Pelayanan Pengobatan bagi Pasien Rujukan Pasien Miskin			Kab.ENREKANG			Jumlah rujukan pasien miskin yang terlayani Rumah Sakit	670 pasien	Terlayannya rujukan pasien miskin yang berobat di Rumah Sakit	100%	700,000,000	770,000,000	RSUD Massenrempulu	3			
1.02.1.02.02.36	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit tempat pelayanan kesehatan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)									4,490,000,000	4,939,000,000					
1.02.1.02.02.36.04	Pengembangan Kamar Operasi dan ICU			Kab.ENREKANG			Prosentase pengembangan kamar operasi	1 Unit	Tersedianya Kamar operasi dan ICU sesuai standar	1 Unit	700,000,000	770,000,000	RSUD Massenrempulu	3			
1.02.1.02.02.36.05	Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit (DAK DAU)			Kab.ENREKANG			Jumlah alat-alat kesehatan yang disediakan	5 Jenis	Terpeuhinya kebutuhan alkes di Rumah Sakit	85%	700,000,000	770,000,000	RSUD Massenrempulu	1			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.1.02.02.36.06	Pengadaan ambulance/mobil jenazah			Kab.ENREKANG			Jumlah ambulance/ mobil jenazah yang diadakan	1 Unit	Terpenuhinya kebutuhan ambulance	1 Unit	700,000,000	770,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.07	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain-lain)			Kab.ENREKANG			Jumlah peralatan rumah tangga Rumah Sakit yang diadakan	3 Item	Lancarnya operasional di Rumah Sakit	3 Item	400,000,000	440,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.08	Pengadaan bahan-bahan logistik RS			Kab.ENREKANG			Jumlah bahan logistik Rumah Sakit yang diadakan	50 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan pasien di Rumah Sakit	50 Jenis	100,000,000	110,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.09	Pengembangan rumah sakit			Kab.ENREKANG			Persentase pengembangan Rumah Sakit	70%	Terbangunnya ruangan sesuai kebutuhan	70%	250,000,000	275,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.10	Pengadaan kelengkapan fisik RSUD			Kab.ENREKANG			Persentase kelengkapan fisik yang diadakan di Rumah Sakit	90%	Terpenuhinya kebutuhan operasional Rumah Sakit	90%	400,000,000	440,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.11	Pengadaan Reagens/Bahan Habis Pakai			Kab.ENREKANG			Jumlah jenis reagens yang tersedia setiap tahun	4 Jenis	Tersedianya bahan habis pakai untuk pemeriksaan di Lab dan Radiologi	4 Jenis	500,000,000	550,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.12	Pengelolaan dan peningkatan pelayanan UTD RS			Kab.ENREKANG			Jumlah donor yang direkrut	150 Orang	Terpenuhinya kebutuhan darah untuk pasien di Rumah Sakit	150 Orang	100,000,000	110,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.13	Penyediaan bahan bakar operasional RS			Kab.ENREKANG			Jumlah bahan bakar yang tersedia	500 Liter	Lancarnya operasional Rumah sakit	500 Liter	100,000,000	110,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.14	Pengembangan SIM RS			Kab.ENREKANG			Persentase pengembangan SIM RS	90%	Adanya sarana informasi yang sesuai kebutuhan	90%	90,000,000	99,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.17	Pengembangan Media Promosi Kesehatan RS			Kab.ENREKANG			Jumlah media promosi yang diadakan	9 Media	Tersedianya sarana promosi kesehatan di Rumah Sakit	9 Media	90,000,000	99,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.18	Pengembangan IPAL RS			Kab.ENREKANG			Persentase pengembangan IPAL Rumah Sakit	90%	Berfungsinya IPAL sesuai syarat teknis	90%	60,000,000	66,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.36.19	Rehabilitasi Bangunan RS			Kab.ENREKANG			Jumlah ruangan yang di rehab/renov	3 ruangan	Berfungsinya bangunan Rumah Sakit	4 ruangan	300,000,000	330,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.37	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)									270,000,000	297,000,000				
1.02.1.02.02.37.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit			Kab.ENREKANG			Persentase pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit	80%	Beroperasinya sarana dan prasarana dengan baik	80%	100,000,000	110,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.37.02	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit			Kab.ENREKANG			Persentase pemeliharaan instalasi limbah Rumah Sakit	85%	Berfungsinya IPAL sesuai syarat teknis	85%	50,000,000	55,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
1.02.1.02.02.37.03	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit			Kab.ENREKANG			Persentase pemeliharaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	80%	Terlaksananya kalibrasi dan berfungsi alkes sesuai syarat kesehatan	85%	120,000,000	132,000,000	RSUD Massenrempulu	1		
<b>Jumlah</b>											<b>38,491,250,000</b>	<b>42,340,375,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003		
					6	7	8	9	10	11							14	15
1.03	Pekerjaan Umum																	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum																	
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah									1,920,000,000	2,112,000,000					
1.03.1.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat						Terpeliharanya alat Berat	19 Unit	Berfungsinya alat berat	100%		370,000,000	407,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.23.14	Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel						Terpeliharanya Alat Bengkel	19 unit	Berfungsinya Alat Bengkel	100%		75,000,000	82,500,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.23.15	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat dan Alat-alat Bengkel						Jumlah Alat Berat dan Alat Bengkel	2,00 unit	Meningkatnya Kapasitas Alat Berat dan Alat Bengkel yang Berfungsi Baik	100%		1,400,000,000	1,540,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.23.16	Monitoing Pengawasan Alat Berat dan alat Angkut						Jumlah Alat Berat dan Alat Angkut yang diawasi	21 Unit	Efektifitas Penggunaan Alat Berat dan Alat Angkut	100%		75,000,000	82,500,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah									12,900,000,000	14,190,000,000					
1.03.1.03.01.24.19	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi						Panjang Irigasi yang direhabilitasi	6 Km	Terpeliharanya jaringan Irigasi	53%		4,000,000,000	4,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.24.22	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi						Panjang irigasi yang ditingkatkan / dibangun	12 Km	Meningkatnya Jaringan Irigasi	53%		8,000,000,000	8,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.24.24	Pengelolaan Aset Irigasi dan Sungai						Panjang Irigasi yang ditingkatkan / dibangun	12 Km	Meningkatnya jaringan Irigasi	53%								
1.03.1.03.01.24.24	Pengelolaan Aset Irigasi dan Sungai						Jumlah Aset Irigasi dan sungai yang dikelola	255 Unit	Terkelolanya Aset Irigasi dan Sungai	100%		300,000,000	330,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.24.25	Pengelolaan Kelembagaan Sumber Daya Air						Jumlah Pertemuan dengan Kelembagaan SDA	6 Pertemuan	Terkelolanya Lembaga SDA	60%		100,000,000	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.24.27	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi						Jumlah Irigasi yang dipelihara	1600 Ha	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	53%		500,000,000	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.26	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah									2,000,000,000	2,200,000,000					
1.03.1.03.01.26.09	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air						Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air	1600 Ha	Terpeliharanya Prasarana Sumber Daya Air	60%		500,000,000	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.26.10	Pembangunan/Rehabilitasi prasarana sungai dan daerah rawan longsor						Jumlah Lokasi Pembangunan Talud / Tanggul	15 Titik	Meningkatnya Pembangunan Talud / Pengamanan Lokasi Rawan Longsor	100%		1,500,000,000	1,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1			
1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terpenuhinya kebutuhan Air bersih Perkotaan dan Pedesaan									22,700,000,000	24,970,000,000					
1.03.1.03.01.27.10	Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Pedesaan						Jumlah Warga yang Memperoleh air minum / air bersih	1.500 Penduduk	Terpenuhinya Kebutuhan air untuk masyarakat pedesaan	100%		9,000,000,000	9,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3			
1.03.1.03.01.27.11	Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Ibukota Kecamatan						Jumlah Warga yang memperoleh air minum / air bersih	900 Penduduk	Terpenuhinya kebutuhan air untuk masyarakat ibu kota kecamatan	100%		5,400,000,000	5,940,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.01.27.12	Pengelolaan kelembagaan sumber daya air bersih						Jumlah Kelembagaan pengelola air bersih	7 lembaga	Tersedianya lembaga yang memelihara air bersih	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3
1.03.1.03.01.27.18	Penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat (PAMSIMAS)						Jumlah Warga yang Memperoleh fasilitas sanitasi dan air bersih	550 Penduduk	Terpenuhinya sarana dan Prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat	100%	8,250,000,000	9,075,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3
1.03.1.03.01.31	<b>Program Pengembangan Jaringan Jalan Pedesaan dan Perkotaan</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)</b>									<b>75,511,250,000</b>	<b>83,062,375,000</b>		
1.03.1.03.01.31.01	Kegiatan Peningkatan Jalan						Panjang jalan yang ditingkatkan	22 Km	Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik	61%	38,000,000,000	41,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.31.02	Kegiatan Rehabilitasi Jalan						Panjang jalanyang direhabilitasi	25 Km	Terpeliharanya Jalan Kabupaten	61%	26,166,250,000	28,782,875,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.31.03	Kegiatan Pembangunan Jembatan						Panjang Jembatan Yang Dibangun	62,00 m	Terhubungnya desa / dusun dengan jembatan penyeberangan	61%	8,075,000,000	8,882,500,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.31.04	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan						Panjang Jembatan yang di pelihara	60,00 m	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	61%	270,000,000	297,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.31.05	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan						Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara	25,00 Km	Terpeliharanya Sarana dan prasarana Transportasi Darat	61%	3,000,000,000	3,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.37	<b>Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)</b>	<b>Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah</b>								<b>565,000,000</b>	<b>621,500,000</b>		
1.03.1.03.01.37.01	Kegiatan Pengendalian Mutu dan Evaluasi Bangunan						Jumlah Titik Uji	190 TU	Meningkatnya Mutu Pekerjaan Konstruksi	100%	260,000,000	286,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.37.02	Bimbingan teknis pengendalian mutu dan penyelenggaraan sarana dan prasarana ke-PU-an						Jumlah Peserta	50 ORG	Meningkatnya Kapasitas SDA Aparat Teknis dan Penyedia Jasa Konstruksi	100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.37.03	Monitoring Evaluasi kegiatan ke-PU-an						Jumlah Monitoring	70 Lokasi	Meningkatnya Pengawasan Mutu Konstruksi	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.37.04	Pengendalian gambar Rencana Kerja dan Syarat Teknis Perencanaan						Jumlah Dokumen	150 Dok	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Sesuai Syarat Teknis dan Gambar	100%	65,000,000	71,500,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.37.05	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium						Jumlah Alat Laboratorium	30 Unit	Meningkatnya Kualitas Mutu Pengujian Laboratorium	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.38	<b>Program Penerangan Jalan Umum dan Ketenagalistrikan</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)</b>									<b>6,044,000,000</b>	<b>6,648,400,000</b>		
1.03.1.03.01.38.01	Pengembangan Energi Terbarukan						Tersedianya Unit Energi Terbarukan	150 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Listrik Perdesaan	100%	455,000,000	500,500,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.38.02	Koordinasi Ketenagalistrikan						Jumlah Koordinasi	60 Dok	Terwujudnya Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan PJU	100%	90,000,000	99,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.38.03	Pemeliharaan Lampu PJU						Jumlah Titik PJU Yang Dipelihara	1000 Titik	Terpeliharanya Lampu PJU	100%	1,649,000,000	1,813,900,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.38.04	Pengembangan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum						Jumlah Pangadaan Lampu PJU	150 Titik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana PJU	100%	350,000,000	385,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.03.1.03.01.38.05	Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan Umum						Terbayarnya Tagihan Listrik PJU	12 Dok	Beroperasi Lampu PJU Secara Optimal	100%	3,500,000,000	3,850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1
1.04	<b>Perumahan Rakyat</b>													
1.03.01	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.04.1.03.01.23	Program Penataan Kawasan Permukiman Taman dan Keindahan Kota	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah							11,200,000,000	12,320,000,000			
1.04.1.03.01.23.01	Penataan peningkatan jalan kawasan perumahan dan permukiman					Panjang Jalan lingkungan / dusun dalam kondisi baik	6.500 M	Tersedianya Jalan kawasan permukiman dalam kondisi baik	100%	8,200,000,000	9,020,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.04.1.03.01.23.02	Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor dan fasilitas umum					Jumlah fasilitas umum dan Gedung kantor yang dibangun dan direhab	10 Unit	Tersedianya fasilitas umum dan gedung Kantor	100%	3,000,000,000	3,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.04.1.03.01.24	Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong terintegrasi	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman							2,450,000,000	2,695,000,000			
1.04.1.03.01.24.01	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, talud dan dekker					Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong, talud dan dekker yang dibangun	3500 Meter	Terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas banjir	100%	2,450,000,000	2,695,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	1	
1.05	Penataan Ruang													
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum													
1.05.1.03.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Penerapan tata Ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan							760,000,000	836,000,000			
1.05.1.03.01.17.09	Pembuatan papan informasi TR					Jumlah Papan informasi TR yang dibuat	3 Bulan	Terwujudnya pengendalian	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.17.10	Kegiatan tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD)					frekuensi koordinasi penataan ruang	5 Kali	Terwujudnya koordinasi tim TKPRD	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.17.11	Pembuatan SIMTARU					Jumlah perda tata ruang yang tersosialisasi melalui website	1 Web	Terwujudnya SIMTARU	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.17.12	Pengendalian ruang					Jumlah Orang yang melakukan penegakan perda penataan ruang	7 Org	Terwujudnya Pengendalian Ruang	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.17.13	Koordinasi pengendalian ruang					Jumlah Orang yang melakukan Koordinasi pengendalian ruang	5 kali	Terwujudnya Koordinasi pengendalian ruang	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.17.14	Pengawasan pemanfaatan ruang					Jumlah Orang yang Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang	7 Org	Terwujudnya pengawasan pemanfaatan ruang	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.17.15	Pengawasan bangunan					Jumlah Orang yang Melakukan pengawasan bangunan	7 Org	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.17.16	Pendataan bangunan					Jumlah Dokumen pendataan bangunan	1 Dok	Terwujudnya informasi pendataan bangunan	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			14	15
1.05.1.03.01.18	Program Perencanaan Tata Ruang dan Penataan Bangunan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Penerapan tata Ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan							1,400,000,000	1,540,000,000			
1.05.1.03.01.18.02	Legalisasi atau perda RDTR					Jumlah Dokumen perda RDTR yang dilegalisasi	2 Dok	Terwujudnya Pemanfaatan tata ruang berdasarkan RDTR	100%	300,000,000	330,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.18.04	Legalisasi RTR kawasan strategis kabupaten					Jumlah dokumen RTR kawasan strategis yang dilegalisasi	2 Dok	Terwujudnya dokumen RTR kawasan Strategis kabupaten	100%	300,000,000	330,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.18.08	Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)					Jumlah dokumen RDTR yang disusun	1 Dok	Terwujudnya Pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW	100%	400,000,000	440,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.05.1.03.01.18.11	Penyusunan RTR kawasan strategis kabupaten					Jumlah Dokumen RTR kawasan Strategis kabupaten yang disusun	2 Dok	Terwujudnya Dokumen RTR kawasan strategis kabupaten	100%	400,000,000	440,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
1.06	Perencanaan Pembangunan													
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum													
1.06.1.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah							30,000,000	33,000,000			
1.06.1.03.01.21.29	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan					Jumlah Dokumen yang sejalan	1 Dok	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan	100%	30,000,000	33,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	3	
<b>Jumlah</b>										<b>143,324,750,000</b>	<b>157,657,225,000</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.03	Pekerjaan Umum														
1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang														
1.03.1.04.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terpenuhinya kebutuhan Air bersih Perkotaan dan Pedesaan		Persentase warga negara yang memperoleh layanan sanitasi	100%					8,587,000,000	9,445,700,000			
1.03.1.04.01.27.10	Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Pedesaan			Kab.ENREKANG			Jumlah warga yang memperoleh air minum / air bersih	1500 penduduk	100%	9,000,000,000	9,900,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.03.1.04.01.27.20	Penyusunan Laporan Kabupaten Sehat			Kab.ENREKANG			Tersedianya dokumen laporan kabupaten sehat	1 Dok	100%	17,000,000	18,700,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.03.1.04.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah		Panjang saluran drainase yang terbangun di lingkungan permukiman	100%					9,017,000,000	9,918,700,000			
1.03.1.04.01.27.10	Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Pedesaan			Kab.ENREKANG			Jumlah warga yang memperoleh air minum / air bersih	1500 penduduk	100%	9,000,000,000	9,900,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.03.1.04.01.27.20	Penyusunan Laporan Kabupaten Sehat			Kab.ENREKANG			Tersedianya dokumen laporan kabupaten sehat	1 Dok	100%	17,000,000	18,700,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04	Perumahan Rakyat														
1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang														
1.04.1.04.01.19	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah		Persentase pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%					320,000,000	352,000,000			
1.04.1.04.01.19.01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur			Kab.ENREKANG			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan dan Wilayah	1 Dok	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.19.02	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)			Kab.ENREKANG			Jumlah Orang Yang Melakukan Pendampingan	3 Org	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.19.03	Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)			Kab.ENREKANG			Jumlah Fasilitator Pendamping	4 Org	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.19.04	Penyusunan/ Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen RPIJM	1 Dok	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23	Program Penataan Kawasan Permukiman Taman dan Keindahan Kota	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah		Persentase penataan kawasan permukiman yang tertangani	75%					9,930,154,000	10,923,169,400			
1.04.1.04.01.23.01	Penataan peningkatan jalan kawasan perumahan dan permukiman			Kab.ENREKANG			Panjang jalan lingkungan / dusun dalam kondisi baik	6500 Meter	100%	8,200,000,000	9,020,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.03	Perencanaan kawasan permukiman pedesaan			Kab.ENREKANG			tersedianya dokumen kawasan permukiman pedesaan	1 dok	100%	300,000,000	330,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.04.1.04.01.23.04	Perencanaan kawasan permukiman perkotaan			Kab.ENREKANG			Tersedianya dokumen kawasan permukiman perkotaan	1 Dok	Terwujudnya dokumen kawasan permukiman perkotaan	100%	300,000,000	330,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	3		
1.04.1.04.01.23.10	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tarkim-TR			Kab.ENREKANG			Terwujudnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan	1 Dok	Terwujudnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan	100%	35,000,000	38,500,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.11	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Mutu dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Tarkim-TR			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta bimbingan	40 org	Terwujudnya bimbingan teknis pengendalian mutu pada penyedia jasa konstruksi	100%	60,000,000	132,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.12	Penyusunan Sitem Informasi/Database Perumahan			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen / sistem informasi database perumahan	3 Dok	Terwujudnya data untuk perencanaan dan pengembangan sarana perumahan	100%	372,800,000	410,080,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.13	Penyusunan Sistem Informasi/Database Kawasan Permukiman			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen / sistem informasi database kawasan permukiman	2 Dok	Terwujudnya data untuk perencanaan dan pengembangan sarana kawasan permukiman	100%	250,000,000	275,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.14	Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)			Kab.ENREKANG			Tersedianya dokumen RP3KP	1 Dok	Terwujudnya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	100%	300,000,000	330,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
<b>1.04.1.04.01.23</b>	<b>Program Penataan Kawasan Permukiman Taman dan Keindahan Kota</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)</b>	<b>Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah</b>								<b>9,817,800,000</b>	<b>10,799,580,000</b>				
1.04.1.04.01.23.01	Penataan peningkatan jalan kawasan perumahan dan permukiman			Kab.ENREKANG			Panjang jalan lingkungan / dusun dalam kondisi baik	6500 Meter	Tersedianya jalan kawasan permukiman dalam kondisi baik	100%	8,200,000,000	9,020,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.03	Perencanaan kawasan permukiman pedesaan			Kab.ENREKANG			tersedianya dokumen kawasan permukiman pedesaan	1 dok	terwujudnya dokumen kawasan permukiman pedesaan	100%	300,000,000	330,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	3		
1.04.1.04.01.23.04	Perencanaan kawasan permukiman perkotaan			Kab.ENREKANG			Tersedianya dokumen kawasan permukiman perkotaan	1 Dok	Terwujudnya dokumen kawasan permukiman perkotaan	100%	300,000,000	330,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	3		
1.04.1.04.01.23.10	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tarkim-TR			Kab.ENREKANG			Terwujudnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan	1 Dok	Terwujudnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan	100%	35,000,000	38,500,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.11	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Mutu dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Tarkim-TR			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta bimbingan	40 org	Terwujudnya bimbingan teknis pengendalian mutu pada penyedia jasa konstruksi	100%	60,000,000	132,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.12	Penyusunan Sitem Informasi/Database Perumahan			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen / sistem informasi database perumahan	3 Dok	Terwujudnya data untuk perencanaan dan pengembangan sarana perumahan	100%	372,800,000	410,080,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.13	Penyusunan Sistem Informasi/Database Kawasan Permukiman			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen / sistem informasi database kawasan permukiman	2 Dok	Terwujudnya data untuk perencanaan dan pengembangan sarana kawasan permukiman	100%	250,000,000	275,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
1.04.1.04.01.23.14	Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)			Kab.ENREKANG			Tersedianya dokumen RP3KP	1 Dok	Terwujudnya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	100%	300,000,000	330,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
<b>1.04.1.04.01.24</b>	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong terintegrasi</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)</b>	<b>Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah</b>		<b>Persentase saluran drainase / gorong-gorong, talud dan dekker yang dibangun</b>	<b>100%</b>					<b>2,450,000,000</b>	<b>2,695,000,000</b>				
1.04.1.04.01.24.01	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, talud dan dekker			Kab.ENREKANG			Panjang saluran drainase / gorong-gorong, talud dan dekker yang dibangun	3500 Meter	Terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas banjir	100%	2,450,000,000	2,695,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1		
<b>1.04.1.04.01.25</b>	<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Permukiman</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)</b>	<b>Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman</b>		<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan sanitasi yang baik</b>	<b>71.50%</b>					<b>8,570,000,000</b>	<b>9,427,000,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.1.04.01.25.01	Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)			Kab.ENREKANG			Jumlah koordinasi percepatan pembangunan sanitasi	6 kali	Terwujudnya pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai kriteria yang telah dipersyaratkan	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.04.1.04.01.25.02	Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)			Kab.ENREKANG			Jumlah fasilitator pendamping kegiatan animas	2 org	Terpenuhinya kebutuhan sanitasi untuk masyarakat	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.04.1.04.01.25.03	Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)			Kab.ENREKANG			Jumlah keluarga yang memperoleh fasilitas sanitasi	140 RT	Terpenuhinya sanitasi untuk masyarakat	100%	8,400,000,000	9,240,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.04.1.04.01.25.04	Operasional dan Pemeliharaan Sanitasi Masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah fasilitas sanitasi dalam kondisi yang baik	5 Unit	Terwujudnya pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.04.1.04.01.26	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah		Persentase penguasaan legalitas lahan pemda	90%					500,000,000	550,000,000		
1.04.1.04.01.26.01	Persertifikatan Tanah Milik Pemda			Kab.ENREKANG			Tersedianya legalitas lahan pemda	1 paket	Terwujudnya legalitas lahan pemda	90%	500,000,000	550,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.04.1.04.01.27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Asset Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah		Persentase kesediaan lahan pemda	70%					1,200,000,000	1,320,000,000		
1.04.1.04.01.27.01	Penataan dan Pembebasan Tanah Perkotaan/Pedesaan			Kab.ENREKANG			Tersedianya lahan untuk program pemda	1 Paket	Terwujudnya lahan untuk infrastruktur pemda	70%	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.04.1.04.01.27.02	Inventarisasi dan Penerbitan Masalah Pertanahan dalam Wilayah Kabupaten Enrekang			Kab.ENREKANG			Tersedianya fasilitas penanganan masalah pertanahan	1 paket	Terwujudnya penanganan masalah pertanahan	70%	200,000,000	220,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.05	Penataan Ruang													
1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang													
1.06	Perencanaan Pembangunan													
1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang													
1.19	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang													
1.19.1.04.01.26	Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah		Persentase warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	100%					1,625,000,000	1,787,500,000		
1.19.1.04.01.26.06	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana			Kab.ENREKANG			jumlah warga korban bencana yang mendapatkan rumah layak huni	20 rumah tinggal	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	100%	550,000,000	605,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	3
1.19.1.04.01.26.07	Penyediaan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah			Kab.ENREKANG			jumlah warga terkena relokasi program pemerintah yang mendapatkan rumah layak huni	20 rumah tinggal	tersedianya rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program pemerintah	100%	550,000,000	605,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	3



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					1	2	3	4	5	6			7	8
1.19.1.04.01.26.08	Pelaksanaan TMMD			Kab.ENREKANG			jumlah rumah yang di rehab dengan partisipasi TNI	10 rumah tinggal	memfasilitasi pelaksanaan kegiatan TNI manunggal membangun desa	100%	190,000,000	209,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.19.1.04.01.26.09	Pembangunan/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni			Kab.ENREKANG			jumlah rumah yang di rehab	15 rumah tinggal	terwujudnya rehabilitasi rumah	100%	265,000,000	291,500,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
1.19.1.04.01.26.10	Bantuan stimulan rumah swadaya			Kab.ENREKANG			jumlah fasilitator pendamping	8 orang	terwujudnya pendampingan bantuan rumah swadaya	100%	70,000,000	77,000,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1
<b>Jumlah</b>											<b>36,532,300,000</b>	<b>40,185,530,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							14
1.19	Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja																
1.19.1.19.03.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	58%				1,665,840,000	1,832,424,000						
1.19.1.19.03.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan (Orang)	55	Masyarakat Yang Telah Terlatih Dalam Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	55 Orang	42,350,000	46,585,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			
1.19.1.19.03.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kab.ENREKANG			Jumlah Aparat Yang Melakukan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Orang)	209 Orang	Meningkatnya Keamanan Lingkungan Di Kab. Enrekang	209 Orang	1,312,740,000	1,444,014,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			
1.19.1.19.03.15.11	Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil Hansip Linmas			Kab.ENREKANG			Cakupan Wilayah Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Kecamatan)	12 Kecamatan	Terwujudnya Simswakarsa Dalam Masyarakat	12 Kecamatan	148,500,000	163,350,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			
1.19.1.19.03.15.12	Pembinaan Mental dan Karakter Bagi Anggota Satpol PP			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Mental Dan Karakter (Orang)	50 Orang	Adanya Anggota Satpol PP Yang Handal	12 Bulan	55,000,000	60,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			
1.19.1.19.03.15.13	Peningkatan Keterampilan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Orang)	36 Orang	Meningkatnya Kemampuan Dan Pengalaman Linmas Dalam Menangani Penanggulangan Bencana	36 Orang	55,000,000	60,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			
1.19.1.19.03.15.14	Rehabilitasi Pos Jaga/Pos Ronda			Kab.ENREKANG			Jumlah Pos Jaga/Ronda Yang Di Rehabilitasi (Pos/Ronda)	6 Unit	Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Masyarakat	6 Unit	30,250,000	33,275,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3			
1.19.1.19.03.15.16	Patroli Wilayah			Kab.ENREKANG			Cakupan Wilayah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Peningkatan Kenyamanan Lingkungan (Kali)	81 Kali	Terlaksananya Patroli Wilayah	81 Kali	22,000,000	24,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3			
1.19.1.19.03.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentrangan dan Keindahan)	88%					1,665,840,000	1,832,424,000					
1.19.1.19.03.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan (Orang)	55	Masyarakat Yang Telah Terlatih Dalam Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	55 Orang	42,350,000	46,585,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			
1.19.1.19.03.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kab.ENREKANG			Jumlah Aparat Yang Melakukan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Orang)	209 Orang	Meningkatnya Keamanan Lingkungan Di Kab. Enrekang	209 Orang	1,312,740,000	1,444,014,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			
1.19.1.19.03.15.11	Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil Hansip Linmas			Kab.ENREKANG			Cakupan Wilayah Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Kecamatan)	12 Kecamatan	Terwujudnya Simswakarsa Dalam Masyarakat	12 Kecamatan	148,500,000	163,350,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			
1.19.1.19.03.15.12	Pembinaan Mental dan Karakter Bagi Anggota Satpol PP			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Mental Dan Karakter (Orang)	50 Orang	Adanya Anggota Satpol PP Yang Handal	12 Bulan	55,000,000	60,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.19.1.19.03.15.13	Peningkatan Keterampilan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Orang)	36 Orang	Meningkatnya Kemampuan Dan Pengalaman Linmas Dalam Menangani Penanggulangan Bencana	36 Orang	55,000,000	60,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1		
1.19.1.19.03.15.14	Rehabilitasi Pos Jaga/Pos Ronda			Kab.ENREKANG			Jumlah Pos Jaga/Ronda Yang Di Rehabilitasi (Pos/Ronda)	6 Unit	Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Masyarakat	6 Unit	30,250,000	33,275,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3		
1.19.1.19.03.15.16	Patroli Wilayah			Kab.ENREKANG			Cakupan Wilayah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Peningkatan Kenyamanan Lingkungan (Kali)	81 Kali	Terlaksananya Patroli Wilayah	81 Kali	22,000,000	24,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3		
1.19.1.19.03.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat		Proporsi Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi (Orang)	160					85,250,000	93,775,000				
1.19.1.19.03.19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah Satuan Keamanan Yang Terbentuk (Kelompok)	2 Kelompok	Kelompok Masyarakat Yang Siap Untuk Menjaga Keamanan Dilingkungan Masyarakat	2 Kelompok	30,250,000	33,275,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3		
1.19.1.19.03.19.03	Pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) bagi Satpol PP			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Pengendalian Massa (Orang)	50 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Aparat Dalam Mengendalikan Massa	50 Orang	55,000,000	60,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1		
1.19.1.19.03.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat		Angka Kriminalitas Yang Tertangani	4.57%					72,600,000	79,860,000				
1.19.1.19.03.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Yang Memperoleh Penyuluhan Tentang Pencegahan Peredaran Miras Dan Narkoba (Orang)	25 Orang	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	12 Bulan	24,200,000	26,620,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3		
1.19.1.19.03.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Yang Memperoleh Penyuluhan Pencegahan Perkembangan Praktek Prostitusi (Orang)	25 Orang	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	12 Bulan	24,200,000	26,620,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3		
1.19.1.19.03.20.06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Yang Memperoleh Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian (Orang)	25 Orang	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian	12 Bulan	24,200,000	26,620,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3		
1.19.1.19.03.27	Program Pelayanan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%					426,110,000	468,721,000				
1.19.1.19.03.27.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja			Kab.ENREKANG			Jumlah Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan (Kali)	12 Kali	Terlaksananya Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Pol PP	12 Bulan	25,000,000	27,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3		
1.19.1.19.03.27.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Kab.ENREKANG			Persentase Kerjasama Dengan Aparat Keamanan (%)	100%	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan	12 Bulan	20,000,000	22,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3		
1.19.1.19.03.27.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan Siskamswakarsa (Orang)	55 Orang	Terciptanya Kenyamanan Lingkungan Yang Memadai	12 Bulan	42,350,000	46,585,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.19.1.19.03.27.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Penegakan Perda			Kab.ENREKANG			Jumlah Monitoring Evaluasi Yang Dilakukan (Kali)	4 Kali	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pelaporan Penegakan Perda	4 Kali	27,500,000	30,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.27.09	Penegakan perda ( pajak rokok )			Kab.ENREKANG			Jumlah Penertiban Perda (Pajak Rokok) (Kali)	60 Kali	Terciptanya Penegakan Perda (Pajak Rokok)	60 Kali	161,260,000	177,386,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1
1.19.1.19.03.27.15	Penegakan Perda Umum (Perda/perbup)			Kab.ENREKANG			Jumlah Penertiban (Perda Umum dan Perbup) (kali)	48 Kali	Terlaksananya Penegakan Perda Umum	48 Kali	150,000,000	165,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%					412,530,000	453,783,000		
1.19.1.19.03.29.04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran			Kab.ENREKANG			Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran (Kegiatan)	15 Kegiatan	Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran dan Kesiapan Pencegahan Kebakaran Di setiap Kantor dan Tempat Usaha Lainnya	100%	66,000,000	72,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Orang)	40 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Peserta Diklat Dalam Melakukan Pertolongan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	60,000,000	66,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.06	Kegiatan Rekrutmen Tenaga sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.07	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.10	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.11	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.13	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.14	Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.15	Pos Komando Operasional Pemadam Kebakaran			Kab.ENREKANG			Jumlah Ketersediaan Bahan Bakar Dan Perawatan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran (Liter)	3000 Liter	Terjaminnya Kondisi Dan Kelayakan Kendaraan Damkar Dalam Operasi Pemadaman	100%	91,080,000	100,188,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1
1.19.1.19.03.29.16	Diklat Pemadam Kebakaran dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran (orang)	150 Orang	Bertambahnya Pengetahuan Peserta Diklat Tentang Metode Pemadaman Kebakaran Dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran	100%	38,500,000	42,350,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.19.1.19.03.29.17	Diklat Fire Resceu Petugas Pemadam Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.18	Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran										0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.19	Pengadaan peralatan Kerja Personil Petugas Damkar			Kab.ENREKANG			Jumlah Peralatan Standar Kerja Tim Petugas Pemadam Kebakaran (Buah)	10 Buah	Terpenuhinya Kelengkapan Peralatan Standar Kerja Tim Petugas Pemadam Kebakaran	100%	25,000,000	27,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1
1.19.1.19.03.29.20	Pengadaan Perlengkapan Petugas Damkar			Kab.ENREKANG			Jumlah Personil Yang Memperoleh Perlengkapan Standar Pemadam Kebakaran (Orang)	30 Orang	Tersedianya Perlengkapan Standar Personil Pemadam Kebakaran	100%	37,950,000	41,745,000	Satuan Polisi Pamong Praja	1
1.19.1.19.03.29.21	Peningkatan Keterampilan Bagi Petugas Tingkat SKPD Dalam Antisipasi Kebakaran dan Penyelamatan Korban			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Peningkatan Keterampilan Antisipasi Kebakaran Dan Penyelamatan Korban (Orang)	40 Orang	Meningkatnya Keterampilan Petugas Dalam Mengantisipasi Kebakaran Dan Penyelamatan Korban	100%	44,000,000	48,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3
1.19.1.19.03.29.22	Pembuatan dan Perbaikan Hidran			Kab.ENREKANG			Jumlah Hidran Yang Terpasang Untuk Penyediaan Air Bagi Kendaraan Pemadam Kebakaran (Buah)	5 Buah	Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Kendaraan Pemadam Kebakaran	100%	50,000,000	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	3
<b>Jumlah</b>											<b>6,282,500,000</b>	<b>6,910,750,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.13	Sosial													
1.13.01	Dinas Sosial													
1.13.1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								1,010,000,000	1,111,000,000		
1.13.1.13.01.15.02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Menjahit Tingkat Dasar)			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan	35 orang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit	100%	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.15.07	Koordinasi penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan program desa Sejahtera mandiri (DSM)			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi keskos melalui prog DSM	12 kecamatan	Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi keskos melalui prog DSM	12 kecamatan	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.15.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Aplikasi PBI Jkn			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 50.000.000	Tersedianya sarana dan prasarana pengelola aplikasi PBI JKN	2 unit	Bertambahnya sarana dan prasarana pengelolaan aplikasi PBI JKN	2 unit	50,000,000	55,000,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.15.10	Pendataan Verifikasi dan Validasi Data BDT			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	Terlaksananya pendataan, verifikasi dan validasi data BDT	129 desa/kel	Terverifikasi dan validnya data BDT	129 Desa/kel	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.15.12	Pendampingan & monitoring kube fakir miskin penumbuhan dan pengembangan perkotaan dan pedesaan			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 35.000.000	Jumlah kelompok usaha bersama yang didampingi	100 KUBE	Terlaksananya pendampingan dan monitoring KUBE	90%	35,000,000	38,500,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.15.13	Sosialisasi Pembinaan Bantuan Pangan Non Tunai			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Terlaksananya sosialisasi pembinaan bantuan pangan non tunai	12 kecamatan	Tersosialisasinya pembinaan bantuan pangan non tunai	12 kecamatan	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.15.15	Pengelolaan Distribusi Raskin kepada Keluarga Kurang Mampu			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 700.000.000	Jumlah penerima rastra	12.898 KK	Teratasinya sebagian kebutuhan masyarakat miskin	90%	700,000,000	770,000,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.15.16	Pendataan Verifikasi dan Validasi data PBI JKN - PBI Daerah			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	Terlaksananya pendataan, verifikasi dan validasi data PBI-JKN dan PBI-Daerah	12 kecamatan	Terverifikasi dan validnya data PBI JKN- PBI Daerah	90%	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.15.17	Monitoring Pemberian Bantuan Pemenuhan Gizi Stunting			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	Terpenuhinya pemenuhan gizi stunting	12 kecamatan	Terlaksananya pemberian bantuan pemenuhan gizi stunting	12 kecamatan	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.15.18	Pendampingan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)										0	0	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial I)	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								35,000,000	38,500,000		
1.13.1.13.01.20.01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 35.000.000	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan	30 orang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi eks penyandang penyakit sosial	100%	35,000,000	38,500,000	Dinas Sosial	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.13.1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							70,000,000	77,000,000			
1.13.1.13.01.21.06	Koordinasi dan Pembinaan Karang Taruna			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	Jumlah karang taruna yang dibina	1 kelompok	Terlaksananya pembinaan karang taruna	98%	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.22	Program Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							475,000,000	522,500,000			
1.13.1.13.01.22.01	Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Kabupaten, Supervisor, Operator dan Pendamping PKH			SULAWESI SELATAN	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Kabupaten, Supervisor, Operator dan Pendamping PKH	38 orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Kabupaten, Supervisor, Operator dan Pendamping PKH	95%	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.22.03	Pendampingan Kegiatan Kearifan Lokal			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Jumlah kelompok yang didampingi	4 kelompok	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Kearifan Lokal	4 kelompok	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.22.04	Koordinasi dan Pendampingan Program Kereserian Sosial			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Terwujudnya Koordinasi dan Pendampingan Program Kereserian Sosial	3 desa	Terlaksananya Koordinasi dan Pendampingan Program Kereserian Sosial	3 desa	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.22.06	Koordinasi Pendampingan dan Monitoring Pemberdayaan program Keluarga Harapan (PKH)			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 170.000.000	Jumlah keluarga yang didampingi	9.478 KPM	Terpenuhinya kebutuhan ibu hamil, anak balita dan pendidikan anak usia dini	100%	170,000,000	187,000,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.22.09	Insentif anggota tenaga pekerja sosial			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 200.000.000	Jumlah petugas sosial/relawan sosial	39 orang	Terbayarnya insentif petugas sosial/relawan sosial	100%	200,000,000	220,000,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.22.11	Koordinasi Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia									0	0	Dinas Sosial	1	
1.13.1.13.01.23	Program Sumbangan Dan Pengawasan Kegiatan Sosial	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							10,000,000	11,000,000			
1.13.1.13.01.23.01	koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial,pemberian sumbangan serta undian berhadiah			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 10.000.000	Terwujudnya koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial,pemberian sumbangan serta undian berhadiah	Kab. Enrekang	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial,pemberian sumbangan serta undian berhadiah	Kab. Enrekang	10,000,000	11,000,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.24	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							25,000,000	27,500,000			
1.13.1.13.01.24.01	Monitoring dan Pembinaan warga di lokasi lomba desa dan P2WKSS			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Jumlah desa/kecamatan yang dibina	1 desa/kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 desa	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.26	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							155,000,000	170,500,000			
1.13.1.13.01.26.01	Peringatan Hari-hari Besar Sejarah Bangsa			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 50.000.000	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	25 orang	Adanya partisipasi pada hari HKS	25 orang	50,000,000	55,000,000	Dinas Sosial	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.13.1.13.01.26.02	Koordinasi Pemberian Bingkisan Kepada Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Veteran			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 55.000.000	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	50 orang	Terpenuhinya nilai-nilai kejujuran dan keperintisan	50 orang	55,000,000	60,500,000	Dinas Sosial	1		
1.13.1.13.01.26.03	Koordinasi Penyelenggaraan hari-hari nasional serta pemeliharaan TMP Maspul dan TMB Maroangin			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 50.000.000	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	1 TMP dan 1 TMB	Terpeliharanya komponen fisik TMP dan TMB serta terlaksananya upacara hari-hari nasional	1 TMP dan 1 TMB	50,000,000	55,000,000	Dinas Sosial	1		
1.13.1.13.01.29	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								25,000,000	27,500,000				
1.13.1.13.01.29.01	Monitoring pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Terwujudnya Monitoring pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Kab. Enrekang	Terlaksananya Monitoring pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Kab. Enrekang	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	3		
1.13.1.13.01.30	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								155,000,000	170,500,000				
1.13.1.13.01.30.01	Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar anak terlantar di luar panti			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Jumlah anak terlantar yang dibina	20 anak	Terlaksananya Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar anak terlantar di luar panti	85%	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	3		
1.13.1.13.01.30.02	Koordinasi pembinaan dan perlindungan sosial anak			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Jumlah anak yang dibina	25 anak	Terlaksananya pembinaan dan perlindungan sosial anak	96%	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	1		
1.13.1.13.01.30.03	Koordinasi perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum	50 anak	Terlindunginya anak yang berhadapan dengan hukum	50 anak	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	1		
1.13.1.13.01.30.04	Pendidikan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	Jumlah anak yang mengikuti pelatihan	25 anak	Terdidik dan terlatihnya anak penghuni panti	25 anak	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	1		
1.13.1.13.01.30.05	Koordinasi dan monitoring pemenuhan hak kebutuhan dasar panti			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 50.000.000	Tersedianya kebutuhan pokok dasar panti	5 panti asuhan	Terpenuhinya kebutuhan dasar panti	5 panti asuhan	50,000,000	55,000,000	Dinas Sosial	1		
1.13.1.13.01.31	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								50,000,000	55,000,000				
1.13.1.13.01.31.01	Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Jumlah lansia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan	199 lansia	Terlaksananya Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	95%	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	3		
1.13.1.13.01.31.02	Koordinasi Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Jumlah lansia yang didampingi	199 lansia	Terpenuhinya jaminan sosial lanjut usia	95%	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	3		
1.13.1.13.01.32	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								25,000,000	27,500,000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					1	2	3	4	5	6			7	8
1.13.1.13.01.32.02	Monitoring, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 25.000.000	Jumlah pengemis yang mendapat bimbingan dan rehabilitasi	1 orang	Terlaksananya Monitoring, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	95%	25,000,000	27,500,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.33	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								150,000,000	165,000,000		
1.13.1.13.01.33.01	Pendampingan penyiapan logistik untuk korban bencana alam bencana sosial			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 120.000.000	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial (perkiraan)	6.000 jiwa	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	95%	120,000,000	132,000,000	Dinas Sosial	1
1.13.1.13.01.33.02	Pembinaan dan pengembangan keterampilan penanggulangan bencana kepada anggota tagana			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	anggota TAGANA yang mengikuti pelatihan	10 orang	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan keterampilan penanggulangan bencana kepada anggota tagana	95%	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	3
1.13.1.13.01.34	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								80,000,000	88,000,000		
1.13.1.13.01.34.02	Koordinasi Pelayanan Permasalahan Sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	Rp. 30.000.000	Jumlah permasalahan sosial yang ditangani	50 kasus	Terlaksananya pelayanan permasalahan sosial melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	95%	30,000,000	33,000,000	Dinas Sosial	1
<b>Jumlah</b>											<b>3,598,500,000</b>	<b>3,958,350,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
1.11.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
1.11.1.11.01.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase ARG dalam APBD	3%					491,500,000	540,650,000			
1.11.1.11.01.20.01	Peremusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan			Kab.ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup perempuan	50%	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.02	Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Forum / Pokja PUG			Kab.ENREKANG			Jumlah focal point PUG yang aktif	5 PD	Terwujudnya PPRG pada perangkat daerah	10%	44,000,000	48,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.03	Pembentukan OPrasionalisasi dan Penguatan Forum Pemberdayaan Perempuan Bagi Kader Perempuan Pada Organisasi Masyarakat			Kab.ENREKANG			Terbentuk dan aktifnya forum pemberdayaan perempuan	3 forum	Menguatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	50%	37,500,000	41,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.04	Pengembangan jejaring Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			Kab.ENREKANG			Terbangunnya koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 kali	Menguatnya jejaring layanan pemberdayaan perempuan	40%	38,500,000	42,350,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.05	Peningkatan Pengetahuan / Keterampilan Bagi Perempuan			Kab.ENREKANG			Jumlah perempuan yang mendapat peningkatan keterampilan	100 orang	Meningkatnya keterampilan perempuan yang dibina	75%	82,500,000	90,750,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.06	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)			Kab.ENREKANG			Jumlah perempuan kepala keluarga yang dibina	20 orang	Meningkatnya kemampuan perempuan kepala keluarga	50%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.07	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Kader Perempuan pada Organisasi Masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah kader perempuan yang dilatih	30 orang	Meningkatnya pengetahuan kader perempuan	70%	35,000,000	38,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.08	Pelatihan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM Perencana pada Lembaga Pemerintah			Kab.ENREKANG			Jumlah SDM perencana yang dilatih PPRG	40 orang	Meningkatnya pengetahuan perencana tentang PPRG	70%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.09	Pendampingan Pelaksanaan PPRG Lingkup Kabupaten			Kab.ENREKANG			Jumlah perangkat daerah yang didampingi	5 PD	Meningkatnya PD yang melaksanakan PPRG	10%	33,000,000	36,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.10	Workshop PUG bagi Pengelola Lembaga Pokja PUG, Focal Point dan Tim Teknis Pokja PUG			Kab.ENREKANG			Jumlah kegiatan dari pokja yang dapat disinergikan	20 kegiatan	Meningkatnya pelaksanaan PUG	60%	38,500,000	42,350,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.11	TOT Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG bagi Fasilitator / Champion			Kab.ENREKANG			Jumlah fasilitator yang mengikuti TOT	20 orang	Meningkatnya pengetahuan fasilitator PUG	75%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	15%					491,500,000	540,650,000			
1.11.1.11.01.20.01	Peremusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan			Kab.ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup perempuan	50%	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
1.11.1.11.01.20.02	Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Forum / Pokja PUG			Kab.ENREKANG			Jumlah focal point PUG yang aktif	5 PD	Terwujudnya PPRG pada perangkat daerah	10%	44,000,000	48,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.11.1.11.01.20.03	Pembentukan OPrasionalisasi dan Penguatan Forum Pemberdayaan Perempuan Bagi KADER Perempuan Pada Organisasi Masyarakat			Kab.ENREKANG			Terbentuk dan aktifnya forum pemberdayaan perempuan	3 forum	Menguatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	50%	37,500,000	41,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.20.04	Pengembangan jejaring Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			Kab.ENREKANG			Terbangunnya koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 kali	Menguatnya jejaring layanan pemberdayaan perempuan	40%	38,500,000	42,350,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.20.05	Peningkatan Pengetahuan / Keterampilan Bagi Perempuan			Kab.ENREKANG			Jumlah perempuan yang mendapat peningkatan keterampilan	100 orang	Meningkatnya keterampilan perempuan yang dibina	75%	82,500,000	90,750,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.20.06	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PeKka)			Kab.ENREKANG			Jumlah perempuan kepala keluarga yang dibina	20 orang	Meningkatnya kemampuan perempuan kepala keluarga	50%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.20.07	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Kader Perempuan pada Organisasi Masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah kader perempuan yang dilatih	30 orang	Meningkatnya pengetahuan kader perempuan	70%	35,000,000	38,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.20.08	Pelatihan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM Perencana pada Lembaga Pemerintah			Kab.ENREKANG			Jumlah SDM perencana yang dilatih PPRG	40 orang	Meningkatnya pengetahuan perencana tentang PPRG	70%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.20.09	Pendampingan Pelaksanaan PPRG Lingkup Kabupaten			Kab.ENREKANG			Jumlah perangkat daerah yang didampingi	5 PD	Meningkatnya PD yang melaksanakan PPRG	10%	33,000,000	36,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.20.10	Workshop PUG bagi Pengelola Lembaga Pokja PUG, Focal Point dan Tim Teknis Pokja PUG			Kab.ENREKANG			Jumlah kegiatan dari pokja yang dapat disnergikan	20 kegiatan	Meningkatnya pelaksanaan PUG	60%	38,500,000	42,350,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.20.11	TOT Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG bagi Fasilitator / Champion			Kab.ENREKANG			Jumlah fasilitator yang mengikuti TOT	20 orang	Meningkatnya pengetahuan fasilitator PUG	75%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.21	<b>Program Peningkatan Perlindungan HAK Perempuan</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>	<b>Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan</b>		<b>Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>85%</b>					<b>422,500,000</b>	<b>464,750,000</b>				
1.11.1.11.01.21.01	Perumusan Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan			Kab.ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	50%	27,500,000	30,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.21.02	Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)			Kab.ENREKANG			Terbentuk dan beroperasinya P2TP2A	3 kec	Meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	50%	165,000,000	181,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.21.03	Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPPO			Kab.ENREKANG			Tersusunnya SOP pelayanan korban kekerasan	2 dok	Terlayannya korban kekerasan sesuai standar	50%	33,000,000	36,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.21.04	Bimbingan Teknis Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Rujukan Lanjutan Bagi SDM Penyedia Layanan Korban Kekerasan			Kab.ENREKANG			Jumlah SDM pelayanan yang ditingkatkan pengetahuannya	30 orang	Meningkatnya kualitas pelayanan	50%	37,500,000	41,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.21.05	Peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan			Kab.ENREKANG			Jumlah SDM yang dilatih	30 orang	Meningkatnya pelayanan terhadap korban kekerasan	50%	44,500,000	48,950,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.21.06	Peningkatan Kapasitas Petugas RS, Kepolisian, Kejaksaan, P2TP2A dalam Melayani Korban Kekerasan			Kab.ENREKANG			Jumlah orang yang dilatih	30 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan	70%	39,000,000	42,900,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				14	15
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.11.01.21.07	Pengembangan Jejaring Penyedia Layanan Perlindungan HAK Perempuan Lingkup Kabupaten			Kab.ENREKANG			Terlaksananya koordinasi jejaring lembaga layanan perlindungan perempuan	2 kali	Meningkatnya koordinasi pelayanan perlindungan perempuan	50%	28,000,000	30,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.21.08	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	Tersosialisasinya kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	60%	28,000,000	30,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.21.09	Rapat Koordinasi Organisasi Perempuan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya rapat koordinasi organisasi perempuan	1 kali	Meningkatnya koordinasi organisasi perempuan	70%	20,000,000	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.22	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>	<b>Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan</b>		<b>Persentase keluarga yang terlayani PUSPAGA sesuai standar</b>	<b>40%</b>					<b>215,500,000</b>	<b>237,050,000</b>		
1.1.1.11.01.22.01	Peremusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga			Kab.ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga	50%	17,500,000	19,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.22.02	Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Lembaga Kualitas Keluarga (PUSPAGA)			Kab.ENREKANG			Jumlah keluarga yang memanfaatkan lembaga PUSPAGA	50 keluarga	Meningkatnya pelayanan PUSPAGA	30%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.22.03	Peningkatan Peranan Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)			Kab.ENREKANG			Terselenggaranya penilaian P2K3	1 desa	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	30%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.22.04	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	Tersosialisasinya kebijakan peningkatan kualitas keluarga	90%	33,000,000	36,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.22.05	Penyusunan Standar Operasional Layanan PUSPAGA			Kab.ENREKANG			Tersedianya SOP pelayanan PUSPAGA	1 dok	Meningkatnya pelayanan PUSPAGA	90%	22,000,000	24,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.22.06	Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta pelatihan	40 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan	70%	33,000,000	36,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.23	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>	<b>Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan</b>		<b>Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak</b>	<b>40%</b>					<b>230,500,000</b>	<b>253,550,000</b>		
1.1.1.11.01.23.01	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak			Kab.ENREKANG			Terupdatenya aplikasi SIGA	1 kali	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	70%	27,500,000	30,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.23.02	Bimbingan Teknis Bagi SDM Pengelola Data Gender dan Anak Tingkat Kabupaten			Kab.ENREKANG			Jumlah pengelola data yang ikut bimtek	30 orang	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola data	75%	38,500,000	42,350,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.23.03	Penyusunan Profil Gender Dan Anak			Kab.ENREKANG			Tersusunnya profil gender dan anak	1 dok	Tersedianya buku profil gender dan anak	80%	33,000,000	36,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.23.04	Pengembangan Media KIE Gender dan Anak			Kab.ENREKANG			Tersedianya media KIE gender dan anak	5 jenis	Tersosialisasinya program DP3A di masyarakat	70%	49,500,000	54,450,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.11.1.11.01.23.05	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (APE)			Kab.ENREKANG			Terselenggaranya evaluasi APE	1 kali	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	70%	17,500,000	19,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.23.06	Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Data Gender dan Anak			Kab.ENREKANG			Terselenggaranya monev penyediaan data gender dan anak	2 kali	Terpantaunya penyediaan data gender dan anak	90%	17,500,000	19,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.23.07	Perumusan Kebijakan Penyediaan Data Gender dan Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung penyediaan data gender dan anak	70%	25,000,000	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.23.08	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Data Gender dan Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta sosialisasi	30 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi	70%	22,000,000	24,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24	<b>Program Pemenuhan HAK dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>	<b>Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan</b>		<b>Skor capaian penilaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)</b>	<b>600 poin</b>					<b>365,500,000</b>	<b>402,050,000</b>				
1.11.1.11.01.24.01	Perumusan Kebijakan Pemenuhan HAK dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung pemenuhan hak anak	50%	77,000,000	84,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24.02	Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak	30 orang	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang ramah anak	50%	25,000,000	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24.03	Pembinaan Sekolah Ramah Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah sekolah ramah anak yang dibina	10 sekolah	Meningkatnya sekolah ramah anak	10%	44,000,000	48,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24.04	Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Forum Anak			Kab.ENREKANG			Terbentuk dan aktifnya forum anak	10 forum	Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan	15%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24.05	Pelatihan Konvensi HAK Anak bagi Instansi / Lembaga Terkait			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta pelatihan KHA	40 orang	Meningkatnya pengetahuan akan hak-hak anak	70%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24.06	Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak			Kab.ENREKANG			Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas KLA	4 kali	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	70%	22,000,000	24,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24.07	Evaluasi Kabupaten Layak Anak			Kab.ENREKANG			Tersedianya dokumen penilaian KLA	1 dok	Jumlah skor KLA	> 500 poin	17,500,000	19,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24.08	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	Tersosialisasinya kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak	70%	20,000,000	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.24.09	Advokasi Pembentukan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan layak anak yang terbentuk	10 buah	Meningkatnya kecamatan dan desa/kelurahan layak anak	7%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		
1.11.1.11.01.25	<b>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>	<b>Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan</b>		<b>Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</b>	<b>85%</b>					<b>142,500,000</b>	<b>156,750,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.1.1.11.01.25.01	Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan Pengaduan dan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			Kab.ENREKANG			Tersusunnya SOP pelayanan perlindungan anak	1 dok	Meningkatnya pelayanan perlindungan anak	50%	27,500,000	30,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.25.02	Penguatan Jejaring Pelayanan Pengaduan dan Pelyanan Rujukan Lanjutan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			Kab.ENREKANG			Adanya pertemuan jejaring perlindungan anak	1 kali	Menguatnya jejaring perlindungan anak	40%	33,000,000	36,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.25.03	Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak			Kab.ENREKANG			Tersosialisasinya sistem perlindungan anak	40 orang	Terwujudnya sistem perlindungan anak secara maksimal	50%	27,000,000	29,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.25.04	Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)			Kab.ENREKANG			Terbentuknya lembaga PATBM	10 lembaga	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak	20%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.25.05	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta sosialisasi yang dilakukan	40 orang	Tersosialisasinya kebijakan perlindungan anak	70%	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
1.1.1.11.01.25.06	Perumusan Kebijakan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak			Kab.ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung upaya perlindungan anak	70%	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
<b>Jumlah</b>											<b>3,180,000,000</b>	<b>3,498,000,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.21	Pangan														
1.21.01	Dinas Ketahanan Pangan														
1.21.1.21.01.16	Program Pengembangan Pengkaderan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan								800,000,000	880,000,000			
1.21.1.21.01.16.03	Promosi Pangan lokal berbasis potensi wilayah			Kab.ENREKANG	pencapaian skor pola pangan harapan	83%	jumlah cipta menu yang di ikuti	3 kali	meningkatkan citra pangan lokal	3 kali	150,000,000	165,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.16.04	Pemanfaatan Pekarangan Melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)			Kab.ENREKANG	pencapaian skor pola pangan harapan	83%	jumlah kelompok yang di bina dengan pemfaatan lahan pekarangan	12 klp	terciptanya kawasan rumah pangan lestari	12 klp	125,000,000	137,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.16.05	Pemberdayaan Desa Diversifikasi Pangan			Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN	pencapaian skor pola pangan harapan	83%	jumlah desa yang akan mengembangkan pangan pokok lokal spesifik wilayah	2 desa	berkembangnya pangan pokok lokal spesifik wilayah	2 desa	175,000,000	192,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.16.06	Pembinaan Keamanan Pangan Segar			Kab.ENREKANG	Menjamin keamanan pangan	80%	Jumlah kelompok/pelaku usaha tani yang menerapkan pertanian sehat	2 Desa	Pangan yang tersedia dalam kondisi aman	80%	100,000,000	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.16.07	Pembinaan Kebun Sekolah			Kab.ENREKANG	Pencapaian skor pola pangan harapan (pph)	83%	Jumlah sekolah yang mendapatkan edukasi tentang pentingnya pemenuhan gizi dan pertanian sehat	10 sekolah	Peran aktif sekolah dalam pemenuhan gizi dan pertanian sehat	10 sekolah	100,000,000	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.16.08	Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan Dengan Pendekatan pola pangan harapan ( PPH )			Kab.ENREKANG	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	83%	Tersedianya data perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan PPH	2 Dok	Meningkatnya pola konsumsi pangan	2 Dok	50,000,000	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.16.10	Pengawasan Keamanan Pangan Melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan			Kab.ENREKANG	Menjamin keamanan pangan	80%	Jumlah pangan segar yang aman	80%	Jaminan keamanan pangan	80%	100,000,000	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.17	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan								400,000,000	440,000,000			
1.21.1.21.01.17.01	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan			Kab.ENREKANG	Ketersediaan pangan utama	75 Ton	Jumlah desa kawasan mandiri pangan	1 desa	Terwujudnya desa mandiri pangan	1 desa	150,000,000	165,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.17.02	Penyusunan Peta Kerawanan pangan dan kerentanan pangan (PSVA)			Kab.ENREKANG	Penanganan daerah rentan rawan pangan	25%	Jumlah dokumen peta daerah rawan dan rentan pangan	1 Dok	Tersedianya dokumen peta daerah rawan dan rentan pangan (PSVA)	1 Dok	50,000,000	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.17.03	Pemetaan Potensi Pangan Pokok Lokal Daerah			Kab.ENREKANG	Ketersediaan pangan utama	75 Ton	Jumlah dokumen potensi pangan lokal daerah	1 Dok	Tersedianya dokumen potensi pangan lokal daerah	1 Dok	50,000,000	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.17.04	Implementasi Sistem Kewaspadaan Gizi dan Pangan			Kab.ENREKANG	Penanganan daerah rentan rawan pangan	25%	Jumlah dokumen informasi pangan dan gizi	1 Dok	Tersedianya informasi pangan dan gizi	1 Dok	50,000,000	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.17.05	Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan ( NBM )			Kab.ENREKANG	Ketersediaan pangan utama	75 Ton	Jumlah data dan informasi tentang neraca bahan makanan	1 dok	Tersedianya data dan informasi tentang neraca bahan makanan	1 Dok	50,000,000	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	
1.21.1.21.01.17.06	Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan			Kab.ENREKANG	Ketersediaan Pangan Utama	75 Ton	Tersedianya Informasi Ketersediaan pangan	1 Dok	Jumlah informasi ketersediaan pangan	1 Dok	50,000,000	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.21.1.21.01.18	Program Pengembangan Distribusi, Harga Pangan dan Cadangan Pangan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan							525,000,000	577,500,000			
1.21.1.21.01.18.	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten			Kab.ENREKANG	Cadangan Pangan Pemerintah	10 Ton	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	10 Ton	Jumlah cadangan pangan pemerintah	10 Ton	100,000,000	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	1
1.21.1.21.01.18.01	Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan			Kab.ENREKANG	Daya pengaruh fluktuasi harga pangan strategis terhadap tingkat perilaku konsumsi pangan standar masyarakat	5%	Penumbuhan dan pengembangan gapoktan	3 gapoktan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	3 gapoktan	65,000,000	71,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	1
1.21.1.21.01.18.02	Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan Strategis			Kab.ENREKANG	Ketersediaan informasi harga dan akses pangan	100%	Tersedianya informasi harga dan akses pasar	12 Dok	Jumlah informasi harga dan akses pasar	12 Dok	85,000,000	93,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	1
1.21.1.21.01.18.03	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)			Kab.ENREKANG	Daya Pengaruh Fluktuasi Harga Pangan Strategis Terhadap Tingkat Perilaku Konsumsi Pangan Standar Masyarakat	5%	Terbinanya PUPM tahap penumbuhan dan pengembangan	1 Gapoktan	Jumlah PUPM yang dibina	1 Gapoktan	69,000,000	75,900,000	Dinas Ketahanan Pangan	1
1.21.1.21.01.18.04	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten			Kab.ENREKANG	Cadangan pangan masyarakat	500 Kg	Tersedianya cadangan pangan di tingkat masyarakat	3 Desa	Jumlah desa penyedia cadangan pangan	3 Desa	75,000,000	82,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	1
1.21.1.21.01.18.06	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (PLDPM)			Kab.ENREKANG	Daya Pengaruh Fluktuasi Harga Pangan Strategis Terhadap Tingkat Perilaku Konsumsi Pangan Standar Masyarakat	5%	Penumbuhan dan pengembangan gapoktan	3 gapoktan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	3 Gapoktan	66,000,000	72,600,000	Dinas Ketahanan Pangan	1
1.21.1.21.01.18.07	Pembinaan Lumbung Pangan Desa			Kab.ENREKANG	Cadangan pangan masyarakat	500 Kg	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	4 Lumbung	Tersedianya Lumbung pangan	4 Lumbung	65,000,000	71,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	1
<b>Jumlah</b>										<b>2,716,250,000</b>	<b>2,987,875,000</b>			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.08	Lingkungan Hidup														
1.08.01	Dinas Lingkungan Hidup														
1.08.1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Persentase cakupan area pelayanan, Timbulan sampah yang ditangani	27%, 82%					4,911,000,000	5,402,100,000			
1.08.1.08.01.15.02	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan			Kab.ENREKANG			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Mobil sampah, Motor sampah, Bak sampah, Kontainer sampah) yang diadakan	1 DT, 2 Motor Sampah, 5 Bak Sampah, 2 Container, 1 Excavator	Meningkatnya penanganan timbulan sampah	75%	1,649,000,000	1,813,900,000	Dinas Lingkungan Hidup	1	
1.08.1.08.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan			Kab.ENREKANG			Jumlah kota kecamatan yang dilayani pengelolaan sampahnya.	9 Ibu Kota Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah	75%	3,000,000,000	3,300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1	
1.08.1.08.01.15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan			Kab.ENREKANG			Jumlah orang yang disosialisasikan terkait keijakan strategis persampahan daerah	40 Laki-laki 30 Perempuan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Kebijakan pengelolaan persampahan	75%	70,000,000	77,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1	
1.08.1.08.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Kab.ENREKANG			Jumlah Orang yang dilatih terkait pengelolaan sampah	10 Laki-laki 30 Perempuan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah	75%	70,000,000	77,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1	
1.08.1.08.01.15.15	Penyusunan Laporan Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga			Kab.ENREKANG			Jumlah Laporan jakstrada yang tersusun	1 Lap	Terevaluasinya pelaksanaan jakstrada	80%	12,000,000	13,200,000	Dinas Lingkungan Hidup	3	
1.08.1.08.01.15.16	Bulan Bakti Peduli Sampah Tingkat Kabupaten			Kab.ENREKANG			Jumlah bulan gerakan bersih sampah	3 Bulan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam gerakan bersih sampah	75%	40,000,000	44,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3	
1.08.1.08.01.15.18	Operasional dan Pemeliharaan TPA			Kab.ENREKANG			Jumlah TPA yang beroperasi	1 TPA	Optimalnya pengelolaan TPA	75%	70,000,000	77,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1	
1.08.1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Indeks kualitas air, Indeks Kualitas Udara, Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	59%, 93,7%, 60%					660,000,000	726,000,000			
1.08.1.08.01.16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura			Kab.ENREKANG			Jumlah Penilaian Adipura	1 Kali	Terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih	80%	95,000,000	104,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	1	
1.08.1.08.01.16.19	Pembinaan/Pengembangan dan Pengawasan AMDAL UKL-UPL			Kab.ENREKANG			Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang dibina ketaatannya terhadap izin lingkungan	32 Usaha	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan	80%	60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1	
1.08.1.08.01.16.25	Pemantauan Kualitas Udara			Kab.ENREKANG			Jumlah titik lokasi pemantauan kualitas udara	4 Titik	Terpantaunya kualitas udara	75%	40,000,000	44,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1	
1.08.1.08.01.16.26	Pemantauan Kerusakan Lahan Akibat Produksi Biomassa			Kab.ENREKANG			Jumlah titik lokasi pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa	35 Titik	Terpantaunya kerusakan lahan	75%	60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3	
1.08.1.08.01.16.27	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup			Kab.ENREKANG			Jumlah Laboratorium yang terkelola	1 Lab	Terwujudnya operasionalisasi laboratorium	70%	50,000,000	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3	
1.08.1.08.01.16.28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium			Kab.ENREKANG			Jumlah Sarana dan prasarana laboratorium yg diadakan	1 Buah	Optimalnya fungsi dan pengelolaan laboratorium	75%	85,000,000	93,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	3	
1.08.1.08.01.16.29	Pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil			Kab.ENREKANG			Jumlah IPAL USK yang dibangun	2 Unit	Meningkatnya pengelolaan limbah Usaha Skala Kecil	70%	210,000,000	231,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.08.1.08.01.16.38	Pemantauan Kualitas Air			Kab.ENREKANG			Jumlah titik lokasi pemantauan kualitas air	20 Titik	Tertantaunya kualitas air	75%	60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46%					1,260,000,000	1,386,000,000		
1.08.1.08.01.17.20	Pemulihan kerusakan sumber daya alam			Kab.ENREKANG			Jumlah luas lahan rusak yang direhabilitasi	40 Ha	Tertanganinya kerusakan lahan	75%	120,000,000	132,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.17.21	pemeliharaan Tanaman Koleksi Kebun Raya			Kab.ENREKANG			Jumlah Tanaman Koleksi Yang dipelihara	17697 Specimen	Terpeliharanya tanaman koleksi keun Raya Maspul	90%	600,000,000	660,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.17.22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebun Raya Maspul			Kab.ENREKANG			Jumlah Sarana dan Prasarana Kebun Raya Maspul yang terbangun	10 Unit	Meningkatnya fasilitas penunjang kebun Raya Maspul	75%	400,000,000	440,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.17.23	Pembinaan Partisipasi masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			Kab.ENREKANG			Jumlah kampung proklim yang dibina	35 Lokasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian dampak perubahan iklim	70%	80,000,000	88,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.17.24	Pembinaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/Plasma Nutfa dan konservasi SDA			Kab.ENREKANG			Jumlah lokasi Pembinaan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati/plasma nutfah	3 Lokasi	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati/plasma nutfah	75%	60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Persentase Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	34%					280,000,000	308,000,000		
1.08.1.08.01.24.05	Penataan RTH			Kab.ENREKANG			Jumlah Luasan RTH yang ditata	15 Ha	Optimalnya penataan RTH perkotaan	75%	150,000,000	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.24.06	Pemeliharaan RTH						Jumlah Luasan RTH yang terpelihara	10 Ha	Terpeliharanya RTH perkotaan	80%	130,000,000	143,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.28	Program Penataan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Persentase ketersediaan dokumen lingkungan/kajian teknis lingkungan	100%					410,000,000	451,000,000		
1.08.1.08.01.28.01	Penyusunan RPPLH			Kab.ENREKANG			Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun	1 Dok	Terintegrasinya RPPLH dalam dokumen rencana pembangunan	90%	100,000,000	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.28.04	Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tersusun	1 Dok	Terwujudnya perencanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati	75%	60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.28.05	Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen Gas Rumah Kaca yg tersusun	1 Dok	Terwujudnya informasi Gas Rumah Kaca	80%	60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.28.06	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah			Kab.ENREKANG			Jumlah laporan DIKPLHD yang tersusun	1 Dok	Terwujudnya informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	85%	60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.28.08	Pameran Lingkungan Hidup			Luar Daerah			Jumlah pameran yang diikuti	1 Kali	Meningkatnya promosi sumber daya alam	75%	45,000,000	49,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.28.09	Koordinasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen AMDAL dan UKL UPL			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen Amdal	50 Dok	Meningkatnya kinerja penilaian dokumen lingkungan	75%	85,000,000	93,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.08.1.08.01.29	Program Pengelolaan Daur Ulang Sampah dan LB3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R/ Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	24 %, 45 ton						1,030,000,000	1,133,000,000		
1.08.1.08.01.29.01	Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3			Kab.ENREKANG			Jumlah orang yang disosialisasikan terkait B3 dan LB 3	350 Org	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan LB3	80%		60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.29.02	Bimbingan Teknis Pengelolaan B3 dan LB3			Kab.ENREKANG			Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan limbah B3	30 Org	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola LB3	75%		55,000,000	60,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.29.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan B3 dan LB3			Kab.ENREKANG			Jumlah sarana dan prasarana B3 dan LB3 yang diadakan	1 Unit Tiga Roda 100 Unit tempat Sampah	Meningkatnya penanganan LB3	65%		160,000,000	176,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.29.04	Koordinasi dan Pembinaan B3 dan LB3			Kab.ENREKANG			Jumlah Usaha Penghasil LB3 yang dibina	50 Usaha	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam mengelola LB3	75%		50,000,000	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.29.05	Pembangunan Sarana dan prasarana daur ulang sampah			Kab.ENREKANG			Jumlah Sarpras Daur ulang sampah yang dibangun	2 Unit	Meningkatnya penanganan daur ulang sampah	70%		600,000,000	660,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.29.06	Pilah dan Daur Ulang (PINDAH ULANG) LB3			Kab.ENREKANG			Jumlah Limbah B3 yang dilakukan "PINDAH ULANG"	10 Ton	Meningkatnya daur ulang LB3	60%		50,000,000	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.29.07	Pameran Produk daur Sampah			Kab.ENREKANG			Jumlah Pameran daur ulang sampah yang diikuti	1 Kali	Meningkatnya promosi produk daur ulang sampah	65%		55,000,000	60,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.30	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Persentase MHA terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, Persentase MHA terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana, Jumlah sekolah Adiwiyata	65%, 50%, 25 sekolah						270,000,000	297,000,000		
1.08.1.08.01.30.02	Pelatihan dan Pendidikan Bidang Lingkungan			Kab.ENREKANG			Jumlah OPL yang didiklat terkait bidang lingkungan	2 OPL	Meningkatnya pengetahuan OPL	75%		45,000,000	49,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.30.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana MHA			Kab.ENREKANG			Jumlah MHA yang diberikan sarana dan prasarana	2 MHA	Terwujudnya sarpras MHA	75%		60,000,000	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.30.04	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan			Kab.ENREKANG			Jumlah sekolah yang dibina	30 Skh	Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	80%		90,000,000	99,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.30.05	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup			Kab.ENREKANG			Jumlah penghargaan lingkungan hidup	1 Kali	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan	80%		40,000,000	44,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.30.06	Pendampingan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal			Kab.ENREKANG			Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi, Jumlah Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	4 MHA, 2 HKL	Meningkatnya pendampingan MHA	80%		35,000,000	38,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.31	Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi Usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten, Peningkatan sarana dan prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	100 %, 1PPLHD						105,000,000	115,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.08.1.08.01.31.01	Pelayanan Pengaduan Masyarakat terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			Kab.ENREKANG			Jumlah pengaduan yang teregistrasi	3 Kasus	Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat	80%	35,000,000	38,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.31.02	Penegakan Hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup			Kab.ENREKANG			Jumlah rekomendasi tindak lanjut dari penanganan kasus lingkungan hidup	2 Rekomendasi	Meningkatnya penegakan dan penanganan kasus LH	75%	40,000,000	44,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.31.03	Pelatihan pejabat pengawas lingkungan hidup			Kab.ENREKANG			Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat PPLHD	1 Org	Meningkatnya wawasan aparatur PPLHD	75%	30,000,000	33,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	3
1.08.1.08.01.33	Program Penataan Kawasan Pemukiman Taman dan Keindahan Kota	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan		Persentase pengembangan dan pemeliharaan Taman Kota	60%					1,100,000,000	1,210,000,000		
1.08.1.08.01.33.01	Pemeliharaan Taman Kota			Kab.ENREKANG			Jumlah taman yang dipelihara	12 Taman	Terpeliharanya taman-taman perkotaan	85%	350,000,000	385,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.33.02	Pembangunan Taman Kota			Kab.ENREKANG			Jumlah taman yang dibangun	2 Buah	Meningkatnya keindahan kota	75%	400,000,000	440,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.33.03	Pembangunan Tugu/Taman Potensi Daerah			Kab.ENREKANG			Jumlah tugu/taman potensi daerah yang dibangun	1 Buah	Meningkatnya keindahan kota kecamatan	70%	200,000,000	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
1.08.1.08.01.33.04	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pengelolaan Pertamanan serta Fasilitas lainnya			Kab.ENREKANG			Jumlah Sarana dan prasarana pertamanan yang diadakan	15 Buah	Meningkatnya keindahan taman-taman kota	80%	150,000,000	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	1
<b>Jumlah</b>											<b>12,190,000,000</b>	<b>13,409,000,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.10	Admsinitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil														
1.10.01	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								2,283,000,000	2,511,300,000			
1.10.1.10.01.15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	25.000.000	Koordinasi antar instansi terkait tentang kebijakan kependudukan yaitu kantor Kemenag, Kantor Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan,RSU ,Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan tentang Data Kependudukan	6 Instansi	Terjalin kerja sama antara instansi terkait data kependudukan	80%	25,000,000	27,500,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
1.10.1.10.01.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	35.000.000	Jumlah Laporan Informasi administrasi kependudukan	3 laporan	Persentase Laporan Informasi Kependudukan	100%	35,000,000	38,500,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
1.10.1.10.01.15.07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	20.000.000	Jumlah layanan Aplikasi Informasi Administrasi Kependudukan yang dapat diakses masyarakat	1 Aplikasi	Layanan Informasi yang dapat diakses masyarakat berupa panggilan antrian	95	20,000,000	22,000,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
1.10.1.10.01.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (DAK)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	685.000.000	Pelayanan Penerbitan Dokumen Admindukcapil	12 Bulan	Persentase Pelayanan Penerbitan Dokumen Admindukcapil meningkat	100%	685,000,000	753,500,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
1.10.1.10.01.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	130.000.000	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200 Peserta (100 Peserta Pria dan 100 Peserta Wanita)	Pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil meningkat	90%	130,000,000	143,000,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
1.10.1.10.01.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	50.000.000	Monitoring ,evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Dokumen Kependudukan di 12 Kecamatan	12 Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	80%	50,000,000	55,000,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
1.10.1.10.01.15.16	Pembinaan Aparatur Pendaftaran penduduk			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	30.000.000	Jumlah aparaturn Pendaftaran Penduduk yang mengikuti Bintek	15 orang	Penguatan Team Work Opening Adminduk	80%	30,000,000	33,000,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	
1.10.1.10.01.15.17	Penyediaan Formulir Pembuatan Dokumen Kependudukan Untuk Kec/Desa/Kel.			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	30.000.000	Jumlah Formulir Pendaftaran Penduduk untuk masyarakat (Formulir Perubahan Biodata,Buku Hartan Kependudukan,Formulir Pindah Datang ,Formulir Pindah Keluar Negeri,Formulir Biodata Penduduk,Formulir Penduduk Rentan	6 Jenis	Masyarakat ,memahami akan pentingnya dokumen kependudukan meningkat	100%	30,000,000	33,000,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
1.10.1.10.01.15.19	Peningkatan Pengelolaan SIAK (DAK)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	15.000.000	Jumlah Pejabatan Administrator Data Base (ADB) yang mengikuti Bintek tentang pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	1 orang ADB	SDM Pengelola SIAK meningkat	90%	15,000,000	16,500,000	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003	14	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.10.1.10.01.15.20	Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	120.000.000	Jumlah Desa yang dikunjungi dalam rangka pelayanan keliling Admindukcapil (Perekaman KTP,Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan akta kelahiran ,Penerbitan SuratKeterangan Pindah Penduduk baik Pindah datang atau Pindah Keluar)	14 Desa (Stunting)	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Capil	90%	120.000,000	132,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.15.21	Pemeliharaan SIAK			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	50.000.000	Pemeliharaan PC SIAK, jaringan Lokasi SIAK,pemeliharaan Server SIAK	5 Unit	Kepemilikan Dokumen Admindukcapil meningkat	90%	50,000,000	55,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.15.22	Pengadaan Blangko Kartu Identitas Anak (KIA)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	135.000.000	Jumlah Kartu Identitas anak (KIA) yang dicetak	45.000 Lembar	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk yang berusia dibawah 17 tahun	80%	135,000,000	148,500,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.15.23	Penyusunan Buku Agregat Kependudukan persemester			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	8.000.000	Jumlah Buku Agregat Kependudukan yang dicetak	32 Buku	Persentase Data Agregat Kependudukan	75%	8,000,000	8,800,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.15.24	Penyediaan Blangko Pendaftaran Penduduk (DAK)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	355.000.000	Jumlah Blangko Formulir Pendaftaran Penduduk untuk masyarakat (Kartu Keluarga)	1 Jenis	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan meningkat	95%	355,000,000	390,500,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.15.25	Pemutakhiran /Updating Data			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	50.000.000	Jumlah Penduduk yang didata setiap rumah	"25.034 pendu duk"	Pemutakhiran Data yang akurat	95%	250,000,000	275,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.15.26	Pencanangan Kampung Gisa (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	150.000.000	Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kampung GISA (Gerakan Sadar Adminduk)	1 DEsa	Kampung Sadar GISA (Gerakan sadar Adminduk) meningkat	75%	150,000,000	165,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.15.28	Operasionalisasi dan peningkatan pelayanan UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	15.000.000	Jumlah Operasionalisasi Pelayanan UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil	11 Kecamatan	Pelayanan UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil di 11 Kecamatan meningkat	80	15,000,000	16,500,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.15.29	Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten/Kota			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	60.000.000	Jumlah Pelayanan inovasi Kabupaten/Kota	1 inovasi	Pelayanan yang tertib, mudah dan lancar	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.15.30	Pengolahan Data dan Dokumentasi Kependudukan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	30.000.000	Jumlah laporan hasil Pelayanan pendaftaran penduduk	1 Laporan	Persentase laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	80	30,000,000	33,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.15.31	Kegiatan Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	60.000.000	Jumlah elemen Data yang disinkronkan	32 Data	Ada data Data Where House di Kabupaten	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.15.32	Implementasi Adm.Kependudukan (Pemotretan dan Perekaman Sidik Jari)e-KTP Nasional			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	30.000.000	Jumlah Pemotretan dan Perekaman Sidik Jari e-KTP Nasional	4246 orang	Presentase Cakupan Pemotretan dan perekaman sidik jari e-KTP Nasional	80%	30,000,000	33,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.16	Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									585,000,000	643,500,000				
1.10.1.10.01.16.01	Penyediaan Formulir Pembuatan Dokumen Pencatatan Sipil untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	30.000.000	Jumlah Formulir untuk pembuatan Dokumen Pencatatan Sipil untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 jenis	Masyarakat memahami akan pentingnya dokumen Pencatatan Sipil meningkat	100%	30,000,000	33,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.10.1.10.01.16.02	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	20.000.000	Jumlah Penduduk yang dicatat perkawinan dan pembatalan Perkawinan	18 orang	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan meningkat	75%	20.000.000	22.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.16.03	Pelayanan Akta Kelahiran dibawah 5 tahun			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	35.000.000	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran dibawah 5 Tahun	42%	*Kepemilikan Akta Kelahiran dibawah umur 5 tahun meningkat	60	35.000.000	38.500.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.16.04	Penyusunan Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	15.000.000	Jumah Laporan kepemilikan Akta Kelahiran yang tersusun	1 Laporan	Persentase laporan Kepemilikan Akta Kelahiran	65%	15.000.000	16.500.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3		
1.10.1.10.01.16.11	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	150.000.000	Jumlah Data kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	500 Data	Pengabungan/integrasi data base non SIAK ke dalam Non SIAK	80%	150.000.000	165.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.16.12	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran , Kematian			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	100.000.000	Jumlah Kecamatan yang dikunjungi dalam rangka pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	9 (sembilan ) Kecamatan	Presentase Kepemilikan akta Kelahiran , Kematian meningkat	80%	100.000.000	110.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.16.13	Penyediaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK)			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	200.000.000	Jumlah Blangko dan Formulir Akta untuk pembuatan Dokumen Pencatatan Sipil	8 jenis	Masyarakat memahami akan pentingnya dokumen Pencatatan Sipil meningkat	100%	200.000.000	220.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.16.14	Pelayanan Akta Kelahiran diatas 5 tahun			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	35.000.000	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran diatas 5 Tahun	42%	*Kepemilikan Akta Kelahiran diatas umur 5 tahun meningkat	60%	35.000.000	38.500.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
<b>1.10.1.10.01.17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan</b>										<b>150.000.000</b>	<b>165.000.000</b>				
1.10.1.10.01.17.01	Pengklasifikasian dan Penyortiran Arsip			Kab.ENREKANG	Jumlah dana	20.000.000	Jumlah Arsip Dokumen admindukcapil perdesa perkecamatan	4350 orang	Persentase penyortiran arsip perdesa /kelurahan dan perkecamatan	90%	20.000.000	22.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.17.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Kependudukan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	50.000.000	Jumlah Aplikasi Sistim Kependudukan yang dipelihara	1 Aplikasi	Pemeliharaan Aplikasi Sisitim Kependudukan meningkat	95%	50.000.000	55.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.17.03	Penyusunan Profil dan Proyeksi dan Kependudukan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	40.000.000	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang dicetak	40 Buku	Persentase Penyusunan Buku Profil Kependudukan	80%	40.000.000	44.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.17.04	Pembuatan layanan informasi Administrasi kependudukan (Leaflet, Brosur ,Spanduk dan Kalender)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	20.000.000	Jumlah (Leaflet,Brosur , Spandukkalender tentang Admindukcapil	175 Buah	Persentase Pengetahuan masyarakat akan administrasi kependudukan meningkat	80%	20.000.000	22.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
1.10.1.10.01.17.07	Pengembangan Database Informasi Kearsipan (Digitalisasi Arsip)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	20.000.000	Jumlah Dokumen Pelayanan Admindukcapil yang discand	5235 Dokumen	Persentase Jumlah Dokumen Admindukcapil meningkat	90%	20.000.000	22.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
<b>Jumlah</b>											<b>4,902,500,000</b>	<b>5,392,750,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							14
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1.22.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1.22.1.22.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							482,880,000	531,168,000						
1.22.1.22.01.15.05	Koordinasi, Pendampingan dan Biaya Operasional P3MD			Kab.ENREKANG Ibukota Provinsi Luar Daerah			Terselenggaranya Operasional P3MD Jumlah koordinasi P3MD yang dilaksanakan	1 TA 30 kali	Terpenuhinya koordinasi, pendampingan dan operasional P3MD di Kab. Enrekang	90%	161,880,000	178,068,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.15.07	Lomba Pembangunan Desa			Kab.ENREKANG Ibukota Provinsi Luar Daerah			Pembinaan, penilaian dan penunjukan desa lokasi lomba desa tingkat kabupaten, provinsi dan regional	129 Desa / Kelurahan	Penetapan Juara Lomba Desa tk. Kabupaten	30 Desa / Kelurahan	70,000,000	77,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.15.09	Pengembangan Desa Percontohan / Laboratorium Lapang (LABSITE PMD)			Kab.ENREKANG							0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.15.10	Pengembangan Kerjasama Desa			Kab.ENREKANG			Jumlah Desa yang diidentifikasi, terbina dan dikembangkan terkait kerjasama desa	12 Desa	Terbentuknya kerjasama desa	1 Paket	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.15.15	Evaluasi Perkembangan Desa			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Jumlah Desa yang dievaluasi terkait tingkat perkembangan desa	112 Desa	Tersedianya Data dan Informasi tingkat perkembangan desa Terpenuhinya ketentuan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	1 Dokumen 100%	75,000,000	82,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, Menengah (KUMKM)								295,000,000	324,500,000					
1.22.1.22.01.16.08	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.16.09	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.16.10	Pelatihan Pengelolaan BUMDes										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.16.11	Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMDes			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan kelembagaan BUMDes yang dilaksanakan Jumlah BUMDes yang dikembangkan	60 kali 100 BUMDes	Persentase BUMDes Mandiri	80%	100,000,000	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.16.15	Expo Ekonomi Kreatif			Luar Daerah			Jumlah produk yang dipamerkan, jumlah peserta expo	45 buah, 2 Orang	Persentase promosi produk Bumdes / UEM	80%	35,000,000	38,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.16.16	Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa			Kab.ENREKANG Ibukota Provinsi			Prekuensi pembinaan Pasar Desa yang dilaksanakan Jumlah Pasar Desa yang terbina	30 OH 10 Pasar Desa	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan pengembangan Pasar Desa	1 Dokumen	25,000,000	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
1.22.1.22.01.16.17	Pelaksanaan Festival Desa										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.22.1.22.01.16.19	Pengembangan Kawasan Perdesaan			Kab.ENREKANG  Luar Daerah			Jumlah koordinasi, pembinaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan	30 kali	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk/difasilitasi  Tersedianya dokumen hasil pengembangan Kawasan Perdesaan	2 Kawasan Perdesaan  1 Dokumen	20,000,000	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								325,001,000	357,501,100				
1.22.1.22.01.18.05	Sosialisasi peraturan tentang Desa dan Sosialisasi Hukum			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Sosialisasi peraturan tentang desa dan sosialisasi hukum	129 Orang	Terpenuhinya sosialisasi peraturan tentang desa dan sosialisasi hukum	80%	70,000,000	77,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.18.06	Pendampingan / Pengawasan atas Penyampaian LKPJ Kepala Desa			Kab.ENREKANG  Luar Daerah			Jumlah Desa lokus pendampingan/pengawasan atas penyampaian LKPJ Kepala Desa	112 Desa	Terpenuhinya pendampingan/pengawasan atas penyampaian LKPJ Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan Tersedianya dokumen hasil pendampingan dan pengawasan atas penyampaian LKPJ Kepala Desa	100%  1 Dokumen	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.18.07	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penginputan Data Prodeskel			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta bintek Prodeskel dan pendampingan desa	112 Orang	Peningkatan pengetahuan Aparatur Desa terkait penginputan Prodeskel Tersedianya Data Prodeskel tahun berkenaan	90%  1 Dokumen	35,000,000	38,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.18.09	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.18.10	Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.18.11	Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.18.12	Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.20	Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								650,000,000	715,000,000				
1.22.1.22.01.20.01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa			Kab.ENREKANG			Jumlah Pilkades serentak yang diselenggarakan	29 Pilkades	Terpenuhinya Kepala Desa definitif dan Pelantikan Kades terpilih	29 Kepala Desa	100,000,000	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.20.02	Pembinaan Administrasi Desa			Kab.ENREKANG			Jumlah Desa yang terbina terkait pengelolaan Administrasi perkantoran desa	56 Desa	Persentase desa yang tertib administrasi perkantoran desa	80%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.20.03	Review LPJ Keuangan Desa			Kab.ENREKANG  Luar Daerah			Jumlah Dokumen LPJ Keuangan Desa yang direview	112 Dokumen	Persentase desa yang tertib pertanggungjawaban keuangan desa Terpenuhinya review LPJ Keuangan Desa tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	90%  100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22.1.22.01.20.04	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Jumlah desa lokus penerapan laporan keuangan berbasis aplikasi	112 Desa	Persentase inputan Lapkeudes pada aplikasi (Siskeudes dan Sipades) sesuai ketentuan	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.20.05	Monev Pelaksanaan ADD dan DD			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Jumlah monev pelaksanaan ADD dan Dana Desa yang dilaksanakan	66 kali	Tersedianya dokumen hasil monev pelaksanaan ADD dan Dana Desa	1 Dokumen	150,000,000	165,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.20.06	Penyusunan Regulasi tentang Desa			Kab.ENREKANG			Jumlah Perda / Perbup tentang desa yang dihasilkan	2 Perda	Tingkat pemenuhan regulasi tentang desa	70%	25,000,000	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.20.07	Bimbingan / Pendampingan Penyusunan APBDesa			Kab.ENREKANG			Jumlah desa yang diberikan bimbingan/pendampingan penyusunan APBDesa	112 Desa	Terpenuhinya penyusunan APBDesa sesuai ketentuan	100%	66,000,000	72,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.20.08	Pembinaan / Pendampingan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Jumlah Dokumen RKP Desa yang tersusun sesuai ketentuan	112 Dokumen RKP Desa	Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.20.09	Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
1.22.1.22.01.21	<b>Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>								<b>1,049,000,000</b>	<b>1,153,900,000</b>		
1.22.1.22.01.21.03	Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan desa	40 Orang	Peningkatan kapsitas pengurus kelembagaan desa	80%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.21.05	Pemilihan dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa			Kab.ENREKANG			Jumlah pemilihan dan pelantikan BPD yang diselenggarakan	20 Pemilihan/Pelantikan BPD	Terpenuhinya kepengurusan BPD yang defenitif sesuai ketentuan	100%	30,000,000	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.21.07	Pendataan dan Pembentukan Komunitas Masyarakat Hukum Adat										0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.21.09	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional, koordinasi dan pembinaan TP PKK Kabupaten / Kec.	100%	Terpenuhinya program kerja dan kegiatan PKK tk. Kabupaten dan tk. Kecamatan	100%	800,000,000	880,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.21.10	Pembinaan Pokjandal Posyandu			Kab.ENREKANG			Jumlah pokjandal posyandu yang terbina	12 Pokjandal Posyandu	Persentase peningkatan peran dan fungsi posyandu / Pokjandal Posyandu	90%	30,000,000	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.21.11	Koordinasi, Konsultasi, Monev Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Jumlah koordinasi, konsultasi, monev prog. pengembangan kelembagaan masyarakat perdesaan yang dilaksanakan	40 kali	Terpenuhinya koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi prog. pengembangan kelembagaan masy. perdesaan	90%	30,000,000	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
1.22.1.22.01.21.12	Pendataan dan Penginputan Simkel serta Pembinaan Kelembagaan Desa			Kab.ENREKANG			Jumlah kelembagaan desa yang terdata, terbina	24 kelembagaan	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan desa	90%	25,000,000	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
1.22.1.22.01.22	<b>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)</b>	<b>Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan</b>								<b>290,000,000</b>	<b>319,000,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				14	01/02/2003	15
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					6	7	8	9	10	11					
1.22.1.22.01.22.02	Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna									0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.22.03	Sosialisasi / Pelatihan Teknologi Tepat Guna									0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.22.04	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna			Kab.ENREKANG Ibukota Provinsi Luar Daerah			Jumlah peserta gelar TTG yang diutus	8 Orang	Peningkatan wawasan peserta gelar TTG dan media sosialisasi TTG	90%	60,000,000	66,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	
1.22.1.22.01.22.05	Inventarisir dan Penyusunan Data Base Teknologi Tepat Guna									0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.22.14	Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna									0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.22.15	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina TTG									0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		
1.22.1.22.01.22.16	Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Posyantek			Kab.ENREKANG			Jumlah kelembagaan posyantekdes / wartekdes yang terbina Jumlah kelembagaan Posyantek yang terbina	48 Posyantekdes / Wartekdes 12 Posyantek	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan Posyantek dan Posyantekdes / Wartekdes	85%	25,000,000	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	
1.22.1.22.01.22.17	Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan Desa Hijau			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta sosialisasi terkait desa hijau, PAMSIMAS, AMPL, Weslic Jumlah pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan	20 Orang 15 kali	Terpenuhinya koordinasi, sosialisasi dan pembinaan Desa Hijau	100%	25,000,000	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	
1.22.1.22.01.22.18	Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan			Kab.ENREKANG Luar Daerah							40,000,000	44,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	
<b>Jumlah</b>										<b>3,725,230,000</b>	<b>4,097,753,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							12
1.12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
1.12.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
1.12.1.12.01.15	Program Keluarga Berencana	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)								5,785,000,000	6,363,500,000						
1.12.1.12.01.15.01	Bakti TNI KB-Kes Terpadu			Kab.ENREKANG			terpadunya kegiatan TNI, KB dan Kesehatan	80 orang	meningkatnya calon peserta KB yang terlayani	80%	45,000,000	49,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.07	Monitoring dan evaluasi Kampung KB			Kab.ENREKANG			terlaksananya sosialisasi dan monitoring kampung KB	1 tahun	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB	1 tahun	25,000,000	27,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.08	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin			Kab.ENREKANG			tersedianya alat kontrasepsi bagi keluarga tidak mampu	12.343 RTM	meningkatnya peserta KB baru	75%	100,000,000	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) Kabupaten dan Kecamatan			Kab.ENREKANG			tersedianya biaya operasional balai penyuluhan KB di Kecamatan dan integrasi program KBPK	12 Kecamatan	meningkatkan pencapaian akseptor KB	75%	1,750,000,000	1,925,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.10	Kesatuan Gerak PKK- KB-KES			Kab.ENREKANG	terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera	1,07%	terpadunya kegiatan PKK, KB dan kesehatan	1x/tahun	peningkatan pencapaian akseptor KB	75%	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.11	Kegiatan Bulan Bakti KB KES IBI			Kab.ENREKANG			terpadunya kegiatan KB-Kes dan IBI	1x/tahun	meningkatnya calon peserta KB yang terlayani	80%	45,000,000	49,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.12	Pembinaan dan pelayanan KB di daerah terpencil/ tertinggal			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembinaan dan Pelayanan KB	2 Desa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KB	2 Desa	50,000,000	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.13	Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan dan Pembinaan Program KB			Kab.ENREKANG			terkoordinasinya program keluarga berencana	1 tahun	terwujudnya program KB	75%	145,000,000	159,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.15	Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB ) DAK Non Fisik			Kab.ENREKANG			tersedianya biaya operasional balai penyuluh KB	12 Kecamatan	meningkatnya kinerja penyuluh KB	75%	3,550,000,000	3,905,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.15.17	Pembinaan kesertaan KB Pria dan motivator			Kab.ENREKANG			terlaksananya pembinaan kesertaan Kb Pria	12 kecamatan	terwujudnya kesertaan KB pria	12 Kecamatan	50,000,000	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									145,000,000	159,500,000					
1.12.1.12.01.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)			Kab.ENREKANG			terlaksananya advokasi KIE dan Kespro	100 orang	meningkatnya pengetahuan remaja tentang kespro	80%	45,000,000	49,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.16.04	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Secara Alami			Kab.ENREKANG			terlaksananya kespro secara dini	150 siswa	meningkatnya pengetahuan remaja tentang kespro	80%	45,000,000	49,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			
1.12.1.12.01.16.06	Sekolah Siaga Kependudukan ( SSK )			Kab.ENREKANG			terbinanya sekolah siaga kependudukan	4 sekolah	terintegrasinya program KB dalam mata pelajaran di sekolah	75%	30,000,000	33,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.12.1.12.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									92,000,000	101,200,000		
1.12.1.12.01.17.01	Pelayanan konseling KB			Kab.ENREKANG			terlaksananya konseling KB dan kesehatan reproduksi	12 Kecamatan	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ber KB	70%	25,000,000	27,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.17.05	Monitoring dan Evaluasi ke Faskes/ Klinik KB			Kab.ENREKANG			terlaksananya monev ke faskes dan klinik KB	21 faskes	terwujudnya monitoring dan evaluasi	21 faskes	40,000,000	44,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.17.06	Pelayanan dan Penanggulangan Side Effect Pasca Pemasangan Alat Kontrasepsi			Kab.ENREKANG			tersedianya obat dan side efek pasca pemasangan alkon	12 kecamatan	meningkatnya PUS yang ber KB dan menurunnya DO peserta KB	65%	27,000,000	29,700,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.17.07	Distribusi alat/obat kontrasepsi			Kab.ENREKANG			terdistribusinya alat/obat kontrasepsi	12 kecamatan	meningkatnya peserta KB yang terlayani	12 kecamatan	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									1,100,000,000	1,210,000,000		
1.12.1.12.01.18.03	Peningkatan Peran Serta PPKBD dan Sub PPKBD dalam Kelembagaan IMP			Kab.ENREKANG			terbinanya PPKBD dan Sub PPKBD	12 kecamatan	meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PPKBD dan sub PPKBD tentang IMP	75%	945,000,000	1,039,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.18.06	pembinaan dan koordinasi terhadap PLKB dan IMP			Kab.ENREKANG			terkoordinasinya IMP di kecamatan	12 kecamatan	meningkatnya kinerja para penyuluh di lapangan	75%	40,000,000	44,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.18.07	Pembinaan dan Evaluasi Kampung KB			Kab.ENREKANG			Jumlah kampung KB	32 kampung	Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang mengetahui pentingnya KB	32 kampung	25,000,000	27,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.18.13	Operasional Kegiatan dan Pembinaan KB-KS Tingkat Kecamatan dan Desa			Kab.ENREKANG			Jumlah kecamatan yang di bina	12 kecamatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya KB	12 kecamatan	60,000,000	66,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.18.14	Sosialisasi Pergerakan Masyarakat Peduli KB			Kab.ENREKANG			Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	30 orang	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KB	30 orang	30,000,000	33,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									165,000,000	181,500,000		
1.12.1.12.01.20.03	Pembentukan PIK Remaja			Kab.ENREKANG			terbentuknya PIK/KRR bagi remaja	7 sekolah	tersedianya pusat informasi dan monseling KRR bagi remaja	85%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.20.05	Pembinaa saka kencana dan jambore saka kencana			Kab.ENREKANG			terbinanya saka kencana dan jambore saka kencana	12 kecamatan	terwujudnya saka kencana dan jambore saka kencana	70%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.20.06	Pembinaan PIK Remaja/ Forum Gendre dan pemilihan duta gendre			Kab.ENREKANG			terbinanya PIK Remaja dan Forum Genre	12 kecamatan	terwujudnya forum genre dan duta genre	80%	55,000,000	60,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.12.1.12.01.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									70,000,000	77,000,000				
1.12.1.12.01.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah			Kab.ENREKANG			terlaksananya penyuluhan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	2 sekolah (100 siswa)	meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba, PMS dan HIV/AIDS	65%	70,000,000	77,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah								95,000,000	104,500,000				
1.12.1.12.01.22.02	Sosialisasi Pencegahan Stunting pada Anak 1000 Hari Pertama Kehidupan			Kab.ENREKANG			tercegahnya stunting pada anak	12 kecamatan	terwujudnya pencegahan stunting pada anak pada 1000 hari pertama kehidupan	75%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									187,000,000	205,700,000				
1.12.1.12.01.23.02	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKB			Kab.ENREKANG			terlatihnya kelompok kader BKB dalam mengasuh tumbuh kembang anak	12 kecamatan	meningkatnya pengetahuan kader BKB tentang pengasuhan tumbuh kembang anak	80%	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.23.03	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKR			Kab.ENREKANG			terlatihnya kelompok BKR	80 orang	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang BKR	80%	35,000,000	38,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.23.04	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKL			Kab.ENREKANG			terlatihnya kelompok BKL	80 orang	meningkatnya pengetahuan kader tentang BKL	80%	40,000,000	44,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.23.05	Pembinaan manajemen kelompok UPPKS			Kab.ENREKANG			terbinanya kelompok UPPKS	12 kecamatan	meningkatnya usaha kelompok UPPKS	70%	37,000,000	40,700,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.23.06	Pembinaan dan pelatihan kelompok keluarga sejahtera										0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.25	Program Pengembangan Data dan Informasi KB	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah								250,000,000	275,000,000				
1.12.1.12.01.25.01	Rumah Dataku			Kab.ENREKANG			Jumlah rumah data	12 unit	tersedianya data yang akurat di rumah data	12 unit	25,000,000	27,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.25.02	Evaluasi Capaian Program Kegiatan KB/KS			Kab.ENREKANG			termonitornya program KB/KS	semesteran	terevaluasinya program KB/KS secara terpadu	75%	40,000,000	44,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		
1.12.1.12.01.25.03	Pemetaan KB dan KS			Kab.ENREKANG	presentase ketersediaan data KB/KS yang akurat	75%	tersedianya peta demografi dan peta PUS di desa/kelurahan	129 desa	terwujudnya ketersediaan data yang akurat	80%	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.12.1.12.01.25.04	Perekaman Data Keluarga KB/KS			Kab.ENREKANG			tersedianya data keluarga KB/KS	12 kecamatan	terwujudnya data keluarga KB/KS yang akurat	80%	90,000,000	99,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.25.05	Pembinaan R/R PPKBD dan Sub.PPKB Program KB/KS			Kab.ENREKANG			terbinanya R/R bagi PPKBD dan sub PPKBD	129 desa	terwujudnya pencatatan dan pelaporan	80%	30,000,000	33,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
1.12.1.12.01.25.06	Penyusunan Grand Desigen Kependudukan dan KB			Kab.ENREKANG			tersedianya data kependudukan dan KB	1 dokumen	terwujudnya data kependudukan dan KB	75%	50,000,000	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
<b>Jumlah</b>											<b>8,728,741,000</b>	<b>9,601,615,100</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1.07	Perhubungan															
1.07.01	Dinas Perhubungan															
1.07.1.07.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah							87,000,000	95,700,000					
1.07.1.07.01.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.									0	0	Dinas Perhubungan	1			
1.07.1.07.01.17.06	Kegiatan penciptaan kemandirian dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.			Kab.ENREKANG			Jumlah Pengawasan Angkutan Umum Penumpang Di terminal	15 Kali	Tertib naik turunnya penumpang di lingkungan terminal	90%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan						Jumlah Sekolah yang disosialisasikan terkait keselamatan, ketertiban lalu lintas	1 Sekolah	Adanya pemahaman tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas	75%	12,000,000	13,200,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.17.19	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)			Kab.ENREKANG			Jumlah Kendaraan bermotor yang diuji	282 Kendaraan	Terlaksananya pengujian Kendaraan sesuai dengan Standar pelayanan PKB	80%	10,000,000	11,000,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.17.26	Kegiatan Penciptaan Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya			Kab.ENREKANG			Jumlah Operasi Angkutan Umum	20 Kali	Terciptanya ketertiban administrasi angkutan umum	90%	35,000,000	38,500,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah								135,000,000	148,500,000				
1.07.1.07.01.19.05	Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kab. Enrekang										0	0	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.19.07	Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas			Kab.ENREKANG			Jumlah Koordinasi rencana Manajemen dan Rekayasa Lalulintas	10 Kali	Terciptanya kelancaran dan Rekayasa lalu lintas	90%	25,000,000	27,500,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.19.09	Pengaturan/Pengendalian Arus Mudik Lebaran Dan Tahun Baru			Kab.ENREKANG			Jumlah Pengaturan/Pengendalian arus mudik dan tahun baru	2 Kali	Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran arus mudik dan tahun baru	75%	35,000,000	38,500,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.19.10	Pengaturan lalu lintas setiap hari pasar di 3 Kecamatan. kec. Enrekang, Anggeraja, Alla			Kab.ENREKANG			Jumlah Pengaturan Lalulintas di Jalan pada Hari Pasar	3 Kec	Lancarnya arus lalu lintas di sekitar pasar	80%	15,000,000	16,500,000	Dinas Perhubungan	3		
1.07.1.07.01.19.11	Pengaturan Lalu Lintas pada Tepi dan Samping Jalan Setiap Pagi Hari (5 Hari Kerja)			Kab.ENREKANG			Jumlah Pengaturan Lalu Lintas di Jalan Raya	3 Kec	Lancarnya Arus Lalu Lintas di sekitar pasar	80%	15,000,000	16,500,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.19.12	Pengawasan Dan Patroli Lalu Lintas			Kab.ENREKANG			Jumlah Pengawasan dan Patroli Lalulintas	5 Kec	Terciptanya Pengawasan dan Patroli lalu lintas	75%	10,000,000	11,000,000	Dinas Perhubungan	3		
1.07.1.07.01.19.13	Pembuatan Perda Jaringan Induk Jalan Kab Enrekang			Kab.ENREKANG			Jumlah Perda Perda Jaringan Induk Jalan Kab. Enrekang	1 Perda	Terciptanya Perda Jaringan Induk Jalan Kab. Enrekang	75%	25,000,000	27,500,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.19.14	Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Kab. Enrekang			Kab.ENREKANG			Jumlah Dokumen andalalin yang tersusun	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Andalalin	75%	10,000,000	11,000,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.22	Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah								639,050,000	702,955,000				
1.07.1.07.01.22.2	Pengadaan Kendaraan Mobil Patroli (LLAJ) (Roda Empat)			Kab.ENREKANG			Jumlah Kendaraan Dinas Yang diadakan	1 Unit	Bertambahnya Kendaraan Dinas Roda Empat Dinas Perhubungan	90%	435,000,000	478,500,000	Dinas Perhubungan	1		
1.07.1.07.01.22.12	Pengadaan Dan Pemasangan Guadrail			Kab.ENREKANG			Jumlah Guadrail Yang Terpasang	1 Unit	Berkurangnya Tingkat Kecelakaan Dijalan	80%	70,000,000	77,000,000	Dinas Perhubungan	1		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.07.1.07.01.22.13	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengaturan Lalulintas			Kab.ENREKANG			Jumlah Pengaturan Lalulintas di Jalan Raya	3 Kec	Terciptanya Keamanan lalulintas setiap hari	80%	0	0	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.22.15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffik Light/ Warning Light			Kab.ENREKANG			Jumlah Traffik Light/Warning Light yang terpelihara	11 Unit	Berfungsinya Traffik Light/Warning Light dengan baik	80%	15,000,000	16,500,000	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.22.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte,Rambu Rambu Lalin Dan Guadrail			Kab.ENREKANG			Jumlah Halte, Rambu Rambu Lalin dan Guadrail yang direhab/Terpelihara	4 Halte, 5 Guadrail,5 Rambu Rambu	Terpeliharanya Halte, Rambu Rambu Lalin Dan Guadrail dengan baik	70%	24,050,000	26,455,000	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.22.17	Pembangunan Halte Bus,Taxi,Gedung Terminal										0	0	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.22.19	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas			Kab.ENREKANG			Jumlah Rambu lalulintas yang terpasang	150 Unit	Bertambahnya Rambu rambu lalulintas yang terpasang	90%	35,000,000	38,500,000	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.22.20	Pengadaan Papan Informasi Wilayah dan Arah Jalan			Kab.ENREKANG			Jumlah Papan Informasi Wilayah dan arah jalan	1 Unit	Bertambahnya Papan Informasi Wilayah dan arah jalan yang terpasang	90%	60,000,000	66,000,000	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.23	<b>Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)</b>	<b>Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah</b>								<b>335,000,000</b>	<b>368,500,000</b>		
1.07.1.07.01.23.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor			Kab.ENREKANG			Jumlah Alat Pengujian Kendaraan bermotor yang dipelihara	1 Unit	Berfungsinya alat pengujian kendaraan bermotor ( PKB )	90%	110,000,000	121,000,000	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.23.06	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal Kabupaten Enrekang			Kab.ENREKANG			jumlah Terminal yang terpelihara	1 Unit	Terciptanya keamanan dan ketertiban menaik dan menurunkan penumpang	70%	75,000,000	82,500,000	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.23.13	Pembangunan Sarana Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB )			Kab.ENREKANG			Jumlah sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor ( PKB )	1 Unit	Berfungsinya Sarana Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor	70%	75,000,000	82,500,000	Dinas Perhubungan	1
1.07.1.07.01.23.14	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB )			Kab.ENREKANG			Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang diadakan	1 Unit	Bertambahnya alat pengujian kendaraan bermotor ( PKB )	75%	75,000,000	82,500,000	Dinas Perhubungan	1
<b>Jumlah</b>											<b>2,716,250,000</b>	<b>2,987,875,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							14
1.23	Statistik																
1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik																
1.23.1.25.01.15	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							364,200,000	400,620,000						
1.23.1.25.01.15.03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB				jumlah dana		Tersedianya Data PDRB	n buku	Adanya Buku PDRB	75%	35,000,000	38,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.23.1.25.01.15.12	Pengembangan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi				jumlah dana		Adanya data yang valid	paket aplikasi	Tersedianya aplikasi yang siap pakai / digunakan		60,000,000	66,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.23.1.25.01.15.13	Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka				jumlah dana		Tersedianya data Enrekan Dalam Angka Dan Kecamatan Dalam Angka	buku	Tersusunnya Data/Buku Kabupaten Dalam Angka Dan Kecamatan Dalam Angka		109,200,000	120,120,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.23.1.25.01.15.15	Penyusunan Buku Tentang Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kab. Enrekang				jumlah dana		Tersusunnya Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kab.Enrekang	n buku	Adanya Buku Harga Barang Dan Jasa	n %	100,000,000	110,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.23.1.25.01.15.24	Peningkatan Pelayanan Persandian, Perlindungan Jaringan dan Data Daerah				jumlah dana		Tersedianya operasional persandian dan perlindungan data daerah	12 bulan	Persentase pelayanan administrasi persandian dan perlindungan data jaringan	85%	60,000,000	66,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.25	Komunikasi dan Informatika																
1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik																
1.25.1.25.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								1,964,000,000	2,160,400,000					
1.25.1.25.01.15.26	Pengembangan Press Release Kegiatan Pemda				jumlah dana		Terpublikasinya kegiatan pemda	50 buku	Kliping, buku, buletin, koran/surat kabar tentang kegiatan Pemda Enrekang	12 bulan	1,500,000,000	1,650,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.25.1.25.01.15.27	Pelaksanaan Jumpa Pers Pemda				jumlah dana		Jumlah Jumpa Pers Yang Dilaksanakan		tercapainya sinkronisasi pemberitaan antara mass media dan Pemda	75%	25,000,000	27,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.25.1.25.01.15.29	Pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik OPD dan Masyarakat				jumlah dana		Jumlah OPD dan Masyarakat mengikuti Pelatihan Jurnalistik	50 orang	Sdm OPD dan Masyarakat terhadap jurnalistik semakin meningkat.	75%	60,000,000	66,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.25.1.25.01.15.32	Tour Jurnalistik Kegiatan Pemda dan Masyarakat				jumlah dana		jumlah tour jurnalistik yang dilakukan oleh Pemda bersama masyarakat	n kegiatan	Tercapainya Sinergitas Media masyarakat Dan Pemda	80%	40,000,000	44,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.25.1.25.01.19	Program Pengembangan Telematika E Government	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan								2,990,983,000	3,290,081,300					
1.25.1.25.01.19.02	Operasional Website / Aplikasi Pelaksanaan E-Government Berbasis Teknologi Internet (TI)				jumlah dana				Jumlah website Tersedianya website Kabupaten Dan Website PD	2 jenis 85%	30,000,000	33,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.25.1.25.01.19.09	Pengembangan Bandwith				jumlah dana		Cakupan bandwith yang tersedia	150-200 Mbps	Persentase Layanan Jaringan Internet Yang Memadai	85%	150,961,000	166,057,100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			
1.25.1.25.01.19.10	Pengembangan Aplikasi/Replikasi Sistem Informasi				jumlah dana		Cakupan Aplikasi	5 aplikasi	Tersedianya aplikasi Dan Replikasi sistem Informasi dan Pendataan PD	90%	50,000,000	55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1.25.1.25.01.19.11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi				jumlah dana		Jumlah OPD/Desa/Kelurahan/Puskesmas/Sekolah yang terakses Jaringan WAN Jumlah Data Centre dan Command Centre	11 Kecamatan 15 Puskesmas 2 unit		Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Adanya Data Center Dan Comand Center		persen	2,430,022,000	2,673,024,200	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.19.12	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola TIK				jumlah dana		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Hardware/Software	40 orang		Adanya peserta yang mengikuti Pelatihan		80%	30,000,000	33,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.19.15	Maintenance Infrastruktur Telematika				jumlah dana		Jumlah Hardware Dan Software yang terpelihara	2 unit		Tersedianya Hardware Dan Software		85%	350,000,000	385,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
<b>1.25.1.25.01.20</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Komunikasi Publik</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan</b>										<b>384,900,000</b>	<b>423,390,000</b>		
1.25.1.25.01.20.01	Pemantauan dan Pengawasan Tower Menara Telekomunikasi				jumlah dana		Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan menara telekomunikasi	88 dokumen laporan		terdeteksinya tower menara telekomunikasi dalam rangka pemasukan PAD		80%	88,000,000	96,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.20.02	Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik melalui MC				jumlah dana		Terwujudnya saluran komunikasi publik	5 kegiatan		adanya saluran komunikasi publik		80%	26,000,000	28,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.20.03	Literasi Media Sosial				jumlah dana		Jumlah Peserta yang mengikuti Literasi media	200 orang		adanya peserta yang mengikuti literasi media sosial			63,000,000	69,300,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.20.04	Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat				jumlah dana		Adanya pelayanan aduan masyarakat yang diproses	3 layanan		terprosesnya aduan masyarakat		80%	42,000,000	46,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.20.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik				jumlah dana		Adanya laporan Monev	24 laporan					45,150,000	49,665,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.20.06	Gelar Aksi Pertunjukkan Rakyat				jumlah dana		Tercapainya penyampaian informasi pada masyarakat	n kali		Adanya penyampaian informasi kepada masyarakat		85%	120,750,000	132,825,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
<b>1.25.1.25.01.21</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan</b>										<b>630,500,000</b>	<b>693,550,000</b>		
1.25.1.25.01.21.01	Operasional Pengelolaan PLID (Pelayanan Informasi Dokumentasi)				jumlah dana		Jumlah informasi dan dokumentasi yang termuat dalam website pemerintah selama setahun	seluruh OPD		Informasi publik dapat diakses oleh masyarakat		80%	40,000,000	44,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.21.02	Operasional Media Center Pemkab Enrekang				jumlah dana		Berfungsinya Media Center sebagai salah satu sumber Informasi	12 bulan		Tercapainya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui akses media center/info publik		95%	60,000,000	66,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.21.03	Pembinaan dan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)				jumlah dana		Terbinanya Kelompok Informasi masyarakat	15 kelompok		Adanya anggota KIM/masy. Yang mamfu menerima dan menyebarkan informasi		80%	35,000,000	38,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.21.04	Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Pembangunan				jumlah dana		Ikut sertanya Pemda Enrekang dalam Pameran Pembangunan	2 kali		Tersosialisasinya data potensi		80%	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.21.05	Pembuatan Buletting Majalah Suara Massenrempulu				jumlah dana		Terbitnya majalah suarah massenrempul	8000 eksemplar		Tersosialisasinya program kerja dan Kebijakan Pemda		85%	46,000,000	50,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
					6	7	8	9	10	11			12	13	
1.25.1.25.01.21.06	Pembinaan dan Penayangan Kegiatan Pemda Pada TV Kabel				jumlah dana		Jumlah penayangan beberapa kegiatan Pemda melalui TV Kabel.	12 kali		Tersosialisasinya beberapa kegiatan Pemda dan lembaga lainnya ke masyarakat.	75%	35,000,000	38,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.21.07	Pengelolaan Data Informasi Melalui Aplikasi Sistem Integrasi				jumlah dana		Terkelolanya data informasi publik ke dalam Integrasi Sistem Informasi			Data Informasi Publik ter-upgrade dalam sistem aplikasi	75%	52,650,000	57,915,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.21.08	Operasional Pelayanan Sound Sistem				jumlah dana		Jumlah pelayanan sound system yang terlayani oleh diskominfo	12 bulan		Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan sound sistem dapat berjalan dengan lancar.	80%	80,850,000	88,935,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
1.25.1.25.01.21.10	Perawatan dan Perbaikan Peralatan Sound Sistem				jumlah dana		Tersedianya Peralatan Dan Terpeliharanya sound sistem	1 tahun		Peralatan sound sistem siap pakai/digunakan	75%	60,000,000	66,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1
<b>Jumlah</b>											<b>7,725,172,000</b>	<b>8,497,689,200</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11			14	15			
1.14	Tenaga Kerja																
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																
1.14.1.15.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argindustri (M4)	Terwujudnya realisasi infestasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata daerah		Persentase penyerapan tenaga kerja	85%					125,000,000	137,500,000					
1.14.1.15.01.15.10	pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit tingkat lanjutan			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta yang mengikuti diklat keterampilan menjahit	15 Orang	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja	15 Orang	60,000,000	66,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1			
1.14.1.15.01.15.11	Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyusunan data perencanaan tenaga kerja			Kab.ENREKANG			Jumlah tenaga kerja yang terdata	2.500 Tenaga kerja	Terwujudnya database tenaga kerja yang falid	2.500 Tenaga Kerja	35,000,000	38,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1			
1.14.1.15.01.15.14	Pendampingan dana tugas pembantuan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja			Kab.ENREKANG			Jumlah sasaran pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 Kecamatan	Bertambahnya wawasan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	6 Kecamatan	30,000,000	33,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1			
1.14.1.15.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas pada seluruh lapisan Masyarakat		Laju pertumbuhan PDB pertanaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB rill perorang bekerja pertahun (SDGis)	80%					220,000,000	242,000,000					
1.14.1.15.01.16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai			SULAWESI SELATAN			Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti pendidikan/pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang siap pakai	30 Orang	Tersedianya tenaga kerja yang siap pakai	30 Orang	180,000,000	198,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1			
1.14.1.15.01.16.08	Koordinasi Penyusunan Dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja Online (BKOL)			SULAWESI SELATAN			Frekuensi koordinasi penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja (BKOL)	15 Kali	Terciptanya Koordinasi Pemkab dan PemProv terhadap informasi bursa tenaga kerja	80%	40,000,000	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1			
1.14.1.15.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argindustri (M4)	Terwujudnya realisasi infestasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata daerah		Propersi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (SDGis)	75%					90,000,000	99,000,000					
1.14.1.15.01.17.03	Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Kab.ENREKANG			Volume pelaksanaan prosedur ketenagakerjaan dan fasilitasi perselisihan hubungan industrial	15 Kali	Terciptanya kepastian hukum pekerja dan pengusaha	12 Bulan	40,000,000	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1			
1.14.1.15.01.17.10	Inventarisasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan Tahun Berjalan			Kab.ENREKANG			Jumlah perusahaan yang bekerja pada Tahun berjalan	200 Perusahaan	Terwujudnya inventarisasi perusahaan jasa konstruksi dan konsultan yang berjdi di Kab. Enrekang untuk Tahun berjalan	200 Perusahaan	50,000,000	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1			
1.15	Koperasi dan UKM																
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, Menengah (KUMKM)		Propesi kredit UMKM terhadap total kredit (SDGis)	85%					40,000,000	44,000,000		
1.15.1.15.01.15.06	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan UKM			Enrekang Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN			Frekuensi pelaksanaan koordinasi	15 Kali	Berkembangnya usaha bagi pelaku UMKM	200 UMKM	40,000,000	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas		Propersi kredit UMKM terhadap total kredit (SDGis)	85%					120,000,000	132,000,000		
1.15.1.15.01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			SULAWESI SELATAN			Jumlah peserta yang ikut pelatihan	40 Orang	Meningkatnya wawasan Bagi wirausaha	40 Oang	50,000,000	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.16.07	Pelatihan Managemen Pengelolaan Koperasi/KUD			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG			Jumlah peserta yang ikut pelatihan	30 Orang Pengurus / Pengelola Koperasi	Meningkatnya keterampilan pengelolaan koperasi/KUD	30 Orang pengurus/pengelolaan koperasi	40,000,000	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.16.12	Pembinaan usaha bagi usaha kecil menengah			SULAWESI SELATAN			Jumlah UKM yang dibina	150 UKM	Jumlah UKM yang berdaya saing	20 UKM	30,000,000	33,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas		persentase UMKM terhadap layanan keuangan (SDGis)	80%					510,000,000	561,000,000		
1.15.1.15.01.17.05	Pemantauan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN			Pembinaan monev dan pengalihan tanggakan dana KUKM Tahun 2002 -2009	30 KUKM	Meningkatnya penerimaan/pengembalian dana KUKM	10 Juta	25,000,000	27,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG			Jenis Produk yang di promosi	10 Jenis	Dikenalnya produk baik lokas maupun non lokal	65%	250,000,000	275,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.17.14	Pendampingan Pembangunan/ Penataan Kawasan Dan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)			SULAWESI SELATAN			Jumlah tempat usaha yang terbangun	50 PKL	tersedianya sarana/tempat usaha bagi PKL	1 Lokasi	100,000,000	110,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.17.18	Pengsertifikatan tanah usaha mikro kecil menengah			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG			Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat	100 UMKM	Adanya jaminan untuk mendapatkan modal	100 Sertifikat tanah	30,000,000	33,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.17.20	Pembentukan kelompok wirausaha baru			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG			Jumlah kelompok yang terbentuk	20 Kelompok	Bertambahnya kelompok usaha yang produktif	10 Kelompok	35,000,000	38,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.19	Program Pengembangan Kemitraan Ekonomi Besar, Menengah dan Kecil	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas		Persentase koperasi dan UMK yang bermitra	60%					90,000,000	99,000,000		
1.15.1.15.01.19.02	Sosialisasi Pengembangan Kemitraan UMKM			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	30 Peserta	Meningkatnya pemahaman peserta tentang mitra usaha	60%	40,000,000	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.15.1.15.01.19.03	Membangun Pola Kemitraan Bagi UMKM			Kab.ENREKANG			Jumlah aspek kemitraan yang dibangun	3 Aspek	Meningkatnya kerjasama usaha	50%	50,000,000	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1.15.1.15.01.21	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas		Prsentase Koperasi Aktif	80%					1,100,000,000	1,210,000,000				
1.15.1.15.01.21.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			Kab.ENREKANG			Frekuensi pelaksanaan koordinasi	7 Kali	Sinkronnya program/kegiatan pusat dan daerah	1 Program dan 7 Kegiatan	40,000,000	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
1.15.1.15.01.21.02	Pengawasan, penilaian dan penghargaan koperasi berprestasi			Kab.ENREKANG			Jumlah KPS/UPS koperasi yang dibina, diawasi dan diberi penghargaan	25 KPS/USP Kop	Meningkatnya akuntabilitas KPS/UPS Koperasi	75%	35,000,000	38,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
1.15.1.15.01.21.03	Penyuluhan, pembentukan, pengesahan, perubahan AD Koperasi dan pembubaran koperasi			Kab.ENREKANG			Jumlah koperasi yang terbentuk, koperasi PAD koperasi yang dibubarkan dan lomba desa P2WKSS	2 Koperasi terbentuk	Terbentuknya 2 koperasi dan telah dibubarkannya 10 koperasi tidak aktif	85%	30,000,000	33,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
1.15.1.15.01.21.04	Pembinaan/Bimbingan Penyusunan laporan Keuangan dan Pelaksanaan RAT			Kab.ENREKANG			Jumlah Koperasi yang dibimbing dalam penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan RAT	81 Koperasi	Meningkatnya kepercayaan anggota koperasi dan terlaksananya RAT	65%	60,000,000	66,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
1.15.1.15.01.21.05	Pemberdayaan DEKOPINDA Kabupaten Enrekang			Kab.ENREKANG			Jumlah koperasi yang dibina dan diberdayakan	50 Koperasi	Berfungsinya DEKOPINDA dalam pembinaan gerakan koperasi	75%	75,000,000	82,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
1.15.1.15.01.21.06	Peningkatan SDM bagi Aparat Pembina Koperasi			Kab.ENREKANG			Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan	5 Orang	Meningkatkan SDM pengolah koperasi	65%	60,000,000	66,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
1.15.1.15.01.21.07	Magang/Orientasi Lapangan Pengurus/Anggota Koperasi			Luar Daerah			Jumlah pengurus/anggota koperasi yang mengikuti magang	50 Orang	Bertambahnya pengetahuan tentang perkoperasian	50 Orang	225,000,000	247,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
2	URUSAN PILIHAN															
2.08	Transmigrasi															
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
2.08.1.15.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan		Persentase Transmigrasi Swakarsa	1 Lokasi					570,000,000	627,000,000				
2.08.1.15.01.15.07	koordinasi dan konsultasi program transmigrasi			SULAWESI SELATAN			Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	5 Kali	Tersedianya data dan informasi penyelesaian masalah pertanahan lokasi transmigrasi	70%	40,000,000	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
2.08.1.15.01.15.08	Bimtek Perencanaan dan Studi Banding Pengembangan Kawasan Transmigrasi*			SULAWESI SELATAN			Jumlah peserta bimtek dan study banding	5 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta tentang modal kawasan transmigrasi yang sesuai dengan kondisi	60%	80,000,000	88,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
2.08.1.15.01.15.09	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			SULAWESI SELATAN			Jumlah lokasi yang dibangun	1 Lokasi	Tersedianya lokasi kawasan transmigrasi	70%	450,000,000	495,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1		
<b>Jumlah</b>											<b>3,133,000,000</b>	<b>3,446,300,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							14
1.16	Penanaman Modal																
1.16.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
1.16.1.16.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4)								330,000,000	363,000,000						
1.16.1.16.01.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia			Kab.ENREKANG	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan Agroindustri	44 kali	Frekuensi Koordinasi Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan dunia Usaha	44 Kali	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Investasi	1 Dokumen	70,000,000	77,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			
1.16.1.16.01.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			Kab.ENREKANG	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4)	24 Kali	Terpantaunya kegiatan Penanaman Modal di Daerah	12 Bulan	Terpantaunya kegiatan Penanaman Modal di Daerah	1 Paket	80,000,000	88,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			
1.16.1.16.01.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi			SULAWESI SELATAN Luar Daerah Ibukota Provinsi	Meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4)	12 Kali	Pendidikan dan pelatihan di Bidang penanaman modal yang diikuti	12 kali	Meningkatnya Kualitas SDM guna pelayanan investasi	1 Paket	80,000,000	88,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			
1.16.1.16.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi			Luar Daerah SULAWESI SELATAN Ibukota Provinsi	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4)	10 Kali	Frekuensi Pameran Promosi	10 Kali	Meningkatnya Minat Investor-Investor untuk berusaha/berinvestasi Meningkatkan Minat Investor-Investor untuk berusaha/berinvestasi	1 Paket 1 Paket	100,000,000	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			
1.16.1.16.01.18	Program Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4)									180,000,000	198,000,000					
1.16.1.16.01.18.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah										0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			
1.16.1.16.01.18.02	Sosialisasi, Bimbingan dan workshop bagi UKM, UMKM, serta Pengusaha			Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertanian,pertambangan,energi,wisata,dan Kehutanan Daerah	1 paket	Terbinanya seluruh pengusaha baik skala besar maupun skala pemula	1 Paket	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha di Daerah	1 paket	70,000,000	77,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			
1.16.1.16.01.18.03	Pengawasan Ketentuan dan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab.ENREKANG	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan agroindustri (M4)	12 Kecamatan	Meningkatnya Iklim Investasi dan realisasi Investasi Daerah	12 Kecamatan	Terlaksananya Ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah	12 Kecamatan	60,000,000	66,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			
1.16.1.16.01.18.04	Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah			SULAWESI SELATAN	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4)	12 Bulan	Terbinanya seluruh pengusaha baik yang skala besar maupun skala pemula	1 paket	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha di daerah	1 Paket	50,000,000	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.16.1.16.01.18.05	Penyusunan Peraturan Bupati dibidang Penanaman Modal			SULAWESI SELATAN							0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
1.16.1.16.01.19	Program Peningkatan pelayanan terpadu	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)									610,000,000	671,000,000		
1.16.1.16.01.19.02	Pemantauan/Peninjauan Lapangan Lokasi Izin			Kab.ENREKANG	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan agroindustri 9 M4 )	100 BAPL	Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan	100 BAPL	Izin yang terbit dimiliki rekomendasi teknis	100 BAPL	60,000,000	66,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
1.16.1.16.01.19.03	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik			Kab.ENREKANG	Meningkatkan perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agriindustri ( M4 )	75 Orang	Jumlah orang mengikuti Sosialisasi Pelayanan Publik	75 Orang	Pemahaman Masyarakat terkait dengan pelayanan publik	75 orang	50,000,000	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
1.16.1.16.01.19.05	Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) Pelayanan Perizinan										0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
1.16.1.16.01.19.06	Operasional Perizinan dan Non Perizinan Mobile On Line			SULAWESI SELATAN	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri ( M4 )	2000 izin	Pelayanan Penerbitan izin dan non izin dilokasi pemohon	2000 izin	Jumlah izin dan non izin yang diproses secara online dilokasi	2000 izin	400,000,000	440,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
1.16.1.16.01.19.07	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan			Kab.ENREKANG	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri Monitoring dan evaluasi Layanan	12 kecamatan 12 kecamatan			Perbaikan kualitas layanan publik	12 Kecamatan	50,000,000	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
1.16.1.16.01.19.10	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan										0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
1.16.1.16.01.19.11	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan										0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
1.16.1.16.01.19.12	Pembangunan Mal Pelayanan Publik										0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
1.16.1.16.01.19.13	Penyediaan Sarana dan Prasarana layanan Perizinan OSS										50,000,000	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
1.16.1.16.01.20	Program Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dlm Pelayanan Perizinan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)									100,000,000	110,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.16.1.16.01.20.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayanan Publik			Kab.ENREKANG	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah	12 Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pelayanan Publik	12 Kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan di Bidang Pelayanan Publik di Kecamatan	12 Kecamatan	50,000,000	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
1.16.1.16.01.20.02	Pengadaan Plat Himbauan tentang Perizinan dan Kotak Saran/Pengaduan			Kab.ENREKANG	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4)	12 plat	Terpasangnya Plat Himbauan dan Layanan Perizinan	12 Plat	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Prosedur Mengurus Izin	12 Plat	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
1.16.1.16.01.20.03	Pengadaan Lipload / Brosur			Kab.ENREKANG	Meningkatkan Perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah	200 lembar	Tersedianya lipload/ brosur sebagai bahan promosi investasi	200 lembar	Adanya lipload/brosur yang menjadi media informasi promosi investasi	200 lembar	50,000,000	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
<b>Jumlah</b>											<b>3,265,400,000</b>	<b>3,591,940,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target							
					6	7	8	9	10	11					12	13	14
1.18	Kepemudaan dan Olahraga																
1.18.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata																
1.18.1.18.01.16	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah							1,300,000,000	1,430,000,000						
1.18.1.18.01.16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan			Kab.ENREKANG			Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	15%	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	10 Organisa	100,000,000	110,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.16.13	Penyelenggaraan Kepemudaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional			Enrekang Makassar SULAWESI SELATAN			Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang diikuti	2 Kegiatan	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Kegiatan dan Meningkatkan Wawasannya	20 orang	100,000,000	110,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	3			
1.18.1.18.01.16.14	Pembinaan Pemuda Pelopor			Enrekang Makassar			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor	1 Kali	Jumlah Pemuda Pelopor yang dibina	24 Orang	100,000,000	110,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.16.15	Peningkatan Ketahanan Bela Negara Bagi Generasi Muda			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan Ketahanan Bela Negara	50 orang	Meningkatnya Wawasan Bela Negara dan Semangat Patriotik Generasi Muda	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.16.23	Pelatihan Potensi dan Seleksi PASKIBRAKA			Kab.ENREKANG			Jumlah Paket Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Tim Paskibraka Kabupaten	1 Paket	Jumlah Personil Tim Paskibraka Kabupaten	75 Orang	650,000,000	715,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.16.24	Studi Wawasan Bagi Tim Paskibraka Kabupaten			Luar Daerah			Jumlah Pelaksanaan Study Wawasan Tim Paskibraka Kabupaten	1 Kali	Jumlah Peserta Study Wawasan	75 Orang	150,000,000	165,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.16.25	Pembinaan Kepemimpinan Pemuda			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pembinaan Kepemimpinan Pemuda	100 Orang	Persentase Peningkatan Wawasan Kepemimpinan Pemuda	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah								460,000,000	506,000,000					
1.18.1.18.01.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			Enrekang			Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	20 Orang	Persentase Peningkatan Kompetensi Wirasaha Muda	100%	200,000,000	220,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.17.02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda			SULAWESI SELATAN			Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	20 Orang	Persentase Peningkatan Keterampilan bagi Pemuda	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.17.03	Pelatihan Pembina Palang Merah			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan Pembina Palang Merah	60 Orang	Jumlah Organisasi Palang Merah yang Aktif	60 Sekolah	160,000,000	176,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah								125,000,000	137,500,000					
1.18.1.18.01.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda			Kab.ENREKANG			Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan bahaya Narkoba	25 Sekolah	Persentase sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba	25%	125,000,000	137,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			
1.18.1.18.01.20	Program Pembinaan dan Permasalahannya Olah Raga	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah								550,000,000	605,000,000					
1.18.1.18.01.20.04	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah			Kab.ENREKANG			Cakupan Pembinaan Atlet Muda	30%	Jumlah atlet yang dibina	190 Atlet	130,000,000	143,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.18.1.18.01.20.06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			Luar Daerah Ibukota Provinsi			Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi	3 Prestasi	Jumlah Atlit yang Meraih Prestasi pada Event Kompetisi yang diikuti	3 Atlit	80,000,000	88,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
1.18.1.18.01.20.07	Pengembangan Olahraga Rekreasi/Tradisional			Enrekang Ibukota Provinsi			Jumlah Event Kegiatan Olahraga Rekreasi / Tradisional yang diikuti	2 Event	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Olahraga Rekreasi / Tradisional	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
1.18.1.18.01.20.13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih; peneliti; praktisi; dan teknisi olahraga			Kab.ENREKANG			Jumlah Pelatih yang Mengikuti Diklat	45 Orang	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Pelatih	100%	80,000,000	88,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
1.18.1.18.01.20.19	Pelaksanaan Event Club Olahraga Daerah			Kab.ENREKANG			Jumlah Event Kejuaraan Antar Club	2 Event	Aktifnya Club Olahraga Daerah	12 Club	90,000,000	99,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
1.18.1.18.01.20.20	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar			Kab.ENREKANG			Jumlah Event Pemassalan Olahraga bagi Pelajar	1 Event	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Event Kejuaraan	40 Sekolah	70,000,000	77,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
<b>1.18.1.18.01.21</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>	<b>Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah</b>								<b>1,550,000,000</b>	<b>1,705,000,000</b>				
1.18.1.18.01.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga			Kab.ENREKANG			Jumlah Sarana dan Prasarana yang di bangun	22 Unit	Persentase Peningkatan minat Berolahraga dalam Masyarakat	100%	1,350,000,000	1,485,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
1.18.1.18.01.21.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga			Kab.ENREKANG			Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Paket	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	150,000,000	165,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
1.18.1.18.01.21.08	Pengadaan Peralatan Olahraga			Kab.ENREKANG			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Olahraga yang disediakan	1 Paket	Persentase Peningkatan Minat Olahraga dalam Masyarakat	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
<b>1.18.1.18.01.23</b>	<b>Program Pengembangan Data Informasi dan Data Statistik Daerah</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>									<b>40,000,000</b>	<b>44,000,000</b>				
1.18.1.18.01.23.01	Penyusunan Profil Data SKPD			Kab.ENREKANG			Jumlah Profil data OPD	1 Dok	Persentase Peningkatan Pelayanan Data OPD	100%	40,000,000	44,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>															
<b>2.04</b>	<b>Pariwisata</b>															
<b>1.18.01</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata</b>															
<b>2.04.1.18.01.18</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan dan Destinasi Wisata</b>	<b>Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)</b>	<b>Terwujudnya realisasi infestasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata daerah</b>								<b>5,344,500,000</b>	<b>5,878,950,000</b>				
2.04.1.18.01.18.01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan			Kab.ENREKANG			Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dibangun	3 Paket	Persentase peningkatan daya tarik objek wisata	100%	1,879,500,000	2,067,450,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata			Enrekang Makassar Luar Daerah			Jumlah event promosi pariwisata daerah	6 Event	Jumlah kunjungan wisatawan	50.000 Wisatawan	300,000,000	330,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.04	Koordinasi dengansektor pendukung pariwisata			Kab.ENREKANG			Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Pendukung Pariwisata	1 Kali	Jumlah Stekholder Pariwisata yang Mengikuti Rapat Koordinasi	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.05	Pengembangan Desa Wisata			Kab.ENREKANG			Jumlah Desa Wisata yang dibina dan dikembangkan	3 Desa Wisata	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan desa wisata	30%	150,000,000	165,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.04.1.18.01.18.06	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu			Kab.ENREKANG			Jumlah pelatihan pemandu wisata terpadu	1 Paket	Meningkatnya skill pemandu wisata	100%	130,000,000	143,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.07	Operasional Pengelolaan Onjek Wisata Permandian Lewaja			Kec.ENREKANG			Jumlah objek wisata yang dikelola	1 Objek	Jumlah PAD pada sektor Pariwisata	400.000.000	180,000,000	198,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.08	Penyusunan Master Plan Objek Pariwisata			Kab.ENREKANG			Jumlah Objek Wisata yang memiliki Master Plan	2 Objek	Terwujudnya perencanaan pembangunan kepariwisataan yang terarah dan berkelanjutan	100%	175,000,000	192,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.09	Operasional Pengelolaan Objek Wisata Villa Bambapuang			Kec.ANGGERAJA			Jumlah objek wisata yang dikelola	1 Objek	Jumlah PAD pada sektor Pariwisata	300.000.000	270,000,000	297,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.10	Peningkatan Kualitas Tatakelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan			Kab.ENREKANG			Jumlah Pelatihan Kepariwisataaan	4 Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan	160 Orang	550,000,000	605,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.11	Pemilihan Duta Wisata			Enrekang Makassar			Jumlah event Pemilihan Duta Wisata	2 Event	Jumlah Duta Wisata yang terpilih dan mewakili kabupaten	4 Orang	75,000,000	82,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.12	Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata			Kab.ENREKANG			Jumlah paket kegiatan untuk mendukung operasional TIC	1 Paket	Jumlah pelaksanaan operasional TIC	1 Tahun	150,000,000	165,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.13	Pengembangan Daya Tarik Wisata			Kab.ENREKANG			Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana objek wisata	2 Paket	Persentase peningkatan daya tarik objek wisata	100%	550,000,000	605,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.14	Cetak Buku Profil Pariwisata Daerah			Makassar			Jumlah booklet profil pariwisata Kab. Enrekang	250 Eksem-plar	Meningkatnya promosi pariwisata daerah	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.15	Pengembangan Amenitas Pariwisata			Kab.ENREKANG			Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana objek wisata yang dibangun untuk peningkatan amenities pariwisata	2 Paket	Persentase peningkatan amenities objek wisata	100%	550,000,000	605,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.16	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen database Pariwisata Kabupaten Enrekang	1 Dokumen	Persentase peningkatan pelayanan data kepariwisataan	100%	20,000,000	22,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
2.04.1.18.01.18.17	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan			Kab.ENREKANG			Jumlah paket wisata yang siap dipasarkan	1 Paket	Persentase peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kab. Enrekang	20%	250,000,000	275,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1		
<b>Jumlah</b>											<b>10,467,500,000</b>	<b>11,514,250,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							12
1.24	Kearsipan																
1.26.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																
1.24.1.26.01.19	Program Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)	Meningkatnya minat dan Budaya Baca Masyarakat							431,000,000	474,100,000						
1.24.1.26.01.19.01	Pengelolaan dan Penertiban Arsip			Kab.ENREKANG			Jumlah OPD Yang Tertib Arsip	7 OPD	Memudahkan Dalam Pencarian Arsip	7 OPD	41,000,000	45,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.02	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di SKPD			Kab.ENREKANG			Volume OPD Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	37 OPD	Tercapainya Evaluasi Internal Kearsipan	37 OPD	35,000,000	38,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.03	Pembuatan Regulasi Kearsipan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.05	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip						Jumlah OPD Yang Melakukan Pendataan dan Penataan Arsip	25 OPD	Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip	25 OPD	44,000,000	48,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.06	Penelusuran Arsip Daerah			Kab.ENREKANG			Jumlah Arsip Daerah Yang Ditelusuri	470 Arsip	Arsip Tekstual dan Media Baru	470 Arsip	40,000,000	44,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.07	Perawatan Arsip			Kab.ENREKANG			Jumlah Arsip Yang Dirawat	120 Arsip	Terjaga dan Terpeliharanya Arsip	120 Arsip	20,000,000	22,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.08	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan			Kab.ENREKANG			Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kearsipan	50 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Arsip	50 Orang	54,000,000	59,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.09	Survei Akuisisi dan Penilaian Arsip			Kab.ENREKANG			Jumlah OPD Lokus Survey Akuisisi dan Penilaian Arsip	8 OPD	Tersedianya Data dan Informasi Tentang Arsip	8 OPD	34,000,000	37,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.10	Pembuatan Bahan Publikasi Kearsipan			Kab.ENREKANG			Jumlah Bahan Publikasi Kearsipan Yang Tersedia	43 Buah	Tersedianya Bahan Publikasi Kearsipan	43 Buah	31,000,000	34,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.11	Pengembangan Layanan Informasi Kearsipan			Kab.ENREKANG							0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.12	Pembinaan Dan Penilaian Arsip di OPD						Jumlah OPD Yang Dinilai Pengelolaan Arsipnya	15 OPD	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Arsip di OPD	15 OPD	33,000,000	36,300,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.13	Pembinaan Kelembagaan Kearsipan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.14	Pendampingan Kearsipan Desa										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.15	Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.16	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika			Kab.ENREKANG			Jumlah Dokumen/Arsip Yang Diduplikat Dalam Bentuk Informatika	250 Arsip	Bertambahnya Arsip Berbentuk Informatika	250 Arsip	15,000,000	16,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.17	Sosialisasi Kearsipan			Kab.ENREKANG			Jumlah OPD Yang Mengikuti Sosialisasi Kearsipan	43 OPD	Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan	43 OPD	52,000,000	57,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.24.1.26.01.19.18	Lomba Tertib Arsip			Kab.ENREKANG			Jumlah OPD Peserta Tertib Arsip	44 OPD	Adanya Pemenang Lomba Tertib Arsip	44 OPD	32,000,000	35,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			
1.26	Perpustakaan																
1.26.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																
1.26.1.26.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)									876,000,000	963,600,000					
1.26.1.26.01.15.01	Penyusunan Regulasi Perpustakaan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.26.1.26.01.15.02	Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Perpustakaan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.03	Fasilitasi Pegiat Literasi Perpustakaan			Kab.ENREKANG			Jumlah Pegiat Literasi Perpustakaan	300 Orang	Bertambahnya Pegiat Literasi	300 Orang	50,000,000	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.04	Wisata Literasi			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Wisata Literasi	200 Orang	Meningkatnya Daya Minat Masyarakat Terhadap Literasi	200 Orang	35,000,000	38,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.05	Diskusi Buku			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Diskusi Buku	50 Orang	Terlaksananya Diskusi Buku	50 Orang	30,000,000	33,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.06	Pelatihan Literasi Informasi Terapan			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Pelatihan Literasi Informasi Terapan	100 Orang	Bertambahnya Pengetahuan Tentang Literasi terapan	100 Orang	35,000,000	38,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.07	Gerakan Ibu Hebat			Kab.ENREKANG			Jumlah Pesta Gerakan Ibu Hebat	200 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Ibu Tentang Literasi	200 Orang	55,000,000	60,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.08	Pembinaan dan Pendidikan Perpustakaan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah			Kec.ENREKANG			Jumlah Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Yang Tersedia	1000 Eksp.	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	1000 Eksp.	170,000,000	187,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.10	Pelayanan Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Perpustakaan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.12	Librarys Competition			Kec.ENREKANG			Jumlah Peserta Library Competition	12 Bulan	Meningkatnya Semangat Belajar dan Berkompetisi bagi Para Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum	12 Bulan	81,000,000	89,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.13	Pelayanan perpustakaan keliling			Kab.ENREKANG			Jumlah Pelayanan Perpustakaan Keliling	280 Perpustakaan	Terlayannya Perpustakaan Keliling ke Sekolah/Komunitas	280 Perpustakaan	150,000,000	165,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.15	Pekan Literasi			Kec.ENREKANG			Jumlah Peserta Pekan Literasi	300 Orang	Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat Tentang Literasi	300 Orang	100,000,000	110,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.16	Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.17	Workshop Kepenulisan , Speed Reading dan Story Telling			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Workshop Kepenulisan Speed Reading dan Story Telling	300 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Workshop Kepenulisan Speed Reading dan Story Telling	300 Orang	75,000,000	82,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.18	Computer Course dan English Course			Kec.ENREKANG			Jumlah Peserta Computer Course dan English Course	60 Peserta	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Computer Course dan English Course	60 Peserta	20,000,000	22,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.15.19	Pengolahan bahan pustaka			Kec.ENREKANG			Jumlah Pengelolaan Koleksi Bahan Pustaka	1500 Eksp.	Terkelolanya Koleksi Bahan Pustaka	1500 Eksp.	75,000,000	82,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
<b>1.26.1.26.01.16</b>	<b>Program Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah, Desa dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)</b>									<b>468,378,000</b>	<b>515,215,800</b>				
1.26.1.26.01.16.01	Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah			Kec.ENREKANG			Jumlah Gedung Perpustakaan Yang Tersedia	1 Unit	Adanya Gedung Perpustakaan	1 Unit	278,378,000	306,215,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dan Kelurahan			Kec.ENREKANG			Jumlah Perpustakaan Yang di Monitoring dan Di Evaluasi	12 Bulan	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Sekolah,Desa dan Kelurahan	12 Bulan	65,000,000	71,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		
1.26.1.26.01.16.05	Pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan			Kec.ENREKANG			Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Strategi dan Pengembangan Perpustakaan	350 Orang	Terlaksananya Strategi Pengembangan Perpustakaan	350 Orang	125,000,000	137,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.26.1.26.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								125,000,000	137,500,000		
1.26.1.26.01.17.01	Pengembangan Ruang Baca			Kab.ENREKANG			Jumlah Sarana Dan Prasarana Ruang Baca Yang Tersedia	1 Unit			65,000,000	71,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
1.26.1.26.01.17.02	Pengembangan Depo Arsip			Kab.ENREKANG			Jumlah Sarana dan Prasarana Depo Arsip Yang Tersedia	1 Unit	Adanya Sarana Dan Prasarana Depo Arsip	1 Unit	60,000,000	66,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
1.26.1.26.01.18	Program Pengembangan Perpustakaan Berbasis IT	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2)									230,000,000	253,000,000		
1.26.1.26.01.18.01	Pengadaan Koleksi Digital			Kec.ENREKANG			Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Digital	600 Eksp.	Tersedianya Koleksi Digital Perpustakaan	600 Eksp.	70,000,000	77,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
1.26.1.26.01.18.02	Alih Media dan Pelestarian Bahan Pustaka			Kec.ENREKANG			Persentase Alih Media dan Pelestarian Bahan Pustaka	90%	Terpelihara Bahan Pustaka	90%	60,000,000	66,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
1.26.1.26.01.18.03	Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan			Kec.ENREKANG			Persentase Pengelolaan Perpustakaan Secara Otomasi	100%	Diterapkannya Pengelolaan Perpustakaan Berbasis TIK	100%	60,000,000	66,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
1.26.1.26.01.18.04	Internet Marketing			Kab.ENREKANG			Jumlah Peserta Kursus Internet Marketing	60 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Internet Marketing	60 Orang	40,000,000	44,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
1.26.1.26.01.18.05	Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Semua Jenis Perpustakaan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
1.26.1.26.01.18.06	Bimtek Manajemen Perpustakaan										0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
<b>Jumlah</b>											<b>3,517,478,000</b>	<b>3,869,225,800</b>		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			14	15
2.01	Pertanian													
2.01.01	Dinas Pertanian													
2.01.2.01.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan							3,516,500,000	3,868,150,000			
2.01.2.01.01.20.12	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian					Jumlah PPL yang difasilitasi Jumlah Orang yang terlatih Frekuensi Supervisi Penyuluhan Jumlah Posluhdes dan Penyuluh Swadaya yang diadvokasi	135 Orang 20 Orang 135 Kali 50 Orang	Persentase Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluh	10%	650,000,000	715,000,000	Dinas Pertanian	1	
2.01.2.01.01.20.15	Pengelolaan Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian					Frekuensi Temu Tehnis Jumlah Desa yang mengikuti Jambore Jumlah Desa yang terfasilitasi Rembug Kelompok Tani Jumlah BPP yang mengadopsi TI	3 Kali 2 Desa 2 Desa 12 BPP	Persentase Peningkatan Metode Informasi dan Metode Penyuluhan Pertanian	10%	566,500,000	623,150,000	Dinas Pertanian	3	
2.01.2.01.01.20.16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian					Jumlah BPP yang mereplika kaji terap Jumlah Komisi Penyuluhan yang beroperasi Jumlah Dokumen monografi yang tersedia Frekuensi Pertemuan Wilayah	12 BPP 1 Komisi 12 Dokumen 12 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	10%	2,300,000,000	2,530,000,000	Dinas Pertanian	1	
2.01.2.01.01.28	Program Pengembangan Teknologi Produksi Pertanian	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Pertanian							28,600,000,000	31,460,000,000			
2.01.2.01.01.28.01	Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis Koorporasi					Jumlah petani / pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan Jumlah sarpras yang tersedia	25 Org 182 Unit	Peningkatan jumlah produksi komoditi tanaman hortikultura : bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit	76.676, 181, 2.905, 2.482	9,450,000,000	10,395,000,000	Dinas Pertanian	3	
2.01.2.01.01.28.02	Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi					Jumlah petani / pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan Jumlah sarpras yang tersedia	25 Org 182 Unit	Peningkatan jumlah produksi komoditi perkebunan : Kopi arabika (Ton), Lada (Ton)	10.301, 2.249	9,450,000,000	10,395,000,000	Dinas Pertanian	3	
2.01.2.01.01.28.03	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Koorporasi					Jumlah petani / pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan Jumlah sarpras yang tersedia	25 Org 182 Unit	Peningkatan jumlah produksi komoditi tanaman pangan : Padi (Ton), Jagung (Ton)	75.660, 97.954	9,450,000,000	10,395,000,000	Dinas Pertanian	3	
2.01.2.01.01.28.04	Desiminasi Hasil Produksi Pertanian					Frekuensi desiminasi produksi hasil pertanian	Nasional dan Internasional	Cakupan wilayah desiminasi	Nasional dan Internasional	250,000,000	275,000,000	Dinas Pertanian	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.01.2.01.01.29	Program Pembinaan dan Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Tani	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan								1,050,000,000	1,155,000,000		
2.01.2.01.01.29.01	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani						Jumlah kelompok tani yang terfasilitasi pelaksanaan gerdal komoditi pertanian Jumlah PRC yang terfasilitasi Jumlah KEP yang berkembang	2 KT  1 PRC 1 KEP	Persentase peningkatan kemampuan kelompok tani	5%	700,000,000	770,000,000	Dinas Pertanian	1
2.01.2.01.01.29.02	Pengelolaan Data Base Kelompok Tani						Jumlah KT yang dinilai dan divalidasi Jumlah KT yang menyusun RDKK	1.970 KTNA 1.970 KTNA	Persentase penggunaan RDKK dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan lainnya	50%	350,000,000	385,000,000	Dinas Pertanian	3
2.01.2.01.01.29.03	Pekan Nasional (PENAS) KTNA						Jumlah peserta yang mengikuti PENAS KTNA	100 Org	Persentase peningkatan jumlah peserta PENAS KTNA	100%	0	0	Dinas Pertanian	2
2.01.2.01.01.30	Program Pengembangan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)	Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan								1,750,000,000	1,925,000,000		
2.01.2.01.01.30.01	Penerapan Sistem Hortikultura Berkelanjutan						Frekuensi rumangngan Kelompok tani yang mengikuti pelatihan	16 Kali 2 KT	Persentase peningkatan penerapan sistem hortikultura berkelanjutan	2 KT	550,000,000	605,000,000	Dinas Pertanian	3
2.01.2.01.01.30.02	Penerapan Sistem Perkebunan Berkelanjutan						Frekuensi Rumangngan Kelompok Tani Yang Mengikuti Pelatihan	16 Kali 2 KT	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perkebunan Berkelanjutan	2 KT	550,000,000	605,000,000	Dinas Pertanian	3
2.01.2.01.01.30.03	Penerapan Sistem Tanaman Pangan Berkelanjutan						Frekuensi Rumangngan Kelompok Tani Yang Mengikuti Pelatihan	16 Kali 2 KT	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Tanaman Pangan Berkelanjutan	2 KT	650,000,000	715,000,000	Dinas Pertanian	3
2.01.2.01.01.32	Program Peningkatan Produktifitas Pertanian	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan								4,200,000,000	4,620,000,000		
2.01.2.01.01.32.01	Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi Hortikultura						Jumlah petani yang mengikuti bimtek Luasan Lahan yang diintensifikasi, dioptimalisasi Jumlah sapras yang tersedia	25 petani 50 Ha 10 Unit	Peningkatan Produktivitas Hortikultura	20%	500,000,000	550,000,000	Dinas Pertanian	2
2.01.2.01.01.32.02	Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi Perkebunan						Jumlah Petani yang mengikuti bimtek jumlah luasan lahan yang diidentifikasi/direhabilitasi jumlah sapras yang tersedia	25 Orang 50 Ha 10 Unit	Prosentase peningkatan produktivitas perkebunan	20%	500,000,000	550,000,000	Dinas Pertanian	1
2.01.2.01.01.32.03	Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi Tanaman Pangan						Jumlah Petani yang mengikuti bimtek jumlah luasan lahan yang diidentifikasi/direhabilitasi jumlah sapras yang tersedia	25 Orang 50 Ha 10 Ha	Presentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	20%	500,000,000	550,000,000	Dinas Pertanian	1
2.01.2.01.01.32.04	Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT Hortikultura						Jumlah benih hortikultura yang tersedia Jumlah BBI yang beroperasi Jumlah petani yang mengikuti Bimtek	2 Kelompok 2 BBI 25 Orang	Jumlah Tingkat serangan OPT Hortikultura	5%	900,000,000	990,000,000	Dinas Pertanian	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
2.01.2.01.01.32.05	Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT Perkebunan						Jumlah kebun induk yang beroperasi 1 Kali Jumlah petani yang mengikuti Bimtek 25 Orang Jumlah Benih perkebunan yang tersedia 3 Komoditas		Jumah Tingkat Serangan OPT Perkebunan 10%		900,000,000	990,000,000	Dinas Pertanian	3
2.01.2.01.01.32.06	Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT Tanaman Pangan						Jumlah BBI yang beroperasi 1 Komoditi Jumlah Petani yang mengikuti Bimtek 25 Orang Jumlah Varietas yang terdaftar 2 varietas		Jumlah Tingkat Serangan OPT Tanaman Pangan		900,000,000	990,000,000	Dinas Pertanian	3
<b>Jumlah</b>											<b>46,507,500,000</b>	<b>51,158,250,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.01	Pertanian														
2.01.02	Dinas Peternakan dan Perikanan														
2.01.2.01.02.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argindustri (M4)	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas		Jumlah produksi olahan basil ternak yang dipasarkan (ton)	520					975,000,000	1,072,500,000			
2.01.2.01.02.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Kab.ENREKANG Luar Daerah			Jumlah kelompok tani mengikuti bimtek	15 Orang	Meningkatnya usaha agribisnis di pedesaan	15 Kelompok	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.15.13	Pelatihan dan Bimbingan Proses Pengelolaan Modal Usaha Peternakan dan Perikanan			Kab.ENREKANG			Jumlah pelaku usaha hasil peternakan dan perikanan yang dilatih	30 Orang	Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan	30 Kelompok	60,000,000	66,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	3	
2.01.2.01.02.15.18	Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Peternakan			Kab.ENREKANG			Jumlah ternak yang diasuransikan	200 Ekor	Terjaminnya usaha peternakan rakyat	1 Tahun	750,000,000	825,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.15.19	Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha Peternakan			Kab.ENREKANG			Jumlah rekomendasi bagi pelaku usaha peternakan dan perikanan yang diterbitkan	40 Buah	Meningkatnya usaha agribisnis sektor peternakan dan perikanan	1 Tahun	65,000,000	71,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Jumlah ternak yang tertangani dari serangan penyakit (ekor)	7000					857,000,000	942,700,000			
2.01.2.01.02.21.07	Peningkatan Pelayanan Puskesmas			Kab.ENREKANG			Jumlah hewan ternak yang ditangani	6000 Ekor	Optimalnya pusat pelayanan kesehatan hewan	3 Unit	185,000,000	203,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.21.08	Pengamatan Penyakit Hewan			Kab.ENREKANG			Jumlah hewan ternak yang diamati jumlah sosialisasi pengendalian penyakit jumlah desinfectan yang didistribusikan	300 Ekor 10 Kali 120 Liter	Meningkatnya status kesehatan ternak	300 Ekor	80,000,000	88,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.21.09	Pembinaan Rumah Potong Hewan (RPH)/Tempat Pemotongan Hewan (Hewan)			Kab.ENREKANG			Jumlah pembinaan terhadap TPH/RPH	7 Kali	Terpenuhinya standar minimal pelayanan teknis RPH/TPH	1 Tahun	85,000,000	93,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.21.10	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			Kab.ENREKANG			Jumlah pengadaan bahan obat-obatan Jumlah pengadaan vaksin Jumlah pengadaan bahan alat Jumlah vaksinasi ternak	1 Paket 1 Paket 1 Paket 4800 Ekor	Tertanggulangnya penyakit bakterial viral, mikal, arasiter, metabolik dan gangguan reproduksi	7200 Ekor	157,000,000	172,700,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.21.11	Pembangunan Sarana Tempat Pemotongan Hewan (TPH)/Rumah Pemotongan Hewan (RPH)			Kab.ENREKANG			Jumlah TPH/RPH yang dibangun	1 Unit	Tersedianya tempat pemotongan hewan (TPH)/ Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	1 Unit	250,000,000	275,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.21.12	Pembangunan Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Hewan/Bahan Asal Hewan			Kab.ENREKANG			Jumlah TPH/ RPH yang dibangun (unit)		Meningkatnya pengawasan terhadap pengeluaran produksi peternakan		0	0	Dinas Peternakan dan Perikanan	2	
2.01.2.01.02.21.13	Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Hewan Antar Daerah			Kab.ENREKANG			Jumlah hewan ternak keluar masuk daerah yang diperiksa Jumlah bahan asal hewan keluar masuk daerah yang diperiksa	2500 Ekor 3000 Kg	Terlaksananya pengawasan pengeluaran produk peternakan	1 Tahun	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	2	
2.01.2.01.02.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Jumlah populasi ternak kecil (ekor)	64687					882,674,000	970,941,400			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
2.01.2.01.02.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			Kab.ENREKANG			Jumlah HMT yang dikembangkan Jumlah kandang percontohan yang disediakan Jumlah kandang jepit yang disediakan Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun Jumlah SAPRODI yang disediakan	40 Ha 1 Unit 10 Unit 800 Meter 1 Paket	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	1 Paket	360,000,000	396,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit yang didistribusikan	1700 Ekor	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	12 Kelompok	122,674,000	134,941,400	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22.10	Inseminasi Buatan (IB)			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit (Straw) yang disediakan Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket)	1300 Dosis 1 Paket	Meningkatnya pelayanan IB pada ternak	1300 Ekor	200,000,000	220,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22.17	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan			Kab.ENREKANG			Jumlah rumah tangga miskin yang dibina	25 RT	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	25 RTM	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22.20	Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan			Kab.ENREKANG			Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina	7000 Kelompok	Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Jumlah produksi telur (ton)	276965					882,674,000	970,941,400		
2.01.2.01.02.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			Kab.ENREKANG			Jumlah HMT yang dikembangkan Jumlah kandang percontohan yang disediakan Jumlah kandang jepit yang disediakan Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun Jumlah SAPRODI yang disediakan	40 Ha 1 Unit 10 Unit 800 Meter 1 Paket	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	1 Paket	360,000,000	396,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit yang didistribusikan	1700 Ekor	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	12 Kelompok	122,674,000	134,941,400	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22.10	Inseminasi Buatan (IB)			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit (Straw) yang disediakan Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket)	1300 Dosis 1 Paket	Meningkatnya pelayanan IB pada ternak	1300 Ekor	200,000,000	220,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22.17	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan			Kab.ENREKANG			Jumlah rumah tangga miskin yang dibina	25 RT	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	25 RTM	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22.20	Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan			Kab.ENREKANG			Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina	7000 Kelompok	Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.01.2.01.02.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Jumlah produksi daging (ton)	7237937					882,674,000	970,941,400		
2.01.2.01.02.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			Kab.ENREKANG			Jumlah HMT yang dikembangkan	40 Ha	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	1 Paket	360,000,000	396,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jumlah kandang percontohan yang disediakan Jumlah kandang jepit yang disediakan Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun Jumlah SAPRODI yang disediakan	1 Unit 10 Unit 800 Meter 1 Paket							
2.01.2.01.02.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit yang didistribusikan	1700 Ekor	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	12 Kelompok	122,674,000	134,941,400	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.10	Inseminasi Buatan (IB)			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit (Straw) yang disediakan Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket)	1300 Dosis 1 Paket	Meningkatnya pelayanan IB pada ternak	1300 Ekor	200,000,000	220,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.17	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan			Kab.ENREKANG			Jumlah rumah tangga miskin yang dibina	25 RT	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	25 RTM	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.20	Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan			Kab.ENREKANG			Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina	7000 Kelompok	Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)</b>	<b>Meningatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah</b>		<b>Jumlah populasi ternak unggas (ekor)</b>	<b>1617289</b>					<b>882,674,000</b>	<b>970,941,400</b>			
2.01.2.01.02.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			Kab.ENREKANG			Jumlah HMT yang dikembangkan Jumlah kandang percontohan yang disediakan Jumlah kandang jepit yang disediakan Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun Jumlah SAPRODI yang disediakan	40 Ha 1 Unit 10 Unit 800 Meter 1 Paket	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	1 Paket	360,000,000	396,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit yang didistribusikan	1700 Ekor	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	12 Kelompok	122,674,000	134,941,400	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.10	Inseminasi Buatan (IB)			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit (Straw) yang disediakan Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket)	1300 Dosis 1 Paket	Meningkatnya pelayanan IB pada ternak	1300 Ekor	200,000,000	220,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.17	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan			Kab.ENREKANG			Jumlah rumah tangga miskin yang dibina	25 RT	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	25 RTM	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.20	Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan			Kab.ENREKANG			Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina	7000 Kelompok	Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)</b>	<b>Meningatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah</b>		<b>Jumlah populasi ternak besar (ekor)</b>	<b>75020</b>					<b>882,674,000</b>	<b>970,941,400</b>			
2.01.2.01.02.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			Kab.ENREKANG			Jumlah HMT yang dikembangkan Jumlah kandang percontohan yang disediakan	40 Ha 1 Unit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	1 Paket	360,000,000	396,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jumlah kandang jepit yang disediakan Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun Jumlah SAPRODI yang disediakan	10 Unit  800 Meter 1 Paket							
2.01.2.01.02.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit yang didistribusikan	1700 Ekor	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	12 Kelompok	122,674,000	134,941,400	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.10	Inseminasi Buatan (IB)			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit (Straw) yang disediakan Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket)	1300 Dosis 1 Paket	Meningkatnya pelayanan IB pada ternak	1300 Ekor	200,000,000	220,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.17	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan			Kab.ENREKANG			Jumlah rumah tangga miskin yang dibina	25 RT	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	25 RTM	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.20	Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan			Kab.ENREKANG			Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina	7000 Kelompok	Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
<b>2.01.2.01.02.22</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)</b>	<b>Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah</b>		<b>Jumlah produksi susu (liter)</b>	<b>1841358</b>					<b>882,674,000</b>	<b>970,941,400</b>			
2.01.2.01.02.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			Kab.ENREKANG			Jumlah HMT yang dikembangkan Jumlah kandang percontohan yang disediakan Jumlah kandang jepit yang disediakan Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun Jumlah SAPRODI yang disediakan	40 Ha 1 Unit 10 Unit 800 Meter 1 Paket	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	1 Paket	360,000,000	396,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit yang didistribusikan	1700 Ekor	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan	12 Kelompok	122,674,000	134,941,400	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.10	Inseminasi Buatan (IB)			Kab.ENREKANG			Jumlah bibit (Straw) yang disediakan Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket)	1300 Dosis 1 Paket	Meningkatnya pelayanan IB pada ternak	1300 Ekor	200,000,000	220,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.17	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan			Kab.ENREKANG			Jumlah rumah tangga miskin yang dibina	25 RT	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	25 RTM	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.22.20	Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan			Kab.ENREKANG			Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina	7000 Kelompok	Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan	100%	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas		Jumlah produksi olahan hasil ternak yang dipasarkan (ton)	550					308,000,000	338,800,000			
2.01.2.01.02.23.03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan			Kab.ENREKANG			Jumlah sarana pemasaran produk peternakan yang dibangun	2 Unit	Tersedianya sarana pemasaran penjualan ternak	1 Unit	150,000,000	165,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	
2.01.2.01.02.23.07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah			Kab.ENREKANG			Jumlah ajang promosi pada event pembangunan yang diikuti Jumlah sosialisasi gemar minum susu yang dilaksanakan	36 Kali 5 Kali	Meningkatnya konsumsi daging dan susu pada masyarakat	6 Kecamatan	98,000,000	107,800,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.01.2.01.02.23.12	Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Peternakan			Kab.ENREKANG			Jumlah pelatihan bagi pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan	16 Kali	Meningkatnya pengetahuan masyarakat pelaku usaha hasil peternakan	5 Kelompok	60,000,000	66,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Jumlah kelahiran ternak dengan aplikasi penerapan teknologi (ekor)	2250					335,000,000	368,500,000				
2.01.2.01.02.29.01	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna			Kab.ENREKANG			Jumlah teknologi tepat guna yang diterapkan	1 Jenis	Meningkatnya produksi dan produktifitas ternak	75%	250,000,000	275,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.29.02	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna			Kab.ENREKANG			Jumlah pelatihan penerapan teknologi peternakan yang dilaksanakan	10 Kali	Meningkatnya teknologi peternakan yang diterapkan	10 Kali	85,000,000	93,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.31	Program Pengembangan Data/Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Tersedianya data base (dokumen)	1					275,459,200	303,005,120				
2.01.2.01.02.31.01	Pendataan Masalah Peternakan			Kab.ENREKANG			Jumlah pendataan kasus penyakit pada hewan ternak	12 Kali	Tersedianya data dan informasi kesehatan hewan	1 Tahun	88,959,200	97,855,120	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.31.02	Pendataan Potensi Peternakan			Kab.ENREKANG			Jumlah pendataan yang dilaksanakan	1 Kali	Tersedianya data base potensi peternakan	1 Tahun	60,500,000	66,550,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.31.03	Pendataan Potensi Perikanan			Kab.ENREKANG			Jumlah pendataan perikanan yang dilakukan	12 Kali	Tersedianya data base potensi perikanan	1 Dokumen	40,000,000	44,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.31.05	Penyusunan Buku Statistik Peternakan dan Perikanan			Kab.ENREKANG			Jumlah buku yang dicetak	20 Buah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	1 Tahun	6,000,000	6,600,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.31.07	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan			Kab.ENREKANG			Jumlah perjalanan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	90 Kali	Meningkatnya informasi data statistik perikanan dan peternakan	1 Tahun	80,000,000	88,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.33	Program Pengembangan Kawasan Peternakan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Persentase kawasan peternakan yang dikembangkan (%)	80					625,000,000	687,500,000				
2.01.2.01.02.33.01	Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah			Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.BARAKA Kec.ANGGERAJA Kec.ALLA			Jumlah pelatihan/sosialisasi bagi kelompok sapi perah yang dilaksanakan	3 Kali	Meningkatnya produksi dan produktifitas kawasan pengembang	5 Kecamatan	135,000,000	148,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.33.02	Pengembangan Kawasan Khusus Kerbau			Kec.CURIO  Kec.BARAKA  Kec.MALUA Kec.MAIWA			Jumlah dokumen pemetaan kawasan yang diterbitkan  Jumlah pelatihan/sosialisasi bagi kelompok yang dilaksanakan	  1 Kali	Meningkatnya produksi dan produktifitas kawasan pengembang	4 Kecamatan	120,000,000	132,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.33.03	Pengembangan Kawasan Khusus Kambing			Kec.ALLA Kec.ENREKANG  Kec.ANGGERAJA Kec.BARAKA Kec.BUNTU BATU Kec.MALUA Kec.MASALLE Kec.BAROKO			Jumlah dokumen pemetaan kawasan yang diterbitkan Jumlah pelatihan/sosialisasi bagi kelompok yang dilaksanakan	2 Dokumen 2 Kali	Meningkatnya produksi dan produktifitas kawasan pengembang	9 Kecamatan	185,000,000	203,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Kec.CURIO												
2.01.2.01.02.33.04	Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Potong			Kab.ENREKANG			Jumlah pelatihan /sosialisasi bagi kelompok sapi potong	1 Kali	Meningkatnya produksi dan produktifitas kawasan pembembang	11 Kecamatan	100,000,000	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.33.05	Program Pengembangan Kawasan Unggas			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen pemetaan kawasan yang diterbitkan Jumlah pelatihan /sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali	Meningkatnya produksi dan produktifitas kawasan pembembang	12 Kecamatan	85,000,000	93,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.34	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Perikanan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Jumlah penyuluh dan petugas peternakan dan perikanan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan teknisnya (orang)	34					165,000,000	181,500,000				
2.01.2.01.02.34.01	Kajian sistem Penyuluhan Perikanan			Kab.ENREKANG			Jumlah metode penyuluhan bagi kelompok masyarakat perikanan	2 Metode	Meningkatnya CBIB kelompok pembudidaya ikan	100%	55,000,000	60,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.34.02	Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penyuluh Perikanan			Kab.ENREKANG			Jumlah penyuluh perikanan yang meningkat kapasitasnya	9 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh	9 Orang	50,000,000	55,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.01.2.01.02.34.03	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian			Kab.ENREKANG			Jumlah penyuluh pertanian yang diberdayakan	30 Orang	Meningkatnya pembinaan/pertemuan dengan kelompok	30 Kelompok	60,000,000	66,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.05	Kelautan dan Perikanan															
2.01.02	Dinas Peternakan dan Perikanan															
2.05.2.01.02.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	1700					2,370,000,000	2,607,000,000				
2.05.2.01.02.20.01	Pengembangan bibit ikan unggul			Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.ALLA			Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Jumlah benih yang diproduksi	4 Paket 2 juta ekor	Meningkatnya sarana dan prasarana BBI	4 Unit	600,000,000	660,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.05.2.01.02.20.04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan			Kab.ENREKANG			Jumlah paket budidaya perikanan yang disediakan Jumlah sarana budidaya perikanan yang disediakan	20 Paket 5 Unit	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Meningkatnya produksi sentra pembibitan rakyat	20 RTM 1Unit	1,250,000,000	1,375,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.05.2.01.02.20.05	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan			Kab.ENREKANG			Jumlah rumah tangga miskin yang dibina	25 KK	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	25 RTM	40,000,000	44,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.05.2.01.02.20.06	Pengembangan Teknologi dan Sistem Pembenihan Ikan Air Tawar			Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.ALLA			Jumlah UPR yang memenuhi standar teknis	2 Unit	Meningkatnya produksi benih BBI	100%	50,000,000	55,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.05.2.01.02.20.07	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan			Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.ALLA			Jumlah pengambilan sampel	9 Kali	Meningkatnya status kesehatan lingkungan perairan	100%	45,000,000	49,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.05.2.01.02.20.08	Kegiatan Optimalisasi Balai Benih Ikan			Kab.ENREKANG			Jumlah BBI yang dioptimalkan operasionalnya	3 Unit	Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar	3 BBI	350,000,000	385,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.05.2.01.02.20.09	Sertifikasi CBIB			Kab.ENREKANG			Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang akan disertifikasi	9 Orang	Tersertifikasinya kelompok pembudidaya ikan	9 Orang	35,000,000	38,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1		
2.05.2.01.02.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	22					170,000,000	187,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.05.2.01.02.21.06	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil			Kab.ENREKANG			Jumlah paket sarana prasarana penangkapan yang disediakan	1 Paket	Meningkatnya jumlah tangkapan kelompok usaha nelayan	50%	40,000,000	44,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	3
2.05.2.01.02.21.07	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib dan Berkelanjutan			Kab.ENREKANG			Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dibina	2 Kelompok	Terjaminnya keberlanjutan usaha nelayan tangkap	100%	25,000,000	27,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	3
2.05.2.01.02.21.08	Pengelolaan Sumber Daya Ikan			Kab.ENREKANG			Jumlah benih yang disebar pada perairan darat dan umum	100000 Ekor	Meningkatnya populasi ikan di perairan umum dan darat	12 Kecamatan	80,000,000	88,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.05.2.01.02.21.09	Pengawasan Sumber Daya Perikanan			Kab.ENREKANG			Jumlah POKMASWAS yang mendapatkan pembinaan	2 Kelompok	Terjaganya lingkungan perairan umum dan destruktifishing	12 Kawasan	25,000,000	27,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	3
2.05.2.01.02.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya sistem pemasaran dan daya saing produk dan komoditi unggulan daerah melalui penerapan iptek			Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	5016				455,000,000	500,500,000		
2.05.2.01.02.23.02	Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan			Kab.ENREKANG  SULAWESI SELATAN			Jumlah even promosi hasil perikanan yang dilaksanakan dan diikuti  Jumlah sosialisasi GEMARIKAN yang dilaksanakan	2 Kali  8 Kali	Meningkatnya produksi ikan dan olahan	150 Kg/Thn	180,000,000	198,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.05.2.01.02.23.03	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Produksi Perikanan			Kec.CURIO Kec.MALUA Kec.BAROKO Kec.MASALLE			Jumlah sarana pemasaran perikanan yang dibangun/rehab		Meningkatnya kualitas lods penjualan ikan dan hasil olahannya		0	0	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.05.2.01.02.23.04	Pembangunan/Rehab. Sarana Pengelolaan Produksi Perikanan			Kec.MAIWA Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.ANGGERAJA Kec.ALLA			Jumlah sarana pengolahan produksi perikanan yang dibangun/rehab	1 Unit	Mempertahankan mutu produksi perikanan		200,000,000	220,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	3
2.05.2.01.02.23.08	Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan			Kec.CURIO Kec.MALUA Kec.BAROKO Kec.MASALLE			Jumlah sarana pemasaran ikan yang disediakan (unit)		Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran ikan	4 Kecamatan	0	0	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.05.2.01.02.23.09	Pengadaan Sarana Pengolahan Ikan			Kec.MAIWA Kec.ENREKANG Kec.CENDANA Kec.ANGGERAJA Kec.ALLA			Jumlah unit alat pengolahan produk perikanan yang disediakan	1 Unit	Tersedianya sarana pengolahan hasil perikanan	1 Unit	75,000,000	82,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.05.2.01.02.25	Program Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Meningkatnya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambangan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah			Jumlah binaan POKDAKAN (kelompok)	30 kelompok				135,000,000	148,500,000		
2.05.2.01.02.25.01	Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan			Kab.ENREKANG			Jumlah POKDAKAN yang dinilai	15 Kelompok	Meningkatnya mutu kelembagaan sesuai standar	15 POKDAKAN	45,000,000	49,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.05.2.01.02.25.03	Pengembangan Sumber Daya Manusia (POKDAKAN)			Kab.ENREKANG			Jumlah pelatihan/bimtek pembudidaya ikan air tawar	25 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan	25 Orang	90,000,000	99,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1
2.05.2.01.02.27	Program Pembangunan Kawasan Perikanan Darat	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi dan infrastruktur kawasan perikanan darat (%)	90				250,000,000	275,000,000		
2.05.2.01.02.27.01	Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Air Tawar			Kab.ENREKANG			Jumlah dokumen pemetaan kawasan budidaya perikanan air tawar yang diterbitkan		Tersedianya dokumen kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar	1 Dokumen	0	0	Dinas Peternakan dan Perikanan	3
2.05.2.01.02.27.02	Pengembangan Kawasan Mina Politan			Kab.ENREKANG			Jumlah pencetakan kolam baru yang dibangun	15 Unit	Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar	1 Kawasan	250,000,000	275,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	2
<b>Jumlah</b>											<b>9,956,459,700</b>	<b>10,952,105,670</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.06	Perdagangan														
2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
2.06.2.07.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)									1,347,000,000	1,481,700,000			
2.06.2.07.01.15.03	Peningkatan pengawasan barang dan jasa (UU No. 8/1999) Tentang perlindungan Konsumen			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 50.000.000	Volume Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	86 Kali	Berkurangnya Barang Beredar Yang Tidak Layak Konsumsi dan Tidak Layak Pakai	80%	50,000,000	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pos Ukur Ulang alat UTTP			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 12.000.000	Jumlah Sarana/ Prasarana Pos Ukur Ulang yang terbangun	2 Unit	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	80%	12,000,000	13,200,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.06	Sosialisasi Undang - undang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 50.000.000	Jumlah Spanduk Informasi Dan Panflet Tentang Perlindungan konsumen dan UTTP	150 Buah	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha/Konsumen Tentang Barang Dan Jasa Yang Layak Konsumsi	75 Buah	50,000,000	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.07	Pengawasan Barang Kadaluarsa di Pasar dan Pertokoan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Jenis barang kadaluarsa yang diawasi	58 Jenis	Berkurangnya barang kadaluarsa yang beredar di pasar dan pertokoan	75%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.09	Orientasi peningkatan kinerja aparat ukur menuju daerah tertib ukur			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Jumlah aparat ukur yang mengikuti orientasi peningkatan kinerja	5 Orang	Meningkatnya SDM bagi aparat	70%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.10	Sosialisasi pasar tertib ukur menuju daerah tertib ukur			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 50.000.000	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tertib ukur	100 Orang	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha/konsumen tentang alat UTTP	75%	50,000,000	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.11	Pembangunan Sarana dan prasarana UPTD Metrologi legal			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 1.000.000.000	Jumlah prasarana dan sarana pendukung Unit Metrologi Legal yang tersedia	200 Unit	Meningkatnya pelayanan UTTP	80%	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.13	Pelatihan Penyidik Metrologi (PPNS Kemetrolgian)			Luar Daerah	Jumlah Dana	Rp10.000.000	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan PPNS Kemetrolgian	1 Orang	Meningkatnya SDM bagi aparat tentang kemetrolgian	60%	10,000,000	11,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.15	Pelatihan Pengamat Tera			Luar Daerah	Jumlah Dana	Rp. 10.000.000	jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan tera	1 Orang	Bertambahnya tenaga penyidik kemetrolgian	70%	10,000,000	11,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.17	Pengawasan Penggunaan Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Volume Pengawasan Alau UTTP	58 Kali	Berkurangnya Alat UTTP ilegal	70%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.18	Pelayanan Sidang Tera/ Tera Ulang			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Volume pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Kali	Optimalnya penggunaan alat UTTP	70%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.21	Partisipasi Peringatan Hari Perlindungan Konsumen			Luar Daerah	Jumlah Dana	Rp. 15.000.000	Jumlah aparat yang mengikuti Hari Perlindungan Konsumen	10 Orang	Partisipasi dalam acara Hari Perlindungan Konsumen	70%	15,000,000	16,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.15.22	Verifikasi standar alat UTTP			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Jumlah peralatan UTTP standar yang terverifikasi	30 unit	Terjaminnya akurasi alat ukur standar	70%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.20	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)									4,300,000,000	4,730,000,000			
2.06.2.07.01.20.01	Pembangunan Pasar Pedesaan/Tradisional			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 4.000.000.000	Jumlah pasar yang terbangun/direvitalisasi	2 pasar	Terbangunnya pasar tradisional yang memenuhi standar	50%	4,000,000,000	4,400,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	
2.06.2.07.01.20.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 300.000.000	Jumlah sarana pasar yang diperbaiki	450 unit	Terpeliharanya sarana pasar dalam peningkatan pelayanan kepada pedagang	80%	300,000,000	330,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.07.01.21	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)									1,640,000,000	1,804,000,000		
2.06.2.07.01.21.01	Bantuan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 1.000.000.000	Jumlah sarana pemasaran bagi PKL yang dibagikan	200 PKL	PKL dalam melaksanakan aktifitas merasa aman dan nyaman	70%	1,000,000,000	1,100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.03	Bimbingan Manajemen Pengelolaan Toko Modern bagi Pengusaha UKM			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 45.000.000	Jumlah pengusaha UKM yang dibimbing	50 orang	Meningkatnya pengetahuan pelaku UMKM dalam mengolah usahanya menjadi toko modern	50%	45,000,000	49,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.04	Orientasi Peningkatan Kinerja Aparat tentang Usaha Perdagangan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 40.000.000	Jumlah aparat yg ikut orientasi usaha perdagangan	6 Orang	Meningkatnya SDM Bagi aparat	60%	40,000,000	44,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.05	Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 125.000.000	Volume pelaksanaan monitoring harga bapak dan barang strategis lainnya	360 Kali	Tersedianya data harga yang akurat	68%	125,000,000	137,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.07	Pelatihan Peningkatan SDM tentang Pemenuhan Pasar Ekspor										0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.08	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	70 PKL	Mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan meningkat	80%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.09	Pembinaan Percontohan Pasar Sehat			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Jumlah pedagang pasar yang terbina	1 pasar	Tercerminnya perilaku hidup dalam lingkungan pasar	60%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.10	Pemutakhiran data pengguna asset daerah (Toko/Lods)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 15.000.000	Jumlah Pengguna toko/lods yang terdata	300 Pdg	Tersedianya data pengguna lods, kios dan gardu yang akurat	50%	15,000,000	16,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.11	Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 25.000.000	Jumlah tempat PKL yang tertata	20 PKL	Meningkatnya kesejahteraan para PKL dan asongan	80%	25,000,000	27,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.12	Penempatan Kembali Pedagang			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Jumlah Pedagang yang ditempatkan kembali	40 Pdg	Terciptanya kenyamanan bagi pengguna pasar	60%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.13	pengadaan mebeleur kantor pengelola pasar			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 20.000.000	Jumlah mobiler kantor pengelola pasar yang tersedia	5 Unit	Meningkatnya pengelolaan pasar	75%	20,000,000	22,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.14	Pengadaan Media Informasi (Running Teks / Video Tron)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 60.000.000	Jumlah media informasi harga yang akurat	1 unit	Tersedianya informasi harga yang akurat	80%	60,000,000	66,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.15	Pengadaan papan nama pasar			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Jumlah papan nama pasar yang tersedia	4 Pasar	Meningkatnya keindahan pasar dengan adanya papan nama pasar	50%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.16	Pengadaan sarana keamanan dan kebersihan pasar			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 50.000.000	Jumlah sarana keamanan dan kebersihan pasar yang tersedia	70 Buah	Meningkatnya kebersihan dan keamanan dalam pasar	50%	50,000,000	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.17	Pengawasan Atas Legalitas Kepemilikan SIUP, TDP dan SITU			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 20.000.000	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	70 Usaha	Meningkatnya usaha yang memiliki legalitas usaha	68%	20,000,000	22,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.18	Pengawasan Insetifikasi Peningkatan Retribusi			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 40.000.000	Volume pengawasan peningkatan retribusi pasar	70 Kali	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	55%	40,000,000	44,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.19	Monitoring Omset Penjualan Pasar Yang menerima Dana Bantuan Tugas Pembantuan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Volume monitoring omset penjualan pasar penerima dana TP	2 pasar	Tersedianya data omset penjualan yang akurat	80%	30,000,000	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.06.2.07.01.21.20	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pasar			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 50.000.000	Volume pengawasan dan pengendalian pasar	90 kali	Meningkatnya rasa aman	60%	50,000,000	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.07	Perindustrian													
2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
2.07.2.07.01.20	Program Pengembangan Ekonomi Lokal Unggulan Daerah	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)									170,000,000	187,000,000		
2.07.2.07.01.20.01	Pengurusan Sertifikat Halal			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 140.000.000	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat halal	20 IKM	Meningkatnya produk IKM yang berlabel halal	75%	140,000,000	154,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				14	15		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
2.07.2.07.01.20.02	Pengurusan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat HAKI	5 IKM	Meningkatnya produk IKM yang memiliki sertifikat HAKI	65%	30.000,000	33.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.21	<b>Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Pelaku Ekonomi Kurang Mampu</b>	<b>Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)</b>									<b>2.780,000,000</b>	<b>3.058,000,000</b>				
2.07.2.07.01.21.01	Bimbingan teknis sentra/perusahaan industri kecil menengah (IKM)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 120.000.000	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan	40 IKM	Meningkatnya keterampilan dalam pengolahan	75%	120.000,000	132.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.21.02	Partisipasi Pameran DEKRANASDA dan Produk IKM			Luar Daerah	Jumlah Dana	Rp. 145.000.000	Volume pelaksanaan pameran Dekranasda	7 kali	Meningkatnya minat terhadap produk unggulan daerah	75%	145.000,000	159.500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.21.03	Magang Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)			Luar Daerah	Jumlah Dana	Rp. 120.000.000	Jumlah IKM yang mengikuti magang	12 IKM	Meningkatnya wawasan, motivasi, keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha IKM kerajinan	75%	120.000,000	132.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.21.04	Pembangunan/Revitalisasi Sentra IKM			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 2.000.000.000	Jumlah sentra IKM yang dibangun/direvitalisasi	1 Sentra	Meningkatnya pendapatan sentra IKM	75%	2.000,000,000	2.200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.21.05	Orientasi Peningkatan Kinerja dalam Rangka Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 80.000.000	Jumlah aparat yang mengikuti orientasi peningkatan kinerja pembinaan IKM	8 orang	Meningkatnya SDM bagi aparat	75%	80.000,000	88.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.21.06	Pemberdayaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kab. Enrekang			Luar Daerah	Jumlah Dana	Rp. 135.000.000	Jumlah IKM / pengrajin yang diberdayakan	30 IKM	Meningkatnya nilai tambah hasil produk kerajinan	75%	135.000,000	148.500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.21.07	Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 180.000.000	Jumlah unit pengolahan hasil yang dibangun	1 Unit	Meningkatnya produksi dan kualitas komoditi unggulan	75%	180.000,000	198.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.21.08	Penyusunan Dokumen Roadmap Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Enrekang										0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.22	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)</b>									<b>680,000,000</b>	<b>748,000,000</b>				
2.07.2.07.01.22.06	Bantuan Kemasan Produk IKM yang Standar			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 210.000.000	Jumlah kemasan produk IKM yang tersedia	14 jenis	Meningkatnya produk IKM yang memiliki kemasan yang standar	60%	210.000,000	231.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.22.10	Pengadaan Mesin / Peralatan IKM pada Komoditi Unggul Daerah			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 350.000.000	Jumlah mesin/peralatan IKM yang tersedia	30 unit	Meningkatnya volume produksi IKM	60%	350.000,000	385.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
2.07.2.07.01.22.11	Pelatihan Pengusaha IKM			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp. 120.000.000	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti pelatihan	25 IKM	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan	60%	120.000,000	132.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1		
<b>Jumlah</b>											<b>13,088,750,000</b>	<b>14,397,625,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.06	Perencanaan Pembangunan															
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang															
1.06.1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										2,350,000,000	2,585,000,000				
1.06.1.06.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD										240,000,000	264,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD										350,000,000	385,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.16	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)										270,000,000	297,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.17	Penyusunan KIA PPAS										200,000,000	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.25	Verifikasi/Asistensi Rancangan Renja OPD										60,000,000	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.34	Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK)										200,000,000	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.35	Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah										200,000,000	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.37	Massenrempulu Expo										390,000,000	429,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.39	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan										100,000,000	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.40	Penyusunan dan Pengumpulan data informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan										90,000,000	99,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.21.41	Penyusunan Daftar Alokasi Kegiatan/Proyek APBD I/ APBD II/ APBN										40,000,000	44,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.21.42	Up Dating E-Planning dan E-Monev										210,000,000	231,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.26	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman										300,000,000	330,000,000				
1.06.1.06.01.26.01	Koordinasi Rencana Pembangunan Sanitasi Permukiman										25,000,000	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.26.02	Pendampingan Program Pengembangan dan Hibah Sanitasi										50,000,000	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.26.03	Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)										25,000,000	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.26.04	Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)										125,000,000	137,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.26.07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Sanitasi										25,000,000	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.06.1.06.01.26.09	Pendampingan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi										50,000,000	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.28	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										649,000,000	713,900,000				
1.06.1.06.01.28.01	Evaluasi Pencapaian RPJMD										60,000,000	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.28.04	Pengendalian dan Evaluasi RKPD										60,000,000	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.28.08	Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan										350,000,000	385,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.28.09	Forum Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah										179,000,000	196,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah										1,275,000,000	1,402,500,000				
1.06.1.06.01.30.01	Pendampingan Program PISEW										50,000,000	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.30.02	Pendampingan Program Hibah Air Minum Perdesaan										75,000,000	82,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30.03	Verifikasi Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja Program OPD Bidang Praswil dan SDA										25,000,000	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup										25,000,000	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Persampahan										25,000,000	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30.07	Koordinasi Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih										150,000,000	165,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30.08	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Praswil SDA dan LH										175,000,000	192,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30.09	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Irigasi Partisipatif										200,000,000	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30.10	Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Perumahan dan Pemukiman										50,000,000	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.30.12	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Praswil dan SDA										75,000,000	82,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.30.13	Koordinasi dan Pendampingan Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur										25,000,000	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.30.14	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan										25,000,000	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.06.1.06.01.30.15	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis										300,000,000	330,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.30.16	Monitoring, Evaluasi Bidang Infrastwil dan SDA										75,000,000	82,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
<b>1.06.1.06.01.31</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Strategis Daerah</b>										<b>675,000,000</b>	<b>742,500,000</b>				
1.06.1.06.01.31.01	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten Enrekang										220,000,000	242,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.31.02	Penyusunan dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWTJM) Kabupaten Enrekang										60,000,000	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3		
1.06.1.06.01.31.03	Koordinasi Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan										20,000,000	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.31.05	Koordinasi Percepatan Reformasi Agraria										70,000,000	77,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.31.06	koordinasi Penataan Ruang Daerah										85,000,000	93,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.31.07	Penyusunan Kebijakan dan Strategis (JAKSTRA) Pengembangan Air Minum										220,000,000	242,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
<b>1.06.1.06.01.32</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial, Budaya dan Pemerintahan</b>										<b>1,648,366,000</b>	<b>1,813,202,600</b>				
1.06.1.06.01.32.02	Sinkronisasi dan Evaluasi Program Bidang Sosial Budaya										200,000,000	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi										222,000,000	244,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.05	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Antara RKPd dan RKPDesa										88,000,000	96,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.07	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender										90,000,000	99,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.08	Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA)										150,000,000	165,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.09	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat										150,000,000	165,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.10	Koordinasi Pelaksanaan Program Germas di Kab. Enrekang										80,000,000	88,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah										200,000,000	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.12	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)										80,000,000	88,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		
1.06.1.06.01.32.13	Koordinasi Pengendalian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok										93,366,000	102,702,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.06.1.06.01.32.15	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarus Utamaan Gender (PUG)									60,000,000	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1	
1.06.1.06.01.32.16	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting									150,000,000	165,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1	
1.06.1.06.01.32.17	Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs									85,000,000	93,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang													
1.20.1.06.01.50	Program Penelitian Pengkajian dan Pengembangan									1,155,000,000	1,270,500,000			
1.20.1.06.01.50.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Kelitbangan									155,000,000	170,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1	
1.20.1.06.01.50.04	Kajian dan Penelitian									1,000,000,000	1,100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1	
1.20.1.06.01.51	Program Pengembangan Inovasi Daerah									540,000,000	594,000,000			
1.20.1.06.01.51.01	Koordinasi Program Kluster Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD)									540,000,000	594,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	3	
1.23	Statistik													
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang													
1.23.1.06.01.15	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah									397,779,000	437,556,900			
1.23.1.06.01.15.23	Penyusunan/Pengisian Data SIPD									397,779,000	437,556,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1	
<b>Jumlah</b>										<b>13,039,945,000</b>	<b>14,343,939,500</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							12
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian																
1.20.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah																
1.20.1.20.05.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)								6,772,750,000	7,450,025,000						
1.20.1.20.05.17.03	Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah						Jumlah Dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 dokumen	persentase ketersediaan dokumen kebijakan akuntansi pemda	100%	110,000,000	121,000,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah			BPKD			Jumlah dokumen sidur tentang pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen sidur pengelolaan keuangan daerah	100%	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			BPKD			Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	1 dokumen	jumlah buku Perda Perubahan APBD yang tercetak	150 Buku	226,270,000	248,897,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD			BPKD			Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 dokumen	jumlah buku perub APBD yang tercetak	150 buku	201,800,000	221,980,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD			BPKD			Jumlah dokumen rancangan perturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	Jumlah buku perda tentang pertanggungjawaban APBD yang tercetak	45 buku	226,270,000	248,897,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			BPKD			Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Jumlah buku Perbub tentang pertanggungjawaban APBD yang tercetak	45 buku	229,270,000	252,197,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			BPKD			Jumlah dokumen rancangan perturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	Jumlah buku perda tentang pertanggungjawaban APBD yang tercetak	45 buku	158,060,000	173,866,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.10	Pengelolaan Pelaporan Inventarisasi Asset/Barang Daerah Kab. Enrekang			BPKD			Tersedianya laporan inventarisasi asset/barang daerah	1 Tahun	Cakupan dokumen inventarisasi asset daerah sesuai regulasi	100%	75,000,000	82,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.10	Evaluasi dan Verifikasi Permintaan Pembayaran Pengguna Anggaran			BPKD			Jumlah dokumen permintaan pembayaran pengguna anggaran yang di evaluasi dan diverifikasi	120 Berkas	Persentase proses permintaan pembayaran pengguna anggaran sesuai aturan	100%	110,000,000	121,000,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.10	Evaluasi dan Verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan			BPKD			Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawababan bantuan keuangan yang di verifikasi dan di evaluasi	112 desa, 17 Kelurahan, 6 partai	Tersedianya Dokumen laporan Pertanggungjawaban Bantuan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	165,000,000	181,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			BPKD			Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	1 dokumen	Jumlah buku perub tentang perubahan APBD yang tercetak	150 buku	201,180,000	221,298,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.25	Rekonsiliasi Pelaksanaan APBD antara BUD dengan SKPD			BPKD			Persentase ketesediaan data yg akurat atas hasil pelaksanaan pelaksanaan APBD	100%	Terlaksananya Rekonsiliasi data antara BUD dengan SKPD	4 kali	65,550,000	72,105,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1.20.1.20.05.17.27	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pengurusan Program Pembangunan			BPKD			Persentase Terkelolanya Penatausahaan keuangan SKPD dan pengurusan program pembangunan selama 12 Bulan	100%	12 bulan	665,620,000	732,182,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.31	Revitalisasi/Rekon Sistem Akuntansi SKPD Pengelola Dana DAK/ADHOC dengan BUD			BPKD			Persentase pengelolaan dana DAK/ADHOC sesuai regulasi	100%	90PD	80,525,000	88,577,500	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.32	Pengelolaan Administrasi Gaji			BPKD			Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS dan CPNS yang tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran	100%	4882 pegawai	85,000,000	93,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.33	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Administrasi Asset/Barang			BPKD			Tersedianya Laporan adm asset/barang secara terkendali	1 laporan	1 Tahun	72,359,000	79,594,900	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.34	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKD			Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi pengelolaan keuangan Daerah	100%	95%	72,539,000	79,792,900	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.36	Peningkatan Pelayanan Administrasi Otorisasi			BPKD			Persentase jumlah Peningkatan pelayanan administrasi Otorisasi	100%	430PD	99,825,000	109,807,500	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.37	Peningkatan Pelayanan Admin. Pengelolaan dan Penatausahaan Pelap. Real Anggaran			BPKD			Persentase Meningkatnya pelayanan administrasi pengelolaan dan penatansahaan pelaporan realisasi anggaran	100%	12 bulan	62,557,000	68,812,700	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.39	Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan dan Monitoring Asset/Barang Daerah			BPKD			Tersedianya laporan adm penggunaan asset/barang daerah secara terkendali	1 Paket	100%	35,000,000	38,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.40	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Asset/Barang Daerah			BPKD			Jumlah Kegiatan rekonsiliasi data keuangan daerah yang bisa dilaksanakan	2 kali	100%	75,000,000	82,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.46	Peningkatan Pelayanan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKD			Persentase cakupan peningkatan pelayanan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	100%	90%	27,285,000	30,013,500	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.47	Penyusunan Pelaporan Dana DAK Berdasarkan SP2d			BPKD			Jmlah Dokumen Laporan Dana DAK berdasarkan SP2D	4 dokumen	100%	66,550,000	73,205,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.51	Laporan Realisasi Pengeluaran Berdasarkan SP2d			BPKD			Jumlah dokumen laporan realisasi berdasarkan SP2D yang tersusun	1 Dokumen	100%	39,930,000	43,923,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.52	Penyusunan laporan keuangan triwulan dan semesteran Pemerintah daerah			BPKD			Jumlah Dokumen Laporan keuangan, Triwulanan dan Semesteran pemerintah daerah	6 dokumen	100%	106,480,000	117,128,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.53	Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah			BPKD			Persentase ketersediaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah di setiap OPD	100%	12 bulan	605,430,000	665,973,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.54	Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKD			Jumlah aparatur yang mengikuti bentek pengelolaan keuangan daerah	45 orang	85%	465,800,000	512,380,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.54	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah			BPKD			Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis BMD	43 Orang	95%	75,000,000	82,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			
1.20.1.20.05.17.55	Pemutakhiran Data Gaji PNS			BPKD			Persentase ketersediaan data gajiPNS daerah yang akurat	100%	12 bulan	93,170,000	102,487,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.20.1.20.05.17.58	Penghapusan Asset/Barang Daerah			BPKD			Jumlah barang/aset daerah yang akan dihapus	1 Paket	Cakupan pengelolaan aset daerah sesuai regulasi	95%	125,000,000	137,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.60	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja OPD			BPKD			Persentase berjalannya pelaksanaan belanja OPD sesuai regulasi	100%	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja di setiap OPD	12 bulan	34,606,000	38,066,600	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.62	Penyusunan Neraca Daerah			BPKD			Tersedianya data penyusunan neraca asset	1 Laporan	Tersusunnya neraca daerah tahun anggaran 2019	100%	230,000,000	253,000,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.63	Pengamanan dan penertiban barang milik daerah			BPKD			Terlaksananya dan teridentifikasinya barang milik daerah	200 Unit	Tersedianya dan teridentifikasinya barang milik daerah	200 unit	165,000,000	181,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.68	Penyusunan RKB dan RKPBU Pemkab. Enrekang			BPKD			RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan T.A 2021	1 Kali	Terwujudnya pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tahun anggaran 2021 sesuai aturan	100%	35,000,000	38,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.73	Sosialisasi Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD			BPKD			Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi	43 Orang	Terlatihnya aparatur dalam penerapan anjuran permendagri	43 Orang	46,300,000	50,930,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.74	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			BPKD			Jumlah Dokumen laporan keuangan pemda yang tersusun	1 Dokumen	Persentase ketersediaan LKPD sesuai regulasi	100%	140,000,000	154,000,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.75	Pengelolaan Administrasi Kasda			BPKD			Persentase terkelolanya Pengelolaan Administrasi Kas Daerah dengan baik	100%	Terkelolanya administrasi Kasda	12 Bulan	50,000,000	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.76	Rekonsiliasi belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan SP2d			BPKD			Jumlah kegiatan rekonsiliasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan SP2D	2 kali	Persentase tersedianya dokumen belanja langsung dan tdk langsung sesuai regulasi	100%	7,500,000	8,250,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.77	Verifikasi permintaan pembayaran atas pihak ketiga			BPKD			Jumlah Dokumen permintaan pembayaran pihak ketiga yang di verifikasi	120 dokumen	Tersedianya SPJ atas pihak ketiga sesuai dengan aturan yang ada	100%	46,585,000	51,243,500	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.79	Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah			BPKD			Jumlah Kegiatan rekonsiliasi data keuangan daerah yang dilaksanakan	2 kali	Persentase ketersediaan data keuangan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan	100%	300,000,000	330,000,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.81	Penyusunan Perda tentang Regulasi pengelolaan keuangan daerah			BPKD			Jumlah dokumen perda tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah yg tersusun	1 Dokumen	Tercetaknya Buku perda regulasi	15 Buku	135,000,000	148,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.87	Evaluasi dan asistensi APBD Pokok dan APBD Perubahan			BPKD			Jumlah Dokumen APBD yang di evaluasi	48 dokumen	Terlaksananya evaluasi dan asistensi APBD	2 kali	110,000,000	121,000,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.88	Evaluasi dan Asistensi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			BPKD			Jumlah Dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	Tersedianya Dokumen APBD Perubahann T.A 2020 dan APBD T.A 2021	100%	65,000,000	71,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.89	Evaluasi dan Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah			BPKD			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang di evaluasi/verifikasi	43 OPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah sesuai regulasi	100%	55,000,000	60,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.90	Monitoring dan Evaluasi dana subsidi hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga			BPKD			Jumlah Dokumen dana subsidi hibah bantuan sosial dan belanja tak terduga yang di evaluasi	4 dokumen	Tersalurkannya dana hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga sesuai regulasi yang ada	100%	150,000,000	165,000,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.91	Asistensi Penyusunan RKA OPD			BPKD			Jumlah Dokumen RKA dan RKAP-OPD yang diasistensi	86 dokumen	Persentase ketersediaan RKA OPD yang sesuai regulasi	100%	133,100,000	146,410,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.93	Asistensi Penyusunan DPA dan DPPA OPD			BPKD			Jumlah Dokumen DPA dan DPPA-OPD yang diasistensi	86 dokumen	Persentase ketersediaan DPA DAN DPPA OPD yang sesuai regulasi	100%	186,340,000	204,974,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.95	Penyusunan Pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah			BPKD			Jumlah Dokumen sistur pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	1 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen sistur pengelolaan keuangan daerah	100%	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		
1.20.1.20.05.17.97	Penilaian dan penafsiran asset			BPKD			Tersedianya data penilaian dan penafsiran asset	1 Laporan	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	100%	79,000,000	86,900,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			01/02/2003	01/02/2003
					1	2	3	4	5	6			7	8
1.20.1.20.05.17.98	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja Atas Hasil Verifikasi			BPKD			Jumlah Dokumen Realisasi belanja OPD	48 dokumen	Tersedianya Data yang akurat atas hasil verifikasi	90%	65,000,000	71,500,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1
<b>Jumlah</b>											<b>9,319,093,000</b>	<b>10,251,002,300</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.20.06	Badan Pendapatan Daerah														
1.20.1.20.06.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan								3,750,000,000	4,125,000,000			
1.20.1.20.06.17.20	Pengadaan dan Pengendalian Benda Berharga			Kab.ENREKANG			Tersedianya sarana dalam penagihan pajak dan retribusi	1 Tahun	Jumlah benda berharga yang tersedia selama satu tahun	5900 Blok	140,000,000	154,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.23	Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya penyelesaian permasalahan pajak dan retribusi daerah	1 Tahun	Jumlah permasalahan pajak dan retribusi daerah yang terselesaikan	1290 Wajib Pajak	90,000,000	99,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.27	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pengurusan Program Pembangunan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD dan pengurusan program pembangunan	1 Tahun	Jumlah Penatausahaan keuangan yang terlaksana selama satu tahun	Honor, Kertas 288R, Tinta Print 27D, Amplop 25D, Pulpen 35D	600,000,000	660,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.41	Monitoring dan Evaluasi PAD			Kab.ENREKANG			Tersusunnya laporan evaluasi PAD yang akurat	4 Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi PAD yang dilaksanakan selama satu tahun	12 Kecamatan	80,000,000	88,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.42	Penyuluhan Perpajakan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya penyuluhan perpajakan	1 Tahun	Jumlah penyuluhan perpajakan yang dilaksanakan selama satu tahun	4 Kali	120,000,000	132,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.43	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pegawai			Kab.ENREKANG			Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi pegawai	1 Tahun	Jumlah pegawai yang dilayani	28 PNS	50,000,000	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.45	Penyusunan SPT Bulanan dan Tahunan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya penyusunan SPT bulanan dan tahunan	1 Tahun	Jumlah SPT bulanan dan tahunan yang tersusun	12 Bulan	20,000,000	22,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.48	Rekonsiliasi dan Evaluasi Dana Transfer			Kab.ENREKANG			Terlaksananya rekonsiliasi dana bagi hasil pajak	1 Tahun	Jumlah rekonsiliasi dan transfer yang dilaksanakan	35 Kali	90,000,000	99,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.50	Bimbingan Tehnis Bendahara SKPD			Kab.ENREKANG			Terlaksananya bimbingan teknis bendahara SKPD	1 Kali	Jumlah bendahara SKPD yang mengikuti bimbingan teknis	25 SKPD	100,000,000	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.66	Pencetakan dan Penerbitan SKPD dan SKRD			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pencetakan dan penerbitan SKPD dan SKRD	1 Tahun	Jumlah pencetakan SKPD dan SKRD selama satu tahun	186.214 Lembar	300,000,000	330,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.67	Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak dan Retribusi Daerah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran objek pajak dan retribusi daerah	1 Tahun	Jumlah pendataan dan pemutakhiran objek pajak dan retribusi daerah	186.214 Wajib Pajak	1,000,000,000	1,100,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.69	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah	1 Tahun	Jumlah penagihan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan selama satu tahun	186.214 Wajib Pajak	160,000,000	176,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.71	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan daerah	1 Tahun	Jumlah rekonsiliasi penerimaan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	500,000,000	550,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.78	Penyusunan pelaporan penerimaan bulanan triwulan dan semesteran			Kab.ENREKANG			Terlaksananya penyusunan pelaporan penerimaan bulanan, triwulan dan semesteran	4 Kali	Jumlah laporan yang tersedia	3 Dokumen	60,000,000	66,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	
1.20.1.20.06.17.80	Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya pembinaan pengawasan pendapatan daerah	1 Tahun	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan selama satu tahun	71 Kali	90,000,000	99,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					1	2	3	4	5	6			7	8
1.20.1.20.06.17.82	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran Obyek Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya			Kab.ENREKANG			Prosentase pendaftaran dan pengolahan pendapatan daerah	1 Tahun	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pendaftaran yang dilaksanakan selama satu tahun	36 Kali	60,000,000	66,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1
1.20.1.20.06.17.84	Pelaksanaan Pelaporan atas Perubahan Data Obyek Pajak dan Retribusi Daerah			Kab.ENREKANG			Prosentase pelaporan dan perubahan data objek pajak dan retribusi daerah	1 Tahun	Jumlah dokumen pelaporan perubahan data objek pajak dan retribusi daerah selama satu tahun	1 Dokumen	50,000,000	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1
1.20.1.20.06.17.85	Penyusunan, Konsolidasi Perencanaan Target Pendapatan Asli Daerah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya penyusunan konsolidasi perencanaan target target pendapatan daerah	1 Tahun	Jumlah perencanaan target target pendapatan daerah yang tersusun selama satu tahun	25 SKPD	60,000,000	66,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1
1.20.1.20.06.17.86	Validasi Data BPHTB			Kab.ENREKANG			Prosentase jumlah validasi data BPHTB yang terlaksana	1 Tahun	Jumlah validasi data BPHTB selama satu tahun	308 Surat Setoran	60,000,000	66,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1
1.20.1.20.06.17.92	Verifikasi, Analisa dan Penghapusan Piutang			Kab.ENREKANG			Terlaksananya verifikasi, analisa dan penghapusan piutang	1 Tahun	Prosentase verifikasi, analisa dan penghapusan piutang selama satu tahun	80%	60,000,000	66,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1
1.20.1.20.06.17.94	Evaluasi Pengelolaan Barang-Barang Berharga			Kab.ENREKANG			Prosentase pengelolaan barang dan jasa kebutuhan kantor	1 Tahun	Jumlah evaluasi pengelolaan barang barang berharga yang dilaksanakan selama satu tahun	59 Kali	60,000,000	66,000,000	Badan Pendapatan Daerah	1
<b>Jumlah</b>											<b>7,154,010,000</b>	<b>7,869,411,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							12
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian																
1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat																
1.20.1.20.07.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							800,000,000	880,000,000						
1.20.1.20.07.30.22	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin PNS			Kelurahan Galonta			Adanya evaluasi dan penegakan disiplin	1 dokumen	Terwujudnya evaluasi dan laporan penegakan disiplin	80%	50,000,000	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.26	Pelaksanaan UD dan Kenaikan Pangkat PI			Kelurahan Galonta			Jumlah PNS yang ikut ujian dinas	20 Orang	Terseleenggaranya ujian dinas bagi PNS	80%	100,000,000	110,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.27	Pelayanan Pemakaman PNS			Kelurahan Galonta			Terseleenggaranya pemakaman bagi PNS yang meninggal	1 Tahun	Terwujudnya penghargaan bagi PNS purnabakti	80%	100,000,000	110,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.29	Pemantauan Mahasiswa Tugas Belajar Dan Izin Belajar			Kelurahan Galonta			Terlaksananya pemantauan bagi mahasiswa tugas dan izin belajar	1 tahun	Meningkatnya kedisiplinan PNS	80%	50,000,000	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.30	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi			Kelurahan Galonta			Jumlah PNS yang mendapatkan Satyalencana	50 Orang	Terlaksananya pemberian satyalencana	1 Tahun	50,000,000	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.31	Pembuatan Cuti, Gaji Berkala, Taspen dan Karsi/Karsu Bagi PNS			Kelurahan Galonta			Jumlah PNS yang mendapatkan cuti, gaji berkala dan taspen	200 Orang	Terlaksananya proses pemberian cuti, gaji berkala dan taspen	1 Tahun	50,000,000	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.34	Penilaian Kinerja PNS			Kelurahan Galonta			Tersedianya data penilaian kinerja PNS	1 Tahun	Terwujudnya peningkatan kinerja PNS	80%	50,000,000	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.36	Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS			Kelurahan Galonta			terseleenggaranya penyelesaian hukum bagi PNS yang bermasalah	1 Dokumen	Terwujudnya ketaatan terhadap aturan	80%	50,000,000	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.37	Penyusunan Bezetting dan Penyelesaian Kebutuhan Pegawai/E-Formasi			Kelurahan Galonta			Adanya dokumen kebutuhan pegawai	1 Dokumen	Terseleenggaranya penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai dengan baik	80%	100,000,000	110,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.30.39	Seleksi Penerimaan Calon PNS			Kelurahan Galonta			Jumlah Penerimaan CPNS	200 Orang	Terlaksananya seleksi CPNS	1 Tahun	200,000,000	220,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.32	Program Pelayanan Mutasi dan Informasi Kepegawaian	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								720,000,000	792,000,000					
1.20.1.20.07.32.01	Mutasi Kenaikan Pangkat			Kelurahan Galonta			jumlah PNS yang menerima kenaikan pangkat	1 Tahun	Terseleenggaranya proses kenaikan pangkat bagi PNS	938 Orang	300,000,000	330,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.32.02	Mutasi Jabatan dan Mutasi Lainnya			Kelurahan Galonta			Jumlah jabatan yang terisi	1 Tahun	Terlaksananya pengisian jabatan sesuai kebutuhan	80%	250,000,000	275,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.32.03	Pemberhentian PNS/Purnabakti			Kelurahan Galonta			Jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun tepat waktu	143 Orang	Terwujudnya pemberhentian PNS tepat waktu	80%	70,000,000	77,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.32.04	Pengolahan Administrasi Data PNS			Kelurahan Galonta			Terlaksananya pengelolaan data pegawai	1 Dok	Terwujudnya pengelolaan data dengan baik	80%	30,000,000	33,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.32.05	Pelaksanaan Sumpah/ Janji PNS			Kelurahan Galonta			Jumlah CPNS yang mengikuti pengambilan sumpah	200 Orang	Terlaksananya pengambilan sumpah bagi CPNS	1 Tahun	20,000,000	22,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1
1.20.1.20.07.32.06	Rekonsiliasi Data Kepegawaian			Kelurahan Galonta			Jumlah dokumen data kepegawaian	1 Dok	tersedianya dokumen data kepegawaian	1 Tahun	50,000,000	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat				1



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.20.1.20.07.52	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							6,140,000,000	6,754,000,000			
1.20.1.20.07.52.01	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah			Kelurahan Galonta			Jumlah pejabat yang mengikuti Diklatpim	48 Orang	Terlaksananya diklatpim bagi pejabat struktural	1 Tahun	3,000,000,000	3,300,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	1
1.20.1.20.07.52.02	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah			Kelurahan Galonta			Jumlah PNS fungsional yang mengikuti pelatihan	20 Orang	Meningkatnya pengetahuan mengenai aturan	80%	40,000,000	44,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	1
1.20.1.20.07.52.03	Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah			Makassar			Jumlah peserta diklat prajabatan CPNS	200 Orang	Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS	1 Tahun	2,500,000,000	2,750,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	1
1.20.1.20.07.52.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Kelurahan Galonta			Jumlah Peserta sosialisasi	20 Orang	Meningkatnya pengetahuan PNS	80%	200,000,000	220,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	1
1.20.1.20.07.52.05	Bimbingan Teknis Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS			Kelurahan Galonta			Jumlah Peserta Bimtek Pengusulan Kenaikan Pangkat	40 Orang	Peningkatan Pengetahuan Tentang tata cara pengurusan pangkat	80%	100,000,000	110,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	1
1.20.1.20.07.52.06	Diklat Tekhnis			Kelurahan Galonta			Jumlah peserta diklat teknis	40 Orang	Tersedianya aparatur yang memiliki sertifikat	1 Tahun	300,000,000	330,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	1
<b>Jumlah</b>										<b>9,168,750,000</b>	<b>10,085,625,000</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
					6	7	8	9	10	11			14	15	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.20.04	Sekretariat DPRD														
1.20.1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							7,251,250,000	7,976,375,000				
1.20.1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah				Sumber Dana	100%	Terbitnya Peraturan Daerah	5 Perda	Lahirnya Perda yang mendukung tercapainya visi Daerah	100%	1,700,000,000	1,870,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama				Sumber Dana	100%	Jumlah pelaksanaan hearing/Dialog dengar pendapat	5 Kali	Terlaksananya Rapat Hearing/Dialog	100%	200,000,000	220,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan				Suber Dana	100%	Jumlah /frekuensi rapat	50 Kali	Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	100%	200,000,000	220,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.04	Rapat-rapat paripurna				Sumber Dana	100%	Jumlah /frekuensi rapat	25 Kali	Terbitnya keputusan DPRD	100%	200,000,000	220,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.05	Kegiatan Reses				Sumber Dana	100%	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 Keg/ Dapil	Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat	100%	700,000,000	770,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah				Sumber Dana	100%	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Daerah	1 Keg	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	100%	200,000,000	220,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				Sumber Dana	100%	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti pelaksanaan pengembangan SDM	120 OK	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Anggota DPRD	100%	1,700,000,000	1,870,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan				Sumber Dana	100%	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi	3 Keg	Tersosialisasinya Peraturan Daerah	100%	200,000,000	220,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.09	Rapat - Rapat Fraksi				Sumber Dana	100%	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Fraksi	8 Kali	Tersusunnya pandangan umum Fraksi	100%	250,000,000	275,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.13	Peningkatan Operasional Rumah Tangga Ketua DPRD				Sumber Dana	100%	Jumlah kebutuhan operasional RT Ketua DPRD	12 Jenis	Terlaksananya kegiatan RT Ketua DPRD	100%	120,000,000	132,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.14	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD				Sumber Dana	100%	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan atas inisiatif DPRD	2 Perda	Terbitnya Peraturan daerah atas inisiatif DPRD	100%	800,000,000	880,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.15	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan				Sumber Dana	100%	Jumlah kegiatan koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan	2 Keg	Penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan	100%	541,250,000	595,375,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.16	Pelaksanaan Jumpa Pers DPRD				Sumber Dana	100%	Jumlah/Frekwensi jumpa pers hasil keputusan DPRD	3 Keg	Terpublikasinya keputusan DPRD	100%	40,000,000	44,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.17	Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD				Sumber Dana	100%	Jumlah Anggota Dewan mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan	30 Org	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Anggota DPRD	100%	200,000,000	220,000,000	Sekretariat DPRD	1	
1.20.1.20.04.15.19	Publikasi/Dokumentasi Kegiatan DPRD				Sumber Dana	100%	Jumlah kegiatan DPRD yang terpublikasi	10 Keg	Terpublikasinya kegiatan-kegiatan DPRD	100%	200,000,000	220,000,000	Sekretariat DPRD	1	
<b>Jumlah</b>										<b>12,771,250,000</b>	<b>14,048,375,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02	Kesehatan														
1.20.02	Sekretariat Daerah														
1.02.1.20.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah		Terwujudnya upaya kesehatan masyarakat	60%					158,870,000	174,757,000			
1.02.1.20.02.16.	Pembinaan Sekolah sehat			Kab.ENREKANG	Jumlah sekolah sehat yang dibina	7 Sekolah	Terbinanya lingkungan Sekolah yang sehat	7 Sekolah			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1	
1.02.1.20.02.16.	Koordinasi dan fasilitasi komisi pengendalian Zonosi			Kab.ENREKANG	Persentase Pelaksanaan koordinasi daerah pengendalian penyakit hewan	100%	Terlaksananya koordinasi daerah pengendalian penyakit hewan	100%			25,000,000	27,500,000	Sekretariat Daerah	1	
1.02.1.20.02.16.	Advokasi dan Sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS				Presentase kelembagaan yang aktif dan penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS	60%	Kelembagaan aktif dan dapat menanggulangi kasus narkoba dan HIV/AIDS	60%			33,870,000	37,257,000	Sekretariat Daerah	1	
1.06	Perencanaan Pembangunan														
1.20.02	Sekretariat Daerah														
1.06.1.20.02.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4)	Terwujudnya realisasi infestasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata daerah								40,000,000	44,000,000			
1.06.1.20.02.21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Kab.ENREKANG	Volume pelaksanaan prosedur ketenagakerjaan dan fasilitasi perselisihan hubungan industrial	15 Kali	Terciptanya kepastian hukum pekerja dan pengusaha	12 Bulan			40,000,000	44,000,000	Sekretariat Daerah	1	
1.06.1.20.02.28	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Persentase pemenuhan pelaporan penda yang dipersyaratkan (LKPI, LPPD, ILPPD dan LAKIP)	95%					430,000,000	473,000,000			
1.06.1.20.02.28.05	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			Kab.ENREKANG	Volume LPPD dan RLPPD	3 Laporan	Tersusunnya laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	3 Laporan			150,000,000	165,000,000	Sekretariat Daerah	1	
1.06.1.20.02.28.06	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Bupati / KDH			Kab.ENREKANG	Volume laporan keuangan pertanggungjawaban Bupati KDH	3 Laporan	Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/KDH kepada DPRD	95%			45,000,000	49,500,000	Sekretariat Daerah	1	
1.06.1.20.02.28.07	Penyusunan Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimalis (SPM)			Kab.ENREKANG	Volume laporan SPM Daerah	1 Laporan	Tersusunnya laporan SPM Daerah	100%			50,000,000	55,000,000	Sekretariat Daerah	1	
1.06.1.20.02.28.10	Peningkatan Sistem Informasi Pengendalian Oprasional Kegiatan (TEPRA)			Kab.ENREKANG	Volume penyediaan laporan TEPRA	12 bulan	Terinput dan terkirimnya laporan TEPRA ke pemerintah pusat.	12 Bulan			50,000,000	55,000,000	Sekretariat Daerah	1	
1.06.1.20.02.28.11	Pemantauan Kegiatan Pembangunan Fisik APBD			Kab.ENREKANG	Persentase hasil pemantauan kegiatan pembangunan	100%	Tersedianya laporan pemantauan kegiatan pembangunan	100%			40,000,000	44,000,000	Sekretariat Daerah	1	
1.06.1.20.02.28.12	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimalis			Kab.ENREKANG	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi SPM	50 orang	Meningkatnya pemahaman aparaturn tentang SPM	95%			35,000,000	38,500,000	Sekretariat Daerah	1	
1.06.1.20.02.28.13	Peningkatan Pengendalian Administrasi Perencanaan Pembangunan			Kab.ENREKANG	Presentase pengendalian administrasi perencanaan pembangunan	100%	Terkendalnya administrasi perencanaan pembangunan	100%			60,000,000	66,000,000	Sekretariat Daerah	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target							
					6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	
1.08	Lingkungan Hidup																
1.20.02	Sekretariat Daerah																
1.08.1.20.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat			Meningkatnya pengelolaan potensi SDA dan kerjasama investasi potensi daerah	70%					68,925,500	75,818,050				
1.08.1.20.02.16.16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan			Kab.ENREKANG	Volume pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan	12 Kec	Adanya laporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sumber daya alam	12 Kec				26,808,000	29,488,800	Sekretariat Daerah	1		
1.08.1.20.02.16.30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup			Kab.ENREKANG								42,117,500	46,329,250	Sekretariat Daerah	1		
1.08.1.20.02.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat			Frekuensi koordinasi pengendalian SDA dan LH	12 Kec					219,239,500	241,163,450				
1.08.1.20.02.17.09	Koordinasi tata kelola pemanfaatan SDA			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan koordinasi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	12 Kec	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat	90%				113,364,500	124,700,950	Sekretariat Daerah	1		
1.08.1.20.02.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA			Kab.ENREKANG	Frekuensi koordinasi peran serta masyarakat terhadap pengendalian sumber daya alam	12 Kec	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengendalian dan konservasi sumber daya alam	12 Kec				43,875,000	48,262,500	Sekretariat Daerah	1		
1.08.1.20.02.17.17	Koordinasi Kegiatan Usaha Pertambangan			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan koordinasi hasil produksi bidang pertambangan	12 kali	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi tentang hasil produksi bidang pertambangan	12 Kali				32,000,000	35,200,000	Sekretariat Daerah	1		
1.08.1.20.02.17.25	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Peternakan dan Perikanan			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi peternakan dan perikanan	12 Kali	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	90%				30,000,000	33,000,000	Sekretariat Daerah	1		
1.08.1.20.02.17.25	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Peternakan dan Perikanan			Kab.ENREKANG								0	0	Sekretariat Daerah	1		
1.08.1.20.02.32	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam					Meningkatnya pengelolaan potensi SDA dan kerjasama investasi potensi daerah	70%					86,271,000	94,898,100				
1.08.1.20.02.32.33	Penyusunan Potensi SDA dan peluang usaha Investasi			Kab.ENREKANG	Volume pengadaan informasi berupa data SDA dalam bentuk buku	40 Buku	Tersedianya informasi berupa data SDA dalam bentuk buku, peta dan CD	90%				86,271,000	94,898,100	Sekretariat Daerah	1		
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
1.20.02	Sekretariat Daerah																
1.11.1.20.02.16	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan			Persentase kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak	20%					15,000,000	16,500,000				
1.11.1.20.02.16.11	Pembinaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan organisasi yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	100%	menurunnya angka tindak kekerasan perempuan	100%				15,000,000	16,500,000	Sekretariat Daerah	1		
1.13	Sosial																
1.20.02	Sekretariat Daerah																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.13.1.20.02.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Persentase kelembagaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	90%						7,000,000,000	7,700,000,000		
1.13.1.20.02.21.09	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial lainnya			Kab.ENREKANG	Jumlah Desa/Kel yang mendapatkan bantuan sosial	129 Desa/Kel	Meningkatnya kesejahteraan Imam Mesjid, pembina TPA, Penyuluh Non PNS dan Pencatat nikah serta terlaksananya pengelolaan BAZNAS yang lebih profesional, transparan dan akuntabel	129 Desa/Kel				6,444,782,000	7,089,260,200	Sekretariat Daerah	1
1.13.1.20.02.21.10	Monitoring dan evaluasi bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan keagamaan			Kab.ENREKANG	Volume pemberian bantuan sarana rumah ibadah	12 Kec	Adanya data yang akurat tentang penerima bantuan sarana rumah ibadah dan kegiatan keagamaan	12 Kec				40,000,000	44,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.13.1.20.02.25	Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat				Persentase pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat	20%						3,041,934,400	3,346,127,840		
1.13.1.20.02.25.04	Pendidikan dan pelatihan pembina TPA/guru mengaji			Kab.ENREKANG	Jumlah Pembina TPA/Guru mengaji yang mengikuti Diklat	80 Pembina TPA/Guru mengaji	Meningkatnya kualifikasi kompetensi Pembina TPA/Guru Mengaji	90%				25,000,000	27,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.13.1.20.02.25.05	Pembinaan kerohanian lingkup pemerintah kabupaten enrekang			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan pembinaan kerohanian lingkup Pemda Enrekang	12 Kali	Terlaksananya pengajian dan mengikutinya pemahaman nilai-nilai Al-Quran	100%				40,000,000	44,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.13.1.20.02.25.06	Penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Asal Kab Enrekang			Kab.ENREKANG	Frekuensi penyelenggaraan pemberangkatan Haji	2 kali	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah asal Kab. Enrekang	2 Kali				431,934,400	475,127,840	Sekretariat Daerah	1
1.13.1.20.02.25.07	Pembinaan kegiatan keagamaan islam lainnya			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan kegiatan keagamaan	19 Kali	Terciptanya masyarakat religius yang mandiri dan agamais	90%				2,530,000,000	2,783,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.13.1.20.02.25.08	Koordinasi dan fasilitasi bagian kesejahteraan rakyat			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan koordinasi bagian Kesra dan Kemas	8 Kali	Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan OPD Bagian Kesra	8 Kali				15,000,000	16,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.16	Penanaman Modal														
1.20.02	Sekretariat Daerah														
1.16.1.20.02.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Persentase peningkatan potensi dan kerjasama investasi promosi Daerah	70%						217,947,900	239,742,690		
1.16.1.20.02.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi			Kab.ENREKANG	Persentase jumlah pelaksanaan pameran	90%	Terlaksananya pameran investasi dan pameran produk unggulan UKM	90%				180,417,900	198,459,690	Sekretariat Daerah	1
1.16.1.20.02.15.14	Pelaksanaan Koordinasi antar kabupaten /kota propinsi terkait kebijakan koperasi			Kab.ENREKANG	Frekuensi koordinasi antar Kab/Kota dan Provinsi	35 Kali	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	85%				37,530,000	41,283,000	Sekretariat Daerah	1
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.20.02	Sekretariat Daerah														
1.20.1.20.02.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				Tingkat realisasi rencana aktivitas kegiatan Bupati/Wakil Bupati	100%						2,059,410,000	2,265,351,000		
1.20.1.20.02.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan			Kab.ENREKANG	Persentase Pelaksanaan dialog antara BKDH/WKDH dengan tokoh masyarakat	100%	Terjadinya komunikasi antara BKDH/WKDH dengan tokoh masyarakat	100%				86,380,000	95,018,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.16.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			Kab.ENREKANG	Tingkat integritas inspeksi KDH/WKDH	100%	Terwujudnya pengawasan KDH/WKDH	100%				100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.20.1.20.02.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya			Kab.ENREKANG							0	0	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.16.07	Peningkatan Operasionalisasi Rumah Tangga KDH/WKDH			Kab.ENREKANG	Tingkat penyediaan operasional rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	100%	Terpenuhinya operasional rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	100%			830,000,000	913,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.16.12	Penerimaan Tamu-tamu Pemerintahan Daerah			Kab.ENREKANG	Tingkat pelayanan tamu-tamu pemma	100%	Peningkatan pelayanan tamu-tamu pemma	100%			1,000,000,000	1,100,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.16.14	Koordinasi konsultasi dan pemantauan penyelenggara pemerintahan otoda			Kab.ENREKANG	Tingkat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pemda dan Otoda	75%	Terkoordinasinya dan terpantauannya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan otoda	75%			22,000,000	24,200,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.16.15	Rapat kerja daerah			Kab.ENREKANG	Volume pelaksanaan rapat Kerja Daerah	1 Paket	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif	100%			21,030,000	23,133,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>				<b>Persentase ketersediaan pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>	<b>95%</b>					<b>94,110,000</b>	<b>103,521,000</b>		
1.20.1.20.02.17.02	Penyusunan standar satuan harga			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan penyusunan standarisasi harga barang dan jasa	90%	Terbitnya buku standar harga satuan barang dan jasa yang dipedomani dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kab. Enrekang	90%			54,110,000	59,521,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.17.99	Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu			Kab.ENREKANG	Volume pelaksanaan rekonsiliasi dan dekonsentrasi tugas pembantuan	1 Tahun	Terlaksananya rekonsiliasi kegiatan PEMDA	100%			40,000,000	44,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.20	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>				<b>Rasio antara jasa pelayanan administrasi dengan kebutuhan kantor</b>	<b>95%</b>					<b>302,082,300</b>	<b>332,290,530</b>		
1.20.1.20.02.20.42	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan			Kab.ENREKANG	Presentase jumlah rekomendasi Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPKP	75%	Adanya tindak lanjut hasil temuan pengawasan	75%			107,202,300	117,922,530	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.20.44	Pengembangan analisis dan penelahan kebijakan daerah			Kab.ENREKANG	Presentase pengkajian dan pengembangan kebijakan KDH	80%	Terwujudnya pengkajian dan pengembangan kebijakan KDH	80%			194,880,000	214,368,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.22	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>				<b>Tingkat penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	<b>80%</b>					<b>80,000,000</b>	<b>88,000,000</b>		
1.20.1.20.02.22.11	Monitoring dan pelaporan pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi			Kab.ENREKANG	Jumlah OPD sasaran monev pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi	4 OPD	Tersedianya laporan percepatan pemberantasan korupsi	100%			50,000,000	55,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.22.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas pemma			Kab.ENREKANG	Jumlah sasaran monev pelaksanaan fakta integritas Pemda	4 OPD	Meningkatnya pelaksanaan fakta integritas	100%			30,000,000	33,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.25	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>				<b>Terlaksananya koordinasi antar Kab/Kota dan Provinsi</b>	<b>85%</b>					<b>160,000,000</b>	<b>176,000,000</b>		
1.20.1.20.02.25.05	Pelaksanaan Koordinasi Antar Kabupaten			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Frekuensi koordinasi antar Kab/Kota dan Provinsi	35 Kali	Terwujudnya Koordinasi antar Kab/Kota dan Provinsi	80%			31,131,250	68,488,750	Sekretariat Daerah	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1.20.1.20.02.25.06	Koordinasi Antara Pemda Dengan Kementrian Pemerintah Pusat Asosiasi Kab. Seluruh Indonesia (APKASI)			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Persentase keikutsertaan Pemkab Enrekang pada Rapat Asosiasi Pemkab seluruh Indonesia (APKASI)	80%	Terwujudnya Koordinasi antar pemkab Seluruh Indonesia	80%			52,331,000	57,564,100	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.25.07	Koordinasi konsultasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan antar lembaga			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama Pemda dengan lembaga lainnya	10 MOU	Terwujudnya kerjasama yang baik antar daerah dengan lembaga	80%			20,000,000	22,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				Persentase pelaksanaan Legislasi dan produk Daerah	80%					156,000,000	171,600,000		
1.20.1.20.02.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan			Kab.ENREKANG	Jumlah perda yang disusun berdasarkan propemperda	10 Perda	Tersusunnya Perda berdasarkan Propemperda	80%			20,000,000	22,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.26.08	Pelembaran Daerah dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah			Kab.ENREKANG	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	10 Perda, 30 Perbup, dan 900 Kepbup	Terdokumentasinya Perda, Perbup dan Kepbup yang telah ditetapkan	80%			36,000,000	39,600,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.26.13	Melaksanakan Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Daerah			Kab.ENREKANG	Jumlah Perda, Perbup dan Kepbup yang diundangkan/ditetapkan	10 Perda dan 30 Perbup	Tersedianya Produk Hukum daerah sesuai kebutuhan	80%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)			Jumlah Kecamatan dan Desa yang dimekarkan	1 Kec 5 Desa/ Kel					160,000,000	176,000,000		
1.20.1.20.02.27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Volume pelaksanaan penyelesaian tapal batas antar wilayah	10 Patok	Meningkatkan pengamanan batas wilayah Kabupaten dan Kecamatan	100%			55,000,000	60,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.27.05	Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggara Otonomi Daerah			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Jumlah laporan penyusunan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah	1 Laporan	Terwujudnya laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah	85%			60,000,000	66,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.27.08	Pemetaan Nama-Nama Rupa Bumi			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Jumlah laporan pemetaan nama-nama rupa bumi yang tersusun	1 Laporan	Terlaksananya pembakuan nama-nama rupa bumi Kab. Enrekang	90%			45,000,000	49,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan dan Pembinaan Penyedia Jasa				Cakupan implementasi sistim pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100%					1,158,163,895	2,316,327,790		
1.20.1.20.02.33.01	Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi			Kab.ENREKANG	Jumlah ketersediaan jasa konstruksi yang kafabel	146 Perusahaan	Tersedianya jasa konstruksi yang kafabel	80%			60,000,000	66,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33.04	Pemeliharaan webside LPSE			Kab.ENREKANG	Terpeliharanya webside dan server LPSE	100%	Meningkatnya layanan webside dan server LPSE	100%			30,000,000	33,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33.05	Pengelolaan UKPBJ			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pelelangan barang dan jasa secara tertib elektronik yang kondusif	100%	Terimplementasikannya pelaksanaan pelelangan/pengadaan barang dan jasa	100%			753,756,895	829,132,585	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33.06	Penunjang Pelaksanaan UKPBJ			Kab.ENREKANG	Terlaksananya Sarana ULP	100%	Tersedianya sarana penunjang ULP yang memadai	100%			20,000,000	22,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33.07	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			Kab.ENREKANG	Terlaksananya PJB secara elektronik yang kondusif	42 OPD	Terwujudnya pelelangan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan dan terpadu	42 OPD			179,122,000	197,034,200	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33.09	Penyusunan Profil Perusahaan Penyedia barang dan jasa			Kab.ENREKANG	Persentase ketersediaan buku profil perusahaan yang masih berlaku	100%	Tersedianya buku profil perusahaan yang masih berlaku	100%			15,000,000	16,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33.10	Pelaksanaan penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi			Kab.ENREKANG	Tertib perizinan sesuai prosedur	100%	Tertatanya penerbitan perizinan sesuai prosedur	100%			35,000,000	38,500,000	Sekretariat Daerah	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1.20.1.20.02.33.11	Self Assessment Tingkat Kematangan UKPB			Kab.ENREKANG	Terlaksananya Pelaporan kegiatan melalui self assesment Organisasi UKPB	100%	Terwujudnya pelaporan kegiatan melalui self assesment Organisasi UKPB	100%			30,000,000	33,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33.12	Penguatan lembaga dan organisasi UKPB			Kab.ENREKANG	Terlaksananya Lembaga dan Organisasi Layanan Pengadaan yang permanen	42 SKPD	Terlaksananya Lembaga dan Organisasi Layanan Pengadaan yang permanen	42 SKPD			20,285,000	22,313,500	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.33.13	Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa			Kab.ENREKANG	Terlaksananya proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa	100%	Terimplementasinya sistem pelayanan barang dan jasa	100%			15,000,000	16,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik		Tingkat pelaksanaan sistim pengendalian administrasi pemerintah, kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum penda	80%					875,560,000	963,116,000		
1.20.1.20.02.34.11	Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan penataan dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Paket	Terwujudnya kelembagaan yang ideal berdasarkan peraturan yang berlaku	95%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.12	Pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan	80%	Terlaksananya pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan	100%			200,000,000	220,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.13	Pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintahan			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm. Pemerintahan	100%	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintahan	100%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.14	Pembinaan dan koordinasi adm pembangunan			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm pembangunan	100%	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi administrasi pembangunan	100%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.15	Pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm. umum dan kepegawaian	100%	Terciptanya pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian	100%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.19	Pembinaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN)			Kab.ENREKANG	Volume pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel di tingkat Kecamatan	12 Kec	Proses pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel di tingkat Kecamatan	12 Kec			55,000,000	60,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.20	Pembinaan dan penataan administrasi kecamatan keurahan			Kab.ENREKANG	Volume peningkatan kemampuan aparatur Kelurahan	17 Kelurahan	Peningkatan kemampuan aparatur Kelurahan dalam melayani Masyarakat	17 Kelurahan			20,560,000	22,616,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.21	Penataan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan movev Reformasi birokrasi	1 Paket	Terwujudnya penataan movev reformasi birokrasi	100%			200,000,000	220,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah				Tingkat pelaksanaan sistim pengendalian administrasi pemerintah, kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum penda	80%					875,560,000	963,116,000		
1.20.1.20.02.34.11	Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan penataan dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Paket	Terwujudnya kelembagaan yang ideal berdasarkan peraturan yang berlaku	95%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.12	Pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan	80%	Terlaksananya pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan	100%			200,000,000	220,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.13	Pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintahan			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm. Pemerintahan	100%	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintahan	100%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.14	Pembinaan dan koordinasi adm pembangunan			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm pembangunan	100%	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi administrasi pembangunan	100%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.15	Pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian			Kab.ENREKANG	Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm. umum dan kepegawaian	100%	Terciptanya pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian	100%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.02.34.19	Pembinaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN)			Kab.ENREKANG	Volume pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel di tingkat Kecamatan	12 Kec	Proses pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel di tingkat Kecamatan	12 Kec			55,000,000	60,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.20	Pembinaan dan penataan administrasi kecamatan kleurahan			Kab.ENREKANG	Volume peningkatan kemampuan aparaturn Kelurahan	17 Kelurahan	Peningkatan kemampuan aparaturn Kelurahan dalam melayani Masyarakat	17 Kelurahan			20,560,000	22,616,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.34.21	Penataan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi			Kab.ENREKANG	Frekuensi pelaksanaan movev Reformasi birokrasi	1 Paket	Terwujudnya penataan movev reformasi birokrasi	100%			200,000,000	220,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.39	<b>Program Penegangan / perlindungan hukum dan pembinaan kesadaran hukum/HAM</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)</b>	<b>Meningkatnya minat dan Budaya Baca Masyarakat</b>		<b>Persentase Penyelamatan Kerugian Daerah</b>	<b>100%</b>					<b>436,932,200</b>	<b>480,625,420</b>		
1.20.1.20.02.39.02	Penyuluhan hukum dan sosialisasi perda			Kab.ENREKANG	Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum daerah	1 Paket	Meningkatnya pemahaman hukum Masyarakat	100%			111,936,700	123,130,370	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.39.06	Pelaksanaan RANHAM			Kab.ENREKANG	Jumlah kelompok sasaran RANHAM	3 Kelompok	OPD memiliki Pro dan HAM	100%			23,290,500	25,619,550	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.39.07	Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kelompok Sadar Hukum			Kab.ENREKANG	Jumlah Desa yang dibina tentang kesadaran hukum	3 Desa	OPD memiliki Pro dan HAM	80%			20,000,000	22,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41	<b>Program Pengembangan Ketelaksanaan Pemerintah Daerah</b>				<b>Tingkat ketatalaksanaan pemerintah daerah</b>	<b>95%</b>					<b>791,200,000</b>	<b>870,320,000</b>		
1.20.1.20.02.41.	Penataan Kelembagaan Pemda			Kab.ENREKANG	Presentase pelaksanaan evaluasi/penataan kelembagaan pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku	85%	Terwujudnya kelembagaan yang ideal berdasarkan peraturan yang berlaku	85%			50,000,000	55,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41.02	Penyusunan Tata Naskah Dinas			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi	Volume pelaksanaan penyusunan pedoman tata naskah OPD	1 Kali	Tersedianya pedoman tata naskah OPD	100%			57,600,000	63,360,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41.03	Penataan administrasi kepegawaian setda			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi	Frekuensi pelaksanaan penataan administrasi kepegawaian Setda	1 Kali	Meningkatkan penataan administrasi kepegawaian Setda	100%			42,000,000	46,200,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41.04	Penyusunan Buku Kerja Pemerintah Daerah			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi	Frekuensi pelaksanaan penyusunan buku kerja pemerintah daerah	1 Kali	Tersedianya buku pedoman dalam rangka rapat-rapat kerja	100%			63,600,000	69,960,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41.06	Penataan data Struktur Organisasi Pemda			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi	Frekuensi pelaksanaan penyusunan papan struktur Pemda	1 Kali	Tersedianya informasi struktur Pemda	100%			80,000,000	88,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41.07	Penyusunan Peraturan - Peraturan Yang Terkait Ketatalaksanaan			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi	Frekuensi pelaksanaan penyusunan peraturan terkait ketatalaksanaan	1 Paket	Meningkatnya produk ketatalaksanaan	100%			48,000,000	52,800,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41.08	Penyusunan TUPOKSI			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi	Jumlah Perbup tentang tupoksi pemda yang disusun	1 Paket	Tersedianya Perbup tentang tupoksi jabatan Pemda	85%			50,000,000	55,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41.12	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Paket	Tersedianya pengukuran kepuasan masyarakat serta mendorong kualitas dan inovasi pelayanan	50%			100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Ibukota Provinsi											
1.20.1.20.02.41.13	Koordinasi konsultasi ketatalaksanaan kelembagaan dan kepegawaian			Kab.ENREKANG  SULAWESI SELATAN Ibukota Provinsi Luar Daerah	Frekuensi pelaksanaan koordinasi, konsultasi ketatalaksanaan kelembagaan dan kepegawaian dengan Pemrov dan Pemius Meningkatkan koordinasi bidang kelembagaan dengan Pemprov dan Pemius	20 Kali  95%						200,000,000	220,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.41.14	Penyusunan SOP OPD			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi	Jumlah OPD yang memiliki SOP yang telah direvisi	1 Paket	Terwujudnya revisi SOP OPD					100,000,000	110,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.20.1.20.02.44	Program Pengelolaan dan Pengembangan Asset Pemerintah Daerah				Persentase Asset pemda yang terinvestasi dan memenuhi standar administrasi	90%						55,000,000	60,500,000		
1.20.1.20.02.44.02	Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang			Kab.ENREKANG	Jumlah Objek batas asset Pemda yang terinventarisasi dan diterbitkan	5 Objek	Terwujudnya ketertiban asset Pemda	5 Objek				55,000,000	60,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.23	Statistik														
1.20.02	Sekretariat Daerah														
1.23.1.20.02.15	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya minat dan Budaya Baca Masyarakat		Tingkat ketersediaan data dan informasi investasi	83%						55,000,000	60,500,000		
1.23.1.20.02.15.10	Pengendalian inflasi Daerah			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi inflasi di Kab. Enrekang	85%	Tersedianya data dan informasi inflasi di Kab. Enrekang	85%				20,000,000	22,000,000	Sekretariat Daerah	1
1.23.1.20.02.15.11	Tim percepatan akses keuangan daerah			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Volume penyediaan data dan informasi keuangan di Kab. Enrekang	1 TA	Tersedianya data dan informasi keuangan di Kab. Enrekang	1 TA				35,000,000	38,500,000	Sekretariat Daerah	1
1.25	Komunikasi dan Informatika														
1.20.02	Sekretariat Daerah														
1.25.1.20.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				Frekuensi data dan informasi kegiatan pemda yang di publikasi kepada masyarakat	24 kali						1,102,137,500	1,212,351,250		
1.25.1.20.02.15.27	Pelaksanaan Jumpa Pers Pemda			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi	Volume pelaksanaan jumpa pers antara pemda dengan awak media	24 Kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah	100%				21,200,000	23,320,000	Sekretariat Daerah	1
1.25.1.20.02.15.28	Pelaksanaan Publikasi Dokumentasi dan Kemitraan Media			SULAWESI SELATAN  Kab.ENREKANG  Luar Daerah Ibukota Provinsi	Persentase informasi tentang pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik serta ketersediaan dikomentasi daerah yang dapat diketahui masyarakat	100%	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi melalui media	100%				1,025,937,500	1,128,531,250	Sekretariat Daerah	1
1.25.1.20.02.15.34	Pengadaan sarana telekomunikasi setda			Kab.ENREKANG	Volume pengadaan sarana telekomunikasi Setda	12 Bulan	Terwujudnya kelancaran komunikasi dan informasi	12 Bulan				55,000,000	60,500,000	Sekretariat Daerah	1
2	URUSAN PILIHAN														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					1	2	3	4	5	6			7	8		
2.01	Pertanian															
1.20.02	Sekretariat Daerah															
2.01.1.20.02.32	Program Peningkatan Produktifitas Pertanian				Tingkat ketersediaan produksi hasil pertanian/perkebunan	90%					124,332,000	136,765,200				
2.01.1.20.02.32.07	Peningkatan Kualitas produksi tembakau			Kab.ENREKANG	Persentase pemfaatan dan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau	80%	Terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat	80%			124,332,000	136,765,200	Sekretariat Daerah	1		
<b>Jumlah</b>											<b>23,518,150,150</b>	<b>25,869,965,165</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003		
					6	7	8	9	10	11			12	13			14	15
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
1.20.08	Inspektorat Daerah																	
1.20.1.20.08.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									3,550,000,000	3,905,000,000						
1.20.1.20.08.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif			SULAWESI SELATAN	JUMLAH DANA	220000000	Jumlah Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan	Pengawasan tidak tumpang tindih dan terarah	100%	220,000,000	242,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.11	Pelaksanaan Pengawasan SMP Sederajat			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	100000000	1.Jumlah SMP/Sederajat yang diReviu 2.Jumlah SMP/Sederajat yang diperiksa	1.36 SMP Sederajat 2. 36 SMP Sederajat	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah/Negara	100%	100,000,000	110,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.12	Pelaksanaan Pengawasan Desa/Kelurahan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	320000000	1. Jumlah Desa/Kelurahan yang diReviu 2.Jumlah Desa/Kelurahan yang diperiksa	1. 129 Desa/Kel 2.65 Desa/Kel	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah/Negara	100%	320,000,000	352,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.13	Pelaksanaan Pengawasan Kantor Camat			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	170000000	Jumlah Kantor Kecamatan yang dilakukan Pengawasan	12 Kantor Kecamatan	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah	100%	170,000,000	187,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.14	Pelaksanaan Pengawasan Setda, Setwan, Dinas / Badan dan RSUD			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	500000000	Jumlah Setda,Setwan,Dinas/Badan dan RSUD yang dilakukan Pengawasan	30 OPD	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah/Negara	100%	500,000,000	550,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.15	Pelaksanaan Pengawasan Belanja Modal dan Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	520000000	1. Persentase Belanja Modal dan Barang yang diserahkan Ke Masyarakat yang di Reviu 2.Persentase Dana Belanja Modal dan Barang yang diserahkan Ke Masyarakat yang dilakukan Pengawasan	1. 100 % 2.50%			520,000,000	572,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.16	Pelaksanaan Pengawasan Khusus dan Pengaduan Masyarakat			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	290000000	Persentase Pengawasan Khusus dan Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah	100%	290,000,000	319,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.18	Pelaksanaan Pengawasan SD dan Sederajat			Kab.ENREKANG	JUMLAH DANA	200000000	1.Jumlah SD/Sederajat yang diReviu 2.Jumlah SD/Sederajat yang diperiksa	1. 233 SD sederajat (reviu) 2. 150 SD sederajat	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang	100%	200,000,000	220,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.19	Pelaksanaan Pengawasan Puskesmas dan Sederajat			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	120000000	Jumlah Puskesmas /sederajat yang dilakukan pengawasan	14 PKM/Sederajat	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang	100%	120,000,000	132,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.20	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	160000000	Jumlah Laporan hasil Reviu yang diterbitkan	1 LHR	Laporan Keuangan Pemda dapat diyakini	100%	160,000,000	176,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.21	Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Rencana Umum Pengadaan Pemda			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	800000000	Persentase RUP OPD yang diAudit	35%	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang	100%	80,000,000	88,000,000	Inspektorat Daerah	1				
1.20.1.20.08.20.22	Pengawasan Terpadu (Join Audit)			SULAWESI SELATAN	Jumlah Dana	200000000	Jumlah Pengawasan Terpadu ( Joint Audit ) yang dilaksanakan	4 Kali	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah	100%	200,000,000	220,000,000	Inspektorat Daerah	1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.20.1.20.08.20.25	Peningkatan Maturitas SPIP Pemda			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	120000000	Maturitas SPIP PEMDA	Level 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan OPD	100%	120,000,000	132,000,000	Inspektorat Daerah	3
1.20.1.20.08.20.27	Pengawasan Aset Pemda			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	120000000	Persentase Aset Pemda Yang dilakukan Pengawasan	35%	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah	100%	120,000,000	132,000,000	Inspektorat Daerah	3
1.20.1.20.08.20.36	Evaluasi SAKIP OPD			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Jumlah Dana	120000000	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP	43 OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	100%	120,000,000	132,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.20.39	Pemeriksaan/Pengujian Sistem Pengendalian Intern OPD dan Pemeriksaan / Audit Kinerja			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	120000000	Jumlah Audit Kinerja yang dilaksanakan	12 OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan OPD	100%	120,000,000	132,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.20.42	Reviu Perencanaan Pemda dan OPD			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	180000000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Reviu	4 Dokumen	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang	100%	180,000,000	198,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.21	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>									<b>485,000,000</b>	<b>533,500,000</b>		
1.20.1.20.08.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				Jumlah Dana	440000000	Jumlah Diklat, BinteK, sosialisasi khusus Pengawasan yang diikuti/dilaksanakan	25 jenis (Diklat, Sosialisasi, BinteK Khusus Pengawasan)	Kualitas/Wawasan SDM Aparat Pengawasan meningkat	100%	440,000,000	484,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.21.03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	450000000	Jumlah PKS yang dilaksanakan	12 Kali	Kualitas/Wawasan SDM Aparat Pengawasan meningkat	100%	45,000,000	49,500,000	Inspektorat Daerah	3
1.20.1.20.08.22	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>									<b>362,000,000</b>	<b>398,200,000</b>		
1.20.1.20.08.22.05	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	270000000	Jumlah Dokumen PKPT yang diterbitkan	1 Dokumen	Program Pengawasan lebih terarah dan terencana	100%	27,000,000	29,700,000	Inspektorat Daerah	3
1.20.1.20.08.22.07	Peningkatan Kapabilitas APIP			SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	110000000	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%	110,000,000	121,000,000	Inspektorat Daerah	3
1.20.1.20.08.22.08	Sosialisasi / Kampanye Pengawasan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	160000000	Jumlah sosialisasi/kampanye pengawasan yang dilaksanakan	10 Kali	Meningkatnya pengetahuan/wawasan tentang Pengawasan	80%	160,000,000	176,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.22.09	Ekspos Hasil Pengawasan dan Hasil Penyusunan LHP			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	650000000	Jumlah Ekspose yang dilaksanakan dan LHP yang terbitkan	350 LHP	Meningkatnya kualitas LHP	100%	65,000,000	71,500,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.35	<b>Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>				<b>1.87 % 2.94% 3.94%</b>	<b>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut 1.BPK RI 2.Inspektorat Provinsi 3.Inspektorat Kabupaten</b>				<b>430,000,000</b>	<b>473,000,000</b>		
1.20.1.20.08.35.02	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN	Jumlah Dana	550000000	Persentase Temuan BPK dan APIP yang terinventarisir dalam proses tindak lanjut	100%	Terkendalinya penyelesaian tindak lanjut	100%	55,000,000	60,500,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.35.03	Penyusunan Kompilasi Hasil Temuan BPK dan APIP			SULAWESI SELATAN	Jumlah Dana	400000000	Persentase Temuan yang dikompilasi	100%	Temuan BPK dan APIP dapat dikompilasi	100%	40,000,000	44,000,000	Inspektorat Daerah	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.20.1.20.08.35.04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	155000000	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang dievaluasi	75%	Rekomendasi temuan OPD dapat dievaluasi dengan teliti dan mencegah kesalahan administrasi serta potensi kerugian Daerah/Negara	100%	155,000,000	170,500,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.35.05	Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	110000000	Persentase Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan melalui MPTGR	60%	Rekomendasi temuan OPD dapat dievaluasi dengan teliti dan mencegah kesalahan administrasi serta potensi kerugian Daerah/Negara	60%	110,000,000	121,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.35.09	Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten Enrekang			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	70000000	Jumlah gelar pengawasan tingkat kabupaten yang dilaksanakan	2 Kali	Terkendalinya penyelesaian tindak lanjut	100%	70,000,000	77,000,000	Inspektorat Daerah	1
<b>1.20.1.20.08.36</b>	<b>Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>									<b>1,712,000,000</b>	<b>1,883,200,000</b>		
1.20.1.20.08.36.01	Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Jumlah Dana	350000000	Jumlah Kerjasama dengan APH dan Stekholder dalam pencegahan tindak pidana korupsi	12 Kali	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	350,000,000	385,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.36.02	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Jumlah Dana	130000000	Jumlah Koordinasi,Supervisi dan Pencegahan yang dilaksanakan	4 Kali	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	130,000,000	143,000,000	Inspektorat Daerah	3
1.20.1.20.08.36.03	Survey Penilaian Integritas Pemda			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	155000000	Nilai Survey Integritas PEMDA	2,5	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	155,000,000	170,500,000	Inspektorat Daerah	3
1.20.1.20.08.36.04	Pendampingan / Pemantauan, Asistensi, Konsultasi, dan Fasilitasi			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Jumlah Dana	380000000	Jumlah kegiatan Pendampingan,Asistensi,konsultasi dan fasilitasi yang dilaksanakan	30 Kali	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	380,000,000	418,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.36.05	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemda Enrekang			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	75000000	Jumlah kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan	4 Kali	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	75,000,000	82,500,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.36.06	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	90000000	Persentase penilaian mandiri reformasi birokrasi lingkup pemda enrekang	80%	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	90,000,000	99,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.36.07	Penanganan Ijazah Palsu ASN			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	42000000	Persentase penanganan ijazah palsu ASN	85%	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	42,000,000	46,200,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.36.08	Pengendalian dan Pengawasan Pungutan Liar (Pungli)			Kab.ENREKANG Luar Daerah	Jumlah Dana	380000000	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pungutan Liar yang dilaksanakan	12 Kali	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	380,000,000	418,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.36.09	Probity Audit			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	110000000	Jumlah Kegiatan Probity Audit yang di laksanakan	5 Kegiatan	Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	100%	110,000,000	121,000,000	Inspektorat Daerah	3
<b>1.20.1.20.08.54</b>	<b>Program Pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah</b>	<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)</b>	<b>Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik</b>		<b>persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal</b>	<b>80%</b>					<b>1,380,000,000</b>	<b>1,518,000,000</b>		
1.20.1.20.08.54.01	Reviu Penyerapan Anggaran Pemda dan Desa			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	370000000	Persentase Anggaran Pemda dan Desa yang diReviu	100%	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang	100%	370,000,000	407,000,000	Inspektorat Daerah	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			01/02/2003	01/02/2003
					1	2	3	4	5	6			7	8
1.20.1.20.08.54.02	Opname Kas BUD dan OPD			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	170000000	Jumlah Opname kas Yang dilakukan	8 kali	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang	100%	170,000,000	187,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.54.03	Pengawasan keuangan daerah secara elektronik			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	510000000	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan secara elektronik	20%	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi	100%	510,000,000	561,000,000	Inspektorat Daerah	1
1.20.1.20.08.54.04	Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan			Kab.ENREKANG	Jumlah Dana	330000000	Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan	80%	Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana korupsi	100%	330,000,000	363,000,000	Inspektorat Daerah	1
<b>Jumlah</b>											<b>10,669,600,000</b>	<b>11,736,560,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian															
1.20.09	Kecamatan Enrekang															
1.20.1.20.09.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							82,000,000	90,200,000					
1.20.1.20.09.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp20.000.000	Tersedianya Dokumen Laporan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Mulai Tingkat Dusun dan Desa / Kelurahan	1 Dokumen	Adanya Sinkronisasi Perencanaan Proses Bottom UP dari Skala Prioritas	100%	6,000,000	6,600,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp6.000.000	Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Konflik Pertanahan	4 Kasus	Terciptanya Kondisi yang Aman dan Tertib di Masyarakat	90%	6,000,000	6,600,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Pengurangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp6.000.000	Terlaksananya Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-Upaya Pengurangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	18 Desa / Kelurahan	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan di Masyarakat	2275 kk	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp20.000.000	Terbinanya Organisasi Kepemudaan, Olah Raga dan Seni	18 Desa / Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Olah Raga dan Seni	90%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp6.000.000	Terciptanya Kondisi Aman dan Tertib di Masyarakat	18 Desa / Kelurahan	Terwujudnya Daerah Aman dan Tertib di Masyarakat	90%	6,000,000	6,600,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.45.06	Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp12.000.000	Terlaksananya Pembinaan / Pemberdayaan dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat	18 Desa / Kelurahan	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	90%	12,000,000	13,200,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.45.09	Pembinaan Organisasi Perempuan			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp6.000.000	Terwujudnya Pembinaan Organisasi Perempuan	1 Organisasi	Meningkatnya Peran Perempuan di Tingkat Kecamatan	100%	6,000,000	6,600,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.45.10	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp6.000.000	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	18 Inovasi	Meningkatnya Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	6,000,000	6,600,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								60,000,000	66,000,000				
1.20.1.20.09.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp15.000.000	Terwujudnya Pembinaan Aparat Desa / Kelurahan	18 Desa / Kelurahan	Terlatihnya Aparat Desa / Kelurahan Dalam Mengelola Administrasi dan Keuangan	36 Aparat Desa / Kelurahan	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp15.000.000	Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa / Kelurahan	18 Desa / Kelurahan	Meningkatnya dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa / Kelurahan yang Tertib Administrasi	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Enrekang	1		
1.20.1.20.09.46.08	Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp15.000.000	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Program PISEW	2 Desa	Meningkatnya Pembangunan dan Pengebangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Enrekang	1		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.09.46.09	Stimulasi Pembangunan Berbasis Masyarakat			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp15.000.000	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	18 Desa / Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Enrekang	1
1.20.1.20.09.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								15,000,000	16,500,000		
1.20.1.20.09.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah			Kec.ENREKANG	Jumlah Dana	Rp15.000.000	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	18 Desa / Kelurahan	Tercapainya Target PBB dan PAD	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Enrekang	1
1.20.1.20.09.48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								2,220,828,000	2,442,910,800		
1.20.1.20.09.48.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Galonta			Kelurahan Galonta	Jumlah Dana	Rp370.138.000	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2 Paket	Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	100%	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Enrekang	1
1.20.1.20.09.48.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tuara			Kelurahan Tuara	Jumlah Dana	Rp370.138.000	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2 Paket	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	100%	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Enrekang	1
1.20.1.20.09.48.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lewaja			Kelurahan Lewaja	Jumlah Dana	Rp370.138.000	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2 Paket	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	100%	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Enrekang	1
1.20.1.20.09.48.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Juppandang			kelurahan Juppandang	Jumlah Dana	Rp370.138.000	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2 Paket	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	100%	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Enrekang	1
1.20.1.20.09.48.09	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puserren			Kelurahan Puserren	Jumlah Dana	Rp370.138.000	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2 Paket	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	100%	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Enrekang	1
1.20.1.20.09.48.10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Leoran			Kelurahan Leoran	Jumlah Dana	Rp370.138.000	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Leoran	2 Paket	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Leoran	100%	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Enrekang	1
<b>Jumlah</b>											<b>3,558,369,000</b>	<b>3,914,205,900</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian															
1.20.10	Kecamatan Alla															
1.20.1.20.10.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							75,000,000	82,500,000					
1.20.1.20.10.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RRPD				Jumlah Dana	100%	Tersedianya dokumen daftar prioritas usulan hasil musrenbang	1 dokumen	Adanya sinkronisasi perencanaan proses botton up dan top down dari skala peioritas	25,000,000	27,500,000	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				Jumlah dana	100%	terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	5 Desa 3 Kelurahan	Terselesikannya konflik pertanahan	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan				Jumlah dana	100%	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial	12 Bulan	Tertangulangnya kemiskinan dan kesejahteraan sosial	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni				Jumlah dana	100%	Terlaksananya pembinaan kepemudaan	1 Tahun	Frekuensi pembinaan pemuda melalui kompetisi olahraga dan seni	25,000,000	27,500,000	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas				Jumlah Dana	100%	Terciptanya keamanan ketertiban masyarakat	100%	Daerah aman dan terkendali	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							35,000,000	38,500,000					
1.20.1.20.10.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa									0	0	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.46.02	Pembinaan aparat desa/keurahan				Jumlah masukan	100%	Terlaksananya pembinaan aparat desa/keurahan	5 Desa/3 Kelurahan	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa/keurahan	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan									0	0	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/keurahan									0	0	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/keurahan									0	0	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/keurahan									0	0	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.46.07	Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi ADD				Jumlah Dana	100%	Terlaksananya pembinaan dan Evaluasi ADD	5 Desa/ 3 keurahan	Terbinanya desa dan keurahan dalam pengelolaan keuangan	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Alla	1			
1.20.1.20.10.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							20,000,000	22,000,000					
1.20.1.20.10.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah				Jumlah Dana	100%	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	5 desa/ 3 keurahan	PBB dan PAD tercapai sesuai target	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Alla	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			14	15
1.20.1.20.10.48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							1,410,000,000	1,551,000,000			
1.20.1.20.10.48.15	penyediaan sarana dan prasarana kelurahan kalosi				Jumlah dana	100%	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan	12 bulan	Tercapainya sarana dan prasarana kelurahan	370,138,000	814,303,600	Kecamatan Alla	3	
1.20.1.20.10.48.16	penyediaan sarana dan prasaran kelurahan Kambiolangi				Jumlah Dana	100%	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan	12 bulan	Tercapainya sarana dan prasarana kelurahan	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Alla	3	
1.20.1.20.10.48.17	penyediaan sarana dan prasarana kelurahan Buntu sugi				Jumlah dana	100%	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan	12 bulan	Tercapainya sarana dan prasarana kelurahan	0	0	Kecamatan Alla	3	
1.20.1.20.10.48.18	Biaya Operasional Kelurahan				Jumlah dana	100%	Tersedianya biaya oprasional kantor kelurahan	1 tahun	Terwujudnya aktivitas dan oprasional kantor kelurahan	299,586,000	329,544,600	Kecamatan Alla	1	
<b>Jumlah</b>										<b>2,123,500,000</b>	<b>2,335,850,000</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.20.11	Kecamatan Anggeraja														
1.20.1.20.11.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								89,000,000	97,900,000			
1.20.1.20.11.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RPKD			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Tersedianya dokumen laporan daftar prioritas usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan mulai Tk.Dusun dan Desa	100%	Adanya sinkronisasi perencanaan proses bottom up dan ntop down darim kegiatan skala prioritas	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terselesaikannya permasalahan kasus-kasus pertanahan	100%	Tertibnya dan berkurangnya permasalahan dalam wilayah yang berkasus	100%	9,000,000	9,900,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya -upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	100%	Tertangulangnya kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100%	Frekuensi pembinaan kelompok pemuda melalui kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terciptanya keamanan dan ketertiban masavarakat 1	100%	Daerah yang aman dan terkendali	95%	9,000,000	9,900,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.45.06	Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat yang melembaga dan partisipatif	100%	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara mandiri	100%	21,000,000	23,100,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								92,000,000	101,200,000			
1.20.1.20.11.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	100%	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.46.02	Pembinaan aparat desa/keurahan			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Jumlah Aparat Desa yang dibina	100%	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya pembinaan,pengawasan	100%	Meningkatnya Pemahaman Aparat Desa tentang Pengelolaan keuangan Desa	100%	17,000,000	18,700,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/keurahan			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Dokumen perencanaan dana desa/keurahan	100%	Terwujudnya dokumen perencanaan dana desa/keurahan	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Anggeraja	1	
1.20.1.20.11.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/keurahan			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Jumlah kegiatan yang dibina dan diawasi	100%	Terwujudnya jumlah kegiatan yang dibina	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Anggeraja	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.20.1.20.11.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Jumlah Laporan Dana Desa	100%	Terwujudnya laporan dana desa	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Anggeraja	1
1.20.1.20.11.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								14,000,000	15,400,000		
1.20.1.20.11.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	100%	PBB	100%	14,000,000	15,400,000	Kecamatan Anggeraja	1
1.20.1.20.11.48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								1,110,414,000	1,221,455,400		
1.20.1.20.11.48.12	Penyedia Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanete			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana kelurahan Tanete	100	Terwujudnya kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Tanete	100%	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Anggeraja	1
1.20.1.20.11.48.13	Penyedia Sarana dan Prasarana Kelurahan Lakawan			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana kelurahan Lakawan	100%	Terwujudnya kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Lakawan	100%	370,138,000	407,151,800	Kecamatan Anggeraja	1
1.20.1.20.11.48.14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mataran			Kec.ANGGERAJA	Jumlah Dana	100%	Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Mataran	100%	Terwujudnya kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Mataran		370,138,000	407,151,800	Kecamatan Anggeraja	1
<b>Jumlah</b>											<b>2,140,193,000</b>	<b>2,354,212,300</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							12
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian																
1.20.12	Kecamatan Baraka																
1.20.1.20.12.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							78,500,000	86,350,000						
1.20.1.20.12.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	30000000	Tersedianya daftar usulan prioritas	12 Desa/ 3Kelurahan	Terselenggaranya peningkatan kualitas musyawarah perencanaan	100%	30,000,000	33,000,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	9000000	Terselesaikannya permasalahan kasus pertanahan	12 Desa/ 3 Kelurahan	Terwujudnya penyelesaian permasalahan kasus pertanahan	100%	9,000,000	9,900,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	10000000	Terselesaikannya permasalahan kasus pertanahan	12 Desa/ 3Kelurahan	Terwujudnya penyelesaian permasalahan kasus pertanahan	100%	8,000,000	8,800,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	22000000	Terwujudnya pembinaan kepemudaan olah raga dan seni	75 Orang	Terwujudnya peningkatan peran pemuda di kecamatan Baraka	100%	22,000,000	24,200,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	9500000	Terlaksananya pembinaan keamanan di Kec. Baraka	7 Kasus	Persentase kon disi kantrantibmas yang kondusif	100%	9,500,000	10,450,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							65,000,000	71,500,000						
1.20.1.20.12.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	3500000	Terwujudnya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	12 Desa	Meningkatnya Kualitas Peraturan Desa tentang APBDes	100%	3,500,000	3,850,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	11500000	Terwujudnya pembinaan aparat desa / kelurahan Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan	12 Desa/3 Kelurahan 100%			11,500,000	12,650,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	12000000	Terwujudnya pembinaan, pengawasan	12 Desa/ 3 Kelurahan	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kelurahan	100%	12,000,000	13,200,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	6400000	Terwujudnya pembinaan, pengawasan perencanaan keuangan desa/kelurahan	12 Desa/3 Kelurahan	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang perencanaan keuangan desa/kelurahan keuangan desa/kelurahan	100%	6,400,000	7,040,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	5300000	Terwujudnya Pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa/kelurahan	12 Desa/3 Kelurahan	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pelaksanaan kegiatan dana desa/kelurahan	100%	5,300,000	5,830,000	Kecamatan Baraka	1			
1.20.1.20.12.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	6500000	Terwujudnya Pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa/kelurahan	12 Desa/3Kelurahan	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pelaksanaan kegiatan dana desa/kelurahan	100%	6,500,000	7,150,000	Kecamatan Baraka	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			14	15
1.20.1.20.12.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							11,000,000	12,100,000			
1.20.1.20.12.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	11000000	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah	12 Desa/3 Kelurahan	PBB	100%	11,000,000	12,100,000	Kecamatan Baraka	1
1.20.1.20.12.48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman							1,350,000,000	1,485,000,000			
1.20.1.20.12.48.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balla			Kelurahan Balla	Jumlah Dana	450000000	Terwujudnya sarana dan prasarana kelurahan Baraka	3 Lingkungan	Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan Baraka	100%	450,000,000	495,000,000	Kecamatan Baraka	1
					Jumlah Dana	450000000	Terwujudnya sarana dan prasarana kelurahan Balla	3 Lingkungan	Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan Balla	100%				
1.20.1.20.12.48.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baraka			Kelurahan Baraka							450,000,000	495,000,000	Kecamatan Baraka	1
1.20.1.20.12.48.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tomenawa			Kelurahan Tomenawa	Jumlah Dana	450000000	Terwujudnya sarana dan prasarana kelurahan Tomenawa	5 Lingkungan	Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan Tomenawa	100%	450,000,000	495,000,000	Kecamatan Baraka	1
1.20.1.20.12.53	Program Adminitrasi Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)								283,000,000	311,300,000			
1.20.1.20.12.53.01	Biaya Operasional Kelurahan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	283000000	Tersedianya biaya operasional perkantoran	3 Kelurahan	Terwujudnya biaya administrasi perkantoran	100%	283,000,000	311,300,000	Kecamatan Baraka	1
1.20.1.20.12.53.01	Biaya Operasional Kelurahan			Kec.BARAKA	Jumlah Dana	283000000	Tersedianya biaya operasional perkantoran	3 Kelurahan	Terwujudnya biaya administrasi perkantoran	100%	0	311,300,000	Kecamatan Baraka	1
<b>Jumlah</b>										<b>2,694,900,000</b>	<b>2,964,390,000</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.20.13	Kecamatan Maiwa														
1.20.1.20.13.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi								61,000,000	67,100,000			
1.20.1.20.13.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKP				Jumlah dana	20000000	Tersedianya Dokumen laporan daftar prioritas usulan kegiatan hasil msurenbang kecamatan mulai tk.dusun dan desa/kel	1 dok	Adanya sinkronisasi perencanaan proses bootn up dan top down dari kegiatan skal prioritas	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				Jumlah dana	8.000.000	Terselesaikannya permasalahan kasus tanah yang ada di desa/kel	85%	Jumlah kasus tanah menurun	100%	8,000,000	8,800,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan				Jumlah Dana	8.000.000	Terlaksananya koordinasi perumusan dan kebijakan sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	100%	Tertangulangnya kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat	100%	8,000,000	8,800,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni				Jumlah Dana	15.000.000	Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan	22 Kelompok	Frekuensi pembinaan kelompok pemuda melalui kompetensi olahraga dan seni tingkat kecamatan	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas				Jumlah dana	10.000.000	Terciptanya keamanan ketertiban masyarakat	85%	Daerah akan aman dan terkendali	100%	10,000,000	11,000,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel								132,000,000	145,200,000			
1.20.1.20.13.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa				Jumlah Dana	12.000.000	Terwujudnya evaluasi rancangan desa tentang APBDes	22 desa dan 1 kelurahan	Terselesainya evaluasi rancangan desa tentang APBDes	100%	12,000,000	13,200,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan				Jumlah Dana	20.000.000	Terwujudnya pembinaan aparat desa/kelurahan	22desa dan 1 kelurahan	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa/kel	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan				Jumlah dana	20.000.000	Terwujudnya pembinaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa/kel	21 desa dan 1 kel	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan				Jumlah dana	20.000.000	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kel	21 desa dan 1 kel	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kel	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan				Jumlah dana	20.000.000	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa/kel	21 desa dan 1 kel	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kel	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Maiwa	1	
1.20.1.20.13.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan				Jumlah dana	20.000.000	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kel	21 desa dan 1 kel	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kel	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Maiwa	1	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					1	2	3	4	5	6			7	8
1.20.1.20.13.46.07	Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi ADD				Jumlah dana	20.000.000	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dan evaluasi pengelolaan ADD	21 desa dan 1 kel	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kel	100%	20.000,000	22.000,000	Kecamatan Maiwa	1
1.20.1.20.13.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)									15,000,000	16,500,000		
1.20.1.20.13.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah				Jumlah dana	15.000.000	Tersedianya jumlah data dan potensi PBB dan PAD yang akurat	21 desa dan 1 kel	PBB dan PAD tercapai sesuai target	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Maiwa	1
1.20.1.20.13.48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1)	Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman								370,000,000	407,000,000		
1.20.1.20.13.48.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangkala				Jumlah dana	370.000.000	Terwujudnya sarana dan prasarana kelurahan bangkala	1 Kelurahan	Terlaksananya sarana dan prasarana kelurahan bangkala dengan baik	100%	370,000,000	407,000,000	Kecamatan Maiwa	1
1.20.1.20.13.53	Program Administrasi Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)									110,000,000	121,000,000		
1.20.1.20.13.53.01	Biaya Operasional Kelurahan				Jumlah dana	105.000.000	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran	12 Bulan	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran kel.bangkala	100%	105,000,000	115,500,000	Kecamatan Maiwa	1
<b>Jumlah</b>											<b>1,509,500,000</b>	<b>1,660,450,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11			14	15			
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian																
1.20.14	Kecamatan Bungin																
1.20.1.20.14.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								66,600,000	73,260,000					
1.20.1.20.14.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RRPD			Kec.BUNGIN Desa Bungin Desa Bulu Desa Baruka Desa Sawitto Desa Tallang Rilau Desa Banua	Jumlah Dana	Rp. 17.600.000,-	Jumlah Dokumen Musrenbang Yang Dihilangkan	1 Dokumen	Adanya Sinkronisasi Perencanaan Proses Bottom Up Dan Top Down Dari Kegiatan Skala Prioritas	100%	17,600,000	19,360,000	Kecamatan Bungin	1			
1.20.1.20.14.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan										7,000,000	7,700,000	Kecamatan Bungin	1			
1.20.1.20.14.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan										6,000,000	6,600,000	Kecamatan Bungin	1			
1.20.1.20.14.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni										19,000,000	20,900,000	Kecamatan Bungin	1			
1.20.1.20.14.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas										11,000,000	12,100,000	Kecamatan Bungin	1			
1.20.1.20.14.45.06	Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat										6,000,000	6,600,000	Kecamatan Bungin	1			
1.20.1.20.14.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								38,500,000	42,350,000					
1.20.1.20.14.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa										6,500,000	7,150,000	Kecamatan Bungin	3			
1.20.1.20.14.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan										9,000,000	9,900,000	Kecamatan Bungin	1			
1.20.1.20.14.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan										7,000,000	7,700,000	Kecamatan Bungin	3			
1.20.1.20.14.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan										8,000,000	8,800,000	Kecamatan Bungin	3			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			14	15
1.20.1.20.14.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan									8,000,000	8,800,000	Kecamatan Bungin	3	
1.20.1.20.14.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							8,500,000	9,350,000			
1.20.1.20.14.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah									8,500,000	9,350,000	Kecamatan Bungin	1	
<b>Jumlah</b>										<b>861,250,000</b>	<b>947,375,000</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.20.15	Kecamatan Cendana														
1.20.1.20.15.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								96,000,000	105,600,000			
1.20.1.20.15.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD			Kec.CENDANA	Tersedianya usulan rencana pembangunan berdasarkan skala prioritas	600 usulan	Tersedianya dokumen laporan prioritas usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan mulai tingkat dusun dan desa	1 dokumen	Jumlah dokumen Musrenbang yang dihasilkan	1 dokumen	25,000,000	27,500,000	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kec.CENDANA	Jumlah sengketa/kasus yang ditangani	20 kasus	Terselesaikannya masalah pertanahan yang ada di desa-desa	20 kasus	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menurunkan kasus-kasus tanah	7 Desa	14,000,000	15,400,000	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			Kec.CENDANA	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima Bantuan	365 orang	Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	100%	Menurunnya angka kemiskinan di kecamatan	100%	10,000,000	11,000,000	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni			Kec.CENDANA	Jumlah Kelompok Pemuda/masyarakat yang dibina	7 Desa	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	7 kelompok	Terwujudnya keterlibatan para pemuda pada kegiatan ditingkat kecamatan	100%	35,000,000	38,500,000	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas			Kec.CENDANA	Jumlah penanganan kantibmas	7 Desa	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat	7 Desa	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	12,000,000	13,200,000	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik								60,000,000	66,000,000			
1.20.1.20.15.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			Kec.CENDANA	Terselenggaranya evaluasi peraturan desa tentang APBDesa	7 Desa	Terlaksananya evaluasi peraturan Desa tentang APBDesa	7 Desa	Meningkatnya pelaksanaan peraturan Desa dan APBDesa secara efektif dan efisien	7 Desa	10,000,000	11,000,000	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan			Kec.CENDANA	Jumlah aparat desa yang dibina	60 orang	Terbinanya aparat desa	7 Desa	Terwujudnya pemerintahan Desa yang baik	100%	25,000,000	27,500,000	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan			Kec.CENDANA	Jumlah Kegiatan di Desa yang di bina dan diawasi	50 kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa	7 Desa	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan dana desa yang akuntabel	100%	25,000,000	27,500,000	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan			Kec.CENDANA							0	0	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan			Kec.CENDANA							0	0	Kecamatan Cendana	1	
1.20.1.20.15.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan			Kec.CENDANA							0	0	Kecamatan Cendana	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			14	15
1.20.1.20.15.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							25,500,000	28,050,000			
1.20.1.20.15.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah			Kec.CENDANA	Pesentase Realisasi PAD	100%	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7 Desa	Meningkatnya pendapatan daerah	100%	25,500,000	28,050,000	Kecamatan Cendana	1
<b>Jumlah</b>										<b>1,061,500,000</b>	<b>1,167,650,000</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							14
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian																
1.20.16	Kecamatan Curio																
1.20.1.20.16.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat							91,000,000	100,100,000						
1.20.1.20.16.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RRPD			Kec.CURIO	Jumlah Dana	25.000.000	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	11 Desa	Adanya sinkronisasi perencanaan bottom up dan top down dari kegiatan skala prioritas	100%	25,000,000	27,500,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kec.CURIO	Jumlah Dana	12.000.000	Jumlah penyelesaian konflik konflik pertanahan 1 tahun	11 Desa	Terselesainya konflik konflik pertanahan yang ada	85%	12,000,000	13,200,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 12.000.000	Terwujudnya rumusan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan	11 Desa	Tertanggulangnya kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat	100%	12,000,000	13,200,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 20.000.000	Terwujudnya Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni	1 Klp	Prekuensi pembinaan kelompok pemuda melalui kompetisi olahraga dan senitngkat kecamatan	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 12.000.000	Terwujudnya Penanganan/ Pemeliharaan Kantibmas	11 Desa	Terwujudnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	90%	12,000,000	13,200,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.45.08	Stimulasi berbasis Masyarakat			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 6.000.000	Terlaksananya kegiatan pembangunan Berbasis Masyarakat	11 Desa	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun	100%	6,000,000	6,600,000	Kecamatan Curio	3			
1.20.1.20.16.45.11	Penanganan/Pemeliharaan Konflik Sosial			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 4.000.000	Terwujudnya rasa aman dalam masyarakat	11 Desa	Terselesikannya konflik sosial di masyarakat	100%	4,000,000	4,400,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							30,000,000	33,000,000						
1.20.1.20.16.46.02	Pembinaan aparat desa/keurahan			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 10.000.000	Terlaksananya Pembinaan Aparat Desa	11 Desa	Terlaksananya pemerintahan desa secara baik	100%	10,000,000	11,000,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/keurahan			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 5.000.000	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa	11 Desa	Terlaksananya pembinaan perencanaan Pemerintahan Desa Secara Baik	100%	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/keurahan			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 5.000.000	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa	11 Desa	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan desa secara baik	100%	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/keurahan			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 10.000.000	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa dalam Pelaporan Keuangan Desa	11 Desa	Terwujudnya capaian administrasi dan Realisasi fisik	100%	10,000,000	11,000,000	Kecamatan Curio	1			
1.20.1.20.16.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							15,000,000	16,500,000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			01/02/2003	01/02/2003
					1	2	3	4	5	6			7	8
1.20.1.20.16.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah			Kec.CURIO	Jumlah Dana	Rp. 15.000.000	Terwujudnya kegiatan Intensifikasi	1 Tahun	Tercapainya target pendapatan Daerah	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Curio	1
<b>Jumlah</b>											<b>861,250,000</b>	<b>947,375,000</b>		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11			14	15			
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian																
1.20.17	Kecamatan Buntu Batu																
1.20.1.20.17.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							49,000,000	53,900,000						
1.20.1.20.17.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD									15,500,000	17,050,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan									4,500,000	4,950,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan									4,500,000	4,950,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni									17,000,000	18,700,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas									4,500,000	4,950,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.45.06	Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat									3,000,000	3,300,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							29,000,000	31,900,000						
1.20.1.20.17.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa									5,500,000	6,050,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan									5,500,000	6,050,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan									3,000,000	3,300,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan									5,500,000	6,050,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan									5,500,000	6,050,000	Kecamatan Buntu Batu	3				
1.20.1.20.17.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan									2,000,000	2,200,000	Kecamatan Buntu Batu	3				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.17.46.12	Pembinaan administrasi tata pemerintahan desa										2,000,000	2,200,000	Kecamatan Buntu Batu	1
1.20.1.20.17.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas pada seluruh lapisan Masyarakat								6,000,000	6,600,000		
1.20.1.20.17.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah										6,000,000	6,600,000	Kecamatan Buntu Batu	3
<b>Jumlah</b>											<b>795,000,000</b>	<b>874,500,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.20.18	Kecamatan Malua														
1.20.1.20.18.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik		Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan dan persentase kegiatan perangkat daerah yg dikoordinasikan	100%					82,000,000	90,200,000			
1.20.1.20.18.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RRPD			Kec.MALUA	Jumlah Dana	17000000	Terlaksananya Musrenbang dari Tk. Desa/Kel Sampai Kecamatan	8 Desa / Kel	Tersusunnya Dokumen Musrenbang RRPD	1 Dok	17,000,000	18,700,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kec.MALUA	Jumlah Dana	10000000	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan	4 Kali	Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	10,000,000	11,000,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			Kec.MALUA	Jumlah Dana	10000000	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	8 Desa/ Kel	Terwujudnya Koordinasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	8 Desa/ Kel	10,000,000	11,000,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni			Kec.MALUA	Jumlah Dana	20000000	Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni	8 Desa/ Kel	Terwujudnya Pembinaan Kepemudaan Olahraga dan Seni	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas			Kec.MALUA	Jumlah Dana	10000000	Terlaksananya Pemeliharaan Kantibmas	8 Desa/ Kel	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	85%	10,000,000	11,000,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.45.06	Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat			Kec.MALUA	Jumlah Dana	15000000	Terlaksananya Pembangunan dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat	8 Desa/ Kel	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat	90%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		Persentase kegiatan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%					50,000,000	55,000,000			
1.20.1.20.18.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			Kec.MALUA	Jumlah Dana	5000000	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	7 Desa	Terwujudnya Rancangan APBDesa yang Sesuai	100%	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan			Kec.MALUA	Jumlah Dana	15000000	Terlaksananya Pembinaan Aparat Desa / Kelurahan	8 Desa / Kel	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Aparat Desa / Kel	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan			Kec.MALUA	Jumlah Dana	15000000	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa / Kelurahan	8 Desa / Kel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa / Kelurahan Yang Sesuai dengan yang di persyaratkan	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan			Kec.MALUA	Jumlah Dana	5000000	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan dalam Perencanaan Keuangan desa / kel	8 Desa / Kel	Terwujudnya Perencanaan Keuangan Desa / Kel Yang sesuai dengan yang di persyaratkan	100%	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Malua	1	
1.20.1.20.18.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan			Kec.MALUA	Jumlah Dana	5000000	Terlaksananya Pengawasan dalam Pelaksanaan dana Desa / Kel	8 Desa / Kel	Terwujudnya Kegiatan dan Dana / Kel yang sesuai dengan yang di persyaratkan	100%	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Malua	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.20.1.20.18.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan			Kec.MALUA	Jumlah Dana	5000000	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaporan Keuangan Dana Desa / Kel	8 Desa / Kel	Terwujudnya Pelaporan Keuangan Desa / Kel yang sesuai dengan yang di persyaratkan	100%	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Malua	1
1.20.1.20.18.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik		Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Yang Dilaksanakan	80%					15,000,000	16,500,000		
1.20.1.20.18.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah			Kec.MALUA	Jumlah Dana	15000000	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	8 Desa / Kel	Terwujudnya Capaian Realisasi PAD	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Malua	1
1.20.1.20.18.48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik		Persentase Sarana Dan Prasarana yang terbangun	100%					1,000,000,000	1,100,000,000		
1.20.1.20.18.48.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Malua			Kelurahan Malua	Jumlah Dana	1000000000	Terlaksananya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Malua	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan malua yang memadai	100%	1,000,000,000	1,100,000,000	Kecamatan Malua	1
1.20.1.20.18.49	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik		Cakupan Urusan Pemberdayaan Masyarakat	100%					120,000,000	132,000,000		
1.20.1.20.18.49.01	Pelayanan Kesehatan Masyarakat			Kelurahan Malua	Jumlah Dana	20000000	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Paket	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Paket	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Malua	1
1.20.1.20.18.49.02	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan			Kelurahan Malua	Jumlah Dana	20000000	Terlaksananya Pelayanan pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	Terwujudnya Pelayanan pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Malua	1
1.20.1.20.18.49.03	Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			Kelurahan Malua	Jumlah Dana	20000000	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1 Paket	Terwujudnya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1 Paket	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Malua	1
1.20.1.20.18.49.04	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Malua	Jumlah Dana	20000000	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	1 Paket	Terwujudnya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	1 Paket	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Malua	1
1.20.1.20.18.49.05	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			Kelurahan Malua	Jumlah Dana	20000000	Terlaksananya Ketentraman dan ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Malua	1 Paket	Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Malua	1 Paket	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Malua	1
1.20.1.20.18.49.06	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menanggapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya			Kelurahan Malua	Jumlah Dana	20000000	Terlaksananya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta kejadian Luar Biasa Lainnya	1 Paket	Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta kejadian Luar Biasa Lainnya	1 Paket	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Malua	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			01/02/2003	01/02/2003	
					1	2	3	4	5	6			7	8	9
1.20.1.20.18.53	Program Administrasi Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)			Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%						150,000,000	165,000,000		
1.20.1.20.18.53.01	Biaya Operasional Kelurahan			Kelurahan Malua	Jumlah Dana	150000000	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan perkantoran	12 Bulan	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan perkantoran	100%	150,000,000	165,000,000	Kecamatan Malua	1	
<b>Jumlah</b>											<b>2,184,100,000</b>	<b>2,402,510,000</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.20.19	Kecamatan Masalle														
1.20.1.20.19.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan								67,000,000	73,700,000			
1.20.1.20.19.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RRPD			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rp. 15.000.000	Tersedianya Dokumen Laporan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Mulai TK. Dusun dan Desa	1 Dokumen	Adanya sinkronisasi perencanaan proses bottom up dan top down dari kegiatan skala prioritas	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Masalle	1	
1.20.1.20.19.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rp. 5.000.000	Terselesaikannya Permasalahan kasus Pertanahan	4 Kasus	Tertibnya dan berkurangnya Permasalahan dalam Wilayah yang berkasus	90%	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Masalle	1	
1.20.1.20.19.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			Kec.MASALLE							0	0	Kecamatan Masalle	1	
1.20.1.20.19.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rp. 20.000.000	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	32 Kelompok	Frekwensi Pembinaan Kelompok Pemuda melalui kompetisi olahraga dan seni tingkat Kecamatan	100%	20,000,000	22,000,000	Kecamatan Masalle	1	
1.20.1.20.19.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rp. 5.000.000	Terciptanya Keamanan ketertiban Masyarakat	12 Bulan	Daerah akan aman dan terkendali	90%	5,000,000	5,500,000	Kecamatan Masalle	1	
1.20.1.20.19.45.06	Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rp. 3.500.000	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pemberdayaan Masyarakat	6 Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pemantauan Pemberdayaan Masyarakat	90%	3,500,000	3,850,000	Kecamatan Masalle	1	
1.20.1.20.19.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel								71,500,000	78,650,000			
1.20.1.20.19.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rp. 2.000.000	Tersusunnya Rancangan Peraturan Desa APBD Desa	6 Desa	Terwujudnya Rancangan Peraturan APB Desa	100%	2,000,000	2,200,000	Kecamatan Masalle	3	
1.20.1.20.19.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rp. 4.000.000	Terlaksananya Pembinaan Aparat Desa/ Kelurahan	6 Kali	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%	4,000,000	4,400,000	Kecamatan Masalle	1	
1.20.1.20.19.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rap. 3.000.000	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan Meningkatkan Pemahaman Aparat Desa Tentang Pengelolaan ADD/DD	6 Kali 100%			3,000,000	3,300,000	Kecamatan Masalle	1	
1.20.1.20.19.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan										0	0	Kecamatan Masalle	3	
1.20.1.20.19.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan										0	0	Kecamatan Masalle	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			12	13
1.20.1.20.19.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							5,000,000	5,500,000			
1.20.1.20.19.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah			Kec.MASALLE	Jumlah Dana	Rp. 1.500.000	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	6 Desa	PBB	100%	1,500,000	1,650,000	Kecamatan Masalle	1
<b>Jumlah</b>											<b>655,000,000</b>	<b>720,500,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian															
1.20.20	Kecamatan Baroko															
1.20.1.20.20.45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							53,000,000	58,300,000					
1.20.1.20.20.45.01	Penyelenggaraan urusan Musrenbang RPKD			Kec.BAROKO			Tersedianya dokumen laporan daftar prioritas usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan mulai tingkat dusun dan desa	1 Dokumen	Adanya sinkronisasi perencanaan botton up dan top down dari kegiatan skala prioritas	100%	13,000,000	14,300,000	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.45.02	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kec.BAROKO			Terselesaikannya kasus pertanahan	6 Kasus	Tertib dan berkurangnya permasalahan dalam wilayah yang berkasus	100%	8,000,000	8,800,000	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.45.03	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			Kec.BAROKO			Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	5 Desa	Tertunggulangnya kemiskinan dan kesenjangan masyarakat	100 5	8,000,000	8,800,000	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.45.04	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni			Kec.BAROKO			Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	8 Kelompok	Frekuensi pembinaan kelompok pemuda melalui kompetensi olah raga dan seni tingkat kecamatan	100%	16,000,000	17,600,000	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.45.05	Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas			Kec.BAROKO			Terlaksananya pembinaan ketertiban masyarakat	5 Desa	Daerah aman dan terkendali	85 5	8,000,000	8,800,000	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.46	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel								33,000,000	36,300,000				
1.20.1.20.20.46.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			Kec.BAROKO			Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahah desa	5 Desa	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan dana desa	100%	9,000,000	9,900,000	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.46.02	Pembinaan aparat desa/kelurahan			Kec.BAROKO			Terlaksananya pembinaan aparat desa/kelurahan	5 Desa	meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	100 5	9,000,000	9,900,000	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.46.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan			Kec.BAROKO			Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi alokasi dana desa	5 Desa	Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan dana desa	100%	15,000,000	16,500,000	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.46.04	Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan										0	0	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.46.05	Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan										0	0	Kecamatan Baroko	1		
1.20.1.20.20.46.06	Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan										0	0	Kecamatan Baroko	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11			14	15
1.20.1.20.20.47	Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik							8,500,000	9,350,000			
1.20.1.20.20.47.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah			Kec.BAROKO			Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	5 Desa	PBB dan PAD tercapai sesuai target	100%	8,500,000	9,350,000	Kecamatan Baroko	1
<b>Jumlah</b>										<b>810,000,000</b>	<b>891,000,000</b>			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003	
					6	7	8	9	10	11							14
1.19	Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
1.19.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
1.19.1.19.02.23	Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Tersedianya perangkat regulasi terkait Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana Tanggap darurat dan Pasca bencana							2,580,000,000	2,838,000,000						
1.19.1.19.02.23.01	Penyusunan Indeks Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana			Kab.ENREKANG		100%	Tersusunnya Indeks ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	1 Dok	Tersediannya laporan Indeks ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	100%	150,000,000	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.02	Penyusunan Bencana Komitjensi Longsor/Banjir			Kab.ENREKANG							100,000,000	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.03	Penguatan Peran media dalam Menumbuhkan Kesiapsiagaan untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam PB			Kab.ENREKANG		100%	Jumlah media massa dan media sosial yang digunakan menyebarluaskan informasi kebencanaan	5 Media	Tersedianya informasi kebencanaan melalui media massa dan media sosial	100%	150,000,000	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.04	Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)			Kab.ENREKANG		100%	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk dan terbina	7 desa/kelurahan	Terbentuknya desa tangguh bencana	100%	200,000,000	220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.05	Penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Penyebar Luasan Informasi PB			Kab.ENREKANG		100%	Jumlah dokumen kajian resiko bencana dan alat informasi bencana	1 Dok/ 3 Alat peraga	tersedianya dokumen kajian resiko bencana dan alat informasi bencana	100%	200,000,000	220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.06	Penguatan Forum Enrekang Tangguh (Pemerintahan,Masyarakat, dan Dunia Usaha)			Kab.ENREKANG		100%	Jumlah peserta forum enrekang tangguh bencana	100 Orang	Terbentuknya forum enrekang tangguh bencana	100%	80,000,000	88,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana (KMPB)			Kab.ENREKANG							100,000,000	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.08	Penyusunan Peta Rawan dan Risiko Bencana Kabupaten Enrekang			Kab.ENREKANG		100%	Jumlah dokumen peta rawan dan resiko bencana	1 Dok	Tersedianya peta rawan dan resiko bencana	100%	300,000,000	330,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.10	Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Slaga Bencana			Kab.ENREKANG							200,000,000	220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.11	Penyusunan SOP dan PROTAP Kebencanaan			Kab.ENREKANG							150,000,000	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.12	Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi Kebencanaan			Kab.ENREKANG							100,000,000	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.13	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana			Kab.ENREKANG							650,000,000	715,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			
1.19.1.19.02.23.14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi Bencana			Kab.ENREKANG		100%	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	6 Kelompok	Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana (KMPB)	100%	75,000,000	82,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				01/02/2003	01/02/2003
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.19.1.19.02.24	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Tersedianya perangkat regulasi terkait Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana Tanggap darurat dan Pasca bencana								1,065,000,000	1,171,500,000		
1.19.1.19.02.24.02	Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Korban Bencana			Kab.ENREKANG							250,000,000	275,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.24.06	Fasilitas Operasionalisasi Satgas/Team Reaksi Cepat (TRC)			Kab.ENREKANG							250,000,000	275,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.24.07	Pemberdayaan Pusdatin/Pusdalops dan Pengendalian Operasional PB			Kab.ENREKANG							125,000,000	137,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.24.08	Gladi dan Simulasi Manajemen Kedaruratan Bencana			Kab.ENREKANG							100,000,000	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.24.09	Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik			Kab.ENREKANG							80,000,000	88,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.24.10	Sosialitas dan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) dan SOP Kedaruratan dan Logistik			Kab.ENREKANG							100,000,000	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.24.11	Workshop Gladi Ruang (Table Top Exercise-TTX) Kedaruratan dan Logistik			Kab.ENREKANG							85,000,000	93,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.24.12	Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik dan Peralatan			Kab.ENREKANG							75,000,000	82,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
1.19.1.19.02.25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Tersedianya perangkat regulasi terkait Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana Tanggap darurat dan Pasca bencana								10,240,000,000	11,264,000,000		
1.19.1.19.02.25.01	Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			Kab.ENREKANG		100%	Tersusunnya dokumen rencana kontijensi longsor/banjir	1 dok	tersediannya dokumen rencana kontijensi longsor/banjir	100%	60,000,000	66,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.25.02	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Pasca Bencana			Kab.ENREKANG							10,000,000,000	11,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.25.03	Verifikasi, Investigasi Kerusakan Kerugian Pasca Bencana			Kab.ENREKANG							100,000,000	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
1.19.1.19.02.25.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			Kab.ENREKANG							80,000,000	88,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
<b>Jumlah</b>											<b>15,957,800,000</b>	<b>17,553,580,000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.19	Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
1.19.1.19.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)			Terwujudnya Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan						253,450,000	278,795,000			
1.19.1.19.01.15.01	Pemantauan/Pengawasan Orang Asing NGO Lembaga Asing dan Narkoba			Kab.ENREKANG			Tersedianya Tim Pemantauan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Narkoba	12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan	Terbentuknya Tim Pemantauan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Narkoba	12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan	68,450,000	75,295,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1
1.19.1.19.01.15.02	Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			Kab.ENREKANG			Tersedianya Data Potensi Konflik Sosial	3 Kali Rapat, 1 Rencana Aksi	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial	3 Kali Rapat, 1 Rencana Aksi	35,000,000	38,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1
1.19.1.19.01.15.04	Penguatan dan Peningkatan kewaspadaan Dini masyarakat			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan	45,000,000	49,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1
1.19.1.19.01.15.06	Workshop Pencegahan Paham Radikalisme Terorisme			Kab.ENREKANG			Presentase Paham Radikalisme Terjadi Penurunan	1 Kali	Meningkatnya Pengetahuan Pencegahan Radikalisme Terorisme	1 Kali	40,000,000	44,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1
1.19.1.19.01.15.07	Pengawasan dan pengendalian ketahanan ekonomi			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Pengendalian Koordinasi Ekonomi Sosial	12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan	Terciptanya Pengendalian Koordinasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan	30,000,000	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1
1.19.1.19.01.15.08	Penanganan masalah Strategis Daerah			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring dengan Seluruh Satuan Intelijen	12 Kali Rapat, 1 Laporan	Meningkatnya Koordinasi dan Monitoring Dengan Seluruh Satuan Intelijen	12 Kali Rapat, 1 Laporan	35,000,000	38,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1
1.19.1.19.01.17	Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)			Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat		Terlaksananya Forum Koordinasi dan Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Forum Pembauran Kebangsaan, Tokoh Agama, Masyarakat Toko Pemuda dan Ormas LSM Atas Kepedulian Terhadap Wawasan Kebangsaan				474,000,000	521,400,000			
1.19.1.19.01.17.01	Peningkatan Toleransi Dalam Kehidupan Beragama			Kab.ENREKANG			Terpeliharanya Keharmonisan Antar Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat	30 Org/Kali	Terlaksananya Toleransi Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	30 Org/Kali	53,000,000	58,300,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3
1.19.1.19.01.17.07	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 Bulan	Tingkat Kewaspadaan Dini Masyarakat Meningkat	12 Bulan	70,000,000	77,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2021						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					01/02/2003	01/02/2003
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.19.1.19.01.17.08	Rakornis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)			Kab.ENREKANG			Terciptanya Rakornis (FKUB)	1 Kali	Terlaksananya Rakornis (FKUB)	1 Kali	28,000,000	30,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1		
1.19.1.19.01.17.10	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)			Kab.ENREKANG			Tersedianya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	12 Bulan	Terciptanya Forum Pembauran Kebangsaan	12 Bulan	30,000,000	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1		
1.19.1.19.01.17.11	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama			Kab.ENREKANG			Prosentase Kerukunan Umat Beragama	12 Bulan	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	12 Bulan	35,000,000	38,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1		
1.19.1.19.01.17.12	Dialog Tokoh Lintas Agama Bersama Pemerintah Daerah			Kab.ENREKANG			Terciptanya Harmonisasi Antar Tokoh Agama dan Pemerintah Daerah	100%	Terlaksananya Dialog Antar Umat Beragama	100%	30,000,000	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3		
1.19.1.19.01.17.14	Seminar Talk Show, Diskusi, Peningkatan Wawasan Kebangsaan			Kab.ENREKANG			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	Terwujudnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	58,000,000	63,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3		
1.19.1.19.01.17.17	Pentas Seni dan Budaya Festival dan Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan			Kab.ENREKANG			Meningkatnya Partisipasi Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	Terwujudnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	80,000,000	88,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3		
1.19.1.19.01.17.18	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat Konsensi Kebangsaan			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat Konsensi Kebangsaan	1 Kali, 1 Laporan	Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat Konsensi Kebangsaan	1 Kali, 1 Laporan	50,000,000	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3		
1.19.1.19.01.17.19	Pelatihan Bela Negara Bagi ASN dan Aparatur Desa			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Bela Negara Bagi ASN dan Aparatur Desa	1 Kali, 1 Laporan	Terwujudnya Bela Negara Bagi ASN dan Aparatur Desa	1 Kali, 1 Laporan	40,000,000	44,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3		
1.19.1.19.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3)	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat		Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat						230,000,000	253,000,000				
1.19.1.19.01.21.10	Pemantauan dan Pembinaan Ormas, LSM, dan Parpol			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Dialog Politik Bersama Parpol, Ormas, LSM dan Tokoh Masyarakat	1 Data Base	Terpantaunya Ormas, LSM dan Parpol	1 Data Base	49,000,000	53,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1		
1.19.1.19.01.21.11	Bimtek Pelaporan Bagi Pengelola Pertanggungjawaban Bantuan Parpol			Kab.ENREKANG			Meningkatnya Pemahaman Pengurus Parpol Dalam Penyusunan SPJ	1 Tahun	Tersusunnya SPJ yang Akuntabel sesuai Aturan	1 Tahun	50,000,000	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3		
1.19.1.19.01.21.13	Pembinaan Dialog Politik Pemuda			Kab.ENREKANG			Terlaksananya Dialog Politik Pemuda	1 Kali	Terciptanya Dialog Politik Pemuda	1 Kali	36,000,000	39,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3		
1.19.1.19.01.21.14	Verifikasi dan Pemutahiran Data Ormas, LSM dan Parpol di Kab. Enrekang			Kab.ENREKANG			Tersedianya Data Jumlah Ormas, LSM dan Data Parpol di Kab. Enrekang	1 Data Base	Terdeteksinya Kegiatan Seluruh Parpol, Ormas dan LSM	1 Data Base	36,000,000	39,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3		
1.19.1.19.01.21.19	Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol			Kab.ENREKANG			Terciptanya Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Parpol	1 Kali Verifikasi	Terseleksinya Persyaratan Permohonan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Parpol	1 Kali Verifikasi	59,000,000	64,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1		
<b>Jumlah</b>											<b>2,531,250,000</b>	<b>2,784,375,000</b>				

**LAMPIRAN HASIL DESK POKOK-POKOK PIKIRAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**POKOK - POKOK PIKIRAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Abd. Wahid Arsyad SH	REHAB TK ABA DAN TK PERTIWI KALOSI KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pendidikan dan Budaya	0
2	Abd. Wahid Arsyad SH	MOBILER NIS KALOSI KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pendidikan dan Budaya	0
3	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGADAAN AIR BERSIH DESA BAROKO	Kec.BAROKO	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
4	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGADAAN AIR BERSIH KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
5	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGECORAN JALAN SMK KALOSI KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	0
6	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGECORAN JL. DUSUN DEDEKAN DESA SUMILLAN	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	0
7	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGECORAN JL. DUSUN TAULO-DUSUN MALELE DESA TAULO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	0
8	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGECORAN JL. DUSUN TO CEMBA DESA MATA ALLO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	0
9	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGECORAN JL. SETAPAK DUSUN TO ENDUK DESA MATA ALLO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	0
10	Abd. Wahid Arsyad SH	PENINGKATAN JALAN LANDOKADAWANG BAWAH DESA BENTENG ALLA UTARA	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	0
11	Abd. Wahid Arsyad SH	PENINGKATAN JALAN LO KO BULAN DESA BENTENG ALLA UTARA	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	0
12	Abd. Wahid Arsyad SH	PENINGKATAN JALAN PARARUK DESA TAULO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	0
13	Abd. Wahid Arsyad SH	DRAINASE LINGKUNGAN KALOSI BARAT KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
14	Abd. Wahid Arsyad SH	DRAINASE LINGKUNGAN KALOSI SELATAN KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
15	Abd. Wahid Arsyad SH	DRAINASE LINGKUNGAN KALOSI UTARA KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
16	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGADAAN BAK SAMPAH KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Lingkungan Hidup	0
17	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGADAAN TERNAK KERBAU DESA MEKKALA	Kec.CURIO	Dinas Peternakan dan Perikanan	0
18	Abd. Wahid Arsyad SH	PENGECORAN JALAN TANI KAMBIOLANGI SELATAN KEL. KAMBIOLANGI	Kec.BAROKO	Dinas Pertanian	0
19	Abd. Wahid Arsyad SH	PENINGKATAN JL. TANI DUSUN PEKAJO DESA MEKKALA	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	0

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. BAU-BETTENG	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
2	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. DANTE-LOCOK, TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
3	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. LOLIANG-TANGRU	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
4	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. MALUA-BERE	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	600,000,000
5	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. PAREDEAN-BESE, DESA BUNTU BATUAN	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
6	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. PASUI-MADATAH	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
7	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. PATUANG-SMA BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	700,000,000
8	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. PELLAPPO-PANGKA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
9	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. POROS BARUKA-BULO	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
10	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. POROS LEMO-TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
11	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. POROS LOMBON-KP. BARU	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
12	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. POROS PARINDING-PARANGIAN	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
13	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. RUAS BELALANG-POTOKKULIN	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
14	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. RUAS PASUI-GURAH	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
15	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. RUAS TAMPANG-PELAPPO, TIROWALI	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
16	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. SERREN - DURI-DURI	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	750,000,000
17	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENINGKATAN JL. TANTIRO-RANTE PADANG	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
18	Abdurrachman Zulkarnain SE	PEMB. JEMBATAN BAU-TANA BULAN	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
19	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENYELESAIAN JEMBATAN RANTE MARIO	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
20	Abdurrachman Zulkarnain SE	JL. LINGK. TANJUN KENDENAN	Kec.BARAKA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	300,000,000
21	Abdurrachman Zulkarnain SE	PEMB. TUGU KEC. BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	500,000,000
22	Abdurrachman Zulkarnain SE	DRAINASE DALAM KOTA BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
23	Abdurrachman Zulkarnain SE	DRAINASE DUSUN PANGBARANI, JANGGURARA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
24	Abdurrachman Zulkarnain SE	IRIGASI DANTE KALACIRI	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
25	Abdurrachman Zulkarnain SE	TALUD DUSUN SALONGGE, DESA KENDENAN	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
26	Abdurrachman Zulkarnain SE	TALUD SDN 136 PASADANAN	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
27	Abdurrachman Zulkarnain SE	TALUD SDN 36 BUNTU LAMBA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
28	Abdurrachman Zulkarnain SE	TALUD/BRONJON LINGK. ULAH BATU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
29	Abdurrachman Zulkarnain SE	PEMB. LAPANGAN TENNIS BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	200,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
30	Abdurrachman Zulkarnain SE	JL. USAHA TANI BAU-TONGLO PARINDING	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	2,147,483,647
31	Abdurrachman Zulkarnain SE	JL. USAHA TANI BUNTU LINTIK LANGAE	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	100,000,000
32	Abdurrachman Zulkarnain SE	JL. USAHA TANI PANOPI JANGGURARA	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	1,500,000,000
33	Abdurrachman Zulkarnain SE	JL. USAHA TANI PAREDEAN	Kec.MALUA	Dinas Pertanian	200,000,000
34	Abdurrachman Zulkarnain SE	JL. USAHA TANI TANA BULAN	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	500,000,000
35	Abdurrachman Zulkarnain SE	PENGADAAN PUPUK U/KELOMPOK TANI	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	1,000,000,000



NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN GEDUNG TK MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Pendidikan dan Budaya	0
2	Ali Suryaji Kartono	PENGADAAN MOBIL PUSTU MALALIN - PUDETE DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Kesehatan	0
3	Ali Suryaji Kartono	BENDUNGAN IRIGASI SAWAH DESA KARRANG	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
4	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN KRIF PENGARAH ARUS SUNGAI PUDETE DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
5	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN KRIP PENGARAH ARUS SUNGAI MALALIN-PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
6	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN KRIF PENGARAH ARUS SUNGAI PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
7	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN SUMUR MALALIN - PUDETE DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
8	Ali Suryaji Kartono	PENGADAAN SARANA AIR BERSIH MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
9	Ali Suryaji Kartono	PENGADAAN MCK MALALIN DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
10	Ali Suryaji Kartono	PENGEORAN JALAN BELONG - BABA DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
11	Ali Suryaji Kartono	PENGEORAN JL. PUDUKKU	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
12	Ali Suryaji Kartono	PENGEORAN JL. SALU LIANG MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
13	Ali Suryaji Kartono	PENGEORAN/PENINGKATAN JL. ANTAR DESA PUDETE - BISSAKAN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
14	Ali Suryaji Kartono	PENGEORAN/PENINGKATAN JL. POROS PUDETE - MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
15	Ali Suryaji Kartono	PENGEORAN/PENINGKATAN JL. TANI BAKA - KABERE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	2,147,483,647
16	Ali Suryaji Kartono	PENINGKATAN JALAN DESA TUNGKA	Kab.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
17	Ali Suryaji Kartono	PENINGKATAN JALAN KARRANG - MALLAGA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	800,000,000
18	Ali Suryaji Kartono	PENINGKATAN JALAN KELURAHAN LEORAN	Kab.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
19	Ali Suryaji Kartono	PENINGKATAN JALAN PINANG, KEL.LEORAN	Kab.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
20	Ali Suryaji Kartono	PENINNGKATAN JALAN DESA CEMBA	Kab.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
21	Ali Suryaji Kartono	RABAT BETON JL. DUSUN CENDANA ATAS DUSUN CENDANA ATAS	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
22	Ali Suryaji Kartono	RABAT BETON JL. DUSUN CENDANA BAWAH DUSUN CENDANA BAWAH	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
23	Ali Suryaji Kartono	RABAT BETON JL. PENGHUBUNG BULO-LEBANG DUSUN BABA SELATAN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
24	Ali Suryaji Kartono	RABAT BETON JL. PENGHUBUNG DESA CENDANA DAN DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
25	Ali Suryaji Kartono	JEMBATAN GANTUNG DESA TUNGKA	Kab.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
26	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN BENTANGAN JEMBATAN GANTUNG BABA-BULO DUSUN BABA SELATAN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	800,000,000
27	Ali Suryaji Kartono	JEMBATAN GANTUNG PUDUKKU - BOLONG DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	1,200,000,000
28	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON MALALIN DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
29	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON PUDETE DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
30	Ali Suryaji Kartono	PENGERASAN JL. PENGHUBUNG DUSUN CENDANA ATAS DAN DUSUN CENDANA BAWAH	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
31	Ali Suryaji Kartono	PEMASANGAN LAMPU JALAN MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
32	Ali Suryaji Kartono	PERBAIKAN LAMPU JALAN MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
33	Ali Suryaji Kartono	PENGERUKAN TANAH MASJID DESA KARRANG	Kec.CENDANA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	50,000,000
34	Ali Suryaji Kartono	IRIGASI PUDUKKU DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
35	Ali Suryaji Kartono	BRONJONG LANJUTAN SALU BURU AREA SAWAH DAN PEMUKIMAN WARGA DUSUN BABA DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
36	Ali Suryaji Kartono	BRONJONG LANJUTAN SALU BURU AREA SAWAH DAN PEMUKIMAN WARGA DUSUN BABA DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
37	Ali Suryaji Kartono	BRONJONG SUNGAI DESA KARRANG	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
38	Ali Suryaji Kartono	BRONJONG SUNGAI PINANG KEL. LEORAN	Kab.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
39	Ali Suryaji Kartono	DRAINASE TALUD JL. PENGHUBUNG DESA CENDANA DAN DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
40	Ali Suryaji Kartono	DRAINASE IRIGASI SAWAH DESA KARRANG	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
41	Ali Suryaji Kartono	DRAINASE OSSO - BAKA DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
42	Ali Suryaji Kartono	DRAINASE OSSO - BAKA DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
43	Ali Suryaji Kartono	PEMASANGAN BRONJONG MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
44	Ali Suryaji Kartono	PEMASANGAN BRONJONG PUDETE DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
45	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN BRONJONG PUDETE DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
46	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN DEKKER MALALIN- PUDETE DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
47	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN DRAINASE BULO DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
48	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN DRAINASE MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
49	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN DRAINASE PEMBUANGAN PUDETE - MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
50	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN DRAINASE PUDETE - MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
51	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KOLONGAN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
52	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI MALALIN DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
53	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PUDETE - MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
54	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN TALUD PUDETE - MALALIN DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
55	Ali Suryaji Kartono	PENGECORAN JL. OSSO-BAKA DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
56	Ali Suryaji Kartono	PENGERASAN JL. TANI TOMALLEWAN MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
57	Ali Suryaji Kartono	PERINTISAN JL. TANI MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
58	Ali Suryaji Kartono	TALUD IRIGASI SAWAH, TALLANG, DUSUN BABA SELATAN DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	750,000,000
59	Ali Suryaji Kartono	TALUD SUNGAI KECIL AREA PEMUKIMAN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
60	Ali Suryaji Kartono	BEDAH RUMAH DESA KARRANG	Kec.CENDANA	Dinas Sosial	150,000,000
61	Ali Suryaji Kartono	BEDAH RUMAH KEL. LEORAN MASSEMBA	Kab.ENREKANG	Dinas Sosial	150,000,000
62	Ali Suryaji Kartono	EMBUNG-EMBUNG TOMALLENG DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100,000,000
63	Ali Suryaji Kartono	LAPANGAN SEPAK BOLA PUDUKKU	Kec.CENDANA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100,000,000
64	Ali Suryaji Kartono	LAPANGAN SEPAK BOLA TOMALLENG DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	0
65	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN LAPANGAN FUTSAL DESA MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	0
66	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN BIBIT IKAN EMAS MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Peternakan dan Perikanan	0
67	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN BIBIT IKAN MUJAIR MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Peternakan dan Perikanan	0
68	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN PENGEMBANGAN SAPI BALI DESA MALALIN	Kec.CENDANA	Dinas Peternakan dan Perikanan	0
69	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN TERNAK KAMBING MALALIN PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Peternakan dan Perikanan	0
70	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN PENGADAAN MESIN PEMOTONG PADI UNTUK BUMDES DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	500,000,000
71	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN BIBIT DURIAN MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
72	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN BIBIT JAGUNG MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
73	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN BIBIT PADI MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
74	Ali Suryaji Kartono	BANTUAN BIBIT RAMBUTAN MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
75	Ali Suryaji Kartono	EMBUNG-EMBUNG BAKA DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	500,000,000
76	Ali Suryaji Kartono	PENGERASAN JALAN TANI PERIKANAN - BABA DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	2,147,483,647

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
77	Ali Suryaji Kartono	PENGERASAN JL. TANI PECA BOLONG DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	1,000,000,000
78	Ali Suryaji Kartono	PENINGKATAN JL. TANI BOLONG - TOMALLEWAN DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	2,147,483,647
79	Ali Suryaji Kartono	PERINTISAN JL. TANI BAKA KABERE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	200,000,000
80	Ali Suryaji Kartono	PERINTISAN JL. TANI BOLONG - PUKKASI DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	500,000,000
81	Ali Suryaji Kartono	PERINTISAN JL. TANI BOLONG - PUKKASI DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	300,000,000
82	Ali Suryaji Kartono	EMBUNG - EMBUNG BOLONG DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
83	Ali Suryaji Kartono	EMBUNG - EMBUNG DESA KARRANG	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
84	Ali Suryaji Kartono	EMBUNG-EMBUNG BOLONG DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	100,000,000
85	Ali Suryaji Kartono	EMBUNG-EMBUNG DESA KARRANG	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	400,000,000
86	Ali Suryaji Kartono	EMBUNG-EMBUNG KEL. LEORAN	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	50,000,000
87	Ali Suryaji Kartono	PEMBANGUNAN JL. TANI LAITING DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	100,000,000
88	Ali Suryaji Kartono	PENGEORAN/PENINGKATAN JL. TANI DESA ONGKO	Kec.MAIWA	Dinas Pertanian	0
89	Ali Suryaji Kartono	PENGERASAN JL. TANI ASORONG OSSO DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	300,000,000
90	Ali Suryaji Kartono	PENGERASAN JL. TANI BUTTU DEA DUSUN BABA UTARA	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	100,000,000
91	Ali Suryaji Kartono	PERINTISAN JALAN TANI DESA TUNGKA	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
92	Ali Suryaji Kartono	PERINTISAN JALAN TANI MALALIN - PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
93	Ali Suryaji Kartono	PERINTISAN JL. TANI BULO DUSUN BABA SELATAN	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	70,000,000
94	Ali Suryaji Kartono	PERINTISAN JL. TANI PUDETE	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0
95	Ali Suryaji Kartono	TALUD JL. TANI PECA BOLONG DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	1,000,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Andi Aswan, SE	PAGAR SDN 192 LANDOKE DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pendidikan dan Budaya	0
2	Andi Aswan, SE	REHAB PAGAR/TALUD SD 39 CAKKE LAKAWAN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pendidikan dan Budaya	100,000,000
3	Andi Aswan, SE	TALUD SD TOKPAE DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pendidikan dan Budaya	0
4	Andi Aswan, SE	REHAB IRIGASI KASSA DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
5	Andi Aswan, SE	PEMBANGUNAN IRIGASI RADAR DESA LANGDA, BUNTU BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
6	Andi Aswan, SE	SAB LANDOKE (LANJUTAN) DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	135,000,000
7	Andi Aswan, SE	PENGASPALAN (HOTMIX) BANGKAN-BELALANG DESA LANGDA, BUNTU BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	350,000,000
8	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. BOTTO BALLA DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
9	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. CAKKE-LAKAWAN KEL. LAKAWAN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
10	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. KOTA-BUNTU AMPANG PEKALOBAN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
11	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. LO KO-ERAN BATU JANGGURARA, BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
12	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. PALANGKEA-TAMBILI DESA ONGKO, MAIWA	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
13	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. POROS DAWEK-DANTE DURIAN DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
14	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. POROS URU-TALIMBANGAN DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
15	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. SAROMBON-TANETE KEL. TANETE, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
16	Andi Aswan, SE	PENGADAAN LAMPU JALAN DESA LEDAN DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
17	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. BUBUN SALAK (JALIN) LAKAWAN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
18	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. KATANGKA-RADAK DESA LANGDA, BUNTU BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
19	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JL. LINGKAR BENTENG BANUA BAMBA PUANG	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
20	Andi Aswan, SE	PENATAAN LOKASI MASJID ALHADITS CAKKE, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
21	Andi Aswan, SE	DRAINASE BAMBA, GURAH BT MONDONG, BT. BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	70,000,000
22	Andi Aswan, SE	DRAINASE BANGKAN-BELALANG DESA LANGDA, BUNTU BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
23	Andi Aswan, SE	DRAINASE JL. BUBUN SALAK LAKAWAN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
24	Andi Aswan, SE	DRAINASE KANTOR CAMAT ANGGERAJA LAKAWAN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
25	Andi Aswan, SE	DRAINASE LANDOKE RAK BUNG	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
26	Andi Aswan, SE	DRAINASE POROS DULANG KOLAI DESA DULANG	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	0

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
27	Andi Aswan, SE	DRAINASE POROS TALIMBANGAN DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
28	Andi Aswan, SE	DRAINASE RUKO SOSSOK (BARAT SPBU SOSSOK) MATARAN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
29	Andi Aswan, SE	PEMBANGUNAN IRIGASI GENGGE DESA LANGDA, BUNTU BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
30	Andi Aswan, SE	PLAT DEKKER POROS DANTE MALUA-TALIMBANGAN DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
31	Andi Aswan, SE	TALUD SALU PASARAN TANETE, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	0
32	Andi Aswan, SE	BEDAH RUMAH DESA BT. MONDONG BT. BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Sosial	200,000,000
33	Andi Aswan, SE	LAPANGAN VOLLEY KASAMBI TINDALUN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	50,000,000
34	Andi Aswan, SE	KUBE SAPI KELOMPOK TANI BOTTO BALLA DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Peternakan dan Perikanan	50,000,000
35	Andi Aswan, SE	KUBE TERNAK KAMBING, BUNTU RIRI BT MONDONG, BT. BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Peternakan dan Perikanan	0
36	Andi Aswan, SE	KUBE TERNAK SAPI, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Peternakan dan Perikanan	40,000,000
37	Andi Aswan, SE	BANTUAN CULTIVATOR U/ KELOMPOK TANI KAB. ENREKANG	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	70,000,000
38	Andi Aswan, SE	CULTIVATOR KELOMPOK TANI BANGGA, BUNGGAWAI DESA BUBUNLAMBA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	0
39	Andi Aswan, SE	CULTIVATOR KELOMPOK TANI SIPATURU DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0
40	Andi Aswan, SE	EMBUNG-EMBUNG KEL. TANI BAMBAPUANG	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	0
41	Andi Aswan, SE	EMBUNG-EMBUNG KELOMPOK TANI KAB. ENREKANG	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	200,000,000
42	Andi Aswan, SE	EMBUNG-EMBUNG KELOMPOK TANI WAISARRAN, RACAK DESA MAMPU	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	50,000,000
43	Andi Aswan, SE	EMBUNG-EMBUNG KT KARTI BAMBAPUANG DESA BAMBAPUANG	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	0
44	Andi Aswan, SE	EMBUNG-EMBUNG SIPATUR (LANDOKE) DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0
45	Andi Aswan, SE	HELLER KOPI LATIMOJONG, POTOK ULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	30,000,000
46	Andi Aswan, SE	JUT BUNTU RIRI-AMPIRING (BT. MONDONG) BT MONDONG, BT. BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	100,000,000
47	Andi Aswan, SE	PEMIMPIL JAGUNG LATIMOJONG, LAKAWAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	25,000,000
48	Andi Aswan, SE	PENGEORAN JUT BUNTU KIKI DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0
49	Andi Aswan, SE	PENINGKATAN JUT LANDOKE BARIBATU DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0
50	Andi Aswan, SE	MESIN SEGEL UKMK SAMBEL MERCON MASPUL BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
51	Andi Aswan, SE	BANTUAN UMKM CONTINUE SELLER (PENGEMAS PLASTIK KOPI) KELOMPOK TANI SIPATURU PASUI DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Asrul Anas Nasir	PERINTISAN JL. DARI KUBURAN LIANG KE LAPANGAN, KEL. TUARA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
2	Asrul Anas Nasir	PEMERIHARAAN/PERBAIKAN JL ASPAL (JL B. SAWAH)	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
3	Asrul Anas Nasir	PENGEORAN JL. LORONG LIANG KE PEKUBURAN, KEL. TUARA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
4	Asrul Anas Nasir	PENGEORAN JL. RUAS PENJA KUMADANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
5	Asrul Anas Nasir	PENGERASAN JALAN TANI BAMPU	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
6	Asrul Anas Nasir	PENGERASAN JALAN TANI DARI RANDANGAN KE	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
7	Asrul Anas Nasir	PERINTISAN JALAN RANDANGAN-KULINJANG, KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
8	Asrul Anas Nasir	JEMBATAN GANTUNG BATILI TEMBUS RANDANGAN, KEL. GALONTA-KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
9	Asrul Anas Nasir	DEKKER BATILI LUAR, KEL. GALONTA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
10	Asrul Anas Nasir	PENGERASAN JL DARI KACA CEMBUNG KE JEMBATAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
11	Asrul Anas Nasir	JALAN LINGKUNGAN BAMBA (BELAKANG KANTOR KEL. PUSERREN)	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
12	Asrul Anas Nasir	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN TALAGA, KEL. JUPPANDANG	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
13	Asrul Anas Nasir	DEKKER BATU-BATU, DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
14	Asrul Anas Nasir	DEKKER CEMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
15	Asrul Anas Nasir	DEKKER RUAS KUMADANG TUNGKA, DESA KARUENG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
16	Asrul Anas Nasir	DRAINASE BATILI LUAR	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
17	Asrul Anas Nasir	DRAINASE JL LING. LAPPORAN, DESA LEMBAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
18	Asrul Anas Nasir	DRAINASE JL. MALALIN PUDETE, DESA MALALIN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
19	Asrul Anas Nasir	DRAINASE JL. MENUJU LAPANGAN KULINJANG, KEL. TUARA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
20	Asrul Anas Nasir	DRAINASE PAKKALARIAN, KEL. GALONTA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
21	Asrul Anas Nasir	PEMBANGUNAN DRAINASE, KEL. LEWAJA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
22	Asrul Anas Nasir	PEMBANGUNAN DRAINASE/PENGEORAN JL. LINGKUNGAN DESA LANGGOGO	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
23	Asrul Anas Nasir	PEMBUATAN DRAINASE JL. BUTTU SAWAH, KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
24	Asrul Anas Nasir	PEMBUATAN TALUD SUNGAI MATA ALLO, KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
25	Asrul Anas Nasir	TALUD JALAN BUTTU SAWAH	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
26	Asrul Anas Nasir	TALUD RUAS GAREGE-BARANGANNA, DESA LEMBANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
27	Asrul Anas Nasir	PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI CEMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
28	Asrul Anas Nasir	PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI LEMBANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
29	Asrul Anas Nasir	PENGADAAN BIBIT SAPI BALI	Kec.ENREKANG	Dinas Peternakan dan Perikanan	75,000,000
30	Asrul Anas Nasir	PENGADAAN KAMBING KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Peternakan dan Perikanan	50,000,000



NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENAMBAHAN RUANG KELAS TK ABAH DAN TALUD DESA BONTONGAN DUSUN KAL. 1	Kec.BARAKA	Dinas Pendidikan dan Budaya	50,000,000
2	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	IRIGASI KALOH RANDAN-PELAPPO BONTONGAN, PELAPPO	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	400,000,000
3	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	IRIGASI LOPI-SARURAN DESA BONTONGAN, BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
4	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PEMBUATAN IRIGASI BUSUKAN-SALUTONGGO DESA KADINGE, SIPUKU	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
5	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PIPA PENGAIRAN AIR BERSIH 2 INCI DIGANTI 3 INCI	Kec.BARAKA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
6	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PIPA PENGAIRAN AIR BERSIH 2 INCI DIGANTI 3 INCI BONTONGAN, PELAPPO	Kec.BARAKA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	800,000,000
7	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PROYEK PENGADAAN AIR BERSIH KARANGAN DESA BONTONGAN	Kec.BARAKA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	1,000,000,000
8	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENGECORAN JALAN SIMPANG TIGA LATIMOJONG, ANGIN-ANGIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	700,000,000
9	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENGECORAN JL. BONE-BONE KE PENDOKESAN DESA BONE-BONE	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
10	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENGECORAN JL. BUNTU RIDING BONTONGAN, KALIMBUA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
11	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENYELESAIAN JALAN POROS LEDAN-LATIMIJONG DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
12	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENYELESAIAN JL. POROS LATIMOJONG DESA LATIMOJONG	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
13	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PROYEK JALAN PEKUBURAN (BUNTU TUDING) BONTONGAN, KALIMBUA I	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	400,000,000
14	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENGECORAN JL. ALTERNATIF KAMIRI-PANTAWANAN DESA BONTONGAN, BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
15	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	DRAINASE BANGKAN (JALAN POROS) DESA TIROWALI, BANGKAN	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
16	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PEMBUATAN TALUD JL. POROS SALUBOKO DESA BONTO	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	80,000,000
17	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	TANGGUL LAP. SEPAK BOLA RESSO BONTONGAN, KALIMBUA	Kec.BARAKA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	500,000,000
18	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENGADAAN SAPI TERNAK DESA BONTONGAN	Kec.BARAKA	Dinas Peternakan dan Perikanan	250,000,000
19	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	DESA TIROWALI, BANGKANJL. TANI BANGKAN-PERSAWAHAN SUNGAI	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	250,000,000
20	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	JALAN TANI PARIGI-SARURAN DESA BONTONGAN, BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	500,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
21	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	JL. TANI PEKAPA-PANGKUNG BONTONGAN, KALIMBUA	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	100,000,000
22	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PEMBUATAN EMBUNG-EMBUNG DUSUN LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	600,000,000
23	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PENGECORAN JL TANI RANO-KALAWEAN BONTONGAN, DS PELAPPO	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	400,000,000
24	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PIPANISASI DARI GARUNTU-DURI DESA TIROWALI, BANGKAN	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	300,000,000
25	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	BANTUAN BIBIT BAWANG DESA KADINGE	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	700,000,000
26	Dedi Abrar Hamsir S.Kom	PEMBUATAN OBJEK WISATA LO KO BUBAU DESA KADINGE,ASAAM	Kec.BARAKA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	0

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Dra. Hj. Daya	PEMBANGUNA PAGAR SMP SATAP 9 MAIWA	Kec.MAIWA	Dinas Pendidikan dan Budaya	50,000,000
2	Dra. Hj. Daya	PEMBANGUNAN PAGAR SMP 2 MAIWA, TUNCUNG	Kec.MAIWA	Dinas Pendidikan dan Budaya	100,000,000
3	Dra. Hj. Daya	PEMBANGUNAN INTAKE (SUMUR) AIR BERSIH SALOKALAMA DESA BOIYA	Kec.MAIWA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	50,000,000
4	Dra. Hj. Daya	PEMBANGUNAN INTAKE AIR BERSIH DESA TUNCUNG (SUMUR, SOLAR CELL, POMPA, BAK RESERVOIR)	Kec.MAIWA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	800,000,000
5	Dra. Hj. Daya	PENGECORAN JALAN PARAJA DESA TUNCUNG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
6	Dra. Hj. Daya	PENGECORAN JL. POROS TUNCUNG-TAPONG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
7	Dra. Hj. Daya	PERINTISAN JL. PERKUBURAN DESA TUNCUNG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
8	Dra. Hj. Daya	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA MANGKAWANI	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
9	Dra. Hj. Daya	PEMBANGUNAN DRAINASE JL. POROS TUNCUNG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
10	Dra. Hj. Daya	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGK. BARINGIN	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
11	Dra. Hj. Daya	PERBAIKAN TALUD JEMBATAN POROS TUNCUNG-TAPONG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	350,000,000
12	Dra. Hj. Daya	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA KEC. MAIWA	Kec.MAIWA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	150,000,000
13	Dra. Hj. Daya	PENINGKATAN JALAN TANI DI DESA TUNCUNG	Kec.MAIWA	Dinas Pertanian	75,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Drs. Muh. Ismail Hamid	PENINGKATAN JALAN POROS PADANG MALUA-PUDETTE	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
2	Drs. Muh. Ismail Hamid	PINGKATAN JL. POROS	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
3	Drs. Muh. Ismail Hamid	PINGKATAN JL. POROS MEMBURA-KUNYI	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
4	Drs. Muh. Ismail Hamid	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG ENREKANG-SUDDA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
5	Drs. Muh. Ismail Hamid	PENINGKATAN JALAN MELATI-SWISS	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
6	Drs. Muh. Ismail Hamid	PEMBANGUNAN EMBUNG-EMBUNG	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	100,000,000
7	Drs. Muh. Ismail Hamid	PEMBANGUNAN EMBUNG-EMBUNG DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	50,000,000
8	Drs. Muh. Ismail Hamid	PENINGKATAN JL. TANI JUMPANG TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	300,000,000
9	Drs. Muh. Ismail Hamid	PENINGKATAN JL. USAHA TANI DESA PINANG	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	250,000,000
10	Drs. Muh. Ismail Hamid	PERINTISAN JL. USAHA TANI DESA PINANG	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	100,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	H. Chairul Tahir SE	PENGEORAN JALAN DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
2	H. Chairul Tahir SE	PENGEORAN JALAN DI MENDATTE DESA MENDATTE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
3	H. Chairul Tahir SE	PENGEORAN JALAN KADINGE TANETE KEL. TANETE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
4	H. Chairul Tahir SE	JALAN LINGKUNGAN DESA BONTO	Kec.MALUA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
5	H. Chairul Tahir SE	JALAN LINGKUNGAN DESA MENDATTE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
6	H. Chairul Tahir SE	JALAN LINGKUNGAN DESA SARURAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
7	H. Chairul Tahir SE	JALAN LINGKUNGAN DESA SINGKI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
8	H. Chairul Tahir SE	JALAN LINGKUNGAN DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
9	H. Chairul Tahir SE	JALAN LINGKUNGAN DESA TINDALUN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
10	H. Chairul Tahir SE	JALAN LINGKUNGAN KEL. MATARAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
11	H. Chairul Tahir SE	JALAN LINGKUNGAN KEL. TANETE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
12	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA BAMBA PUANG	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	60,000,000
13	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA BATUNONI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	120,000,000
14	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA BONTO	Kec.MALUA	Dinas Pertanian	60,000,000
15	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA DULANG	Kec.MALUA	Dinas Pertanian	60,000,000
16	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA MENDATTE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	60,000,000
17	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA SALUDEWATA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	60,000,000
18	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA SINGKI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	60,000,000
19	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA TALLUNGTONDOK	Kec.MALUA	Dinas Pertanian	60,000,000
20	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG DESA TINDALUN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	60,000,000
21	H. Chairul Tahir SE	EMBUNG-EMBUNG KEL. TANETE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	60,000,000
22	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA BAMBA PUANG	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
23	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA BATUNONI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
24	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA BONTO	Kec.MALUA	Dinas Pertanian	100,000,000
25	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA MENDATTE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
26	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA SALUDEWATA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
27	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA SARURAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
28	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA SINGKI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
29	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
30	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI DESA TINDALUN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
31	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI KEL. MATARAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
32	H. Chairul Tahir SE	JALAN USAHA TANI KEL. TANETE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
33	H. Chairul Tahir SE	KOMPONINASI/PERPIPAAN DESA KADINGE	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	100,000,000
34	H. Chairul Tahir SE	KOMPONISASI/PERPIPAAN DESA BATUNONI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
35	H. Chairul Tahir SE	KOMPONISASI/PERPIPAAN DESA SARURAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
36	H. Chairul Tahir SE	KOMPONISASI/PERPIPAAN DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
37	H. Chairul Tahir SE	KOMPONISASI/PERPIPAAN KEL. TANETE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Hairul, ST	PENGEORAN JL. MALANYING BUNTU RIRI SANGLEMPONGAN, CURIO	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
2	Hairul, ST	PENGERASAN JL. BUNTU RANDAN-LIBA DESA CURIO, CURIO	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
3	Hairul, ST	PENGERASAN JL. BUNTU RANDANG-BUNTU BENTENG DESA CURIO, CURIO	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
4	Hairul, ST	PENINGKATAN JL. BOLANG-BIBANG DESA BOLANG	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
5	Hairul, ST	PENINGKATAN JL. BOLANG-TAULO DESA BOLANG	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
6	Hairul, ST	PENINGKATAN JL. DEDEKAN-SUMILLAN DESA SUMILLAN	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	600,000,000
7	Hairul, ST	PENINGKATAN JL. KALIMBUA-GARUTUK KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
8	Hairul, ST	PEMBANGUNAN JEMBATAN RANTE TONGGO, PEPANDUNGAN	Kec.MASALLE	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
9	Hairul, ST	PEMBANGUNAN JEMBATAN SALAGA KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
10	Hairul, ST	PEMB. JL. LINGK. MASJID AL IKHLAS-PEKUBURAN PARARUK KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
11	Hairul, ST	PENGEORAN JL. LINGKUNGAN DUSUN LIMBONG	Kec.CURIO	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
12	Hairul, ST	PENGEORAN JL. LINGKUNGAN KALOSI TIMUR KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
13	Hairul, ST	PENGEORAN JL. PARARUK-TAULO KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
14	Hairul, ST	PEMBANGUNAN JUT BUNTU RIRI	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	150,000,000
15	Hairul, ST	PERINTISAN JL. TANI DUSUN KARRA DESA TALLUNG URA	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	150,000,000
16	Hairul, ST	PERINTISAN JUT BUNTU KIKI DESA SUMBANG	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	100,000,000
1	Hawa S.Pi	PEMBAANGUNAN RUANG KELAS BARU TK PERTIWI	Kec.BARAKA	Dinas Pendidikan dan Budaya	60,000,000
2	Hawa S.Pi	PEMBANGUNAN DUA RUANG KELAS BARU TK ABA LOCOK DUSUN LOCOK, BATU NONI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pendidikan dan Budaya	100,000,000
3	Hawa S.Pi	PEMBANGUNAN PAGAR KELOMPOK BERMAIN LOKO JARUN, MAMPU	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pendidikan dan Budaya	100,000,000
4	Hawa S.Pi	PENGASPALAN POROS MAMPU TOCEMBA SALUDEWATA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
5	Hawa S.Pi	PENGERASAN JL. PESAMPELAN-BUNTU BUNU TAMPUN, PANDUNG BATU	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
6	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. BUNTU AMPANG-KOTA PEKALOBAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
7	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. KOTA-SIPATE DUSUN KOTA, PEKALOBAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
8	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. LING. LINGKAR BUNGGAWAI BUNGGAWAI, BUBUN LAMBA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
9	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. LINGK. DUSUN BETTENG BETTENG, DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	140,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
10	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. LINGK. DUSUN BULO	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
11	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. LOCOK-BO DI LOCOK, BATU NONI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
12	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. MALIMONGAN-LEMBONG MALIMONGAN, PEKALOBEAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
13	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. POROS DAWEK-DANTE DURIAN LEDAN, BUNTU BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
14	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. SIPATE-LEMBONG SIPATE, PEKALOBEAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
15	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. TAMPUN SEGITIGA BANTI TAMPUN, PANDUNG BATU	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
16	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. TANI SUMPILI-TUMPANG KEL. MATARAM	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
17	Hawa S.Pi	PENINGKATAN RUAS JL. BUNU-KOTA BUNU, BUBUN LAMBA,	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
18	Hawa S.Pi	PEMB. JEMBATAN GANTUNG DUSUN LO KO JARUN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	400,000,000
19	Hawa S.Pi	PENGADAAN LAMPU TENAGA SURYA TINDALUN, ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	250,000,000
20	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. LING. DUSUN LOKO JARUN DUSUN LO KO JARUN, MAMPU	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
21	Hawa S.Pi	DRAINASE DUSUN BETTENG BETTENG, DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
22	Hawa S.Pi	DRAINASE DUSUN TAMPUN TAMPUN, PANDUNG BATU	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
23	Hawa S.Pi	PEMASANGAN BRONJONG/TALUD POROS BUNGAWAI MARENA BUBUN LAMBA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
24	Hawa S.Pi	PEMB. EMBUNG-EMBUNG ANGGERAJA, BARAKA, BUNTU BATU	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	500,000,000
25	Hawa S.Pi	PENGADAAN BIBIT BAWANG MERAH ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	300,000,000
26	Hawa S.Pi	PENGADAAN MESIN PENGOLAHAN KOPI MAMPU, PEKALOBEAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	200,000,000
27	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. TANI DUSUN BUNTU PASSE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
28	Hawa S.Pi	PENINGKATAN JL. TANI DUSUN LOMBON DESA KADINGEH	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	30,000,000
29	Hawa S.Pi	POMPANISASI ANGGERAJA, BARAKA, BUNTU BATU	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	500,000,000
30	Hawa S.Pi	POMPANISASI DESA TINDALUN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
31	Hawa S.Pi	PENGADAAN ALAT2 PERTANIAN DAPIL 2	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	300,000,000
32	Hawa S.Pi	PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN DESA LEDAN, BUNTU BATU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20,000,000



<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Henri	TALUD SDN 147 PELALI DESA BUNTU PEMA	Kec.CURIO	Dinas Pendidikan dan Budaya	75,000,000
2	Henri	PEMB. JL. DESA BUNTU BARANA-MALIBA DESA BUNTU BARANA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
3	Henri	PEMB. JL. DESA LANDO KADAWANG-PAPOPORAN DESA BENTENG ALLA	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
4	Henri	PEMB. JL. PEKUBURAN MALANYNYING DESA SANGLEMPONGAN	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
5	Henri	PEMBANGUNAN JL. RANTE-PAMENTA DESA PEBALORAN	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
6	Henri	PENINGKATAN JL. PELALI-MINANGA DESA PEBALORAN	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
7	Henri	PENINGKATAN JL. PELALI-PEKAJO DESA MEKKALA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
8	Henri	DRAINASE DALAM KOTA PELALI DESA BUNTU PEMA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
9	Henri	DRAINASE DESA SALASSA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
10	Henri	TALUD LAPANGAN SEPAK BOLA PELALI	Kec.CURIO	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	0
11	Henri	TALUD LAPANGAN SEPAK BOLA PELALI DESA BUNTU PEMA	Kec.CURIO	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Hj. Nurul Hikmah	PENGEORAN DARI KUBURAN KE TUARA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
2	Hj. Nurul Hikmah	PENGEORAN JALAN POLONG LEORAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
3	Hj. Nurul Hikmah	PENGEORAN JL POROS PAPI-BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
4	Hj. Nurul Hikmah	PENGERASAN JALAN MARIDI-PASANG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	0
5	Hj. Nurul Hikmah	PENGERASAN JL. TONDO BATU-GEWAN SURAKAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
6	Hj. Nurul Hikmah	PERINTISAN JL. PERBATASAN KE BALANGGARANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
7	Hj. Nurul Hikmah	RABAT BETON DUSUN SINAR BUTTU TEANG, DESA BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
8	Hj. Nurul Hikmah	RABAT BETON LEBANI	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
9	Hj. Nurul Hikmah	RABAT BETON PARIWANG	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
10	Hj. Nurul Hikmah	JALAN LINGKUNGAN MALAUWE	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	50,000,000
11	Hj. Nurul Hikmah	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BABA UTARA, DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
12	Hj. Nurul Hikmah	PENGEORAN JL. LINGKUNGAN BAMPU DUSUN BAMPU, DESA KARUENG	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
13	Hj. Nurul Hikmah	PENGEORAN JL. LINGKUNGAN DUSUN BAMPU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
14	Hj. Nurul Hikmah	PENINGKATAN JL. LINGKUNGAN DUSUN GARUTU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
15	Hj. Nurul Hikmah	PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BAMPU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
16	Hj. Nurul Hikmah	BRONJONG LEBANI	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	0
17	Hj. Nurul Hikmah	DRAINASE LEBANI	Kec.MAIWA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
18	Hj. Nurul Hikmah	DRAINASE MANGKAWANI	Kec.CENDANA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
19	Hj. Nurul Hikmah	PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BAMPU, DESA KARUENG	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
20	Hj. Nurul Hikmah	PENGADAAN SARANA OLAHRAGA SEPAK BOLA DAN VOLLEY DESA CENDANA	Kec.ENREKANG	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	10,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
21	Hj. Nurul Hikmah	PEMBUATAN KANDANG SAPI BABA UTARA, DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Peternakan dan Perikanan	0
22	Hj. Nurul Hikmah	EMBUNG - EMBUNG PUDUKKU	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	60,000,000
23	Hj. Nurul Hikmah	PENGADAAN MESIN PEMIPIL JAGUNG DESA BUTTU BATU, DUSUN GARUTU	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	0
24	Hj. Nurul Hikmah	PENGADAAN MESIN PEMIPIL JAGUNG DESA TALLU BAMBA, KEC. ENREKANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	70,000,000
25	Hj. Nurul Hikmah	PENGADAAN SAPI PERAH DESA PANETTE	Kec.ENREKANG	Dinas Peternakan dan Perikanan	100,000,000
26	Hj. Nurul Hikmah	PENGERASAN JL. TANI KE BOKO	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	500,000,000
27	Hj. Nurul Hikmah	PERCETAKAN SAWAH DAN PENAMBAHAN/ PERLUASAN SAWAH	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	0

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Ikrar Eran Batu ST	MOBILER KANTOR KECAMATAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
2	Ikrar Eran Batu ST	PEMBANGUNAN AULA KANTOR KECAMATAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
3	Ikrar Eran Batu ST	REHAB KANTOR DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
4	Ikrar Eran Batu ST	PEMBANGUNAN TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pendidikan dan Budaya	0
5	Ikrar Eran Batu ST	PENAMPUNGAN AIR BERSIH MADATAH, DESA LUNJEN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
6	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN MESIN POMPA AIR (YANNAS)	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
7	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
8	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN PIPA 1 1/4	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
9	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN PIPA 3/4 AIR BERSIH	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
10	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN POMPA AIR SIMIZU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
11	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN SANCING	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
12	Ikrar Eran Batu ST	PEMBUATAN WC UMUM DESA BUNTU MONDONG, DUSUN PASONGKEN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	50,000,000
13	Ikrar Eran Batu ST	TALUD DUSUN LAMBAK, DESA LANGDA	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
14	Ikrar Eran Batu ST	JL. LINGKAR DANTE GURA	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
15	Ikrar Eran Batu ST	PENINGKATAN JALAN LORONG SMP SATAP BARAKA	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	0
16	Ikrar Eran Batu ST	PENINGKATAN JALAN POROS DESA POTOKULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
17	Ikrar Eran Batu ST	DEKKER POROS KECAMATAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
18	Ikrar Eran Batu ST	PEMBUATAN DEKKER DUSUN PASONGKEN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
19	Ikrar Eran Batu ST	PENGECORAN JL. POROS DANTE MALUA-URU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
20	Ikrar Eran Batu ST	PERINTISAN JL BUBUN KANI, SINGKI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	0
21	Ikrar Eran Batu ST	RABAT BETON LAMPUNG-RABUNG	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
22	Ikrar Eran Batu ST	RABAT BETON PEWA-BUNTU GALLANG, PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
23	Ikrar Eran Batu ST	DRAINASE DANTE BAGIAN BELAKANG DUSUN GURA	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
24	Ikrar Eran Batu ST	PERBAIKAN IRIGASI KASSA, DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
25	Ikrar Eran Batu ST	PERBAIKAN IRIGASI URU	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
26	Ikrar Eran Batu ST	JALAN TANI BUNTU TONGA-ULUH KALO DUSUN MATA WAI, DESA POTOKULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	100,000,000
27	Ikrar Eran Batu ST	JALAN TANI LAMBE-BUNTU TAGARI DUSUN BELALANG	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	100,000,000
28	Ikrar Eran Batu ST	JALAN TANI TOKI-GARUTUK DUSUN LAMBAK	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
29	Ikrar Eran Batu ST	PEMBUATAN JL. TANI GURA NUNANG-MILA	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	200,000,000
30	Ikrar Eran Batu ST	CULTIVATOR/DOMPENG DUSUN BT. PESSE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	0
31	Ikrar Eran Batu ST	EMBUNG-EMBUNG DESA PASUI	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0
32	Ikrar Eran Batu ST	EMBUNG-EMBUNG DUSUN SINGKI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
33	Ikrar Eran Batu ST	JALAN TANI KUBURAN DESA SINGKI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	140,000,000
34	Ikrar Eran Batu ST	JL. TANI PASSOPA-NUNANG DUSUN GURA	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	200,000,000
35	Ikrar Eran Batu ST	MESIN POMPA AIR (ALCOM) DUSUN BATU RAPE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	0
36	Ikrar Eran Batu ST	MESIN POMPA AIR/PIPA (ALCOM)	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	50,000,000
37	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN CULTIVATOR DESA LUNJEN	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	0
38	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN PIPA PERTANIAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0
39	Ikrar Eran Batu ST	PENGEORAN JALAN TANI BUNTU RIRI-KALEWAI, DESA BUNTU MONDONG	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	100,000,000
40	Ikrar Eran Batu ST	PENGEORAN JALAN TANI DESA BUNTU RIRI-AMPIRING, DESA BUNTU MONDONG	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	100,000,000
41	Ikrar Eran Batu ST	PENGEORAN JL TANI LOCONG-PASONGKEN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	100,000,000
42	Ikrar Eran Batu ST	PENGEORAN JL. TANI MILA LOKKO BEKE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
43	Ikrar Eran Batu ST	PENGEORAN JL. TANI SALU BAMBA- BUNTU PIPIK	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	100,000,000
44	Ikrar Eran Batu ST	PENGERASAN JALAN TANI MADATAH, LUNJEN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0
45	Ikrar Eran Batu ST	PERPIPAAN DUSUN SINGKI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	50,000,000
46	Ikrar Eran Batu ST	PERPIPAAN MESIN SANCING, DESA SINGKI, DUSUN BATU RAPE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	50,000,000
47	Ikrar Eran Batu ST	EMBUNG-EMBUNG DUSUN CENDANA, DESA SIAMBO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	0
48	Ikrar Eran Batu ST	PEMBUATAN EMBUNG-EMBUNG ALLOAN, DESA LEDAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	0
49	Ikrar Eran Batu ST	PENAMPUNGAN UNTUK PERTANIAN MADATAH, DESA LUNJEN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	0
50	Ikrar Eran Batu ST	PENGADAAN MESIN AIR, DESA SIAMBO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	0
51	Ikrar Eran Batu ST	PENGEORAN JL. TANI BURONTONG, DUSUN URU	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	40,000,000
52	Ikrar Eran Batu ST	PERINTISAN JL. TANI LAUBUN, DUSUN URU	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	30,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Ir. Djayadi Suleman	PENGADAAN AIR BERSIH (SPAM) BATU RAMPUN (CAKKE)	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
2	Ir. Djayadi Suleman	JALAN LINGKUNGAN PEKUBURAN SINGKI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
3	Ir. Djayadi Suleman	PENGERASAN JALAN KOTU DESA MENDATTE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
4	Ir. Djayadi Suleman	PENGERASAN JALAN TINDALUN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
5	Ir. Djayadi Suleman	PENINGKATAN JALAN DESA BAMBAPUANG	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
6	Ir. Djayadi Suleman	PENINGKATAN JALAN DESA MENDATTE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
7	Ir. Djayadi Suleman	PENINGKATAN JALAN DESA SARURAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
8	Ir. Djayadi Suleman	PENINGKATAN JALAN DESA SARURAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
9	Ir. Djayadi Suleman	PENINGKATAN JALAN LEMPAN-SIPATE DESA SALU DEWATA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
10	Ir. Djayadi Suleman	PENINGKATAN JALAN SERREN KEC. MALUA	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
11	Ir. Djayadi Suleman	LANJUTAN JEMBATAN DESA MAMPU	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	600,000,000
12	Ir. Djayadi Suleman	LANJUTAN JEMBATAN GANTUNG DESA SARURAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
13	Ir. Djayadi Suleman	JALAN LINGKUNGAN DESA PEKALOBAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
14	Ir. Djayadi Suleman	JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN TANETE	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
15	Ir. Djayadi Suleman	JALAN LINGKUNGAN KOTA BELALANG DESA LANGDA	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
16	Ir. Djayadi Suleman	DRAINASE KOTA ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
17	Ir. Djayadi Suleman	LAPANGAN FUTSAL CAKKE KEC. ANGGERAJA	Kec.ANGGERAJA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	200,000,000
18	Ir. Djayadi Suleman	CEK DAM DESA KOTU DESA BAMBAPUANG	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pertanian	100,000,000
19	Ir. Djayadi Suleman	PERINTISAN SALU LANDO-MILA BARAKA (BONTONGAN)	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	100,000,000
1	Ir. Runjaya Kasmidi	PENGADAAN SAB DESA PUNDI LEMO	Kec.CENDANA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
2	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMB. JL. USAHA TANI, DUSUN TAPPUAN DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	0
3	Ir. Runjaya Kasmidi	PENINGKATAN JALAN DESA CEMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
4	Ir. Runjaya Kasmidi	RABAT BETON BABA SELATAN DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
5	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DUSUN GARUTU, DESA BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
6	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN JL. LINGKUNGAN DUSUN GARETTONG, DESA BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
7	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN JL. LINGKUNGAN DUSUN LANGGOGO	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
8	Ir. Runjaya Kasmidi	PENGADAAN JL. LINGKUNGAN DUSUN BABA, DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
9	Ir. Runjaya Kasmidi	DRAINASE BULO BABA SELATAN, DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	70,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
10	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN BRONJONG DESA CEMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
11	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN BRONJONG DESA TAULAN	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
12	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN DEKKER KEL. PUSERREN KM 3	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
13	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BATILI, KEL. GALONTA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
14	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN PENJA, DESA KARUENG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
15	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN DRAINASE JL. BT. SAWAH KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
16	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN DRAINASE KEL. JUPPANDANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
17	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN TALUD KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
18	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMB. JL. USAHA TANI DUSUN GALUNG DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
19	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMB. JL. USAHA TANI DUSUN LAPPORAN DESA TEMBAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
20	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN EMBUNG-EMBUNG DUSUN KULINJANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	50,000,000
21	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI DESA CEMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
22	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
23	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI DUSUN GARUTU, DESA BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
24	Ir. Runjaya Kasmidi	PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI, DUSUN LEMBANG DESA LEMBANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
25	Ir. Runjaya Kasmidi	PENGADAAN PENGGILINGAN JAGUNG DUSUN BABA	Kec.CENDANA	Dinas Pertanian	50,000,000
26	Ir. Runjaya Kasmidi	PENGADAAN PENGGILINGAN JAGUNG DUSUN LAPIN, DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	50,000,000
27	Ir. Runjaya Kasmidi	PENGADAAN PIPA DUSUN BAGEAN, DESA LEMBANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	50,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. BELAJEN TIMUR-TETE PAMPANG KEL. KAMBIOLANGI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
2	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. KARAMPAK-PEBU DESA SUMILLAN	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
3	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. KIKI-RANO DESA PANA	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
4	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. LAJJA LINTIK DESA SUMILLAN	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
5	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. LINTIK-BARO DESA SUMILLAN	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
6	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. LUMBAJA - PASAK DALLE DESA BENTENG ALLA	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
7	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. PEBU-SAMBEKO DESA SUMILLAN	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
8	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. PELALI-SANGTEMPE DESA BUNTU PEMA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
9	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. REDAK-TO LAMUNAN DESA PATONGLOAN,	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
10	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. SUDU-BALOBOAN DESA BUNTU SUGI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
11	Ir. Saharuddin	PENINGKATAN JL. TANI TO ENDUK-BT. TOLONG DESA MATA ALLO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
12	Ir. Saharuddin	EMBUNG-EMBUNG DESA RAMPUNAN	Kec.MASALLE	Dinas Pertanian	100,000,000



NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Ismail Jafar	PEMB. TALUD DAN PAGAR KESDES TOKKONAN	Kec.ENREKANG	Dinas Kesehatan	0
2	Ismail Jafar	PEMB.PAGAR SMPN 6 ENREKANG, DESA RANGA	Kec.ENREKANG	Dinas Pendidikan dan Budaya	0
3	Ismail Jafar	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PUSTU, DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Kesehatan	0
4	Ismail Jafar	PEMB. TALUD SUNGAI GARUTU, DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
5	Ismail Jafar	PEMB. JL. TANI RUAS WALA-NOSU DUSUN RANGA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
6	Ismail Jafar	SARANA AIR BERSIH DUSUN BANUA, DESA RANGA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
7	Ismail Jafar	PELEBARAN JALAN RUAS KUKKU - RANGA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
8	Ismail Jafar	PEMB. JALAN KALUPPINI-SAMMA, DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
9	Ismail Jafar	PENGECORAN JALAN RUAS LELATING-LEMBONG, DESA RANGA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
10	Ismail Jafar	PENGERASAN JALAN GARUTU-LONDA DESA BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
11	Ismail Jafar	PENGERASAN JALAN TANI LINGKAR BUTTU PESE DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
12	Ismail Jafar	PENGERASAN JL. KALUPPINI-SARONG JALUR KARIANGO	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
13	Ismail Jafar	PENINGKATAN JALAN BATU ADAT DUSUN TONDON	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
14	Ismail Jafar	PENINGKATAN JALAN RUAS SAMMA-DATTE BOLA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
15	Ismail Jafar	PENINGKATAN JALAN SARONG-DADEKO	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
16	Ismail Jafar	PENINGKATAN JALAN SARONG-KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
17	Ismail Jafar	PENINGKATAN JALAN SINAIAN-SAMMA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
18	Ismail Jafar	PENINGKATAN JALAN TANI KAJAO-SARASA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
19	Ismail Jafar	PENINGKATAN JL. MALAWWE-SARONG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
20	Ismail Jafar	PENINGKATAN JL. PASA LABA-SALU BUKU DUSUN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	350,000,000
21	Ismail Jafar	PENINGKATAN JL. RUAS BAGEAN-LEMBANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
22	Ismail Jafar	PENINGKATAN JL. RUAS LEBANG-BISSAKAN DESA LEBANG, KEC. CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
23	Ismail Jafar	PENINGKATAN JL. TUNGKA JEMBATAN GANTUNG DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
24	Ismail Jafar	PERINTISAN JL. RUAS BUTTU BATU-KALIDONG DESA BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
25	Ismail Jafar	PERLUASAN JL. RUAS CENDANA BAWAH KEC. CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
26	Ismail Jafar	PERINTISAN JL, RUAS KALUPPINI-TOBALU, DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
27	Ismail Jafar	REHABILITASI JL. DEPAN KANTOR DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
28	Ismail Jafar	JEMBATAN SALU LOENG DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
29	Ismail Jafar	JALAN LINGKUNGAN CEMBA (JALAN LINGKAR) DESA CEMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
30	Ismail Jafar	PEMBANGUNAN PEDESTRIAN/TROTOAR DALAM KOTA ENREKANG	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
31	Ismail Jafar	PEMB. BALAI PERTEMUAN DUSUN SAMMA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
32	Ismail Jafar	PEMB. GEDUNG PERTEMUAN DATTE BOLA, DESA RANGA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
33	Ismail Jafar	PEMB. GEDUNG PERTEMUAN LEMBONG II	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
34	Ismail Jafar	PENYELESAIAN PEMB. GEDUNG PERTEMUAN DATTE	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
35	Ismail Jafar	REHAB BALAI PERTEMUAN DUSUN DATA, DESA TOKKONAN	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
36	Ismail Jafar	REHAB GERDUNG PERTEMUAN DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
37	Ismail Jafar	DRAINASE DEPAN MASJID BATILI DALAM, KEL. GALONTA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
38	Ismail Jafar	DRAINASE LANJA-DATTE BOLA, DESA RANGA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
39	Ismail Jafar	DRAINASE LONDA KANDANG KUBURA DESA TEMBAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
40	Ismail Jafar	DRAINASE POROS KUKKU-KALUPPINI, KEL. LEWAJA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
41	Ismail Jafar	PEMB. DRAINASE DUSUN DATA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
42	Ismail Jafar	PEMB. DRAINASE DUSUN DATA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
43	Ismail Jafar	PEMB. DRAINASE DUSUN SARONG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
44	Ismail Jafar	PEMB. DRAINASE JL. LINGKAR PUANG BUTTU	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
45	Ismail Jafar	PEMB. DRAINASE KUKKU (POROS EKG-LEWAJA)	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
46	Ismail Jafar	PEMB. TALUD PENGAMAN RUMAH ADAT PASANG DESA PASANG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	0
47	Ismail Jafar	REHAB SALURAN IRIGASI SALU LOENG, DESA KALUPPINI	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
48	Ismail Jafar	BANTUAN TERNAK SAPI DESA TOKKONAN	Kec.ENREKANG	Dinas Peternakan dan Perikanan	100,000,000
49	Ismail Jafar	- PENINGKATAN JL. TANI BATU REPE-TANGNGA NUNU, DUSUN DATA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	0

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
50	Ismail Jafar	PENINGKATAN JL. TANI SALU BAKA-SEMBUANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	0
51	Ismail Jafar	EMBUNG-EMBUNG LABA DESA ROSSOAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	0
52	Ismail Jafar	PEMB. EMBUNG-EMBUNG BOLA TALLU DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	0
53	Ismail Jafar	PENGADAAN PEMIPIL JAGUNG DESA TOKKONAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
54	Ismail Jafar	BANTUAN TERNAK SAPI	Kec.ENREKANG	Dinas Peternakan dan Perikanan	0

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Karama	LANJUTAN ADD PENGEORAN BONGSO KUBURAN DESA POTOKULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
2	Karama	LANJUTAN RABAT BETON PANDUNG BATU TOBALU DESA PANDUNG BATU	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
3	Karama	PENGERASAN JALAN BATU NONI-DANTE DESA BATU NONI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
4	Karama	PENINGKATAN JALAN DANTE MALUA URU DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
5	Karama	PENINGKATAN JALAN DANTEMALUA DEA KAJU DESA LEDAN/KADINGE	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
6	Karama	PENINGKATAN JALAN DAWEK DANTE DURIAN DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	1,800,000,000
7	Karama	PENINGKATAN JL. BELALANG WAI-WAI DESA POTOKULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
8	Karama	PENINGKATAN JL. BUNTU LENTA PAO BOLONG DESA POTOKULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
9	Karama	PENINGKATAN JL. KALACIRI DANTE DESA POTOKULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
10	Karama	RABAT BETON DUSUN BATU SANGBUA POROS LAPIN DESA BANTI	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
11	Karama	PEMELIHARAAN RUAS JL. BATUNONI-LOCOK (LONGSOR)	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
12	Karama	LORONG SMP SATAP 6 BARAKA DESA POTOKULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	50,000,000
13	Karama	LANJUTAN PMM LANGAE BONGSO DESA POTOKULLIN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
14	Karama	DRAINASE GURA BUNTU RIRI DESA BUNTU MANDONG	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	30,000,000
15	Karama	DRAINASE JL. POROS PANDUNG BATU DESA PANDUNG BATU	Kec.BARAKA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
16	Karama	DRAINASE KUBURAN LAMBA DOKO DESAS BUNTU MANDONG	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	60,000,000
17	Karama	EMBUNG-EMBUNG BOLONG	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	50,000,000
18	Karama	JALAN TANI ALLA KACOCIK POHPEDAK DESA PANDUNG BATU	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	100,000,000
19	Karama	JALAN TANI BOLONG SULLUKAN DESA PANDUNG BATU	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	100,000,000
20	Karama	JALAN TANI SAMPANG PENGERASAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	300,000,000
21	Karama	LANJUTAN JL. TANI PACCAMBURU LEMBANG DESA PANDUNG BATU	Kec.BARAKA	Dinas Pertanian	100,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	IRIGASI PERPIPAAN DESA LABULU, DESA TANETE	Kec.MAIWA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
2	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	SUMUR BOR	Kec.MAIWA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	250,000,000
3	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PELEBARAN JALAN SETIAP RUAS JALAN KEC. MAIWA, KEC. CENDANA	Kab.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
4	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGEORAN JALAN LAISONG-LABATU	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	0
5	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGEORAN JALAN LIMBUAN-LAISONG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
6	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGEORAN JALAN LINGKAR BOTTO MALLANGGA	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
7	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGEORAN JALAN LINGKAR DUSUN BATARANG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
8	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGEORAN JALAN PRAMUKA - MAROANGIN	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
9	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGEORAN JALAN PRODUKSI, SALODUA	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
10	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGEORAN JALAN SALURAMA - LEMBONG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
11	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENINGKATAN JALAN GALLARAN - PASANG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
12	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENINGKATAN JALAN GALLARAN - PASANG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	0
13	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENINGKATAN JALAN LABUKU - TANETE	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
14	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENINGKATAN JALAN LEBANI - MATAKALI	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
15	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENINGKATAN JALAN MAROANGIN - BOIYA	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
16	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENINGKATAN JALAN MATAKALI - BULO	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
17	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENINGKATAN JALAN TAPONG - PALADANG	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
18	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENINGKATAN JALAN URU-KALUPPANG (HOTMIX)	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
19	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PPENGEORAN JALAN EKUBURAN ONGKO	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	0
20	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PEMBANGUNAN JEMBATAN NADIAR SALU LEMO, DESA PALAKKA	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	0
21	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	REHABILITASI JEMBATAN SARRU, PUNCAK HARAPAN	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
22	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	REHABILITASI JEMBATAN TANI BOIYA	Kec.MAIWA	Dinas Pekerjaan Umum	120,000,000
23	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	DRAINASE TIAP DESA, KEC. CENDANA, KEC. MAIWA	Kab.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
24	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	BANTUAN KUBE KELOMPOK USAHA BERSAMA KEC. MAIWA, KEC. CENDANA	Kab.ENREKANG	Dinas Sosial	200,000,000
25	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	LAPANGAN SEPAK BOLA DAN ALUN2 KEC. MAIWA DAN KEC. CENDANA	Kab.ENREKANG	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	0
26	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	BANTUAN SAPI LOKAL/BALI KELOMPOK TANI	Kec.MAIWA	Dinas Peternakan dan Perikanan	1,000,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
27	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	ALAT PERONTOK JAGUNG KEC. CENDANA, KEC. MAIWA	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	70,000,000
28	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	HAND SPRAYER ELEKTRIC KEC. CENDANA, KEC. MAIWA	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
29	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	HAND TRACKTOR	Kec.MAIWA	Dinas Pertanian	300,000,000
30	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	MOBIL TRACKTOR	Kec.MAIWA	Dinas Pertanian	600,000,000
31	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGADAAN MOBIL PANEN PADI	Kec.MAIWA	Dinas Pertanian	800,000,000
32	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	PENGADAAN POMPA	Kec.MAIWA	Dinas Pertanian	35,000,000
33	Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM	EMBUNG-EMBUNG SETIAP DESA	Kec.MAIWA	Dinas Pertanian	1,100,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Mustain Sumaele, SE	SAB MALAWWE KEL. TUARA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
2	Mustain Sumaele, SE	SAB TALLU BAMBA DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	250,000,000
3	Mustain Sumaele, SE	PENINGKATAN JL. BATILI KUBURAN PUANG BUTTU KEL. GALONTA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	250,000,000
4	Mustain Sumaele, SE	PENINGKATAN JL. GALUNG-TEMBAN DESA TEMBAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	350,000,000
5	Mustain Sumaele, SE	PENINGKATAN JL. GARETTONG-BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	250,000,000
6	Mustain Sumaele, SE	PENINGKATAN JL. KULINJANG-TUNGKA KEL. TUARA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
7	Mustain Sumaele, SE	PENINGKATAN JL. MALAWWE-SARONG KEL. TUARA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
8	Mustain Sumaele, SE	PENINGKATAN JL. TUNGKA-KUMADANG DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
9	Mustain Sumaele, SE	PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIDONG DESA CEMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
10	Mustain Sumaele, SE	PEMBANGUNAN JEMBATAN LANGGOGONG KEL. LEWAJA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
11	Mustain Sumaele, SE	PEMBANGUNAN JEMBATAN LEMBANG DESA LEMBANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
12	Mustain Sumaele, SE	REHAB JEMBATAN GALUNG DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	250,000,000
13	Mustain Sumaele, SE	REHAB JEMBATAN PANETTE	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	0
14	Mustain Sumaele, SE	REHAB JEMBATAN PANETTE DESA CENDANA	Kec.CENDANA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
15	Mustain Sumaele, SE	LAMPU TENAGA SURYA DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC. CENDANA, KEC. MAIWA)	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
16	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN BAMPU DESA KARUENG	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
17	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN BUTTU CUI KEL. JUPPANDANG	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
18	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN GALUNG DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
19	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN GALUNG MELATI	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	75,000,000
20	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN KAMPUNG JAWA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
21	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN KAMPUNG JAWA KEL. JUPPANDANG	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
22	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN KEPPE KEL. GALONTA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	75,000,000
23	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN MATA DEWA KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	75,000,000
24	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN/TALUD MASEMBA KEL. LEORAN	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
25	Mustain Sumaele, SE	DRAINASE BAMBA KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
26	Mustain Sumaele, SE	DRAINASE DESA LEMBANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	0
27	Mustain Sumaele, SE	DRAINASE KAMPUNG BARAKA DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	175,000,000
28	Mustain Sumaele, SE	DRAINASE KOTA ENREKANG KEL. JUPPANDANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
29	Mustain Sumaele, SE	DRAINASE PUDUKKU DESA PUNDI LEMO	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
30	Mustain Sumaele, SE	DRAINASE TUNGKA DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
31	Mustain Sumaele, SE	JL. LINGKUNGAN/TALUD TEMBAN DESA TEMBAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
32	Mustain Sumaele, SE	KUBE	Kab.ENREKANG	Dinas Sosial	0
33	Mustain Sumaele, SE	EMBUNG-EMBUNG KEC. ENREKANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	350,000,000
34	Mustain Sumaele, SE	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JL. TANI DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
35	Mustain Sumaele, SE	PENGADAAN DROS JAGUNG DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC. CENDANA, KEC. MAIWA)	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	0
36	Mustain Sumaele, SE	PENGADAAN HAND TRACTROR DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC. CENDANA, KEC. MAIWA)	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	0
37	Mustain Sumaele, SE	PENGADAAN JUT PERSAWAAN DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC. CENDANA, KEC. MAIWA)	Kab.ENREKANG	Dinas Pertanian	0
38	Mustain Sumaele, SE	PENGEORAN JL. TANI DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	150,000,000
39	Mustain Sumaele, SE	PERINTISAN JL. TANI BAMBA KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
40	Mustain Sumaele, SE	PENGADAAN BIBIT IKAN DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC. CENDANA, KEC. MAIWA)	Kec.ENREKANG	Dinas Peternakan dan Perikanan	0



<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Rachmad Saleh	PEMBANGUNAN RKB SDN 74 BOLANG, DESA BOLANG	Kec.ALLA	Dinas Pendidikan dan Budaya	360,000,000
2	Rachmad Saleh	DRAINASE JL. SUDU-CURIO PAMOLONGAN, DESA SALASSA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
3	Rachmad Saleh	PENINGKATAN JL. BUNTU TANGLA-GAROGA MASALLE, DESA MASALLE	Kec.MASALLE	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
4	Rachmad Saleh	PENINGKATAN JL. KALIMBUA-PARARUK KALOSI, KEC. ALLA	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	600,000,000
5	Rachmad Saleh	PENINGKATAN JL. PEKAJO-BERE PEKAJO, DESA MEKKALA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
6	Rachmad Saleh	PENINGKATAN JL. PISIAN-TO BEANG BAROKO, KE. BAROKO	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
7	Rachmad Saleh	PENINGKATAN JL. SUDU-MALELE, DESA TAULO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
8	Rachmad Saleh	PENINGKATAN JL. TO CEMBA-DEDEKAN DEDEKAN, KEC. ALLA	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
9	Rachmad Saleh	JL. LINGKUNGAN KEL. KAMBIOLANGI KAMBIOLANGI, KEC. ALLA	Kec.ALLA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
10	Rachmad Saleh	PAMASANGAN BRONJONG JEMBATAN KALIMBUA KALIMBUA, KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
11	Rachmad Saleh	PEMBUATAN EMBUNG SIDURUK CECE, DESA SUMILLAN	Kec.ALLA	Dinas Pertanian	55,000,000
12	Rachmad Saleh	PIPANISASI BOLANG BOLANG, DESA BOLANG	Kec.ALLA	Dinas Pertanian	120,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Rahmat S.Kom	REHAB KANTOR/RUANG GURU SMPN 3 MAIWA DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pendidikan dan Budaya	0
2	Rahmat S.Kom	PEMB. PAGAR PUSKESMAS BUNGIN KEC. BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Kesehatan	0
3	Rahmat S.Kom	IRIGASI INDUK KAINDI DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
4	Rahmat S.Kom	IRIGASI KASSA DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
5	Rahmat S.Kom	POKOK SUNGAI SALUMALEA DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
6	Rahmat S.Kom	PENINGKATAN JL. POROS BANUA-TALLANG DESA BANUA	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
7	Rahmat S.Kom	PENINGKATAN JL. POROS BUNGIN-BULO DESA BULO	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
8	Rahmat S.Kom	PENINGKATAN JL. POROS BUNGIN-NATING DESA BUNGIN-SAWITTO	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
9	Rahmat S.Kom	PENINGKATAN JL. POROS DUSUN BANUA - SERANG - PALEMBONGAN DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
10	Rahmat S.Kom	PENINGKATAN JL. POROS TALIMBANGAN-BUNGIN DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0
11	Rahmat S.Kom	PENINGKATAN JL. POROS TALLANG-BANUA DESA TALLANG	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
12	Rahmat S.Kom	PENINGKATAN JL. PUSKESMAS KEC. BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
13	Rahmat S.Kom	PENINGKATAN JL. SMPN 3 MAIWA DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
14	Rahmat S.Kom	PNGK. JL. POROS BUNGIN-SAWITTO (RESETLMEN) DESA BUNGIN-SAWITTO	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
15	Rahmat S.Kom	RABAT BETON JL. POROS TAMPAAN-BUNGIN DESA BARUKA	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
16	Rahmat S.Kom	PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG PAMEROK ANNUNG DESA BANUA	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
17	Rahmat S.Kom	PEMELIHARAAN JEMBATAN SALU RANO DAN SALU PATANI DESA BARUKA	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
18	Rahmat S.Kom	PERBAIKAN JEMB. BATU CIAK DAN KAMPUNG BARU DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
19	Rahmat S.Kom	PENERANGAN JALAN UMUM	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
20	Rahmat S.Kom	PENERANGAN JALAN UMUM DESA SAWITTO	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
21	Rahmat S.Kom	PEMB. SARANA PERIBADATAN MASJID DAN MUSHOLLAH KEC. BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
22	Rahmat S.Kom	DRAINASE JL. POROS BANUA-TALLANG DESA BANUA	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
23	Rahmat S.Kom	DRAINASE JL. POROS BUNGIN-BULO DESA BULO	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
24	Rahmat S.Kom	DRAINASE JL. POROS TALIMBANGAN-BUNGIN DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pekerjaan Umum	0

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
25	Rahmat S.Kom	DRAINASE/TALUK JL. POROS BUNGIN-SAWITTO	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
26	Rahmat S.Kom	DRAINASE/TALUK JL. POROS TALLANG-BANUA DESA TALLANG	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
27	Rahmat S.Kom	DRAINASE/TALUK POROS BUNGIN-NATING DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
28	Rahmat S.Kom	PEMB. DRAINASE JL. POROS BARUKA-BUNGIN DESA BARUKA	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
29	Rahmat S.Kom	PEMELIHARAAN DEKKER DUSUN PATANI DESA BARUKA	Kec.BUNGIN	Dinas Pekerjaan Umum	0
30	Rahmat S.Kom	PENGADAAN SAPI KEC. BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Peternakan dan Perikanan	120,000,000
31	Rahmat S.Kom	BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA BANUA	Kec.BUNGIN	Dinas Pertanian	100,000,000
32	Rahmat S.Kom	BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA BARUKA	Kec.BUNGIN	Dinas Pertanian	0
33	Rahmat S.Kom	BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA BULO	Kec.BUNGIN	Dinas Pertanian	100,000,000
34	Rahmat S.Kom	BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA LEDAN	Kec.BUNTU BATU	Dinas Pertanian	100,000,000
35	Rahmat S.Kom	BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA SAWITTO	Kec.BUNGIN	Dinas Pertanian	120,000,000
36	Rahmat S.Kom	BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA TALLANG	Kec.BUNGIN	Dinas Pertanian	120,000,000
37	Rahmat S.Kom	BANTUAN ALAT PERTANIAN UNTUK KELOMPOK TANI DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pertanian	420,000,000
38	Rahmat S.Kom	PEMB. JL. TANI SOLONGAN DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pertanian	300,000,000
39	Rahmat S.Kom	PEMBUATAN EMBUNG-EMBUNG DESA BUNGIN	Kec.BUNGIN	Dinas Pertanian	300,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Rahmat S.Pd M.Pd	AIR BERSIH BATU-BATU DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	300,000,000
2	Rahmat S.Pd M.Pd	AIR BERSIH BUTTU BATU DESA BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
3	Rahmat S.Pd M.Pd	AIR BERSIH LEON DESA ROSSOAN	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	0
4	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN POROS KOTU-LEON DESA ROSSOAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
5	Rahmat S.Pd M.Pd	JL. POROS SURAKAN LAMBA DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
6	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN LINGKUNGAN DADEKO	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
7	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN LINGKUNGAN DARA DESA TEMBAN	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
8	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN LINGKUNGAN GALUNG DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
9	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN LINGKUNGAN GARUTU DESA BUTTU BATU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
10	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN LINGKUNGAN LABA DESA ROSSOAN	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
11	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN LINGKUNGAN LAPIN DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
12	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN LINGKUNGAN TAPUAN DESA TUNGKA	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
13	Rahmat S.Pd M.Pd	JALAN PERUMAHAN BAMBA GRAHA KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
14	Rahmat S.Pd M.Pd	TALUD BAMBA (KM2) KEL. PUSERREN	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
15	Rahmat S.Pd M.Pd	DRAINASE BUANGIN DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
16	Rahmat S.Pd M.Pd	DRAINASE JALIKKO DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
17	Rahmat S.Pd M.Pd	DRAINASE LAPIN DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
18	Rahmat S.Pd M.Pd	PEMBANGUNAN DEKKER LEON	Kec.ENREKANG	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
19	Rahmat S.Pd M.Pd	LAPANGAN SEPAK BOLA BUANGIN DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100,000,000
20	Rahmat S.Pd M.Pd	LAPANGAN SEPAK BOLA LAPIN DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100,000,000
21	Rahmat S.Pd M.Pd	EMBUNG SURAKAN DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	50,000,000
22	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT AMBARA DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
23	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT BAGEAN DESA LEMBANG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
24	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT BUANGIN DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
25	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT BUNGIN DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
26	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT DADEKO DESA ROSSOAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
27	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT DENDE DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
28	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT KALIDONG DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
29	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT KARUENG DESA KARUENG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
30	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT LABA DESA ROSSOAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
31	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT LABALE DESA PALAKKA	Kec.MAIWA	Dinas Pertanian	100,000,000
32	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT LAPIN DESA TOBALU	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
33	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT LAPPORAN DESA TEMBAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
34	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT LEON DESA ROSSOAN	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
35	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT PENJA DESA KARUENG	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000
36	Rahmat S.Pd M.Pd	JUT SURAKAN DESA TALLU BAMBA	Kec.ENREKANG	Dinas Pertanian	100,000,000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>OPD</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Sudarmin Tahir	JALAN LINGKAR KAMBIOLANGI KEL. KAMBIOLANGI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
2	Sudarmin Tahir	PENGEORAN DEDEKAN-TO CEMBA DESA SUMILLAN	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
3	Sudarmin Tahir	PENGEORAN JL. PANGAROAN, DUSUN SIKOLONG DESA SANGLEPONGAN	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
4	Sudarmin Tahir	PENGEORAN JL. POROS CURIO-PAROMBEAN DESA CURIO, KEC. CURIO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	0
5	Sudarmin Tahir	PENGEORAN JL. POROS DESA TALLUNG URA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
6	Sudarmin Tahir	PENGEORAN JL. POROS MATA ALLO-SALU DEWATA DESA MATA ALLO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
7	Sudarmin Tahir	PENGEORAN JL. TO MILA DESA MASALLE,KEC.MASALLE	Kec.MASALLE	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
8	Sudarmin Tahir	PENGEORAN KAMPUNG BARU MATA ALLO KEC.ALLA	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
9	Sudarmin Tahir	PENGEORAN LUMBAJA-PASAR DALLE DESA BENTENG ALLA	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
10	Sudarmin Tahir	PENGEORAN MORROK-SANGERAN MATA ALLO KEC.ALLA	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
11	Sudarmin Tahir	PERINTISAN PALISU-BOTTOI DESA BENTENG ALLA	Kec.BAROKO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
12	Sudarmin Tahir	JEMBATAN PEKUBURAN GARU TUK-SANGERAN KEL. KALOSI	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
13	Sudarmin Tahir	DRAINASE JL. POROS CURIO DESA CURIO, KEC. CURIO	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
14	Sudarmin Tahir	TALUD DUSUN SIGA DESA MUNDAN, MASALLE	Kec.MASALLE	Dinas Pekerjaan Umum	30,000,000
15	Sudarmin Tahir	TALUD DUSUN TARIAN BAIBO, KEC. MASALLE	Kec.MASALLE	Dinas Pekerjaan Umum	130,000,000
16	Sudarmin Tahir	TALUD POROS MATA ALLO-SALU DEWATA DESA MATA ALLO	Kec.ALLA	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Umar SH	PEMBANGUNAN JEMBATAN TONGKONAN-MALANYNGING	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
2	Umar SH	PENINGKATAN JALAN MALANYNYING	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
3	Umar SH	PENINGKATAN JL. KAMPUNG BARU-KASISI DESA TALLUNG URA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
4	Umar SH	PENINGKATAN JL. KARURU-ROGO DESA SUMBANG	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
5	Umar SH	PENINGKATAN JL. LAMBA-TONGKONAN DESA SANGLEMPONGAN	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
6	Umar SH	PENINGKATAN JL. PAROMBEAN - BUNTU LIMBONG DESA PAROMBEAN	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
7	Umar SH	PENINGKATAN JL. PEKAJO-BERE DESA MEKKALA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
8	Umar SH	PENINGKATAN JL. RABU-RAMPUNAN	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
9	Umar SH	PENINGKATAN JL. RUAS SUMBANG-TALLUNG URA	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
10	Umar SH	REHAB JEMBATAN GANTUNG	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
11	Umar SH	REHAB JEMBATAN LAMBANAN SOLO DESA SUMBANG	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
12	Umar SH	JL. LINGKUNGAN BARI BATU DESA SALASSA	Kec.CURIO	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
13	Umar SH	JL. LINGKUNGAN BUNTU RANDAN DESA CURIO	Kec.CURIO	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	150,000,000
14	Umar SH	PENGEORAN JL. LINGKUNGAN BUNTU RANDAN DESA CURIO	Kec.CURIO	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	100,000,000
15	Umar SH	DRAINASE DALAM KOTA SUMBANG DESA SUMBANG	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
16	Umar SH	TALUD SD CURIO DESA CURIO	Kec.CURIO	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
17	Umar SH	BANTUAN TERNAK KAMBING	Kab.ENREKANG	Dinas Peternakan dan Perikanan	100,000,000
18	Umar SH	BANTUAN TERNAK SAPI	Kab.ENREKANG	Dinas Peternakan dan Perikanan	100,000,000
19	Umar SH	EMBUNG-EMBUNG RAPA DESA CURIO	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	50,000,000
20	Umar SH	EMBUNG-EMBUNG ALLA DESA BUNTU PEMA	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	50,000,000
21	Umar SH	EMBUNG-EMBUNG RAMPUNAN DESA TALLUNG URA	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	50,000,000
22	Umar SH	EMBUNG-EMBUNG SUMBANG	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	50,000,000
23	Umar SH	JUT PERTANIAN SUMBANG	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	100,000,000
24	Umar SH	JUT SALE BATU RAMPUNAN DESA TALLUNG URA	Kec.CURIO	Dinas Pertanian	75,000,000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI	OPD	ANGGARAN (Rp)
1	Yusuf Muchtar	TALUD SD 65 TAMPO DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pendidikan dan Budaya	300,000,000
2	Yusuf Muchtar	REHAB PUSTU DANTE MARARI DESA TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Kesehatan	0
3	Yusuf Muchtar	REHAB PUSTU MANGGUGU DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Kesehatan	350,000,000
4	Yusuf Muchtar	JALAN ALTERNATIF TAMPO-MANGGUGU DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
5	Yusuf Muchtar	PENGERASAN JL. DANTE-DANGA DESA TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
6	Yusuf Muchtar	PENINGKATAN JL. BT. NONI-TONTONAN DESA BATU NONI	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	400,000,000
7	Yusuf Muchtar	PENINGKATAN JL. CAKKE-MANGGUGU DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
8	Yusuf Muchtar	PENINGKATAN JL. DANTE-KACOEK DESA TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	400,000,000
9	Yusuf Muchtar	PENINGKATAN JL. DULANG-MANGGUGU DESA DULANG	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	350,000,000
10	Yusuf Muchtar	PENINGKATAN JL. TANGRU-BT. NONI DESA TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
11	Yusuf Muchtar	PENINGKATAN JL. TANGRU-TO LIANG DESA TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	700,000,000
12	Yusuf Muchtar	JEMBATAN DOLO DESA KOLAI	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	2,147,483,647
13	Yusuf Muchtar	JALAN LINGKUNGAN MANGGUGU DESA TAMPO	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	200,000,000
14	Yusuf Muchtar	JL. LINGKUNGAN CAKKE-KAMPUNG BARU KEL. LAKAWAN	Kec.ANGGERAJA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang	500,000,000
15	Yusuf Muchtar	DRAINASE BALLA-BOLONG DESA TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
16	Yusuf Muchtar	DRAINASE DULANG DESA DULANG	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	250,000,000
17	Yusuf Muchtar	TALUD TANGRU DESA TANGRU	Kec.MALUA	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
18	Yusuf Muchtar	TALUD LAPANGAN MANGGUGU DESA TAMPO	Kec.MALUA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	500,000,000



### 5.3. RENCANA PENDANAAN DAERAH

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Sebagaimana tertuang dalam Bab 3 tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2021 diproyeksikan sekitar Rp. 1.077.211.340.749 yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 88.644.806.496 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 949.006.534.253 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 39.560.000.000. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/ kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2021, dengan jumlah belanja Rp1.214.622.368.214.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021

Uraian	Tahun
	2021 (dalam Miliar Rupiah)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1,214,62</b>
<b>Belanja Operasi</b>	785,22
Belanja Pegawai	448,65
Belanja Barang & jasa	319,94
Belanja bunga	0
Belanja Subsidi	0
Belanja Hibah	16,20
Belanja Bantuan sosial	0,42
<b>Belanja Modal</b>	<b>238,72</b>
Belanja Modal	238,72
<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>0,32</b>
Belanja tidak terduga	0,32
<b>Belanja Transfer</b>	<b>190,37</b>
Belanja bagi hasil	5,25
Belanja Bantuan Keuangan	185,12

Sumber: Bapenda Kab. Enrekang, 2020 dan Olahan Tim RKPD 2021

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2021

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini adalah akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2019 – 2023.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKK merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

##### 6.1.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Enrekang Tahun 2021

No.	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Persentase desa yang dapat diakses dengan baik kendaraan roda empat sepanjang tahun	82,14	89,28	92,85
2	Penghargaan Adipura level kota kecil	-	Sertifikat	Piala

3	Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	76,59	100	100
4	Angka Usia harapan hidup	70,83	70,47	70,52
5	Persentase stunting	40,6	35,6	30,6
6	Angka Harapan Lama Sekolah	13,86	13,96	14,06
7	Cakupan wilayah terjangkau internet dan jaringan telekomunikasi seluler	100	100	100
8	Angka kriminalitas	228	197	159
9	Mutu Pelayanan	C	B	B
10	Nilai SAKIP	CC	B	B
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
12	Penghargaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Ada	Ada	Ada
13	Persentase penanganan gangguan kantibmas	100	100	100
14	Cakupan Penerapan SPM Sesuai Kewenangan Daerah	100	100	100
15	Indeks Pemberdayaan Gender	58,7	58,74	58,81
16	Pertumbuhan PDRB Per Kapita	8,01	8,40	8,79
17	Tingkat pengangguran terbuka	2,4	1,40	2,46
18	Kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB	21,0	21,06	21,28
19	Tingkat kemiskinan	12,33	11,07	12,86
20	Produktivitas total daerah	68.452.041	70.505.602	72.620.770
21	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82	81,4	81,6
22	Indeks kualitas lingkungan hidup	62,16	62,46	62,76
23	Persentase pertumbuhan nilai produksi komoditas dengan penerapan sistem pertanian ramah lingkungan	6	6,5	6,8

#### 6.1.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Berikut adalah indikator kinerja kunci Kabupaten Enrekang Tahun 2021:

Tabel 6.2  
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Enrekang Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>		
	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>		
	Pertumbuhan PDRB	%	5,015
	Laju Inflasi	%	2,3+1
	PDRB Perkapita	Juta Rp	37 - 47
	Indeks Gini	Ketimpangan	0,355
	Persentase Penduduk Miskin	%	11,25
	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	83,1
	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,09
	Angka Melek Huruf (AMH)	%	91,10
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	8,76
	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,72
	Angka Usia Harapan Hidup	%	70,49
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,78
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,46
	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	98,73
	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03
<b>II</b>	<b>ASPEK LAYANAN UMUM</b>		
	<b>URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	108,40
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	98,74
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	100
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-12 tahun	%	100
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun	%	100
	Angka Kelulusan SD/MI	%	81,71
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	84,66
	Persentase SD/MI Berakreditasi B	%	100
	Persentase SMP/MTs Berakreditasi B	%	60,49
	Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/M.Ts Kondisi Bangunan Baik	%	100
	Jumlah Warga Negara usia 5 -6 tahun yg berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	100
	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam Pendidikan dasar wajib Sembilan tahun	%	100
	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	98
	Tingkat kelulusan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	%	90%
	Presentase Mutu Anak Didik Meningkatkan	%	95
	Capaian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	90
	Capaian Manajemen Pelayanan Pendidikan	%	95

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
	Cakupan Ketercapaian Pengelolaan dan Pengembangan Budaya	%	90
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>		
	Persentase warga negara ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100
	Presentase Angka Kematian IBU	%	1
	Presentase Angka Kematian Bayi	%	2
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar dan usia produktif yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar	%	100
	Persentase warga negara usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus dan penderita gangguan jiwa berat dan terduga tuberculosis yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar	%	100
	Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar	%	100
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	98,67
	Persentase penemuan dan pengobatan penyakit menular	%	92
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular	%	31
	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	100
	Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RSUD	%	
	Persentase pemanfaatan taman obat keluarga	%	100
	Persentase apotek dan toko obat yang diawasi	%	100
	Presentase Penanggulangan masalah gizi balita,bumil dan Rematri	%	100
	Presentese Balita Gizi Buruk	%	0,015
	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight ) pada anak balita.	%	17
	Persentase desa siaga purnama + mandiri	%	26
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	%	66
	Capaian kriteria Kabupaten sehat	Penghargaan	wistara
	Persentase rumah sehat	%	80
	Persentase TTU,TPM dan DAMIU yang memenuhi standar	%	100
	Persentase Peningkatan kunjungan rawat jalan puskesmas dan jaringannya	%	90
	Persentase Pemamfaatan TT di Puskesmas rawat inap ( BOR)	%	54
	Rasio tenaga paramedis persatuan penduduk	Per 1000 Penduduk	2,1/1000 Penduduk
	Presentase upaya kesehatan masyarakat	%	60
	Cakupan pelayanan kesehatan gratis	%	100
	Cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN	Jumlah PKM	14
	Cakupan dana kapitasi JKN pada puskesmas	%	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	%	80
	Presentase Ketersediaan Sarana dan Parasarana RS sesuai standar yang dipersyaratkan	%	100
	Persentase Puskesmas yang menerapkan SIKDA	%	100
	Tingkat pelayanan RSUD memenuhi standar	%	100
	Cakupan pelayanan pasien Umum, JKN dan Jamkesda dibayarkan sesuai jumlah klaim	%	100
	Persentase sarana dan prasarana RSU beroperasi sesuai standar	%	100
<b>3.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	67,0
	Persen Luas irigasi kabupaten berfungsi baik	%	59
	Jumlah alat berat dan alat bengkel berfungsi baik	%	86
	Persentase pengamanan tanggul/ bantaran sungai	%	7
	persen pengendalian mutu konstruksi	%	88
	Persentase Elektrifikasi	%	99
	Persentase Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	%	100
	Persentase dokumen perencanaan tata ruang dan penataan bangunan	%	71
	Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	71
<b>4.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>		
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan air minum sehari-hari dan pengolahan limbah domestik	%	100
	Persentase penataan kawasan permukiman yang tertangani	%	72
	Persentase jalan lingk. Yg berdrainase dlm Kawasan permukiman	%	61
<b>5.</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
	Persentase warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	%	<b>100</b>
	Persentase warga negara yang memperoleh informasi kerawanan bencana	%	<b>100</b>
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	%	<b>100</b>
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	<b>100</b>
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	<b>100</b>
	Cakupan jumlah gangguan wilayah dan lingkungan yg tertangani	%	<b>100</b>
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	<b>58</b>
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	<b>88</b>
<b>6.</b>	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	%	<b>85</b>

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
	Proporsi Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi	%	100
	Persentase pelaksanaan system dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supranatural dan politik di daerah infrastruktur	%	100
	Angka Kriminalitas yang tertangani	%	4,75
	Persentase warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	%	100
<b>7.</b>	<b>SOSIAL</b>		
	Persentase jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100
	Persentase jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100
	Persentase jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100
	Persentase jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti	%	100
	Persentase jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100
	Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	100%	80
	Persentase permintaan sumbangan dan pengawasan kegiatan social yang dibina	100%	100
	Persentase kelembagaan kesejahteraan social yg diberdayakan	100%	100
	Persentase kelembagaan kesejahteraan social yg diberdayakan	100%	100
	Persentase pengembangan wawasan kebangsaan	100%	100
	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	12 kelompok	12 kelompok
	Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	100
	Persentase pelaksanaan pembinaan keagamaan	90%	90
	Persentase petugas tempat ibadah yang dibina	100	100
	Persentase majelis ta'lim dan TPA yang aktif	40	80
	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>		
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	45
	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun (SDGs)	%	79,31
	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (SDGs)	%	100
<b>2.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
	Persentase ARG dalam APBD	%	3
	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	15
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	85
	Persentase Keluarga yang terlayani PUSPAGA sesuai standar	%	35
	Ketersediaan kelembagaan dan penagrutamaan gender dan anak	%	35
	Terwujudnya kelembagaan dan penagrutamaan gender dan anak	%	20%
	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan Anak	%	40
	Skor capaian penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	600
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.	%	85
<b>3.</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>		
	Persentase Penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	%	84
	Cakupan ketersediaan pangan	%	100
<b>4.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	Persentase cakupan area pelayanan	%	27
	Persentase/Cakupan Timbulan sampah yang ditangani	%	82
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten (Nilai TPA)	%	76
	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	45
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R	%	24 %
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku	%	100
	Indeks Kualitas Air		
	Indeks Kualitas Udara		
	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin TPLH dan PUULH yang diterbitkan	%	59
	Terwujudnya pengendalian perusakan lingkungan hidup	%	93,7
	Indeks Kualitas Tutupan lahan		60
	Adanya Regulasi dan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam	Kec	90
	Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	46
	Persentase MHA terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	%	50
	Persentase MHA terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	25
	Jumlah sekolah Adiwiyata	Jumlah	100



No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi Usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten	%	1
	Peningkatan sarana dan prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	PPLHD	50
<b>5.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
	Persentase penataan adm.Kependudukan	%	70
	Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil	%	75
	Persentase pengembangan data dan informasi kependudukan	%	75
<b>6.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif	Jumlah LKD	12 LKD
	Persentase PKK Aktif	%	100
	Persentase Posyandu Aktif	%	100
	Jumlah Desa Kategori Cepat Berkembang	Jumlah Desa	36 Desa
	Jumlah Kelembagaan ekonomi pedesaan yang mandiri dan Profesional	Jumlah Lembaga	30 lembaga
	Jumlah Desa Memanfaatkan Teknologi tepat Guna Pedesaan yang difasilitasi	Jumlah Desa	10 Desa
	Cakupan aparatur Pemerintah Desa yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	%	85
	Persentase desa yang tertib administrasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa	%	60
	Tingkat pemenuhan regulasi tentang desa dan dokumen yang dipersyaratkan	%	50
<b>7.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>		
	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	70
	Persentase ketersediaan sarana prasarana LLAJ	%	55
	Jumlah orang/Barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah Orang	104.902 org
	Jumlah Orang/Barang melalui terminal per tahun	Jumlah Orang	104.902 org
	Jumlah Uji Kir angkutan umum	Unit	34 Unit
	Persentase pelayanan pengamanan lalu lintas	%	72
<b>8.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
	Persentase data potensi dan program pemda yang dipublikasikan ke masyarakat	%	95
	Persentase data dan informasi kegiatan pemda yang dipublikasikan kepada masyarakat	%	80
	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	%	79,97
	Persentase peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	%	70
	Tersedianya jaringan internet dan aplikasi yang terintegrasi guna mewujudkan	%	60
	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menerapkan e-government	%	80
	Persentase penduduk yang menggunakan HP	%	79,97
	Persentase penduduk yang memiliki akses internet	%	33

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
<b>9.</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>		
	Persentase Usaha Kecil Menengah	%	60
	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (SDGis)	%	35,02
	Persentase UMKM terhadap layanan keuangan (SDGis)	%	65
	Persentase Koperasi Aktif	%	55
	Persentase Koperasi dan UMK yang Bermitra	%	65
<b>10.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>		
	Persentase Investasi promosi dan kerjasama Investasi	%	95
	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah (Lokal,PMDN/PMA)	%	5
	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	100
	Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan	%	80
<b>11.</b>	<b>STATISTIK</b>		
	Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi	%	100
	Persentase ketersediaan data dalam SIPD	%	100
	Tersedianya data dan informasi Investasi Daerah	%	83
<b>12.</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,77
	Persentase remaja yang mengetahui kesehatan reproduksi secara dini	%	65
	Persentase layanan calon peserta KB menjadi peserta KB Aktif	%	65
	Persentase masyarakat yang mengetahui pentingnya KB	%	75
	Cakupan pelayanan PIK dan KRR bagi Remaja	%	60
	Persentase Masyarakat yang mengetahui bahaya Narkoba/PMS, dan HIV/AIDS	%	40
	Persentase tenaga pendamping KBK yang aktif	%	60
	Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak	%	40
<b>13.</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
	Persentase peningkatan peranserta kepemudaan	%	20
	Persentase pemuda yang memiliki kecakapan kewirausahaan	%	14
	Persentase sekolah yang mendapat penyuluhan bahaya narkoba	%	25
	Jumlah event cabang olahraga yang mengangkat prestasi daerah	%	30
	Persentase ketersediaan fasilitas dan peralatan olahraga	%	45
	Jumlah fasilitas olah raga yang dikelola dan ditangani secara operasional dan pemeliharaan	%	85%
<b>14.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>		
	Cakupan Ketercapaian dan Pengelolaan dan Pengembangan Budaya	%	90

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
<b>15.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>		
	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan Umum	%	35
	Persentase perpustakaan sekolah yang menggunakan sistem informasi perpustakaan	%	80
	Persentase perpustakaan sekolah, Desa/ Kelurahan yang dikelola baik	%	65
	Persentase masyarakat pengguna perpustakaan	%	40
<b>16.</b>	<b>KEARSIPAN</b>		
	Persentase arsip penting daerah yang disimpan di Depo Arsip	%	100
	<b>URUSAN PILIHAN</b>		
<b>1.</b>	<b>PERTANIAN</b>		
	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Pertanian	%	6.8
	Cakupan Binaan Kelompok Tani	%	80
	Cakupan pelaku usaha Tani yang menerapkan system Pertanian Ramah Lingkungan	%	8
	Persentase Peningkatan Produktivitas Holtikultura	%	2.27
	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	%	2.27
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	2.27
	Persentase PPL yang berkualifikasi Ahli	%	60
	Jumlah produksi daging (ton)	Ton	7.237.937
	Jumlah produksi susu (liter)	Liter	1.841.358
	Jumlah produksi telur (ton)	Ton	276.965
	Jumlah populasi ternak besar (ekor)	Ekor	75.020
	Jumlah populasi ternak kecil (ekor)	Ekor	64.687
	Jumlah populasi ternak unggas (ekor)	Ekor	1.617.289
	Jumlah ternak yang tertangani dari serangan penyakit (ekor)	Ekor	7
	Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak yang dipasarkan (ton)	Ton	550
	Jumlah kelahiran ternak dengan aplikasi penerapan teknologi (ekor)	Ekor	2.25
	Persentase Kawasan Peternakan yang dikembangkan	%	80
<b>2.</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	1800
	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	22
	Jumlah Binaan POKDAKAN (kelompok)	Jumlah Kelompok	30
	Jumlah penyuluh dan petugas peternakan dan perikanan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan teknisnya (orang)	Orang	34
	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	Ton	5.217
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana Prasarana Produksi dan Infrastruktur Kawasan Perikanan Darat	%	90
<b>3.</b>	<b>PERDAGANGAN</b>		

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
	Persentase penurunan jenis barang kadaluarsa yang beredar	%	85
	Persentase pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha	%	72
	Persentase pasar desa strategis yang tersedia	%	55
<b>4.</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>		
	Jumlah produk Unggulan Daerah di Pasar Modern	Jumlah Produk	3
	Persentase Industri rumah tangga dan pelaku ekonomi kurang mampu yang dibina	%	75
	Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan Teknologi	%	60
<b>5.</b>	<b>PARIWISATA</b>		
	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan	50.000
<b>6.</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>		
	Persentase Cakupan Kawasan transmigrasi	%	55
<b>7.</b>	<b>URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>		
	Persentase Capaian SPM	%	100
	Tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan- kegiatan anggota DPRD	%	100
	Tingkat realisasi rencana aktivitas kegiatan Bupati/ Wakil Bupati	%	100
	Persentase kepatuhan OPD dalam implemntasi SOP sesuai sistem pengelolaan keuangan daerah	%	100
	Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	%	100
	Tingkat kesesuaian paket regulasi		
	pengeloaalaan keuangan daerah dengan regulasi	%	100
	Peningkatan dan Penilaian/Predikat		B 70
	Opini BPK		WTP
	Persentase cakupan Pemeriksaan Reguler	%	100%
	Persentae Pengawasan Belanja modal dan Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat	%	55%
	Persentase Penanganan kasus Pengaduan Masyarakat	%	100%
	Persentase Pengujian SPIP dan Audit Kinerja	%	33.3%
	Maturitas	Level	Level 3 (3.5)
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		
	IRKB	%	94%
	ITPROV	%	94%
	BPK RI	%	87%
	Level Kapabilitas APIP	Level	Level III
	Jumlah dokumen pedoman pengawasan yang diterbitkan	Dokumen	1 dokumen
	Tingkatan Kompetensi Aparat Pengawasan	Level	Level 3
	Persentase pencapaian progress pemberantasan korupsi terintegrasi	%	85%
	Nilai survey kepuasan masyarakat/stekholder		2.25
	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal	%	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun
			2021
	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Jumlah OPD	5 OPD
	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama Pemda dengan daerah (lembaga lainnya)	MOU	10 MOU
	Persentase OPD yang dirumuskan dan dikoorinasi kebijakannya	%	100
	Realisasi prolegda yang ditetapkan menjadi perda	Jumlah	8 perda
	Jumlah Kecamatan dan Desa yang dimekarkan	Jumlah	1 Kec 5 Desa/ kel
	Tingkat pelaksanaan sistem pengendalian adminitrasi pemerintahan, Kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum Pemda	%	80
	Presentase Pejabat structural yang telah mengikuti DIKLATPIM	%	95
	Persentase jabatan yang Telah terisi	%	96
	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin	%	66
	Persentase pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan S1	%	60
	Persentase Keterisian jabatan	%	96
	Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan Pangkat tepat waktu	%	100
	Persentase PNS pensiun yang mendapatkan SK tepat waktu	%	100
	Cakupan implementasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	80
	Persentase capaian Laporan kinerja pemerintah dan keuangan	%	90
	Tingkat penerapan regulasi dan pedoman tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	90
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan pemerintahan umum	%	100
	Cakupan urusan pemerintahan umum dan kegiatan perangkat daerah yang dikoordinasikan	%	100
	Persentase desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	%	100
	Persentase urusan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan	%	100
	Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	60
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (%)	%	100
	Jumlah inovasi pelayanan publik	Jenis	9

## BAB VII

### PENUTUP

Proses pembangunan adalah peristiwa dinamis yang dapat mengubah perabahan ke arah yang lebih baik dari masa ke masa. Setiap masa pemerintahan ada ciri khas tertentu yang menjadi karakteristik dari pemegang amanah yang menjalankan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Karakteristik kuat dan fundamental pada pemerintah Kabupaten Enrekang tercermin pada Visi Kabupaten Enrekang yaitu **“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius 2018-2023”**.

Dalam mengimplementasikan proses manajemen pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Enrekang secara konsisten menyusun RKPD melalui pendekatan yang lebih responsif melalui pendekatan politis, teknokratik, *bottom up/top down*, dan partisipatif. Dalam penyusunan RKPD tahun 2021, peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama adalah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Rujukan terbaru yaitu Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 yaitu “Peningkatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Selanjutnya, Tema Pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2021 yaitu **“Membangun Utilitas Perkotaan dan Pemerataan Pembangunan”** Berdasarkan tema pembangunan di atas maka Pemerintah Kabupaten Enrekang menyusun dokumen RKPD tahun 2021 yang memiliki 10 tujuan, 22 sasaran, dan 55 program.

Fungsi dokumen RKPD tahun 2021 yaitu: 1) Sebagai landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk menyusun RAPBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021; 2) Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program/kegiatan perangkat daerah masing-masing pada tahun 2021; dan 3)

Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas masing-masing perangkat daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten tahun 2021 telah menyajikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan secara jelas dan terinci sehingga proses pencapaiannya dapat lebih terarah. Semua aktor pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat Kabupaten Enrekang dapat bersinergi untuk mewujudkan pembangunan secara holistik dan berkesinambungan dengan berpedoman pada isi RKPD tersebut. Dengan demikian, cita-cita mulia yang terkandung dalam Visi dan Misi Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang.

Akhirnya, semoga seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang dapat semakin sejahtera dan bahagia dengan adanya program dan kegiatan pembangunan yang terus berjalan. RKPD Kabupaten Enrekang tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pemicu pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan sosial di segala bidang.

**BUPATI ENREKANG,**

**ttd**

**H. Muslimin Bando**